

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022	JADWAL	:	11 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 – 8 Agustus 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	9 Agustus 2022	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	11 Agustus 2022
			Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	12 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id

Kantor Cabang
62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) Kantor Mekaar dan 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Unit/Outlet ULaMM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRIILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRIILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp884.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp116.000.000.000,- (seratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 November 2022, sementara pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAA
(Double A)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
PENJAMIN EMISI DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI
Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022.

PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM ("Penawaran Umum") dengan jumlah keseluruhan target dana yang dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-317/PNM-DIRUT/KDP/V/22 tanggal 27 Mei 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ("Obligasi") pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang dalam hal ini terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI MENGINVESTASIKAN DAN ANYADI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xiv
BAB I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	15
BAB III. PERNYATAAN UTANG.....	17
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	50
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	55
BAB VI. FAKTOR RISIKO.....	66
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	73
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	74
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	74
2. KETERANGAN MENGENAI EFEK YANG BELUM DILUNASI.....	75
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	76
4. PERIZINAN.....	79
5. PERJANJIAN PENTING.....	80
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	84
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SERTA HUBUNGAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN.....	85
8. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM.....	87
9. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN.....	89
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	97
11. SUMBER DAYA MANUSIA.....	119
12. STRUKTUR ORGANISASI.....	125
13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	126
14. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	138
15. KEGIATAN USAHA.....	147
16. STRATEGI USAHA.....	151
17. KEUNGGULAN BERSAING.....	152
18. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.....	153
19. PEMASARAN.....	153
20. TEKNOLOGI INFORMASI.....	154
21. PERSAINGAN USAHA.....	154
22. TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....	157
23. PROSPEK USAHA.....	164
24. TRANSAKSI AFILIASI.....	165
25. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	168
26. RISET DAN PENGEMBANGAN.....	169
27. ASURANSI YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	170
BAB IX. PERPAJAKAN.....	178
BAB X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	179
BAB XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	180
BAB XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	183
BAB XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	193
BAB XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	198
BAB XV. AGEN PEMBAYARAN.....	199
BAB XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	200
BAB XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	232

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran atau KSEI	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia “KSEI”, berkedudukan di Jakarta Selatan yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan juga bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
Bapepam	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga keuangan (DLKJ) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.</p>
Bunga Obligasi	<p>Berarti Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan keterangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun;- Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun;

Bursa Efek atau BEI	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Obligasi	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	<p>Berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prospektus;- Prospektus Awal;- Prospektus Ringkas dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas;- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan;- Perjanjian Perwaliamanatan;- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;- Akta Pengakuan Utang;- Perjanjian Agen Pembayaran;- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI;- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang di BEI;- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi <p>beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya dan dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk, atau obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM juncto angka 4 Peraturan No. IX.A.2, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi	Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeure</i>	Berarti satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Perwalianamanatan, antara lain banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, wabah atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi	Berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Jumlah Terutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian kelalaian yang disebut dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi untuk

	mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Laba (rugi) komprehensif – bersih	Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Laporan Posisi Keuangan	Berarti neraca keuangan.
Manajer Penjatahan	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum sesuai Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.
Masa Penawaran Obligasi	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu 5 (lima) Hari Kerja pada tanggal 2 – 8 Agustus 2022. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Mekuar	Berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Obligasi	Berarti Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp884.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah); - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah);

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor: 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Baepem dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 1 Tahun 2011.
Pefindo	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan UUPM dan peraturan KSEI.
Pemeringkat	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berkedudukan di Jakarta Selatan atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK sesuai POJK No. 49/2020.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Obligasi.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran atas Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi dengan nama "Obligasi Berkelanjutan V PNM" yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana Obligasi sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) yang mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran dana Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang akan memberikan jaminan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>) berdasarkan Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>) terhadap penerbitan Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT, CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT, CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Pengakuan Utang	Berarti Akta Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 56 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 36 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal 25 Mei 2022, Nomor SP-075/OBL/KSEI/0522, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan para Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 35 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 46 tanggal 21 Juni 2022 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 22 tanggal 6 Juli 2022, dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 57 tanggal 21 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta

	<p>Perjanjian Perwaliamanatan No. 34 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 45 tanggal 21 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 21 tanggal 6 Juli 2022, dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 55 tanggal 21 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.</p>
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	<p>Berarti pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV PNM yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM No. 33 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM No. 20 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM No. 54 tanggal 21 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.</p>
Pernyataan Pendaftaran	<p>Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan POJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, dan POJK No. 58/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.</p>
Perseroan atau Emiten	<p>Berarti PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PT PNM atau yang biasa disebut PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.</p>
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang di BEI	<p>Berarti persetujuan yang diberikan oleh BEI kepada Perseroan untuk pencatatan Obligasi sebagaimana dinyatakan dalam surat BEI No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022.</p>
Perusahaan Afiliasi	<p>Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.</p>
Perusahaan Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.</p>
Perusahaan Efek	<p>Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
Pihak Berelasi	<p>Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (entitas pelapor).</p> <p>a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:</p>

1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 2. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 2. Satu entitas adalah entitas sosial atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

PNMIM	Berarti PT PNM Investment Management yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
PNMVC	Berarti PT PNM Venture Capital yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
POJK No.4/2022	Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
POJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2014 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 16/2019	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Obligasi Seri A sebesar Rp884.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah).- Obligasi Seri B sebesar Rp116.000.000.000,- (seratus enam belas miliar Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.</p>
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis dalam rangka Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi, Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017, dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dana milik Pemegang Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.

RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
SEOJK 4/2022	Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan, yaitu Tanggal 11 Agustus 2022.
Tanggal Emisi	Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu Tanggal 11 Agustus 2022.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B,
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) yang berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi jatuh pada tanggal tanggal 11 Agustus 2022.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 November 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yaitu tanggal Tanggal 9 Agustus 2022.
UKM	Berarti Usaha Kecil dan Menengah.
ULaMM	Berarti Unit Layanan Modal Mikro.
Undang-Undang OJK	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UU	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UMK	Berarti Usaha Mikro dan Kecil.
UMKMK	Berarti Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Mega Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan UUPM dan merupakan Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.

1. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

A. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi (KPS/USP), dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan channeling melalui LKM/S.

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai pilot project pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp10 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita pra-sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai pilot project pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional dan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

B. Jasa manajemen

Aktivitas Jasa Manajemen merupakan salah satu core business PNM dalam bidang non finansial berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi manajemen, pendampingan bagi manajemen UMKMK, serta aktivitas lainnya. Pada tahun 2021, kegiatan implementasi program pemberdayaan secara digital mendominasi jumlah pelatihan yang diselenggarakan. Hal ini merupakan salah satu komitmen PNM dalam membantu para mitra untuk lebih cepat melakukan adaptasi menuju era digital meski masih dalam tahap yang sederhana.

Untuk optimalisasi dukungan terhadap program pemberdayaan bagi masyarakat pra sejahtera, sepanjang tahun 2021 PNM telah bekerjasama dengan 11 (sebelas) mitra kerja untuk Madani Partnership yang berasal dari BUMN, perusahaan swasta dan lembaga nirlaba. Kerjasama yang terbangun guna meningkatkan kapasitas masyarakat pra sejahtera melalui pelatihan dan pendampingan agar taraf hidup meningkat. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap implementasi kegiatan kegiatan Jasa Manajemen terhadap penerima manfaat. Penyesuaian aktifitas kegiatan sebagian beralih dengan aktifitas berbasis digital dengan tetap menjaga kualitas dampak program untuk penerima manfaat.

C. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat

sesuai dengan kebutuhan kliennya. Pada 31 Desember 2021, total dana yang dikelola PNMIM adalah sebesar Rp14,5 triliun.

D. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

Keterangan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha Persereon Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

PROSPEK USAHA

Dampak pandemi dan dukungan Pemerintah

Di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 menunjukkan peningkatan sebesar 1,06% (QoQ). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen.

Sesuai dengan APBN pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% - 5,5%, inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga di kisaran 3,5%. Fokus Pemerintah pada tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Seiring dengan upaya Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perusahaan terus berupaya membantu nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan seterusnya. Perusahaan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM.

Peluang inovasi

- 1) Perseroan melakukan pendampingan kepada nasabah terpilih dengan tujuan peningkatan kapasitas dan memberi nilai lebih pada produk nasabah agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan kinerja usahanya yang akan berujung pada meningkatkan kesejahteraan nasabah.
- 2) Pengembangan produk dan teknik manajemen risiko untuk dapat melayani segmen pasar UMK dan Ultra Mikro yang belum dapat dijangkau oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 3) Pengembangan produk untuk nasabah Mekaar yang “naik kelas,” dalam arti nasabah-nasabah Mekaar yang sudah lama bergabung dan menunjukkan rekam jejak baik, memiliki usaha serta kemampuan bayar yang mencukupi.

2. Keterangan tentang Efek yang Ditawarkan

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 (“Obligasi”)
Jenis Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Target Dana Obligasi Berkelanjutan V PNM	:	Sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah)
Target Emisi Obligasi	:	Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp884.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah).
 - Seri B dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp116.000.000.000,- (seratus enam belas miliar Rupiah).
- Jangka Waktu : - Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.
- Tingkat Bunga Obligasi : - Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun;
- Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun;
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).
- Pembayaran Bunga Obligasi : Triwulanan.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal (*buy back*) sebagian atau seluruh Obligasi dari setiap Pemegang Obligasi sebelum Tanggal Pembelian Kembali Seluruh Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Hasil Pemeringkatan : *idAA (Double A)* yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan efek bersifat utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp)	
				Nilai Nominal	Nilai Wajar*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.246.000.000.000	1.245.569.976.827
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000	597.729.587.173
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000	1.349.106.984.871
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000	249.563.855.765
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri B, 5 tahun	4 Desember 2023	7,75%	537.000.000.000	828.292.870.838
	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri B, 5 tahun	17 Maret 2024	7,25%	159.000.000.000	497.544.916.848
	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2024	8,25%	339.200.000.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021	Seri A, 370 hari	20 Desember 2022	3,75%	1.000.000.000.000	2.993.103.863.168
	Seri B, 3 tahun	10 Desember 2024	5,50%	1.000.000.000.000	
	Seri C, 5 tahun	10 Desember 2026	6,25%	1.000.000.000.000	
Jumlah				7.772.200.000.000	7.760.912.055.490

*Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva yield terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya

Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	8 Juli 2023	18,025%	515.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
Jumlah				842.000.000.000

Medium Term Notes Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri C, 3 tahun	20 Februari 2023	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	9,75%	208.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahap I Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	27 Oktober 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri H, 36 bulan	15 Desember 2023	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri A, 3 Tahun	27 Oktober 2023	37,38%	712.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri B, 3 Tahun	10 Maret 2024	40,95%	780.000.000.000
Sukuk Mdh IV Tahun 2020	Seri C, 3 Tahun	Juni 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri D, 2 Tahun 11 Bulan	19 Januari 2024	16,17%	308.000.000.000
Jumlah				3.415.000.000.000

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 jo. Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1		1.000.000,00		0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		3.799.999		3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tanggal 20 Juni 2022.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan juga ketentuan Peraturan OJK Nomor

4/POJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 7/ POJK.04/ 2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 terkait penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan dokumen di bidang Pasar Modal. Manajemen menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap informasi keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 yang disajikan dalam Prospektus ini.

Perseroan menyajikan ringkasan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021. Informasi keuangan ini tidak lengkap dan tidak termasuk laporan perubahan ekuitas, arus kas serta catatan atas pengungkapan terkait. Manajemen Perseroan yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa informasi keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dalam Prospektus ini. Hasil untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 atau 31 Maret 2021 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perseroan untuk periode mendatang atau periode lainnya.

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan tidak mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun terhadap informasi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 yang disajikan di bawah ini. Oleh karena itu, investor harus mengandalkan pemeriksaan investor sendiri terhadap Perseroan, ketentuan penawaran dan informasi keuangan. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional calon investor sendiri untuk memahami informasi keuangan ini yang belum pernah diaudit, direviu, atau prosedur apa pun oleh auditor independen.

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting ini dapat dilihat pada Bab IV dalam prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember	
		2021	2020
Total Aset	45.028.681.447.361	43.712.294.587.564	31.664.889.050.308
Total Liabilitas	38.338.103.175.798	37.274.340.682.674	26.077.979.249.069
Total Ekuitas	6.690.578.271.563	6.437.953.904.890	5.586.909.801.239

*) Tidak diaudit

Laporan laba rugi konsolidasian

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Maret 2021*	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
			2021	2020
Pendapatan bunga dan syariah	2.756.869.850.992	1.719.851.993.916	8.425.155.643.903	5.605.264.350.638
Beban bunga dan syariah	(670.628.453.648)	(514.587.284.659)	(2.306.081.020.171)	(1.689.807.858.648)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	2.086.241.397.344	1.205.264.709.258	6.119.074.623.732	3.915.456.491.990
LABA USAHA	300.801.441.550	250.576.743.466	1.086.671.580.172	399.135.154.357
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	256.717.739.299	186.359.263.869	845.127.927.239	358.594.645.337
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	252.080.968.886	196.930.327.150	846.678.617.062	351.671.971.625
Laba per saham	269.011	195.953	221.257	244.214

*) Tidak diaudit

Rasio keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga dan Syariah (%)	60,30	50,31	13,83
Laba tahun berjalan (%)	38,14	135,68	-63,31
Jumlah aset (%)	3,01	38,05	27,13
Jumlah liabilitas (%)	2,85	42,93	18,31
Jumlah ekuitas (%)	3,92	15,23	95,04
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga & syariah (%)	10,91	12,90	7,12
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset (%)	6,21	22,35	19,82
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah (%)	9,31	10,03	6,40
Laba tahun berjalan/total aset (ROA) (%)	0,58	1,93	1,13
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE) (%)	3,91	13,13	6,42
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,85	0,85	0,82
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	5,73	5,79	4,67
Interest Coverage Ratio ⁽¹⁾ (x)	2,62	1,47	1,24
Debt-service Coverage Ratio ⁽²⁾ (x)	0,58	0,19	0,21
Debt to Equity Ratio ⁽³⁾ (x)	4,64	4,88	4,04
Rasio Likuiditas			
Aset lancar/Liabilitas lancar (x)	2,01	1,68	2,08
Gearing ratio (x) ⁽⁴⁾	4,20	4,25	3,24
Non-Performing Financing (%)	0,05	0,54	0,97

⁽¹⁾ Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan beban bunga dari interest bearing debt

⁽²⁾ Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan pembayaran pokok dan bunga dari interest bearing debt

⁽³⁾ Total pinjaman (tidak termasuk biaya hutang pajak, post employment benefit dan lain lain) dibagi dengan total ekuitas

⁽⁴⁾ Total pinjaman dikurangi dengan Cash in Bank dibagi dengan total ekuitas

Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x
Gearing Ratio	Maksimal 8x

7. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi pendapatan kepada Perseroan
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,71%
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,38%

Keterangan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. Faktor Risiko

RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko pembiayaan/risiko kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perseroan yang terutama meliputi pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini dapat menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah dan dapat berujung ke menurunnya pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko pasar
2. Risiko likuiditas
3. Risiko operasional
4. Risiko hukum
5. Risiko reputasi
6. Risiko strategi
7. Risiko kepatuhan
8. Risiko pandemi COVID-19
9. Risiko persaingan usaha
10. Risiko investasi pada Perusahaan Anak
11. Risiko perubahan teknologi
12. Risiko sumber daya manusia
13. Risiko terkait kebijakan Pemerintah
14. Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

1. Risiko pembiayaan/risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko operasional
5. Risiko hukum
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategi
8. Risiko kepatuhan

RISIKO UMUM

1. Risiko terkait perekonomian secara makro atau global
2. Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan Undang-undang

RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini di pasar sekunder yang antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Investor pembeli Obligasi juga menghadapi risiko gagal bayar akibat kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

9. Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp: (021) 791 75000
Faks: (021) 799 0720
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
Website: www.bankmega.com
Up: *Capital Market Services*

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

BAB I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,-
(SEPULUH TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp884.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp116.000.000.000,- (seratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 November 2022, sementara pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

**idAA
(Double A)**



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id
Email: sekper@pnm.co.id

Kantor Cabang

62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.985 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) Kantor Mekaar dan 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Unit/Outlet ULamm

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan akan dan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM ;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM, sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 25 Mei 2022 dan surat pernyataan No. KNMT&R/IIA/OL-0117/05/2022/TD tanggal 27 Mei 2022 dari Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia);
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemerinkatan efek yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat teratas dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemerinkat efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jangka Waktu, Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti Kewajiban Obligasi untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp884.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp116.000.000.000,- (seratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga-ke	Seri A	Seri B
1	11 November 2022	11 November 2022
2	11 Februari 2023	11 Februari 2023
3	11 Mei 2023	11 Mei 2023
4	21 Agustus 2023	11 Agustus 2023
5		11 November 2023
6		11 Februari 2024
7		11 Mei 2024
8		11 Agustus 2024
9		11 November 2024
10		11 Februari 2025
11		11 Mei 2025
12		11 Agustus 2025

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi.

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi yaitu Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan atau kelipatannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak Senioritas atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp15.231.111.101.965 (Lima belas triliun dua ratus tiga puluh satu miliar seratus sebelas juta seratus satu ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah) berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Perwaliananatan;
 - f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia);
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali obligasi;
 - n. pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
 - p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat Jaminan atas seluruh obligasi.
 - q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf m paling sedikit:
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b) Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut:
 - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo; atau
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut:
 - i. tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi.
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- iii. tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
 - d) Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
 - e) Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
 - f) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- i) Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - ii) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - iii) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - iv) mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
 - v) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - vi) menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan pasar modal.
 - a. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal

- tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- vii) memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima dan diterapkan di Indonesia;
 - viii) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - ix) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - c. Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - e. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.
 - f. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
 - x) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
 - a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek

- paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
- ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- c) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
- i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.
- d) Pemeringkatan Ulang
- i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka ix angka a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Emiten, atau;
 - d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 1 huruf a di atas);
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1 huruf a, b, c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf g di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam angka 1, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPS;
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (morotariun) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam - peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan

- Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil Tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan poin 6 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini diatur sebagai berikut:
 - 1) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih Belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 2) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (vi) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (vii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (viii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ix) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (x) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan

- 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 di atas;
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.
Jika dilakukan addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum terhadap Pengakuan Hutang, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Hutang dengan menambahkan akta pengakuan hutang yang baru.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "POJK No.: 16/2020), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat selain RUPS Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No.: 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 POJK No.: 16/2020.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

Hasil Pemingkatan Obligasi

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemingkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-447/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari Pefindo, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

idAA
(Double A)

Hasil pemingkatan di atas berlaku untuk periode 18 April 2022 sampai dengan 1 April 2023.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi dalam UUPM. Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Obligasi ini.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan
PT Permodalan Nasional Madani

Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Telp: (021) 251 1404
Faks: (021) 251 1405
Email: sekper@pnm.co.id
Up: Sekretaris Perusahaan

Wali Amanat
PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp: (021) 791 75000
Faks: (021) 799 0720
Email: waliamanat@bankmega.com
Up: *Capital Market Services*

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Jika dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini belum mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan dana internal yang berasal dari hutang bank dan sumber pendanaan pemerintah untuk memenuhi rencana-rencana penggunaan dana di atas.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan, sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut dan wajib memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Setelah memperoleh persetujuan RUPO, perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi wajib memperoleh persetujuan dari Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Permodalan Nasional Madani Tahap I Tahun 2022, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, akan direalisasikan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya akan dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 selambat-lambatnya pada bulan Desember 2022.

Mengingat bahwa Penggunaan dana atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, sehingga dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 serta Pasal 3 dan 4 POJK No 42/2020, sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak diperlukan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum terakhir kali kepada OJK terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 sesuai surat No. S-012/PNM-DIRKLP/SPR/I/22 tanggal 14 Januari 2022. Dana tersebut telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,3660% (nol koma tiga enam enam nol persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1600% (nol koma satu enam nol nol persen)
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen)
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen).

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0380% (nol koma nol tiga delapan nol persen) yang terdiri dari: biaya Akuntan Publik sekitar 0,0130% (nol koma nol satu tiga nol persen), Konsultan Hukum sekitar 0,0050% (nol koma nol nol lima nol persen) dan Notaris sekitar 0,0200% (nol koma nol dua nol nol persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0460% (nol koma nol empat enam nol persen) yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0030% (nol koma nol nol tiga nol persen), Pemeringkat Efek sekitar 0,0380% (nol koma nol tiga delapan nol persen), dan Audit Penjatahan sekitar 0,0050% (nol koma nol nol lima nol persen).
- Biaya lain-lain, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran dan pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran, sekitar 0,0970% (nol koma nol sembilan tujuh nol persen).

BAB III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp37.274.341 juta. Angka-angka ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

	<i>(dalam Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
LIABILITAS	
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.395.911.950
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000
Utang Obligasi	10.078.282.733.571
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353
Utang pajak	338.434.594.191
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865
Utang lain-lain	323.368.663.976
Beban yang masih harus dibayar	296.450.868.847
Liabilitas pajak tangguhan	5.503.808.922
Liabilitas imbalan kerja	29.174.700.086
Total Liabilitas	32.274.340.682.674

UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak berelasi:

	<i>(dalam Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
Pihak Berelasi	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.899.682.853.634
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	897.316.847.703
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	744.630.751.862
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	495.900.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	473.841.787.830
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	177.147.691.698
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	26.437.480.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.758.429.234
Subtotal	4.732.715.841.961
Pihak Ketiga	
PT Bank DKI	2.606.704.708.356
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	866.488.501.806
PT Bank Permata Tbk	404.166.666.671
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	390.000.000.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	357.502.486.311
PT Bank Mega Tbk	349.742.790.384
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	291.666.666.670
PT Bank Mega Syariah	238.645.300.903
PT Bank Central Asia Tbk	152.866.983.766
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	144.939.066.807
PT Bank Pembangunan Daerah - D.I. Yogyakarta	144.118.702.789
PT Bank Victoria International Tbk	124.925.436.071
PT Maybank Syariah Indonesia	118.055.555.556
PT Danareksa Finance	100.000.000.000
State Bank of India Indonesia	99.615.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	66.527.806.378
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	42.794.208.143
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	40.000.000.004
PT Bank Nationalnobu Tbk	24.979.087.067
PT Bank BCA Syariah	15.228.442.029

	31 Desember 2021
PT Bank Mayora Tbk	1.558.600.000
PT Bank Danamon	154.060.278
Subtotal	6.580.680.069.989
Total	11.313.395.911.950

Berdasarkan jatuh tempo:

	<i>(dalam Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
Kurang dari 1 tahun	5.069.803.105.522
1 - 2 tahun	1.343.092.061.301
Lebih dari 2 tahun	4.900.500.745.127
Total	11.313.395.911.950

Grup telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa cession atas nasabah ULamm dan/atau Mekaar. Cession tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 30 September 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - melalui Unit Syariah nya memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank BTN 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10x, Current ratio diatas 120%, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 12 Maret 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 12 Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 Januari 2021 dan telah dilunasi pada 29 Januari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing*

Ratio maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Perjanjian ini terakhir diubah dengan amandemen 1 Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perjanjian ini terakhir diubah dengan akta perjanjian No. 8 tanggal 12 Maret 2021 tentang syarat *covenant* yang berlaku. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Interest Coverage Ratio* diatas 100% dan *Gearing Ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perjanjian ini terakhir diubah dengan akta perjanjian No. 7 tanggal 12 Maret 2021 tentang syarat *covenant* yang berlaku. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Interest Coverage Ratio* diatas 100% dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.581.656.862.735 dan Rp845.616.110.558.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 458 tanggal 16 November 2021 Bank BNI memberikan tambahan fasilitas sebesar Rp250.000.000.000 dengan bunga 8,5% sehingga total plafond menjadi Rp1.000.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas 36 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Current Ratio* minimal 1.2x, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3% net dan jatuh tempo fasilitas berakhir pada bulan November 2022

Berdasarkan Akta perjanjian No 2 tanggal 5 Agustus 2020 Bank BNI menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut dan telah diperpanjang berdasarkan Addendum Akad No. 2 tanggal 30 Juni 2021.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp330.888.836.202 dan Rp386.070.787.807.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Berdasarkan Akta perjanjian kredit modal kerja No. 37 tanggal 23 Februari 2021, Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 Februari 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan kualitas NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta perjanjian kredit modal kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit UMKM. Perseroan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 8x dan NPL keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,35% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *NonPerforming Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp978.778.698.975 dan Rp1.074.234.877.497.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan Perjanjian Modal Kerja No. 71 tanggal 23 Desember 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) W/A 4 dan W/A 5 dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000.000.000. Jangka waktu maksimal 24 bulan dan 36 bulan yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis Mekaar dan *replacement* pinjaman *existing* dari bank lain dengan suku bunga sebesar 5%. Perusahaan harus menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan telah dilunasi pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp266.666.666.665 dan Rp3.125.000.000.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 9 Juni 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 9 Juni 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.816.666.671 dan nihil.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM (“LPDB-KUMKM”)

Pada tahun 2019, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari LPDB - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian kredit modal kerja No. 013/SP3/LPDB/2019 sebesar Rp30.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan Modal Ventura. Tingkat *margin* sebesar 40%: 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, *margin* dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank DKI (“Bank DKI”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp500.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga fixed sebesar 9,25% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%. Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 42 tanggal 19 November 2020, Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024. Nisbah bagi hasil untuk Bank DKI 63,33% dan Perseroan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perseroan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan NPL maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 9,25% dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x, *current ratio* sebesar 120% dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu fasilitas 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga fixed sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir pada 19 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 63,33% dan Perusahaan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 66,67% dan Perusahaan 33,33%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019, PT Bank DKI memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI dengan memberikan pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan surat perjanjian kredit tanggal No. 65 tanggal 29 November 2017 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga fixed sebesar 8,95% per tahun dan sudah dilunasi pada 30 November 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir di bulan September 2021. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 18 bulan dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan dan sudah dilunasi pada bulan September 2019. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan sudah dilunasi pada 15 Juni 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* gross maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp641.673.765.891 dan Rp385.216.432.171

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BNI Syariah)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank BNI Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Telah dilakukan perpanjangan Fasilitas pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan Plafond pinjaman Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,50% *fixed* pertahun dan jangka waktu pinjaman 12 bulan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp794.939.816.761 dan Rp752.661.315.598.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan akta perjanjian kredit No.12 tanggal 22 September 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan *plafond* maksimal sebesar Rp300.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,35% per tahun dan akan berakhir pada bulan September 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* min 1,2 x dan *gearing ratio* maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 15 April 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp500.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dan akan berakhir pada bulan April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2x dan *gearing ratio* maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9% per tahun dan telah dilunasi pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha

mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan telah dilunasi pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp479.166.666.666 dan Rp125.000.000.000.

PT Bank Mega Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 31 tanggal 15 November 2021, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan akan berakhir pada November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *NonPerforming Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, *current ratio* minimal 1,2x, *gearing ratio* maksimal 10x, *financing to asset ratio* min 65%, *micro financing ratio* min 50%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 tanggal 8 Desember 2020, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,75% fixed per pencairan dengan jangka waktu pinjaman ULaMM 48 Bulan dan Mekaar 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10x.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp320.833.333.326 dan nihil.

PT Bank Mega Syariah

Berdasarkan addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 04 tanggal 2 Februari 2021, PT Bank Mega Syariah memberikan tambahan plafon sebesar Rp65.000.000.000. Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan per pencairan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dan akan berakhir pada 2 Februari 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Fasilitas Mekaar telah diperpanjang sampai dengan 20 November 2021 dan ULaMM akan berakhir di bulan November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp48.848.387.314 dan Rp248.111.798.383.

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 59 tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan

berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *NonPerforming Loan* maksimal tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan addendum ketiga No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp924.999.999.997 dan Rp300.000.000.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 tanggal 14 Desember 2021, PT Bank BPD Kalteng memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar setara 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada Desember 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *NonPerforming Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3% dan *Gearing Ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah dilunasi pada 7 Februari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3% untuk produk Mekaar.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp350.000.000.007 dan Rp183.333.333.306.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 21 tanggal 30 November 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp275.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 7,25% p.a dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3%, CCR 100%, *gearing ratio* maksimal 8x, NPL > 90 hari total maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 23 Juni 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada 23 Juni 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 30 Oktober 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *NonPerforming Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 23 Mei 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp144.357.570.831 dan Rp174.592.057.398.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 82 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada 30 Juni 2022. Tingkat bunga sebesar 9% fixed per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada bulan Februari 2022. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *NonPerforming Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun dan telah berakhir pada bulan Desember 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp231.583.906.557 dan nihil.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No.58 tanggal 30 November 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp390.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 7,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, *Current Ratio* minimal 1.2x, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp166.666.666.659 dan Rp25.000.000.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 31 tanggal 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta (UUS) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (Syariah) kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan nisbah setara sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta - melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil untuk PT Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 55,39% dan Perusahaan 44,61%. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak fasilitas digunakan dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp248.391.380.020 dan Rp141.059.334.398.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp80.891.032.605 dan Rp105.658.831.516.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian *Uncommitted Facility Line* No. 1 tanggal 1 September 2021, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari Rp1.500.000.000.000 fasilitas konvensional dan Rp500.000.000.000 fasilitas syariah, dengan suku bunga setara 6,50% p.a fixed dengan jangka waktu 36 bulan, Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, NPL nett maksimal seluruh kredit 5%, *return of asset* minimal 0,5%, *return of equity* minimal 5% dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 8 November 2021, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp300.000.000.000 dengan bagi hasil setara 7,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal November 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non-Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2% dan *Current Ratio* minimal 1.2 x

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp199.999.999.995 dan Rp102.857.513.266.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.39 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga sebesar 13,5% per tahun dengan jangka waktu 72 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp232.181.720.647 dan Rp883.333.327.

PT Danareksa Finance

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Dana Reksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 17 dengan plafond pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil dan Rp150.000.000.000.

Bank SBI Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 16 Desember 2021, Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp150.000.000.000 dengan bunga setara 7.5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1.2x, *gearing ratio* maksimal 10x, NPL nett maksimal 5%, *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *interest coverage ratio* minimal 1.1x.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.29 tgl 16 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp41.688.565.451 dan Rp13.888.889.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 1% dari plafon kredit.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.999.999.998 dan nihil.

PT Bank Nationalnubu Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* (MML) sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 dan telah berakhir pada 22 April 2021. Pada tahun 2021, fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada 22 April 2022. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp33.333.333.335 dan Rp133.333.333.333.

PT Bank Syariah Indonesia (dahulu PT Bank BRISyariah)

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRI syariah Tbk) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp35.398.143.907 dan Rp32.202.157.568.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 1658/ PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,75% per tahun dan telah dilunasi pada 9 November 2021.

PT Bank Mayora

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mayora berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000.000.000 bersifat non-revolving yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan, administrasi 1% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp119.371.347 dan Rp261.116.311.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tahun 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 tanggal 9 November 2016 sebesar Rp5.500.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 66 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp321.223.651 dan Rp1.863.174.005.

PT Bank KEB Hana Indonesia

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 126 tanggal 19 November 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 20 November 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada Juni 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *NonPerforming Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp37.396.535.192 dan Rp161.721.052.942.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line (MML) kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Adendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10x.

Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Perseroan per 31 Desember 2021 adalah:

	Plafon	LCU	Outstanding
Pinjaman Rekening Koran:			
PT Bank Central Asia Tbk	50.000.000.000	9.454.302.470	40.545.697.530
PT Bank Permata Tbk	25.000.000.000	25.000.000.000	-
Subtotal	75.000.000.000	34.454.302.470	40.545.697.530
Pinjaman Berjangka			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000.000.000	3.500.000.000.000	500.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.750.000.000.000	-	1.477.051.470.588
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	3.500.000.000.000	1.546.835.000.000	830.348.333.336
PT Bank Mega Tbk	1.500.000.000.000	900.000.000.000	277.083.333.333
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	247.083.333.343	752.916.666.657
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	101.208.965.149	898.791.034.851
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	1.000.000.000.000	-	816.666.666.667
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	525.000.000.000	380.681.322.916	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	450.000.000.000	50.000.000.000	85.084.644.147
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	400.000.000.000	250.000.000.000	66.666.666.667
PT Bank Victoria International Tbk	350.000.000.000	125.000.000.000	150.000.000.000
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	300.000.000.000	-	68.416.093.444
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	200.000.000.000	-	177.183.333.336
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	200.000.000.000	-	144.444.444.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	150.000.000.000	50.000.000.000	25.000.000.000
PT Bank SBI Indonesia	150.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000
Subtotal	17.475.000.000.000	7.200.808.621.408	6.369.652.687.026
Total	17.550.000.000.000	7.235.262.923.878	6.410.198.384.556

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

Berdasarkan jenis:

	31 Desember 2021
Medium Term Notes	
Entitas Induk	
MTN XIII Seri A	50.000.000.000
MTN XIII Seri B	110.000.000.000
MTN XIII Seri C	200.000.000.000
MTN XIII Seri D	15.000.000.000
Subtotal	375.000.000.000
Sukuk	
Entitas Induk	
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A	60.000.000.000
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B	240.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I	300.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A	-
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B	65.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D	-

	31 Desember 2021
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E	100.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II	50.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C	322.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F	120.000.000.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	200.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H	50.000.000.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri A	712.000.000.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri D	308.000.000.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri B	780.000.000.000
Sukuk Mudharabah III Tahun 2021 Tahap II Seri F	208.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri A	1.158.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri B	515.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri C	327.000.000.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri C	200.000.000.000
Subtotal	5.715.000.000.000
Total	6.090.000.000.000

Berdasarkan jatuh tempo:

	31 Desember 2021
Kurang dari 1 tahun	2.048.000.000.000
1 - 2 tahun	1.100.000.000.000
Lebih dari 2 tahun	2.942.000.000.000
Total	6.090.000.000.000

Surat Utang Jangka Menengah PNM

Perseroan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perseroan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha Perseroan.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Berdasarkan hasil pemeringkatan Pefindo No. 942/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 MTN XIX seri A, B, dan C mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha Perseroan.

Perusahaan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah Refinancing, pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat idAA (Double A) dengan pemeringkatan Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 56 bulan 14 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 54 bulan 26 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara kuartal baik untuk MTN XIII seri C maupun D. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII C dan D adalah Cessie. Tidak ada keterkaitan wali amanat

dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama wali amanat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII A dan B adalah Cessie. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Nama Wali Amanat dalam penerbitan MTN XII Seri A dan B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perusahaan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang MTN. Surat berharga ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok MTN pada tanggal penerbitan.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran bunga MTN yang untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya pada tanggal jatuh tempo MTN.

Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak -banyaknya Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.158.000.000.000, nisbah setara 6,00% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000.000.000, nisbah setara 7,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000.000.000, nisbah setara 8,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2022 untuk Sukuk Seri A dan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 938/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri C pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri C tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F Tahap II pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp208.000.000.000 dengan jangka waktu 1 Tahun 9 bulan 16 hari, nisbah sebesar 11,59% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III seri F Tahap II. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*) Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III seri F Tahap II tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri B pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp780.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 40,95% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri D tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri D pada tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp308.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 16,17% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri D tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri A pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp712.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 37,38% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan

waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 tahap 1 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri E tahap I pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 10 Bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tahap I tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan telah jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 Tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III tahap 1. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1 adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah Bank BJB dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah Bank BJB dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 44,7917% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri D adalah Bank Bukopin dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D tercatat di bursa KSEI.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Surat Pefindo No. RC968/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. RC-972/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*) yang berlaku untuk periode 20 September 2021 sampai dengan 1 Juli 2022.

UTANG OBLIGASI

Berdasarkan jenis:

	31 Desember 2021
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021	2.992.355.687.311
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	665.350.236.408
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	828.211.644.934
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	249.520.680.130
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.348.973.209.692
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	1.998.662.168.493
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	1.995.209.106.603
Total	10.078.282.733.571

Berdasarkan jatuh tempo:

	31 Desember 2021
Kurang dari 1 tahun	3.901.707.189.148
1 - 2 tahun	2.834.303.297.179
Lebih dari 2 tahun	3.342.272.247.244
Total	10.078.282.733.571

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp168.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp159.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C : Jumlah pokok sebesar Rp339.200.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 27 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-023/PEF-DIR/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 8 Februari sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C : Jumlah pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditegaskan kembali dengan surat Pefindo No. RTG-970/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 17 November 2020 dan Addendum I No. 3 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B : Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 970/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 November 2019. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.

Seri B : Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (*Double A*) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perseroan terdiri dari:

Seri A : Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.

Seri B : Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (*Double A*) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari Pefindo. Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No. 9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 17 tanggal 4 April 2019, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 74 tanggal 9 Mei 2019 dan Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 118 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B : Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (*Double A*) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 No. 109 tanggal 12 Maret 2018 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 139 tanggal 26 Maret 2018 yang keduanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perseroan terdiri dari:

- Seri A : Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.

Seri B : Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 No. 95 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan total pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perseroan terdiri dari:

Seri A : Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.

Seri B : Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022 dan No. 971/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari Pefindo, Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021. Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 No. 40 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pihak yang bertindak selaku wali amanat adalah Bank Mega.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perseroan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah;

5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor

Perseroan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	7.644.312.600
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	5.096.208.398
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	744.433.250
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.307.610.750
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	4.473.781.014
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	3.331.375.948
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.764.210.608
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	2.193.713.909
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972.354.958
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.908.798.140
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969.439.794
Total	37.406.239.369

Biaya transaksi obligasi yang sudah diamortisasi dan dibebankan ke Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	-
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	1.500.802.134
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	265.113.380
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	648.547.879
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	3.253.077.835
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.807.617.100
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.497.076.059
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	2.193.713.909
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972.354.958
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.908.798.140
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969.439.794
Total	23.016.541.188

PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

Berdasarkan jenis:

	<i>(dalam Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
Pihak Berelasi	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.917.715.190.015
Pihak Ketiga	
Bank Pembangunan Asia (USD401.226,81)	5.725.105.338
Total	3.923.440.295.353

Berdasarkan jatuh tempo:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
Kurang dari 1 tahun	508.277.118.314
1 - 2 tahun	1.060.788.348.883
Lebih dari 2 tahun	2.354.374.828.156
Total	3.923.440.295.353

Pusat Investasi Pemerintah (“PIP”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, PIP memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.147.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2023. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 (enam) bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% (seratus persen) dari saldo pinjaman.

Berdasarkan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan No. 02 tanggal 4 November 2019, PIP memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp2.350.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir pada November 2022. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 (enam) bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% (seratus persen) dari saldo pinjaman.

Berdasarkan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, PIP memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp750.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir pada Oktober 2021. Perseroan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 (enam) bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% (seratus persen) dari saldo pinjaman.

Bank Pembangunan Asia (“ADB”)

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (“NUSSP”) yang bersumber dari ADB.

Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%) + 0,35% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk NUSSP.

UTANG PAJAK

	<i>(dalam Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
Entitas Induk	
Pajak penghasilan:	
PPh Pasal 4 (2)	5.510.637.897
PPh Pasal 21	10.061.609.150
PPh Pasal 22	140.807.813
PPh Pasal 23	1.306.420.983
PPh Pasal 25	19.600.762.540
PPh Pasal 29	231.260.238.618

	31 Desember 2021
Pajak lain-lain:	
PPN	12.141.052.530
Subtotal	280.021.529.531
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
PPH Pasal 4 (2)	279.469.859
PPH Pasal 21	3.921.545.511
PPH Pasal 22	899.926
PPH Pasal 23	278.599.017
PPH Pasal 25	609.397.163
PPH Pasal 29	23.986.743.566
Pajak lain-lain:	
PPN	29.336.409.618
Subtotal	58.413.064.660
Total	338.434.594.191

DANA CADANGAN ANGSURAN

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2021
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	2.994.511.749.461
Dana Cadangan Nasabah	1.606.423.205.346
Uang Titipan Nasabah	275.352.673.106
Total	4.876.287.627.913

Dana Cadangan nasabah merupakan dana milik nasabah ULaMM yang dititipkan kepada Perusahaan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah. Perusahaan menampung dana cadangan angsuran masing-masing sejumlah 173.468 nasabah dan 97.446 nasabah ULaMM pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang. Perusahaan melayani uang titipan sejumlah 6.999.774 nasabah dan 5.514.580 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perusahaan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perusahaan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

Uang Pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas. Perusahaan menampung uang pertanggungjawaban masing-masing sejumlah 10.451.377 nasabah dan 7.801.490 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 19 November 2021 Pemerintah telah menyalurkan subsidi bunga/subsidi margin kepada Perusahaan sebesar Rp930.226.274.768. Selanjutnya, pada 31 Desember 2021 Perusahaan telah menyalurkan seluruh subsidi bunga/subsidi margin tersebut melalui dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2021	
Pihak-pihak Ketiga:	
PT BNI Life Insurance	903.698
PT Indo Premier	293.600
PT Bank Commonwealth	245.510
PT Bank CIMB Niaga Tbk	35.057
Total utang <i>management fee</i>	1.477.865

UTANG LAIN-LAIN

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2021	
Pihak Berelasi	
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746
Pihak Ketiga	
Dana pihak ketiga BPR/S	262.429.408.206
Dana titipan asuransi dan notaris	46.113.698.951
Utang pihak ketiga	5.167.604.342
Lain-lain	9.251.672.731
Subtotal	322.962.384.230
Total	323.368.663.976

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2021	
Personalia	106.095.464.862
Bunga operasional	79.126.190.162
Bunga obligasi	78.092.148.236
Bunga pinjaman bank dan MTN	33.124.236.705
Bunga NUSSP	12.828.882
Total	296.450.868.847

LIABILITAS IMBALAN KERJA

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2021	
Entitas Induk	
Program imbalan pasca kerja	5.225.498.897
Program manfaat jangka panjang lain	19.149.871.146
	24.375.370.043
Entitas Anak	4.799.330.043
Total	29.174.700.086

Beban Imbalan Kerja

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Desember 2021	
Laba Rugi	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	(13.060.116.152)
Program manfaat jangka panjang lain	4.661.111.527
	(8.399.004.625)
Entitas Anak	1.874.456.565
Subtotal	(6.524.548.060)
Penghasilan Komprehensif Lainnya	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	(7.215.917.260)
Total	(13.740.465.320)

Perusahaan telah menghitung kewajibannya pada tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan telah menghitung kewajibannya pada tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan hasil perhitungan aktuarial sesuai dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja.

Perusahaan membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24 (revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menggunakan metode Projected Unit Credit untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

Akumulasi keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul tidak diakui kecuali jika melebihi 10% dari nilai yang lebih besar dari Nilai Kini Kewajiban atau Nilai Wajar Aset, maka kelebihanannya diakui sepanjang rata-rata sisa masa kerja.

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat kerja karyawan (*post-employment benefit*) sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan melakukan pendanaan untuk program ini melalui PT BNI Life Insurance.

Total karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah 3.841 karyawan (tidak diaudit) dan 3.683 karyawan (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuarial yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Januari 2021.

PROVISI DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kontinjensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 89 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - 67 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian.
 - 22 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian
- b. Terdapat 105 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - 2 kasus dalam proses Peninjauan Kembali; - 26 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
 - 14 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
 - 63 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Perseroan mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi Perusahaan dengan membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari beban usaha pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp36.728.188.149.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER DANA PELUNASANNYA

Kewajiban keuangan Perseroan berupa utang berbunga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan terhitung sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebesar Rp8.441.359 juta yang akan dilunasi dengan arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya. Rincian utang berbunga tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

	Mata Uang	Outstanding Pokok Pinjaman	Jumlah Pelunasan
Utang Bank dan Lembaga Keuangan			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rupiah	949.722	150.556
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rupiah	1.179.604	259.319

(dalam juta Rupiah)

	Mata Uang	Outstanding Pokok Pinjaman	Jumlah Pelunasan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rupiah	1.791.667	666.667
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Rupiah	583.419	304.770
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rupiah	557.106	350.493
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Rupiah	160.517	22,222
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Rupiah	1.466.667	899.999
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rupiah	200.000	100.000
PT Bank Permata Tbk	Rupiah	404.167	341.667
PT Bank Mega Syariah	Rupiah	221.225	56.868
PT Bank Mega Tbk	Rupiah	145.833	68.750
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Rupiah	100.000	11.111.
PT Bank Central Asia Tbk	Rupiah	-	-
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	Rupiah	225.847	92.513
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Rupiah	16.667	16.667
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	Rupiah	616.550	123.071
Sindikasi BPD	Rupiah	1.140.377	121.573
PT Bank National Nobu Tbk	Rupiah	166.667	161.111
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Syariah	Rupiah	619.671	123.040
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Rupiah	18.613	4.178
PT Bank Pembangunan Daerah- D.I. Yogyakarta	Rupiah	127.777	22.222
PT Bank Victoria International Tbk	Rupiah	200.000	200.000
PT Bank China Construction PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Rupiah	250.192	156.308
Bank SBI Indonesia	Rupiah	150.000	-
PT BTN Syariah	Rupiah	375.000	55.555
BJB Syariah	Rupiah	25.870	25.870
Maybank	Rupiah	433.889	85.000
BCA Syariah	Rupiah	87.269	13.403
Pemerintah RI			
Pemerintah RI Konvensional	Rupiah	1.448.424	471.798
Pemerintah RI Syariah	Rupiah	1.892.757	277.628
Obligasi			
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	Rupiah	2.000.000	1.401.000
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	Rupiah	750.000	750.000
Sukuk Mudharabah			
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri A	Rupiah	1.158.000	1.158.000
Total			8.441.359

Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi/dibayar oleh Perseroan.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perubahan susunan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta No. 33 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perusahaan menyetujui tentang pemberhentian perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan menjadi:

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan*)	: Ninis Kesuma Adriani
Direktur Bisnis	: R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris
Direktur Operasional**))	: Sunar Basuki

*) semula Direktur Keuangan dan Operasional menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan
*) semula Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional
Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0007622 tertanggal 22 April 2022.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SELURUH PEMBatasan YANG DIWAJIBKAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN, DAN PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA SECARA TEPAT WAKTU DAN JUMLAH.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAINNYA, KECUALI LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG MATERIAL SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independen. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518) yang menyatakan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tanggal 20 Juni 2022.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan juga ketentuan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 7/ POJK.04/ 2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 terkait penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan dokumen di bidang Pasar Modal. Manajemen menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap informasi keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 yang disajikan dalam Prospektus ini.

Perseroan menyajikan ringkasan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021. Informasi keuangan ini tidak lengkap dan tidak termasuk laporan perubahan ekuitas, arus kas serta catatan atas pengungkapan terkait. Manajemen Perseroan yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa informasi keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dalam Prospektus ini. Hasil untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 atau 31 Maret 2021 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perseroan untuk periode mendatang atau periode lainnya.

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan tidak mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun terhadap informasi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 yang disajikan di bawah ini. Oleh karena itu, investor harus mengandalkan pemeriksaan investor sendiri terhadap Perseroan, ketentuan penawaran dan informasi keuangan. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional calon investor sendiri untuk memahami informasi keuangan ini yang belum pernah diaudit, direviu, atau prosedur apa pun oleh auditor independen.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember	
		2021	2020
ASET			
Kas dan setara kas	2.951.282.839.030	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	202.760.716.785	1.184.264.100.940	524.808.898.763
Pinjaman yang diberikan – bersih	34.262.835.349.319	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818
Pembiayaan modal – bersih	848.273.450.977	768.094.030.173	846.572.933.315

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember	
		2021	2020
Piutang jasa manajemen	2.927.244.533	5.634.889.481	7.194.005.688
Pendapatan masih akan diterima	138.610.278.387	130.096.791.910	117.946.355.821
Piutang kegiatan manajer investasi	6.250.794.659	7.286.747.464	8.043.481.660
Piutang lain-lain – bersih	100.746.934.837	87.561.426.240	57.711.206.701
Pajak dibayar di muka	126.526.998.073	72.543.712.091	59.324.836.214
Uang muka dan biaya dibayar di muka	624.642.171.636	414.757.419.043	252.346.681.532
Aset pajak tangguhan	530.859.556.978	375.803.163.709	215.587.444.020
Aset tetap – bersih	2.407.980.268.231	2.364.978.848.035	1.475.606.978.180
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		-	5.665.228.119
Aset takberwujud – bersih	111.035.615.638	117.955.394.071	168.073.632.504
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	9.488.212.928	11.036.222.656	1.137.240.496
Aset lain-lain – bersih	2.704.461.015.351	1.774.497.608.922	1.373.687.742.854
TOTAL ASET	45.028.681.447.361	43.712.294.587.564	31.664.889.050.308
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga keuangan	12.395.901.576.664	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650
Surat utang jangka menengah dan sukuk	5.415.000.000.000	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000
Utang obligasi	9.912.026.337.941	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	3.346.904.567.097	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124
Utang pajak	238.191.474.605	338.434.594.191	122.292.791.187
Dana cadangan angsuran	5.944.391.164.308	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026
Utang kegiatan manajer investasi	4.060.427	1.477.865	4.144.473
Utang lain-lain	606.281.020.304	323.368.663.976	384.107.996.141
Beban yang masih harus dibayar	427.514.187.260	296.450.868.847	415.692.220.754
Liabilitas pajak tangguhan	3.825.139.811	5.503.808.922	5.761.818.004
Liabilitas imbalan kerja	48.063.647.382	29.174.700.086	58.558.122.085
TOTAL LIABILITAS	38.338.103.175.798	37.274.340.682.674	26.077.979.249.069
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham dan disetor penuh	3.800.000.000.000	3.800.000.000.000	2.300.000.000.000
Penyertaan modal negara		-	1.500.000.000.000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
Cadangan umum	537.241.280.550	537.241.280.550	537.241.280.550
Cadangan bertujuan	30.632.515.845	30.632.515.845	30.632.515.845
Belum ditentukan penggunaannya	2.301.158.089.790	2.045.597.843.110	1.204.819.762.884
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	(5.619.911.552)	(5.619.911.552)	45.316.567

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember	
		2021	2020
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	2.557.383.261	7.194.154.787	294.036.285
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	6.665.969.357.893	6.415.045.882.740	5.573.032.912.131
Keuntungan non-pengendali	24.608.913.670	22.908.022.150	13.876.889.108
TOTAL EKUITAS	6.690.578.271.563	6.437.953.904.890	5.586.909.801.239

*) Tidak diaudit

Laporan laba rugi konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Maret 2021*	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
			2021	2020
Pendapatan bunga dan syariah	2.756.869.850.992	1.719.851.993.916	8.425.155.643.903	5.605.264.350.638
Beban bunga dan syariah	(670.628.453.648)	(514.587.284.659)	(2.306.081.020.171)	(1.689.807.858.648)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	2.086.241.397.344	1.205.264.709.258	6.119.074.623.732	3.915.456.491.990
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	21.426.892.012	21.931.278.213	96.724.483.396	106.598.063.881
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	14.767.734.140	15.387.325.890	54.674.825.894	51.421.228.815
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	10.584.135.642	3.828.564.740	13.905.735.088	10.678.267.117
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	59.686.000	246.011.818	5.958.672.800	190.455.200
Pendapatan dari Java Reconstruction Fund	-	-	-	2.105.000.004
Beban usaha	(1.853.893.972.907)	(1.058.051.020.216)	(5.345.940.120.307)	(3.870.282.142.486)
Rugi penjualan aset tetap	7.200.000	-	(464.707.625)	-
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(20.299.101)	(198.774.993)	449.904.899	(145.360.609)
Lain-lain - bersih	21.628.668.420	61.642.398.755	142.288.162.295	183.113.150.445
LABA USAHA	300.801.441.550	250.576.743.466	1.086.671.580.172	399.135.154.357
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	300.801.441.550	250.576.743.466	1.086.671.580.172	399.135.154.357
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:				
Pajak kini	(191.014.242.135)	(97.763.034.303)	(401.478.334.283)	(153.962.384.697)
Pajak tangguhan	146.930.539.884	33.545.554.705	159.934.681.350	113.421.875.677
Total beban pajak penghasilan	(44.083.702.251)	(64.217.479.597)	(241.543.652.933)	(40.540.509.020)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Maret 2021*	Untuk tahun yang berakhir pada 31	
			Desember	
			2021	2020
LABA				
PERIODE/TAHUN				
BERJALAN	256.717.739.299	186.359.263.869	845.127.927.239	358.594.645.337
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Kerugian atas perubahan nilai aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain			(5.665.228.119)	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(4.636.770.413)	10.571.063.281	7.215.917.942	(6.922.673.712)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(4.636.770.413)	10.571.063.281	1.550.689.823	(6.922.673.712)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PERIODE/TAHUN				
BERJALAN	252.080.968.886	196.930.327.150	846.678.617.062	351.671.971.625

*) Tidak diaudit

Rasio keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga dan Syariah (%)	60,30	50,31	13,83
Laba tahun berjalan (%)	38,14	135,68	-63,31
Jumlah aset (%)	3,01	38,05	27,13
Jumlah liabilitas (%)	2,85	42,93	18,31
Jumlah ekuitas (%)	3,92	15,23	95,04
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga & syariah (%)	10,91	12,90	7,12
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset (%)	6,21	22,35	19,82
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah (%)	9,31	10,03	6,40
Laba tahun berjalan/total aset (ROA) (%)	0,58	1,93	1,13
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE) (%)	3,91	13,13	6,42
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,85	0,85	0,82
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	5,73	5,79	4,67
Interest Coverage Ratio ⁽²⁾ (x)	2,62	1,47	1,24
Debt-service Coverage Ratio ⁽³⁾ (x)	0,58	0,19	0,21
Debt to Equity Ratio ⁽³⁾ (x)	4,64	4,88	4,04
Rasio Likuiditas			
Aset lancar/Liabilitas lancar (x)	2,01	1,68	2,08
Gearing ratio (x) ⁽⁴⁾	4,20	4,25	3,24

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Non-Performing Financing (%)	0,05	0,54	0,97

⁽¹⁾ Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan beban bunga dari interest bearing debt

⁽²⁾ Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan pembayaran pokok dan bunga dari interest bearing debt

⁽³⁾ Total pinjaman (tidak termasuk biaya hutang pajak, post employment benefit dan lain lain) dibagi dengan total ekuitas

⁽⁴⁾ Total pinjaman dikurangi dengan Cash in Bank dibagi dengan total ekuitas

Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x
Gearing Ratio	Maksimal 8x

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518) yang menyatakan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tanggal 20 Juni 2022.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Tambahan No. 5681 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**").

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S); dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat dan memiliki 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) Kantor Mekaar dan 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Unit/Outlet ULaMM yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan

Beberapa hal berikut merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasi Perseroan.

Kondisi pasar

Terdapat beberapa kondisi pasar yang dapat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, antara lain perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan biaya modal atau pinjaman. Dari faktor-faktor tersebut, tingkat suku bunga memiliki dampak langsung terhadap Perseroan, sehingga pengelolaan risiko perubahan tingkat bunga merupakan salah satu prioritas Perseroan.

Berkat upaya pengelolaan risiko yang baik, sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, perubahan tingkat suku bunga yang terjadi tidak berdampak secara material terhadap pendapatan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan melakukan kajian ulang perubahan tingkat suku bunga serta dampaknya terhadap kinerja operasional dan keuangan secara rutin setiap bulan melalui rapat *Asset Liability Committee* (ALCO). Berdasarkan hasil rapat-rapat tersebut, Perseroan belum pernah mengubah *base lending rate* (BLR) sebagai acuan bunga untuk kredit nasabah

Persaingan usaha di industri

Semakin banyaknya pemain baru pada industri pembiayaan kredit mikro dapat berujung pada persaingan tingkat suku bunga pembiayaan (*lending rate*) antar pemain. Hal ini dapat mempengaruhi preferensi pelaku UKM, terutama yang memiliki sensitivitas tinggi, dan menyebabkan terbentuknya standarisasi dan ekspektasi baru atas tingkat *lending rate* yang diberikan. Hal ini dapat berujung pada menurunnya marjin dan meningkatnya risiko pembiayaan yang mesti ditanggung oleh Perseroan. Sebagai mitigasi, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dengan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

Kualitas aset produktif Perseroan

Menurunnya kualitas aset produktif Perseroan yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan Perseroan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini akan menyebabkan tidak dapat ditagihnya piutang pembiayaan tersebut yang akan berujung pada menurunnya pendapatan dan tingkat profitabilitas Perseroan.

Kondisi pandemi COVID-19

Kondisi pandemi covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia telah berdampak besar bagi seluruh sektor perekonomian, terutama sektor UMKM. Hal ini tentunya membawa dampak pula pada kinerja keuangan Perseroan. Dengan segala ketidakpastian usaha selama pandemi, kegiatan investasi pelaku UMKM mengalami penurunan drastis yang berdampak pada menurunnya kebutuhan mereka terhadap pembiayaan dan berujung pada menurunnya pendapatan Perseroan. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus COVID-19 sebagai pandemi global. Wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Perseroan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman COVID-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan antara lain Kebijakan Keuangan Negara terkait Pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020. Melalui kebijakan ini, Pemerintah melalui Perseroan berupaya untuk membantu UKM yang usahanya terpengaruhi oleh pandemi agar dapat tetap beroperasi dan bersaing di pasar. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak juga bagi kinerja Perseroan, dimana dalam mendukung program Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan membantu para nasabah yang terdampak, maka Perseroan mengambil kebijakan pemberian relaksasi pembiayaan kepada para nasabah yang terdampak tersebut serta tidak dapat berjalannya penagihan pinjaman pembiayaan secara normal (seperti untuk pembiayaan PNM Mekaar yang normalnya dilakukan Pertemuan Kelompok Mingguan) dimana saat ini disesuaikan dengan kondisi/kebijakan Pemerintah daerah setempat sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan Perseroan.

Disisi lain guna menjaga keberlangsungan bisnis maka Perseroan tetap melakukan penyaluran pembiayaan secara selektif memperhatikan kondisi masing-masing wilayah dan ketentuan Pemerintah daerah setempat, namun demikian dengan berjalannya program pemulihan ekonomi secara nasional maka Perseroan tetap optimis bahwa kinerja Perseroan dapat tetap berjalan sesuai yang direncanakan.

3. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman Perseroan tidak memiliki dampak atau pengaruh yang material terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan di masa yang akan datang. Pinjaman dengan mata uang asing Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar USD433.619,13 atau setara Rp5.725.105.338.

4. Kebijakan akuntansi penting

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini. Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

PSAK No. 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS No. 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 72.

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK No. 74 akan menggantikan PSAK No. 62 Kontrak Asuransi. PSAK No. 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK No. 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK No. 62, yang sebagian besar didasarkan pada kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS No. 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS No. 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Penyusunan laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing masing akun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi untuk akun aset keuangan tersedia untuk dijual serta aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perubahan nilai surat berharga, nilai tukar dan tingkat suku bunga

1) Nilai Surat Berharga

Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak sudah mengimplementasikan PSAK terkait surat berharga, sehingga sudah menyajikan nilai wajar surat berharga. Namun, kontribusi atas dampak perubahan surat berharga tidak material terhadap kinerja Perseroan.

2) Nilai Tukar

Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar tidak memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

3) Tingkat Suku Bunga

Peningkatan tingkat suku bunga pinjaman tidak serta merta dapat diikuti langsung dengan perubahan tingkat suku bunga pembiayaan yang diberikan, sehingga akan berdampak terhadap kinerja penyaluran pembiayaan dan keuangan Perseroan. Apabila tingkat suku bunga pinjaman meningkat secara signifikan dalam waktu singkat, beban dana akan meningkat dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Perubahan kebijakan akuntansi yang material

Alasan penerapan kebijakan akuntansi

Perseroan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut sehubungan dengan pemberlakuan secara efektif PSAK 71 sejak 1 Januari 2020 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan

Dampak penerapan awal PSAK 71 terhadap kinerja keuangan Perseroan antara lain penurunan ekuitas sebesar Rp126.591.657.102 pada laporan keuangan 31 Desember 2020.

6. Operasi per segmen

Perseroan dan Perusahaan Anak membagi usahanya ke dalam empat segmen yang terdiri dari Pembiayaan, Manajer Investasi, Modal Ventura dan Pembiayaan Syariah. Berikut adalah kinerja keuangan Perseroan berdasarkan segmen-segmen tersebut.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH		
Pembiayaan	4.492.800	3.959.792
Manajer Investasi	66.242	61.256

Modal Ventura	81.103	90.565
Pembiayaan Syariah	4.127.942	1.793.126
Total setelah eliminasi	8.596.419	5.776.257
BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN		
Pembiayaan	(1.175.789)	(1.290.740)
Manajer Investasi	-	-
Modal Ventura	(70.821)	(112.364)
Pembiayaan Syariah	(1.171.305)	(449.755)
Total setelah eliminasi	(2.306.081)	(1.689.807)

Pendapatan usaha serta kontribusi terhadap pendapatan dan laba usaha

Segmen pembiayaan, baik konvensional maupun syariah selaku bisnis utama Perseroan, merupakan kontributor utama dari pendapatan usaha Perseroan dengan kontribusi untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp8.620.742 juta atau sebesar 98,74% dari total pendapatan usaha. Segmen pembiayaan terdiri dari kontribusi pembiayaan konvensional sebesar Rp4.492.800 juta dan pembiayaan syariah sebesar Rp4.127.942 juta.

7. Hasil kegiatan operasional

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan bunga dan syariah	8.425.155.643.903	5.605.264.350.638
Beban bunga dan syariah	(2.306.081.020.171)	(1.689.807.858.648)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	6.119.074.623.732	3.915.456.491.990
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	96.724.483.396	106.598.063.881
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	54.674.825.894	51.421.228.815
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	13.905.735.088	10.678.267.117
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	5.958.672.800	190.455.200
Pendapatan dari Java Reconstruction Fund	-	2.105.000.004
Beban usaha	(5.345.940.120.307)	(3.870.282.142.486)
Rugi penjualan aset tetap	(464.707.625)	-
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	449.904.899	(145.360.609)
Lain-lain - bersih	142.288.162.295	183.113.150.445
LABA USAHA	1.086.671.580.172	399.135.154.357
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:		
Pajak kini	(401.478.334.283)	(153.962.384.697)
Pajak tangguhan	159.934.681.350	113.421.875.677
Total beban pajak penghasilan	(241.543.652.933)	(40.540.509.020)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	845.127.927.239	358.594.645.337
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian atas perubahan nilai aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	(5.665.228.119)	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	7.215.917.942	(6.922.673.712)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	1.550.689.823	(6.922.673.712)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	846.678.617.062	351.671.971.625
Laba per saham (dalam nilai penuh)		

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan bunga dan syariah. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 50,31% menjadi Rp8.425.155 juta untuk tahun 2021 dari Rp5.605.264 juta untuk tahun 2020 atau meningkat Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pembiayaan Mekaar yang naik 65,87% menjadi sebesar Rp6.926.855

juta pada tahun 2021. Jumlah nasabah Mekaar meningkat dari 7.802.806 nasabah pada tahun 2020 meningkat menjadi 11.011.194 nasabah pada tahun 2021.

Beban bunga dan syariah. Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 36,47% menjadi Rp 908.652 juta untuk tahun 2021 dari Rp1.689.808 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan beban bunga dan syariah pinjaman bank yang meningkat sebesar 64,41% menjadi sebesar Rp dan beban bagi hasil sukuk yang naik masing-masing sebesar Rp355.979 juta atau dan meningkat sebesar Rp485.250 juta atau meningkat sebesar 100% dibanding bebab bunga dan syariah tahun 2020. Perseroan berhasil Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dan mendapatkan pinjaman dari Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, dan beberapa bank swasta lainnya yang digunakan untuk sumber dana pembiayaan Mekaar serta untuk keperluan *refinancing*.

Pendapatan dan beban syariah - bersih. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat sebesar 56,28% menjadi Rp6.119.075 juta untuk tahun 2021 dari Rp3.915.456 juta untuk tahun 2020.

Pendapatan dari giro, dividen, dan bunga deposito. Pendapatan dari *giro*, dividen, dan bunga deposito menurun sebesar 9,26% menjadi Rp96.724 juta untuk tahun 2021 dari Rp106.598 juta untuk tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata saldo giro dan deposito dan penurunan tingkat suku bunga selama tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya.

Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen. Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen meningkat sebesar 3028,65% menjadi Rp5.958 juta untuk tahun 2021 dari Rp190 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan berhasil mendapatkan jasa konsultasi manajemen berupa jasa pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jasa IT, pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP), pelatihan, pendampingan dan *community development* untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah dan Koperasi (UKMK).

Pendapatan dari Java Reconstruction Fund. Pendapatan dari *Java Reconstruction Fund* menurun sebesar 100% menjadi Rp0 untuk tahun 2021 dari Rp2.105 juta untuk tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah berakhirnya pengelolaan dana hibah yang telah berlangsung selama 10 tahun.

Laba/rugi penjualan aset tetap. Perseroan melalui cucu perseroan melakukan penjualan atas aset tetap dan mencatat rugi penjualan aset tetap sebesar Rp465 juta pada tahun 2021.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 18,21% menjadi Rp5.345.940 juta untuk tahun 2021 dari Rp3.870.282 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan yang naik sebesar 27,99% menjadi sebesar Rp2.950.630 juta, kerugian penurunan nilai piutang yang naik sebesar 99,11% menjadi sebesar Rp606.765 juta, dan beban asuransi kredit yang naik sebesar 86,42% menjadi sebesar Rp273.082 juta untuk tahun 2021.

Rugi selisih kurs - bersih. Sejalan dengan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, rugi selisih kurs - bersih tercatat sebesar Rp449 juta untuk tahun 2021, sementara untuk tahun 2020 tercatat sebesar Rp145 juta.

Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih. Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih menurun sebesar 22,29% menjadi Rp142.288 juta untuk tahun 2021 dari Rp183.113 juta untuk tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pendapatan hibah sebesar 67,79% menjadi sebesar Rp61.000 juta untuk tahun 2021.

Laba usaha. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba usaha meningkat sebesar 172,26% menjadi Rp1.086.672 juta untuk tahun 2021 dari Rp399.135 juta untuk tahun 2020.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 495,81% menjadi Rp241.544 juta untuk tahun 2021 dari Rp40.541 untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan seiring dengan peningkatan laba Perseroan.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba tahun berjalan meningkat sebesar 135,68% menjadi Rp845.128 juta untuk tahun 2021 dari Rp358.595 juta untuk tahun 2020.

Penghasilan (kerugian) komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain meningkat sebesar 122,40% menjadi Rp1.551 juta untuk tahun 2021 dari kerugian Rp6.923 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja yang naik sebesar 204,24% akibat pemberlakuan UU Cipta Kerja.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan meningkat sebesar 140,76% menjadi Rp846.879 juta untuk tahun 2021 dari Rp351.672 juta untuk tahun 2020.

8. Aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
Kas dan setara kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.184.264.100.940	524.808.898.763
Pinjaman yang diberikan – bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818
Pembiayaan modal – bersih	768.094.030.173	846.572.933.315
Piutang jasa manajemen	5.634.889.481	7.194.005.688
Pendapatan masih akan diterima	130.096.791.910	117.946.355.821
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286.747.464	8.043.481.660
Piutang lain-lain – bersih	87.561.426.240	57.711.206.701
Pajak dibayar di muka	72.543.712.091	59.324.836.214
Uang muka dan biaya dibayar di muka	414.757.419.043	252.346.681.532
Aset pajak tangguhan	375.803.163.709	215.587.444.020
Aset tetap – bersih	2.364.978.848.035	1.475.606.978.180
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	-	5.665.228.119
Aset takberwujud – bersih	117.955.394.071	168.073.632.504
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.036.222.656	1.137.240.496
Aset lain-lain – bersih	1.774.497.608.922	1.373.687.742.854
TOTAL ASET	43.712.294.587.564	31.664.889.050.308

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Posisi kas dan setara kas menurun sebesar 9,90% menjadi Rp4.020.609 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp4.462.197 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo deposito sebesar 27,14% menjadi sebesar Rp992.058 juta untuk tahun 2021.

Pinjaman yang diberikan - bersih meningkat sebesar 46,58% menjadi Rp32.377.176 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp22.088.985 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan Mekaar sebesar 67,31% menjadi sebesar Rp26.255.405 juta dan pembiayaan Ulamm sebesar 4,26% menjadi sebesar Rp7.280.577 juta untuk tahun 2021.

Aset Tetap – bersih meningkat sebesar 60,27% menjadi Rp2.364.979 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp1.475.607 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan tanah sebesar 55,33% menjadi sebesar Rp859.150 juta dan bangunan meningkat sebesar 76,06% menjadi sebesar 800.195 juta. Peningkatan tanah dan bangunan ini seiring dengan pembukaan kantor cabang untuk menunjang penyaluran pembiayaan Mekaar ke pelosok negeri.

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual meningkat sebesar 870,44% menjadi Rp11.036 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp1.137 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan agunan yang diambilalih sebesar 859,44% menjadi sebesar Rp10.911 juta yang berasal dari cucu Perseroan yaitu PT PNM Venture Syariah untuk tahun 2021.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total aset meningkat sebesar 38,05% menjadi Rp43.712.295 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp31.664.889 juta pada 31 Desember 2020.

Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Liabilitas		
Utang bank dan Lembaga keuangan	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000
Utang obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124
Utang pajak	338.434.594.191	122.292.791.187
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865	4.144.473
Utang lain-lain	323.368.663.976	384.107.996.141
Beban yang masih harus dibayar	296.450.868.847	415.692.220.754
Liabilitas pajak tangguhan	5.503.808.922	5.761.818.004
Liabilitas imbalan kerja	29.174.700.086	58.558.122.085
TOTAL LIABILITAS	37.274.340.682.674	26.077.979.249.069

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Utang bank dan Lembaga keuangan meningkat sebesar 81,75% menjadi Rp 11.313.396 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp6.224.831 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil mendapatkan tambahan pinjaman dari Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, dan beberapa bank swasta lainnya yang digunakan untuk sumber dana pembiayaan Mekaar serta untuk keperluan *refinancing*.

Surat utang jangka menengah dan sukuk meningkat sebesar 56,54% menjadi Rp 6.090.000 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp3.890.500 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil menerbitkan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I masing-masing sebesar Rp2.000.000 juta untuk tahun 2021.

Utang Obligasi meningkat sebesar 7,06% menjadi Rp10.078.283 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp9.413.490 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000 juta dan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 sebesar Rp666.200 juta dan melunasi Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp750.000 juta dan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp839.000 juta yang telah jatuh tempo selama tahun 2021.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total liabilitas meningkat sebesar 42,93% menjadi Rp37.274.341 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp26.077.979 juta pada 31 Desember 2020.

Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		
Modal saham dan disetor penuh	3.800.000.000.000	2.300.000.000.000
Penyertaan modal negara	-	1.500.000.000.000
Saldo laba:		

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Telah ditentukan penggunaannya:		
Cadangan umum	537.241.280.550	537.241.280.550
Cadangan bertujuan	30.632.515.845	30.632.515.845
Belum ditentukan penggunaannya	2.045.597.843.110	1.204.819.762.884
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	(5.619.911.552)	45.316.567
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	7.194.154.787	294.036.285
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	6.415.045.882.740	5.573.032.912.131
Kepentingan non-pengendali	22.908.022.150	13.876.889.108
TOTAL EKUITAS	6.437.953.904.890	5.586.909.801.239

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Posisi total ekuitas meningkat sebesar 15,23% menjadi Rp6.437.954 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp5.836.910 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari laba tahun berjalan.

9. Likuiditas dan sumber pendanaan

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan dan pasar modal.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp4.020.609 juta dan memiliki sumber likuiditas material berupa fasilitas pinjaman perbankan yang masih memiliki sisa kelonggaran tarik, yaitu dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia 1946, BPD Sulselbar, BPD Kalteng, Bank Mega, State Bank India, Bank Mega Syariah, Sindikasi BPD, Bank Nobu, Bank Victoria, BCA, Bank Permata, dan Bank Syariah Indonesia,

Perseroan wajib memenuhi target pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun berjalan dan upaya perolehan pendanaan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan yakin akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, pinjaman perbankan, pinjaman Pemerintah dan pinjaman pasar modal untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Perseroan senantiasa menjajaki sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, penerbitan MTN, penerbitan Obligasi dan Sukuk, serta berencana untuk menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) untuk modal kerja tambahan.

Tabel berikut merupakan sekilas gambaran arus kas Perseroan selama beberapa periode/tahun terakhir.

(dalam Rupiah)

	31 Desember	
	2021	2020
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(7.451.305.020.320)	(3.735.385.898.227)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.974.349.980.632)	(518.055.140.516)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	8.984.066.141.056	5.614.897.352.459
Kenaikan bersih kas dan setara kas	(441.588.859.896)	1.361.456.313.716
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	4.462.197.480.623	3.100.741.166.907
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623

Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Pada 31 Desember 2021, arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari pengembalian penyaluran pinjaman, penerimaan dari pendapatan bunga, penerimaan usaha lainnya dan pengembalian pembiayaan modal ventura yang masing-masing berjumlah sebesar Rp31.773.404 juta, Rp8.487.250 juta, Rp517.905 juta, dan Rp157.116 juta. Setelah memperhitungkan kas yang diperoleh, arus kas bersih untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp7.451.305 juta.

Pada 31 Desember 2020, arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari pengembalian penyaluran pinjaman, penerimaan dari pendapatan bunga, penerimaan usaha lainnya dan pengembalian pembiayaan modal ventura yang masing-masing berjumlah sebesar Rp20.662.776 juta, Rp5.359.063 juta, Rp123.240 juta dan Rp208.605 juta. Setelah memperhitungkan kas yang diperoleh, arus kas bersih untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp3.735.386 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pada 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian efek- bersih dan pembelian aset tetap, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp200.000 juta, dan Rp76.786 juta. Setelah memperhitungkan kas yang diperoleh, arus kas bersih untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.974.350 juta.

Pada 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian efek- bersih dan pembelian aset tetap, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp139.126 juta, dan Rp7.822 juta. Setelah memperhitungkan kas yang diperoleh, arus kas bersih untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp518.055 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Pada 31 Desember 2021, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan dari MTN, penerimaan dana dari obligasi, dan penerimaan dana dari hibah, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp16.685.426 juta, Rp4.470.700 juta, Rp3.666.200 juta, dan Rp61.000 juta. Setelah memperhitungkan kas yang digunakan, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp8.984.066 juta.

Pada 31 Desember 2020, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan dari MTN, penerimaan dana dari obligasi, dan penerimaan dana dari hibah, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp8.531.019 juta, Rp1.983.8 juta, Rp692.000 juta, dan Rp189.394 juta. Setelah memperhitungkan kas yang digunakan, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp5.614.897 juta.

10. Pembahasan mengenai pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2021, sisa kontraktual liabilitas Perseroan yang masih terutang adalah sebesar Rp37.066.442 juta.

Tabel berikut menyajikan kontraktual liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

	≤ 1 tahun	>1 – 2 tahun	>2 – 3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Utang bank dan Lembaga keuangan	5.069.804	1.343.092	4.687.248	213.252	11.313.396
MTN dan Sukuk	2.048.000	1.100.000	2.615.000	327.000	6.090.000
Utang obligasi	3.901.707	2.834.303	1.519.683	1.822.589	10.078.282
Pinjaman Pemerintah RI	508.278	1.060.788	2.348.650	-	3.917.716
Pinjaman Lembaga kredit luar negeri	-	-	-	5.725	5.725
Utang kegiatan manajer investasi	1	-	-	-	1
Utang lain-lain	-	-	-	323.369	323.369

	≤ 1 tahun	>1 – 2 tahun	>2 – 3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Beban yang masih harus dibayar	-	296.450	-	-	296.450
Dana Cadangan Angsuran	4.793.680	55.072	82.608	110.143	5.041.503
Jumlah	16.321.469	6.689.705	11.253.190	2.802.078	37.066.442

Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana ke Perseroan.

Perusahaan mempunyai keyakinan tidak ada komitmen yang material terkait investasi barang modal.

Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup terhadap Perseroan.

Perusahaan mempunyai keyakinan tidak ada transaksi atau kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang mempengaruhi laporan keuangan yang telah di audit.

BAB VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi ini mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko pembiayaan/risiko kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perusahaan yang terutama meliputi pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Perusahaan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini dapat menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah dan dapat berujung ke menurunnya pendapatan dan kinerja keuangan Perusahaan.

Risiko pembiayaan timbul jika pembiayaan kepada nasabah tidak dikelola secara hati-hati atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola secara memadai. Sektor ekonomi terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor perdagangan, disusul Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan. Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan memiliki mekanisme penggunaan grace period, asuransi jiwa, asuransi kredit, dan sistem tanggung renteng khusus, sedangkan untuk produk pemberdayaan kelompok perempuan pra-sejahtera dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pembiayaan. Perusahaan memiliki Komite Pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan. Keanggotaan. Komite Pembiayaan tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit lain terkait.

B. RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana (*cost of fund*) Perusahaan.

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tingkat suku bunga pembiayaan, sehingga menuntut penetapan tingkat suku bunga pembiayaan yang mampu memfasilitasi kebutuhan pelaku UMK, dengan demikian kondisi perubahan beban dana dapat berdampak kepada pendapatan dan laba bersih Perusahaan. Untuk itu, pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman disertai jangka waktu secara *prudent* dengan piutang pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana, dengan mengacu pada perencanaan dan analisa kebutuhan dana.

2. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko terjadinya ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Keterbatasan likuiditas menjadi kendala dalam

pengembangan bisnis, dimana pada saat ini sumber pendanaan utama Perusahaan adalah pinjaman pada lembaga keuangan/perbankan dan pasar modal. Batasan tingkat rasio *leverage* Perusahaan juga berpengaruh kepada terbatasnya kapasitas pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada lembaga keuangan.

Kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi berkepanjangan yang mengakibatkan lembaga keuangan menjalankan kebijakan uang ketat akan menimbulkan dampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas yang berpengaruh pada kemampuan Perusahaan untuk tetap dapat menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan serta berdampak kepada kinerja keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

3. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang disebabkan oleh tidak memadainya atau adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang menyangkut ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem.

Risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perusahaan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perusahaan dan dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Perusahaan dari pihak luar yang merasa dirugikan. Perusahaan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan *database* pada dua tempat yang berbeda yaitu di Jl. Lembang dan di Jl. TB. Simatupang. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Perusahaan memiliki asuransi aset, *cash in safe* dan *cash in transfer* untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

4. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional Perusahaan dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Risiko tersebut berdampak pada terganggunya pencapaian target Perusahaan serta tuntutan hukum kepada Perusahaan dari pihak luar yang merasa dirugikan. Tuntutan atas perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba dan kerugian immaterial yang berpengaruh juga terhadap reputasi Perusahaan.

5. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku oleh Perusahaan atau oleh pihak eksternal terkait ketidakpuasan pelanggan atau hal lain. Risiko dapat menciptakan citra negatif terhadap produk dan kinerja Perusahaan.

6. Risiko strategi

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perusahaan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan.

7. Risiko pandemi COVID-19

Selama masa pandemi, terjadi penurunan penyaluran pembiayaan karena dampak resesi ekonomi yang sangat mempengaruhi kemampuan bayar nasabah. Risiko pandemi dapat berujung ke risiko pembiayaan/risiko kredit. Meski begitu, Perusahaan terus menunjukkan komitmennya untuk membangkitkan dan menyelamatkan UMKM. Kondisi sulit yang dihadapi UMKM pada masa pandemi ini mendorong Perseroan untuk melakukan restrukturisasi agar kondisi usaha mereka dapat terjaga dan sektor UMKM dapat segera pulih.

8. Risiko persaingan usaha

Segmen pembiayaan UMK, mikro dan ultra mikro (Mekaar) saat ini menjadi bisnis yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dan porsi pertumbuhan yang cepat dan terukur. Tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani membuat sektor ini menarik untuk dijejaki. Sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam kondisi krisis dengan tetap menghasilkan tingkat margin yang menguntungkan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan risiko persaingan usaha, terlihat dengan cukup banyaknya pemain pasar baru yang masuk ke segmen pembiayaan UMK termasuk pesaing dari sisi *Financial Technology* (Fintech) yang unggul dari sisi teknologi.

Perusahaan merupakan satu dari sedikit pelaku pasar yang selain menyediakan pembiayaan juga memberikan pendampingan dan konsultasi usaha kepada sektor UMK, seperti pengembangan kapasitas usaha untuk nasabah-nasabah ULaMM dan Mekaar. Khusus untuk produk Mekaar, dalam bentuk event pelatihan secara intensif.

Mulai banyaknya bermunculan perusahaan *fintech* yang menawarkan jasa *peer to peer lending* untuk saat ini belum menjadi ancaman yang signifikan bagi produk Mekaar, karena segmen pasarnya, yang relatif lebih paham teknologi, berbeda dengan segmen Mekaar yang cenderung lebih bersifat tradisional. Bertolak belakang dengan segmen ULaMM Perseroan, perusahaan-perusahaan *peer to peer lending* kebanyakan tidak menetapkan agunan untuk pembiayaan yang mereka salurkan. Hal ini menimbulkan risiko yang harus mereka tanggung relatif lebih besar, maka untuk mengkompensasi risiko tersebut, tingkat bunga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibanding ULaMM.

Perusahaan mengidentifikasi lembaga-lembaga pembiayaan usaha mikro, terutama lembaga yang lebih besar dari Perusahaan seperti BRI Mikro, BTPN Syariah, Mandiri Mikro dan lembaga lain yang mendapat fasilitas program KUR, sebagai pesaing utama.

Risiko persaingan dapat berdampak pada berkurangnya nasabah Perusahaan yang kemudian akan berpengaruh kepada turunnya pendapatan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

9. Risiko investasi pada Perusahaan Anak

Sebagai induk perusahaan yang melakukan investasi pada Perusahaan Anak, secara tidak langsung Perusahaan bergantung juga pada kinerja operasi dan keuangan dari Perusahaan Anak. Risiko tersebut terutama menyangkut kemampuan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba yang akan berujung pada kontribusi terhadap keuangan. Dengan demikian, apabila kegiatan operasi dan kinerja keuangan Perusahaan Anak mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan.

10. Risiko perubahan teknologi

Semakin besarnya jumlah karyawan dan nasabah Perusahaan, kebutuhan akan sistem teknologi informasi yang terintegrasi / secara digital, baik untuk pihak internal maupun eksternal, untuk menghindari kesalahan manusia akibat proses manual semakin menjadi keharusan dan kritical, Meski begitu, teknologi informasi bersifat dinamis dan mengandung risiko dalam setiap perkembangannya maupun pada penerapan infrastrukturnya. Penekanan risiko terutama pada perubahan pengembangan suatu sistem layanan dan optimalisasi efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi, seperti akses data, pengelolaan data, jaringan komunikasi dan keamanan, pengelolaan perangkat, perencanaan kapasitas dan manajemen risiko teknologi informasi.

11. Risiko sumber daya manusia

Risiko yang dihadapi Perusahaan dalam menjalankan aktifitas bisnis pembiayaan mikro adalah risiko ketersediaan SDM yang memenuhi spesifikasi dan kompetensi yang relevan serta tingkat *turn over* SDM terutama untuk level karyawan kunci. Dengan persaingan bisnis pembiayaan mikro yang semakin ketat, terutama dari perbankan, karena peluang dan ragam bisnisnya sangat besar sehingga menjanjikan marjin usaha yang cukup baik bagi lembaga keuangan, Perusahaan semakin sulit untuk merekrut SDM dan profesional dan berdedikasi tinggi dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha.

Risiko ini dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan usaha karena dapat menghambat ekspansi usaha yang kemudian dapat berujung pada menurunnya pertumbuhan pendapatan. Karakteristik usaha pembiayaan kredit mikro adalah jumlah nasabah yang sangat banyak dan sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan oleh Perusahaan, jumlah nasabah tersebut juga memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peningkatan kebutuhan jumlah SDM yang sepadan dan dengan kompetensi yang sesuai agar mampu memfasilitasi kebutuhan nasabah dengan baik.

12. Risiko terkait kebijakan Pemerintah

Perseroan merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, dimana mekanisme pengawasan dan RUPS dilakukan melalui kuasa pemegang saham yang dalam hal ini dipegang oleh Kementerian BUMN. Perseroan sebagai BUMN juga terlibat dalam menjalankan kebijakan Pemerintah yang menyangkut penyaluran dana ke UMKM, terutama pembiayaan ultra mikro atau pembiayaan kepada perempuan prasejahtera melalui produk Mekaar

Salah satu kebijakan Pemerintah yang dipercayakan kepada Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- 1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diterapkan sebagai tanggapan Pemerintah terhadap dampak pandemi COVID-19, melalui penyaluran subsidi bunga dimana ketentuan terkait hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-060/PNM-DIR/XII/20 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Pembiayaan ULaMM dan Mekaar dalam Rangka Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- 2) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dimana ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-033/PNM-DIR/VIII/20 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, dan Penyaluran pembiayaan kepada Keluarga Pra-Sejahtera melalui Produk Mekaar melalui realisasi Penyertaan Modal Negara pada tahun 2020 sebesar Rp2,5 triliun dimana ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-028/PNM-DIR/VII/20 tentang Kebijakan Penyaluran Pembiayaan Mekaar Bersumber Dana dari Penyertaan Modal Negara Tahun 2020.

13. Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki hubungan bisnis dengan negara lain ataupun bersinggungan dengan peraturan internasional yang relevan.

Risiko ini mungkin akan muncul apabila Perseroan memiliki hutang/pinjaman dari luar negeri dan/atau penerbitan efek utang dalam valuta asing. Namun sesuai POJK No. 16/2019, pasal 9, sumber dana Perseroan hanya dapat berasal dari: penyertaan modal negara, pinjaman dari Pemerintah/badan layanan umum, pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya, penerbitan efek bersifat utang, pinjaman subordinasi, sekuritisasi piutang pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hibah serta dengan denominasi Rupiah. Apabila Perseroan melakukan penerbitan efek utang dalam valuta asing, Perseroan harus memperoleh izin dari regulator terkait dan Perseroan harus melakukan mitigasi risiko valuta asing dengan melakukan *hedging*.

C. RISIKO-RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

1. Risiko pembiayaan/risiko kredit

Perusahaan Anak seluruhnya bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Anak menghadapi risiko ketidakmampuan nasabah atau perusahaan pasangan usahanya untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan atau permodalan yang diberikan, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja masing-masing Perusahaan Anak. Risiko ini dapat timbul apabila proses pembiayaan tidak dikelola secara baik. Dalam menghadapi risiko ini, telah diterapkan berbagai kebijakan seperti penggunaan asuransi jiwa dan asuransi kredit.

2. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan Anak. Dalam perencanaan usaha, risiko pasar menjadi salah satu pertimbangan utama, terutama risiko pasar yang memiliki dampak langsung dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana. Dengan pola aktifitas usaha yang dijalankan Perusahaan Anak saat ini, risiko pasar adalah minimal. Perusahaan Anak tidak mempunyai kegiatan usaha dalam valuta asing.

3. Risiko likuiditas

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Anak menghadapi risiko likuiditas yaitu kesulitan untuk memenuhi kewajiban/liabilitas keuangan yang harus diselesaikan, baik berupa kewajiban pengembalian pinjaman maupun simpanan pihak ketiga. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target Perusahaan Anak. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya arus kas dan terkendalikannya besar *maturity gap*. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi di atasi dengan memelihara aset likuid dan memperluas akses Perusahaan Anak ke beragam sumber pendanaan.

4. Risiko operasional

Perusahaan Anak selalu berupaya untuk memastikan bahwa seluruh praktek kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Perusahaan Anak juga menghadapi risiko terjadinya penyimpangan atas *Standard Operating Procedures* yang mengacu pada Perseroan pada beberapa transaksi yang dilakukan.

Risiko operasional dapat terjadi sebagai akibat dari adanya gangguan dalam kegiatan operasional Perusahaan Anak karena adanya bencana alam, kegagalan proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem yang dapat berujung pada terganggunya pencapaian target Perusahaan Anak. Namun, risiko ini dapat dimitigasi melalui penerapan SOP pelaksanaan kegiatan operasional yang baik.

5. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional Perusahaan Anak dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Risiko tersebut berdampak pada terganggunya pencapaian target Perusahaan Anak serta tuntutan hukum kepada Perusahaan Anak dari pihak luar yang merasa dirugikan. Tuntutan atas perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba Perusahaan Anak dan kerugian immaterial yang berpengaruh kepada reputasi Perusahaan Anak.

Perusahaan Anak melakukan kajian ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas *enforceability* dalam perjanjian guna memvalidasi hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

6. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku oleh Perusahaan Anak. Risiko tersebut berdampak padaterganggunya pencapaian target Perusahaan Anak dan dapat menciptakan citra negatif terhadap produk-produk Perusahaan Anak. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemegang kepentingan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Risiko strategi

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perusahaan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan.

8. Risiko kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang terkait aktifitas kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan usahanya, Perusahaan diatur oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang wajib dipenuhi, antara lain terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, peraturan-peraturan OJK, peraturan terkait kewajiban Perusahaan sebagai Emiten, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Kegagalan dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut dapat menyebabkan Perusahaan dikenakan sanksi atau pun denda. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perusahaan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya secara prudent dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan ketentuan.

D. RISIKO UMUM

1. Risiko terkait perekonomian secara makro atau global

Segmen UMK sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Indikator perekonomian, pertumbuhan ekonomi, suku bunga (*cost of borrowing*) dan indikator lainnya sangat berpengaruh pada kesejahteraan pelaku UMK yang menjadi debitur Perusahaan, dan akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Dampak dari risiko tersebut akan mengganggu pencapaian target Perusahaan, dimana usaha mitigasi yang dilakukan Perusahaan adalah dengan menerapkan pendekatan *zero-interest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Komite ALCO secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha.

2. Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan Undang-undang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang wajib dipenuhi, antara lain terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, peraturan-peraturan OJK, peraturan terkait kewajiban Perseroan sebagai Emiten, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Kegagalan dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi atau pun denda. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

E. RISIKO BAGI INVESTOR

- 1) Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini di pasar sekunder yang antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang
- 2) Investor pembeli Obligasi juga menghadapi risiko gagal bayar akibat kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk

memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO PERSEROAN.

BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 20 Juni 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan juga ketentuan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 7/ POJK.04/ 2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 terkait penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan dokumen di bidang Pasar Modal. Manajemen menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap informasi keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 yang disajikan dalam Prospektus ini.

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan tidak mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun terhadap informasi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 yang disajikan di bawah ini. Oleh karena itu, investor harus mengandalkan pemeriksaan investor sendiri terhadap Perseroan, ketentuan penawaran dan informasi keuangan. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional calon investor sendiri untuk memahami informasi keuangan ini yang belum pernah diaudit, direviu, atau prosedur apa pun oleh auditor independen.

Perubahan susunan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta No. 32 dan 33 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perusahaan menyetujui tentang pemberhentian perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Independen	: Veronica Colondam
Komisaris Independen	: Meidyah Indreswari
Komisaris	: Parman Nataatmadja
Komisaris *)	: Iwan Taufiq Purwanto

Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan**)	: Ninis Kesuma Adriani
Direktur Bisnis	: R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris
Direktur Operasional***)	: Sunar Basuki

*) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019. Penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Iwan Taufiq Purwanto selaku Komisaris belum dilaksanakan. Iwan Taufiq Purwanto akan efektif menjabat sebagai Komisaris Perseroan setelah Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

***) semula Direktur Keuangan dan Operasional menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan

****) semula Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas persero, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (**"PP No. 38/1999"**) dan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (**"Akta Pendirian"**). Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara Republik Indonesia	300.000	300.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	300.000	300.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	900.000	900.000.000.000	

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 (**"Akta No. 59/2021"**).

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S); dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat dan memiliki 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Kantor Mekaar dan 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Unit/Outlet ULAMM yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan efek bersifat utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp)	
				Nilai Nominal	Nilai Wajar*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.246.000.000.000	1.245.569.976.827
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000	597.729.587.173
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000	1.349.106.984.871
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000	249.563.855.765
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri B, 5 tahun	4 Desember 2023	7,75%	537.000.000.000	828.292.870.838
	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri B, 5 tahun	17 Maret 2024	7,25%	159.000.000.000	497.544.916.848
	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2024	8,25%	339.200.000.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021	Seri A, 370 hari	20 Desember 2022	3,75%	1.000.000.000.000	2.993.103.863.168
	Seri B, 3 tahun	10 Desember 2024	5,50%	1.000.000.000.000	
	Seri C, 5 tahun	10 Desember 2026	6,25%	1.000.000.000.000	
Jumlah				7.772.200.000.000	7.760.912.055.490

*Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva yield terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya

Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	8 Juli 2023	18,025%	515.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
Jumlah				842.000.000.000

Medium Term Notes Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri C, 3 tahun	20 Februari 2023	17,94%	322.000.000.000

Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	9,75%	208.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri H, 36 bulan	15 Desember 2023	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahap I Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	27 Oktober 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri A, 3 Tahun	27 Oktober 2023	37,38%	712.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri B,3 Tahun	10 Maret 2024	40,95%	780.000.000.000
Sukuk Mdh IV Tahun 2020	Seri C, 3 Tahun	Juni 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri D, 2 Tahun 11 Bulan	19 Januari 2024	16,17%	308.000.000.000
Jumlah				3.415.000.000.000

Upaya-upaya manajemen untuk menjaga kemampuan keuangan Perseroan antara lain:

- 1) Menjaga tingkat operating *cash flow* (di luar pembiayaan dan angsuran) agar selalu positif
- 2) Menjaga prospek Perseroan agar selalu memiliki tingkat profitabilitas yang memadai untuk melakukan pembayaran bunga dan beban operasional lainnya
- 3) Melakukan pemupukan laba dengan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
- 4) Menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan *primary reserve* dan *secondary reserve* yang telah ditetapkan
- 5) Menyediakan LCU (*Line Credit Unused*) dan melakukan penerbitan surat utang, dalam hal terdapat kekurangan dana untuk membayar pokok efek bersifat utang pada saat jatuh tempo.

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 (“Akta No. 28/2020”), telah dilakukan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp5.200.000.000.000 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor dari semula sebesar Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah).

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Persoran setelah peningkatan modal dasar dan tambahan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta No. 28/2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	2.299.999	1.000.000,00	2.299.999.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	2.299.999	1.000.000,00	2.299.999.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	6.900.000	-	6.900.000.000.000,00	

Tambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) seluruhnya telah diambil bagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan dibuktikan dengan Rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Account 8889898128/PNM 2020 Periode 27 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 ("Akta No. 12/2021"), telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah). Tambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) seluruhnya telah diambil bagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan dibuktikan dengan Rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Account 8889898117/PNM 2020 Tahap II Periode 03 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020. Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 12/2021, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468156 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pelaksanaan pengalihan saham seri B telah dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1		1.000.000,00		0,00003
PT Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk		3.799.999		3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak khusus yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan:

- a. Perubahan Anggaran Dasar;
- b. Perubahan permodalan;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
- e. Permintaan dan pengaksesan data informasi, dan dokumen perusahaan termasuk namun tidak terbatas dalam rangka pelaksanaan kegiatan tata kelola terintegrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Persetujuan pemindahan tangan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
- h. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan presentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
- i. Persetujuan rencana penggunaan laba;
- j. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan RUPS;
- k. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon Dewan Komisaris;

- I. Penetapan dan persetujuan Rencana Kerja Jangka Pendek (RKAP), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis), dan Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) berikut *Key Performance Indikator* (KPI) serta kontrak manajemen.

4. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin usaha antara lain sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperoleh	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku
1.	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-150/NB.2/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	OJK	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya
2.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-24/NB.223/2020 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Kepada PT Permodalan Madani (Persero) tanggal 20 Maret 2020	OJK	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha syariah
3.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (NIB OSS-RBA) No. 0101220005059 tanggal 1 Januari 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 01.061.178.8-093.000 atas nama Perseroan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.061.178.8-093.000 atas nama Perseroan	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih terdaftar sebagai Wajib Pajak
6.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak No. S-31PKP/WPJ.19/KP.0403/2017 tanggal 19 September 2017	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih dikualifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak
7.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-137KT/WPJ.19/KP.0403/2017 tanggal 19 September 2017	Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak	Selama Perseroan masih terdaftar sebagai Wajib Pajak

Perizinan yang dimiliki Perseroan tersebut berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin usaha antara lain sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku
1	PT PNM Investment Management	Izin Usaha Penasihat Investasi	KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019 dikeluarkan oleh OJK	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Usaha Manajer Investasi	KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 dikeluarkan oleh OJK	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Usaha Penasihat Berjangka	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS - RBA	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Izin Operasional /Komersial	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS - RBA	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Nomor Induk Berusaha	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Nomor Pokok Wajib Pajak (Kantor Pusat)	No. 01.760.274.9-093.000 terdaftar sejak 1 April 2012	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.

		Nomor Pokok Wajib Pajak (Kantor Surabaya)	No. 01.760.274.9-611.001 terdaftar sejak 25 April 2012	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. PEM-01055/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 13 April 2012	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
2	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Izin Usaha Modal Ventura	352/KMK.017/2000 tanggal 23 Agustus 2000 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Nomor Induk Berusaha	9120109742736 tanggal 23 Juli 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Nomor Pokok Wajib Pajak	No. 1.061.182.0—51 terdaftar sejak tanggal 1 April 2012	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Surat Keterangan Terdaftar	No. PEM-00187/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 4 April 2021, dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Empat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.
		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. PEM-00393/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 5 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Empat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha.

5. Perjanjian Penting

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	OS 31 Maret 2022	Jatuh Tempo
1	<p>Akta Perjanjian kredit modal kerja <i>Executing</i> Nomor 44 tanggal 19 November 2020 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan diantara PT Bank DKI (“Bank DKI”) dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada Bank DKI terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 serta Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya Perjanjian Kredit dengan Bank DKI</p>	<p>Fasilitas Kredit Fasilitas kredit yang diberikan Bank DKI dengan jumlah pokok sebesar maksimal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)</p> <p>Bunga Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank DKI sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen), tarif suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan Bank DKI. Tarif suku bunga <i>fixed</i> untuk kredit yang sudah dicairkan</p>	Bank DKI	65.044.403.338	25 okt 2022

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	OS 31 Maret 2022	Jatuh Tempo
2	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Winahyu Erwiningsih, S.H., M.H., Notaris di Sleman oleh dan diantara PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (“BPD DIY”) dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada BPD DIY terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan tujuan penggunaan dana untuk modal kerja pembiayaan UMKM yang merupakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan (transaksi dagang berkaitan dengan kegiatan usaha) serta Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya Perjanjian Kredit dengan BPD DIY</p>	<p>Plafond Kredit BPD DIY memberikan kredit kepada Perseroan dengan plafond sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)</p> <p>Bunga Bunga kredit ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang dihitung dari saldo pokok kredit secara efektif <i>floating rate</i>, atas dasar cara perhitungan yang berlaku di BPD DIY dan dibayar setiap bulan</p>	BPD DIY	44.400.647.098	09 Juni 2023
5	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 06 September 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan Bank Nobu</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada Bank Nobu terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dikarenakan dana hasil Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan serta Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya Perjanjian Kredit dengan Bank Nobu</p>	<p>Fasilitas Kredit Bank Nobu memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan berupa Pinjaman Tetap Angsuran untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada Usaha Kecil Menengah melalui ULaMM sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)</p> <p>Bunga Bunga sebesar 9,25% (sembilan koma lima persen) per annum <i>fixed</i> 3 (tiga) tahun dan provisi (sudah termasuk biaya administrasi) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) flat dari plafon</p>	Bank Nobu	16,666.666.667, -	06 September 2022

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	OS 31 Maret 2022	Jatuh Tempo
7	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 9 November 2010 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 40811/GBK/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada BCA terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 serta Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya Perjanjian Kredit dengan BCA</p>	<p>Fasilitas Kredit BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan, yaitu berupa fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional</p> <p>Bunga Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar 7% (tujuh persen) per annum, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).</p>	BCA	12.662.052.300	9 November 2022
8	<p>Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada Bank Mega terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dikarenakan dana hasil Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan serta Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya Perjanjian Kredit dengan Bank Mega</p>	<p>Fasilitas Pinjaman Pemberian fasilitas pinjaman kepada Perseroan dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Fasilitas fixed loan 1, sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar Rupiah) (“Fasilitas Fixed Loan 1”)</p> <p>b. Fasilitas fixed loan 2, sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) (“Fasilitas Fixed Loan 2”)</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman Perseroan wajib menggunakan fasilitas pinjaman:</p> <p>c. Untuk Fasilitas Fixed Loan 1, hanya untuk modal kerja pembiayaan segmen Mekaar.</p> <p>d. Untuk Fasilitas Fixed Loan 2, hanya untuk modal kerja pembiayaan segmen ULaMM.</p> <p>Tingkat Bunga Tingkat bunga untuk setiap tahunnya yaitu sebesar 9,90% (sepuluh koma tujuh lima persen) fix rate per pencairan</p>	Bank Mega	79.166.666.666	<p>a. Untuk Fasilitas Fixed Loan 1 selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan</p> <p>b. Untuk Fasilitas Fixed Loan 2 selama 48 (empat puluh delapan) bulan.</p> <p>16 Nov 2022</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	OS 31 Maret 2022	Jatuh Tempo
9	<p>Perjanjian kredit modal kerja Executing No. 11 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Bank DKI dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada Bank terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 serta Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya Perjanjian Kredit dengan Bank</p>	<p><u>Bentuk dan Jumlah Fasilitas Kredit</u> Bank DKI dengan ini sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja Executing kepada Perseroan untuk Tambahan Modal Kerja untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar dengan limit kredit maksimal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) ("Fasilitas Kredit")</p> <p><u>Sifat Fasilitas Kredit</u> Sifat Fasilitas Kredit adalah Non-Revolving</p>	Bank DKI	374.674.565.982 ,-	21 mei 2024
10	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 5 tanggal 15 April 2021 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada Bank terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan tujuan penggunaan dana untuk modal kerja pembiayaan UMKM yang merupakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan serta Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya Perjanjian Kredit dengan Bank</p>	<p><u>Modal MMQ 2</u></p> <p>a. Penyertaan Perseroan: maksimum sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah). b. Penyertaan Bank Permata: maksimum sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). c. Indikasi Bagi Hasil: setara minimal 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per annum.</p> <p>Ekspetasi bagi hasil Bank Permata dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Tujuan Fasilitas</u> Untuk membiayai modal kerja usaha Perseroan</p>	Bank Permata	404.166.666.666 ,-	18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad termasuk <i>avaibility period</i> 27 Sept 2022

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Ketiga	OS 31 Maret 2022	Jatuh Tempo
12	<p>Akta Perjanjian kredit modal kerja Ekspor No. 30 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan kepada Kreditur terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 serta Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya Perjanjian Kredit dengan Kreditur</p>	<p><u>Ruang Lingkup</u> LPEI menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada Perseroan berupa fasilitas kredit modal kerja Ekspor yang bersifat Non-Revolving dengan Limit Kredit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)</p>	LPEI	160.516.666.672 ,-	30 Sept 2024

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, dalam hal ini Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur pada saat setelah dilaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I.

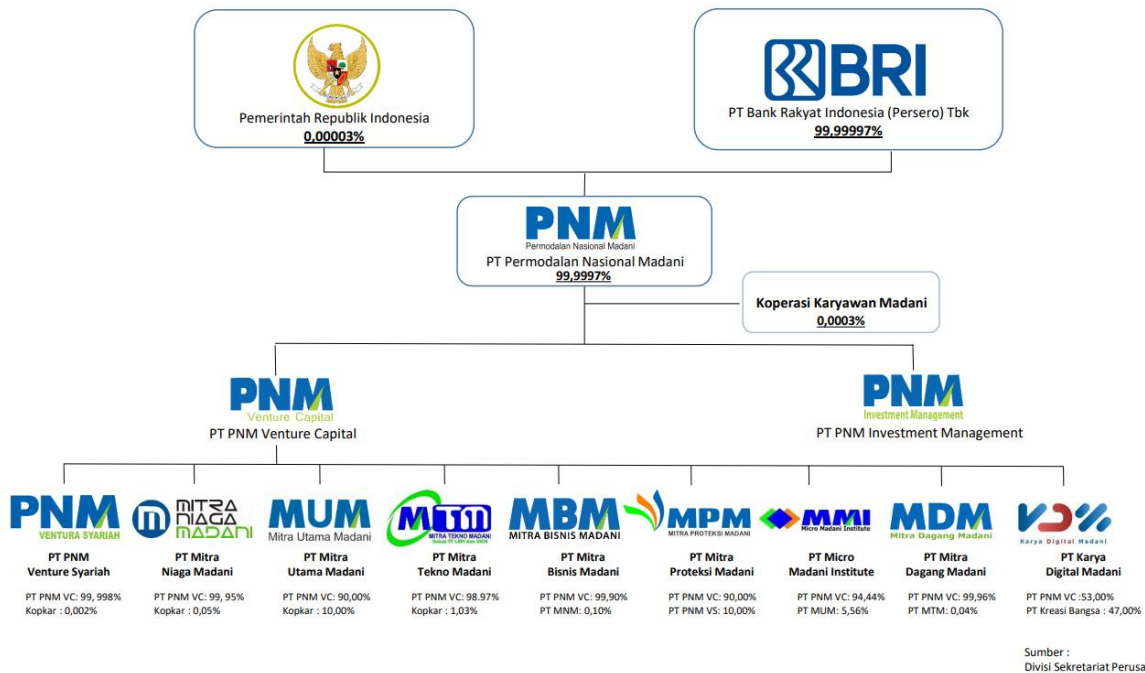
Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan seperti perolehan persetujuan atau pemberitahuan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi dan dapat menghalangi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I.

Sampai dengan Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan yang timbul atas adanya perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku sebagaimana diungkap di atas.

6. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp2.364.978 juta. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan. Nilai aset sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan merupakan aset tetap milik pihak terafiliasi yang terkonsolidasi dengan Perseroan. Seluruh aset tetap milik pihak terafiliasi yang berupa tanah dan bangunan digunakan Perseroan sebagai kantor cabang kegiatan usaha Perseroan.

7. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan Struktur kepemilikan Perseroan



Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2016. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU pada tanggal 9 Februari 2021, pemilik manfaat yang didaftarkan oleh Perseroan adalah Direktur Utama Perseroan atas nama Arief Mulyadi. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018.

Perusahaan Sepengendali Perseroan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2. PT BRI Remittance co Ltd
3. PT Asuransi BRI Life
4. BRI Multifinance Indonesia
5. PT BRI Danareksa Sekuritas
6. PT BRI Ventura Investama
7. PT BRI Asuransi Indonesia
8. PT Pegadaian

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Entitas		
	Perseroan	PNMIM	PNMVC
Ir. Arif Rahman Hakim	KU	-	-
Veronica Colondam	KI	-	-
Meidyah Indreswari	KI	-	-
Parman Nataatmadja	K	-	-
Iwan Taufiq Purwanto	K	-	-
Arief Mulyadi	DU	KU	KU
Ninis Kesuma Adriani	D	-	-
R. Tjatur Herry Priyono	D	K	-
Sunar Basuki	D	-	-
Kindaris	D	-	-

Keterangan:

KU – Komisaris Utama, KI – Komisaris Independen, K – Komisaris, DU – Direktur Utama, D – Direktur

Pengendalian Perseroan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (“PP No. 72 Tahun 2016”) dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau

tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 2 November 2021, pemilik manfaat Perseroan adalah Direktur Utama atas nama Arief Mulyadi. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Arief Mulyadi tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

8. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

RIWAYAT SINGKAT

Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dan beroperasi secara komersial sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 mengubah bentuk badan hukum perseroan menjadi perusahaan perseroan (persero). Pengalihan menjadi persero tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 3A ("Akta Pendirian BRI"). Anggaran dasar BRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian BRI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 ("Akta No. 3/2021").

PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI pada tanggal 30 September 2021 diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Jumlah Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)			
Modal Dasar					
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50			0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.9999.999.950			100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000			100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Negara Republik Indonesia					
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50			0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	86.108.998.709	4.305.449.935.450			56,82
Masyarakat					
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	64.701.720.394	3.235.086.019.700			42,69
Saham Treasuri	750.463.500	37.523.175.000			0,49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.561.182.604	7.578.059.130.200			100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Saham dalam Portepel	148.438.817.396	7.421.940.869.800	

KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Hadiyanto
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen/Wakil Komisaris Utama	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	Agus Riswanto
Komisaris Independen	:	Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	:	Nurmaria Sarosa

Direksi

Direktur Utama	:	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto
Direktur	:	Viviana Dyah Ayu Retno
Direktur	:	Agus Noorsanto
Direktur	:	Supari
Direktur	:	Andrijanto
Direktur	:	Amam Sukriyanto
Direktur	:	Arga Mahanana Nugraha
Direktur	:	Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur	:	Agus Sudiarto
Direktur	:	Handayani
Direktur	:	Agus Winardono

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting BRI yang angka-angkanya diambil dari:

Laporan keuangan konsolidasian BRI dan Perusahaan Anak BRI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (KAP PSS) dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 3 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim.

Laporan posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	1.678.097.734	1.610.065.344
Total Liabilitas	1.386.310.930	1.380.598.462
Total Ekuitas	291.786.804	229.446.882

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Total aset BRI meningkat sebesar 4,23% menjadi Rp1.678.097.734 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp1.610.065.344 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada beberapa akun seperti, Giro pada bank lain, Penyertaan Saham, dan Aset Pajak Tangguhan.

Total liabilitas BRI meningkat sebesar 0,41% menjadi Rp1.386.310.930 juta pada 31 Desember 2021 dari RpRp1.380.598.462 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Liabilitas Segera, Simpanan Nasabah, Liabilitas Akseptasi, dan utang pajak.

Total ekuitas BRI meningkat sebesar 27,15% menjadi Rp291.786.804 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp229.446.882 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan dana right issue yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021 dengan perolehan dana cash dari publik sebesar Rp41 triliun, proses right issue ini dilakukan dalam rangka akuisisi Pegadaian dan PNM ke dalam Ultra *Micro Holding* (Umi Holding).

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	114.094.429	93.584.113
Pendapatan Premi – neto	6.989.783	6.205.775
Pendapatan Operasional lainnya	41.215.807	38.099.755
Laba Operasional	41.144.382	29.778.701
Laba Sebelum Beban Pajak	40.992.065	29.993.406
Laba Periode/Tahun Berjalan	30.755.766	18.660.393

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Laba operasional meningkat sebesar 38,17% menjadi Rp41.144.382 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp29.778.701 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan Pendapatan Bunga dan Syariah, penurunan beban bunga, Peningkatan Pendapatan Premi – neto, dan peningkatan Pendapatan Operasional lainnya.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 64,82% menjadi Rp30.755.766 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp18.660.393 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan Pendapatan Bunga dan Syariah, penurunan beban bunga, Peningkatan Pendapatan Premi – neto, dan peningkatan Pendapatan Operasional lainnya.

9. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Arif Rahman Hakim *)
 Komisaris Independen : Veronica Colondam **)

Komisaris Independen : Meidyah Indreswari **)
Komisaris : Parman Nataatmadja *)
Komisaris : Iwan Taufiq Purwanto ***)

Direksi

Direktur Utama : Arief Mulyadi *)
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan : Ninis Kesuma Adriani *)
Direktur Bisnis : Tjatur H. Priyono *)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Kindaris *)
Direktur Operasional : Sunar Basuki *)

*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/2019.

**) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pertama kali pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/POJK.05/2019 berlaku bagi Perseroan.

***) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019. Penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Iwan Taufiq Purwanto selaku Komisaris belum dilaksanakan. Iwan Taufiq Purwanto akan efektif menjabat sebagai Komisaris Perseroan setelah Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-133/MBU/05/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 78 tanggal 22 Mei 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0212442 tanggal 05 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077393.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2018, sehubungan dengan pengangkatan Meidyah Indreswari sebagai Komisaris Independen dan Veronica Colondam sebagai Komisaris Independen.
- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127520.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama.

- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-101/MBU/04/2022, No. 0009-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 32 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 32/2022"), sehubungan dengan pengangkatan Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Akta No. 32/2022, sedang dalam proses permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan No. 031/NOT/IV/2022 tanggal 19 April 2022, dibuat oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta.
- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-67/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 4 April 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 11 tanggal 06 April 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127991 tanggal 18 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050156.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, sehubungan dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Direktur Keuangan.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 30 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data

perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0444476 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151143.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 September 2021, sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, dan pengalihan tugas R.Tjatur Heri Priyono semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Operasional.

- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 No. 51-DIR/CSC/01.2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madanitentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 14 Januari 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031241 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009328.AH.01.22.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022, sehubungan dengan pengalihan tugas Kindaris semula Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan pengangkatan Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Keuangan dan Operasional.
- i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-102/MBU/04/2022, No. 0010-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 33 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0007622 tanggal 22 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, sehubungan dengan pengangkatan kembali Arief Mulyadi sebagai Direktur Utama, pengangkatan kembali R. Tjatur Heri Priyono sebagai Direktur Bisnis, perubahan nomenklatur jabatan Ninis Kesuma Adriani semula sebagai Direktur Keuangan dan Operasional menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan; dan perubahan nomenklatur jabatan Sunar Basuki semula sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris, telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019. Terhadap Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019, belum dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Dewan Komisaris.

Perseroan telah mengajukan permohonan perolehan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Iwan Taufiq Purwanto kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. S-344/PNM-DIRUT/SPR/VI/22 tanggal 14 Juni 2022 perihal Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Komisaris. Sampai dengan tanggal Prospektus, belum terdapat jadwal dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Direksi dan Dewan Komisaris yang wajib memiliki hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan:

- a. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-32/KDK.05/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Arif Rahman Hakim Selaku Calon Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 28 Desember 2020;
- b. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-96/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Parman Nataatmadja Selaku Calon Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 28 Desember 2020;
- c. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-42/KDK.05/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kindaris Selaku Calon Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 19 Agustus 2021;
- d. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-41/KDK.05/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Sunar Basuki Selaku Calon Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 19 Agustus 2021; dan
- e. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-15/KDK.05/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Ninis Kesuma Adriani Selaku Calon Direktur Keuangan dan Operasional PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 April 2022.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN.

Seluruh Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi Perseroan terkait Penawaran Umum Obligasi atau pencatatannya di Bursa Efek maupun hal yang dapat menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan S2 jurusan Policy Economics di University of Illinois at Urbana Champaign USA pada tahun 1999.

Selama karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengembangan Statistik pada Bagian Pengembangan Statistik dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisis Ekonomi dan Statistik, BAPPENAS (1994 - 2000), Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Lembaga Ekonomi, BAPPENAS (2000 - 2001), Kepala Bagian Analisis Harga dan Lembaga Ekonomi, BAPPENAS (2001 - 2002), Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi, BAPPENAS (2002 - 2008), Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, BAPPENAS (2008), Direktur Pembinaan Sertifikasi Profesi, Direktorat Pengembangan Sertifikasi Profesi - LKPP (2008 - 2012), Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Kerja, LKPP (2013), Sekretaris Jenderal KPU, KPU (2013 - 2020), Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM (2020), hingga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.

Atas dedikasinya, ia dianugerahi penghargaan sebagai Project Change "Procurement Policy for Effective, Efficient and Alcountabel Voting Equipment Through an Electronic Catalog (e-catalog) di Stand Pameran Terbaik I Pelatihan PIM Tingkat I Generasi XXXIII, LAN (2016) dan 9 Pemimpin Tinggi Menengah Teladan, Menpan (2017).



Veronica Colondam
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 50 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mass Communications and Public Relations di American University pada tahun 2000 dan S2 jurusan Social Science di Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines pada tahun 2005.

Beliau mengawali kariernya dengan mendirikan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) di Jakarta dan menjabat sebagai Ketua YCAB dari tahun 1999-sekarang, selain itu beliau juga aktif sebagai dosen tamu dan pembicara di beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.



Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CA, CPMA, CKM
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 65 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau lulus S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau melanjutkan studi Master of Science in Accounting di University of Saskatchewan, Canada pada tahun 1993 dan mendapatkan gelar Ph.D dari Massey University, New Zealand pada tahun 2006.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menduduki jabatan penting lainnya seperti Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (2006-2008), Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Jakarta II (2008-2010), Kepala Pusdiklatwas BPKP (2010-2013), Sekretaris Utama BPKP (2013-2017), dan terakhir menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2017).



Parman Nataatmadja
Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 65 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan melanjutkan pendidikan S2 Finance di State University Of New York, Buffalo, USA pada tahun 1988.

Beliau mengawali karier di BCA New York (1988 - 1989), beliau juga pernah menjabat sebagai Assistan Manager di Chase Manhattan (1989 - 1991), Manager di PT Danareksa (Persero) (1991 - 1993), Komisaris di PT Pakuan Sawangan Golf (1992 - 2000), Direktur di PT Danareksa Finance (1993 -1995), Managing Director di PT Niaga Leasing (1996 - 2000), President Director di PT Niaga International Factors (1996 - 2005), Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005 - 2008), Komisaris PT Mitra Tani 27 (2005 - 2008), Komisaris PT Sarana Maluku Ventura (2005 - 2007), Direktur Utama PT PNM (Persero) (2008 - Februari 2018), Komisaris Utama PT PNM Investmen Management (2008 - Mei 2018), Komisaris Utama PT PNM Venture Capital (2008 - September 2018), Komisaris Utama Mitra Dagang Madani (2017 - September 2018), Staf Khusus V Menteri BUMN (Februari 2018 - Mei 2019), Komisaris Bank BTN (Maret 2018 - Mei 2019), Komisaris Utama Bank BRI Syariah (April 2019 - September 2020), Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020 - Saat ini).



Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 54 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1990, melanjutkan pendidikan S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, dan melanjutkan pendidikan S2 Master of Business Administration di Nanzan University, Jepang pada tahun 2001.

Beliau mengawali karier di BPKP sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Bagian Tata Usaha pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (2006 - 2009), sebagai Kepala Bidang Akuntan Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2009 - 2011), Kepala Bidang Akuntan Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (2011 - 2013), Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Perdagangan pada Deputi Bidang Akuntan Negara (2013 - 2015), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo (2015 - 2016), Kepala Pusat Informasi Pengawasan (2016 - 2017), Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya (2017 - 2019), Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan (2019 - 2020), Komksaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (2020 - 2022).

Direksi

Arief Mulyadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia berusia 54 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Bekasi. Beliau merupakan lulusan S-1 Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993, kemudian mendapatkan gelar S-2 Magister Sains jurusan Kajian Strategi Ketahanan Nasional dari Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Beliau telah berkarier di PNM sejak Perseroan berdiri di tahun 1999. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Account Officer hingga beberapa jabatan seperti Kepala Divisi dan Pimpinan Cabang. Di samping itu, beliau juga pernah ditugaskan menjadi Komisaris di perusahaan afiliasi PNM yaitu BPRS Sakai Sembayan – Lampung (2007-2010), Komisaris PT Mitra Bisnis Madani (2017-2018). Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi di beberapa lembaga penelitian dan mengikuti Officer Development Programme hingga menjadi Kepala Departemen di Bank Nusa International sejak 1994 hingga 1999.



Ninis Kesuma Adriani
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan

Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun, saat ini beliau berdomisili di Jakarta. Beliau mengawali pendidikan S1 Agrikultur, Institute Pertanian Bogor di tahun 1989 dan Master Finance & Marketing, State University of New York pada tahun 2000. Sebelumnya beliau merupakan Account Officer Bank Rakyat Indonesia periode 1990-1997. Beliau melanjutkan karirnya sebagai Microfinance Specialist in BRI Microbanking periode 2000-2006, Senior Manager in Investor Relations Of BRI periode 2006-2011, Assistant Vice President Correspondent Banking Relations Bank Rakyat Indonesia periode 1 Januari 2011 – 6 Januari 2012, 6 Januari 2012 – 1 Juni 2014 beliau menjabat sebagai Vice President International Business Division BRI, 6 Januari 2014 – 1 Juni 2018 menjabat sebagai Head Of Investor Relations BRI, Director Of Finance and Strategic Planning PT Pegadaian (Persero) periode 30 Mei 2018 – 19 April 2021, serta Director Of Finance, Strategic Planning, & Risk Management PT Pegadaian periode 19 April 2021 – 13 Januari 2022.



R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia berusia 58 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Bekasi. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992.

Beliau mulai berkarir di perusahaan afiliasi PNM, yakni PT PNM Investment Management sejak tahun 1999, dimana beliau menjabat sebagai Senior Manager-Kepala Divisi Corporate Finance (1999-2004); Senior Manager-Kepala Divisi Program Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UMKM) (2005-2007), dan Direktur PT PNM Investment Management (2008-2017).



Kindaris
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan alumnus S1 Hukum Perdata dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991, kemudian mendapatkan gelar S2 Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2004.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Executive Vice President Bisnis ULaMM, beliau mengawali karir di PNM sebagai Account Officer (2000-2001), Kasie KP III (2001-2002), Kasie Pengembangan Usaha (2002-2004), Kasie Pengembangan Bisnis (2004), Kasie pada Grup Regional 1 (2004-2005), Kepala Cabang Pekanbaru (2005-2010), Pemimpin Cabang Bandung (2010-2013), Kepala Divisi Pusat Pelatihan (2013-2014), Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan (2014-2015) yang diperbantukan pada Divisi Sumber Daya Manusia (2015), Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan & Afiliasi (2015), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2015-2017) yang diperbantukan pada Divisi Remedial (2015) serta merangkap tugas sebagai Kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2016), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2017-2018), Kepala Divisi Manajemen Risiko, GCG, dan PPL (2018), Executive Vice President Bisnis ULaMM (2018), Executive Vice President Pengawasan dan Legal (2018-2019), dan Executive Vice President ULaMM dan Jasa Manajemen (2019). Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi sebagai Consumer Kredit Head di PT Bank Jaya Internasional (1991-1997), Senior Account Officer di PT Bank Arya Panduarta, Tbk (1998-1999), dan Loan Work Out Officer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2000).



Sunar Basuki
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari University of Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 2007.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Executive Vice President Keuangan dan Operasional sejak 24 Oktober 2018. Sebelum berkarier di PNM, beliau memiliki pengalaman kerja di antaranya sebagai Auditor di Arthur Andersen (1989-1992), Accounting Manager di Zeuscom Indonesia (1992-1994), Finance & Administration Manager di PT Pritho Industrial Corp. Ltd. (1994-2001), Financial Controller di International Air Transportation Association (2001-2005); dan Group Financial Controller – Indonesia di Eye Corporation (2007-2012). Sebelum menjabat sebagai Executive Vice President Keuangan dan Operasional, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis antara lain sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi (2012-2014); Kepala Divisi Perencanaan dan Riset (2014-2017), dan Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan (2017-2018).

10. Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi prioritas utama Perseroan selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PNM No. SK-007/PNM-DIR/III-04 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pencanangan Pembentukan dan Pengembangan Sistem Manajemen PNM (SM PNM) yang memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh perangkat tata laksana manajemen.

Pengembangan SM PNM dititikberatkan pada praktik GCG, konsep dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, *Balanced Scorecard* (BSC) serta perangkat organisasi lainnya dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya perseroan. Dalam menerapkan perspektif BSC, pemangku kepentingan, proses bisnis atau Perseroan, serta pengembangan atau optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka GCG, Perseroan juga terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pendukung bisnis Perseroan, yang disertai perbaikan organisasi untuk memastikan penyediaan pendanaan yang cepat bagi nasabah, produk yang berdaya saing tinggi dan dapat diterima pasar, serta melaksanakan tata kelola Perseroan dengan risiko yang minim dan terkendali. Perseroan juga mengevaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk mengkaji *cost dan benefit*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bukan hanya merupakan kewajiban semata-mata Perseroan sebagai BUMN, melainkan hal tersebut merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan citra perusahaan yang baik. Mengacu ke kriteria penilaian dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, secara umum kondisi penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2020 mencapai predikat kategori “baik”, dengan skor 84,409 dari skor maksimal 100.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- 3) Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, Komisaris Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Ir. Arif Rahman Hakim	12	12
M. Sholeh Amin	12	12
Veronica Colondam	12	12
Meidyah Indreswari	12	12
Parman Nataatmadja	12	12

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

Bentuk Tugas	Lokasi	Tanggal
Kunjungan Bp Rully Indrawan ke PNM ULaMM cabang Kendari	Kendari	15-16 Jan 2021

Bentuk Tugas	Lokasi	Tanggal
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Air Joman, Area Asahan 1, Tapanuli, Sumatera Utara	Tapanuli, Sumut	11-Feb-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Bonang, Area Demak 3, Semarang, Jawa Tengah	Semarang	11-Feb-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Dukupuntang, Area Cirebon 3, Cirebon, Jawa Barat	Cirebon	11-Feb-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Amahai, Area Maluku 2, Manado	Manado	5-Mar-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Anyer, Area Serang, Jawa Barat	Serang	5-Mar-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Muncar, Area Banyuwangi 5, Jawa Timur	Banyuwangi	5-Mar-21
Kunjungan Bpk Parman Nataatmadja ke PNM ULaMM cabang Serang, Jawa Barat	Serang	17-Mar-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Babakan, Area Cirebon 8, Jawa Barat	Cirebon	9-Apr-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Darussalam, Area Bandaaceh, NAD	Banda Aceh	9-Apr-21
Kunjungan Virtual Dekom ke PNM Mekaar cabang Lambu, Area Bima 2, NTB	Bima	9-Apr-21
Kunjungan Komut ke nasabah Ibu Jumiati, Cirebon	Cirebon	1-May-21
Kunjungan Komut ke nasabah Ibu Kurniawati, Cirebon	Cirebon	1-May-21
Kunjungan Komut ke PNM ULaMM cabang Cirebon	Cirebon	1-May-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM Mekaar cabang Pulomerak, Area Cilegon, Serang, Banten	Serang	7-May-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM Mekaar cabang Sungai Rotan, Area Ogan Ilir 1, OKI, Sumatera Selatan	Palembang	7-May-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM Mekaar cabang Tenggarong, Area Samarinda, Kalimantan Selatan	Samarinda	7-May-21
Kunjungan Komut ke PNM ULaMM Unit Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah	Brebes	29-May-21
Kunjungan Komut ke PNM ULaMM Unit Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah	Ajibarang, Jateng	30-May-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM Mekaar cabang Donorojo, Area Pati 2, Jepara, Jawa Tengah	Jepara	4-Jun-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM Mekaar cabang Puncu, Area Kediri 2, Kediri, Jawa Timur	Kediri	4-Jun-21

Bentuk Tugas	Lokasi	Tanggal
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM Mekaar cabang Waway Karya, Area Lampung Selatan 2, Bandar Lampung, Lampung	Lampung	4-Jun-21
Kunjungan Komut ke PNM ULaMM Cabang Malang, Jawa Timur	Malang	10-Jun-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM ULaMM cabang Jakarta	Jakarta	9-Jul-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM ULaMM cabang Solo	Solo	9-Jul-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM ULaMM cabang Padang	Padang	13-Aug-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM ULaMM cabang Palu	Palu	13-Aug-21
Kunjungan Komisaris ke Nasabah PNM Mekaar di Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat	Sentul	06-Sep-21
Kunjungan Komisaris ke kantor cabang PNM Mekaar Cisaat, Sukabumi	Sukabumi	10-Sep-21
Kunjungan Komisaris ke kantor cabang PNM ULaMM Cisaat, Sukabumi	Sukabumi	10-Sep-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM ULaMM cabang Cimahi	Cimahi	24-Sep-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM ULaMM cabang Lamongan	Lamongan	24-Sep-21
Kunjungan Virtual DEKOM ke PNM ULaMM cabang Semarang	Semarang	24-Sep-21
Kunjungan Komut ke PNM ULaMM dan Mekaar Tasikmalaya	Tasikmalaya	15-16 Oct 2021
Kunjungan Komisaris Ke PNM Cabang Yogyakarta	Yogyakarta	07-09 Oct 2021
Kunjungan Komisaris Ke PNM Cabang Sukabumi	Sukabumi	19-20 Oct 2021
Kunjungan Komisaris ke PNM Cabang Serang (ULaMM cab Serang dan Mekaar cab Cipocok Jaya)	Serang	01-Dec-21
Kunjungan Komisaris ke PNM Cabang Jakarta (ULaMM dan Mekaar)	Jakarta	08-Dec-21
Kunjungan Komisaris ke PNM Cabang Bekasi (ULaMM dan Mekaar)	Cikarang	15-Dec-21
Kunjungan Komisaris Utama ke ULaMM Cilimus dan Mekaar Kuningan 2	Cirebon	17-Dec-21

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, yang diterima oleh Dewan Komisaris selama periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.313.585.187.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan Perseroan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasi dari Perseroan, baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-058/PNM-DIR/XII/20, anggota Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagiannya sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Utama bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Direksi, termasuk menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditentukan berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) Satuan Pengawas Intern
- 2) Sekretariat Perusahaan

Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan struktur remunerasi, gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan penjatihan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) Akuntansi Manajemen dan Keuangan
- 2) Rencana Strategi Perusahaan
- 3) Layanan Bisnis
- 4) Treasury

Direktur Bisnis

Direktur Bisnis bertugas untuk memastikan kelangsungan bisnis pembiayaan ULamm dan Mekaar, mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan, baik secara individu maupun kolektif.

Direktur Bisnis secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Bisnis 1
- 2) Pengelolaan Bisnis 1
- 3) Pengelolaan Bisnis 2

- 4) Pengembangan Kapasitas Usaha
- 5) Remedial
- 6) EVP Bisnis 2
- 7) Pengelolaan Bisnis 3
- 8) Pengelolaan Bisnis 4
- 9) Pengelolaan Bisnis 5
- 10) Unit Usaha Syariah

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bertugas untuk melakukan pengembangan-pengembangan yang diperlukan bagi usaha yang dijalankan Perseroan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- 2) Manajemen Risiko
- 3) Kepatuhan
- 4) Legal
- 5) Pengawasan dan Monitoring 1
- 6) Pengawasan dan Monitoring 2

Direktur Operasional

Direktur Kelembagaan bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan kapasitas usaha; pengelolaan jasa manajemen dan kemitraan, baik untuk UMK maupun LKM/S dan berjalannya fungsi sistem TI, baik TI operasi, TI strategis, maupun TI infrastruktur.

Direktur Kelembagaan secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Kelembagaan dan Support Bisnis
- 2) Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur
- 3) Riset, Pengembangan Produk dan Portofolio
- 4) Jasa Manajemen dan Kemitraan
- 5) Unit PKBL
- 6) EVP Human Capital dan Teknologi Informasi
- 7) Human Capital Services and Policy
- 8) Human Capital Development
- 9) Teknologi Informasi

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, Direksi Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Arief Mulyadi	22	22
Ninis Kesuma Adriani	22	22
R. Tjatur Herry Priyono	22	22
Kindaris	22	22
Sunar Basuki	22	22

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, Direksi telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 14 Januari 2021 melalui Zoom
- 2) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 26 Februari 2021 melalui Zoom

- 3) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Maret 2021 melalui Zoom
- 4) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 20 April 2021 melalui Zoom
- 5) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 21 April 2021 melalui Zoom
- 6) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 27 April 2021 melalui Zoom
- 7) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 13 Mei 2021 melalui Zoom
- 8) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 27 Mei 2021 melalui Zoom
- 9) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 3 Juni 2021 melalui Zoom
- 10) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 25 Juni 2021 melalui Zoom
- 11) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juni 2021 melalui Zoom
- 12) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juli 2021 melalui Zoom
- 13) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 Juli 2021 melalui Zoom
- 14) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 19 Agustus 2021 melalui Zoom
- 15) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui Zoom
- 16) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 24 September 2021 melalui Zoom
- 17) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 18 Oktober 2021 melalui Zoom
- 18) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 19 Oktober 2021 melalui Zoom
- 19) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 25 Oktober 2021 melalui Zoom
- 20) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 25 November 2021 melalui Zoom
- 21) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 18 Desember 2021 melalui Zoom
- 22) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 25 Desember 2021 melalui Zoom

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang diikuti anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
Arief Mulyadi	Economic Outlook 2022 : Investment Opportunities In The Post Pandemic World	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Energy Management Series - Stress And Time Management	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Forum Akuntan Manajemen - Adaptive Financial Strategies Towards Pandemic Recovery : A Pathway To Future Agility	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	IAMI Management Accountants Conference 2021: "Management Accountants Against Covid-19 Pandemic: The Role in Catalysing Economic Recovery"	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Sertifikasi Gelar Internasional CRMP	PT. Utama Hanriz Indonesia	2021
	Modern Advanced Excel for Management Accountants	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	One Day Workshop : Understanding Data Science For Management Accountants	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Sosialisasi CPMA IAMI	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Forum Akuntan Manajemen : Sustainability : Fiscal Policy and Benefit for Plastic Waste Industry	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Kartini IAMI : Empowering Future Global Women Leaders	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Advance Priciing Agreement (APA) : Alternatif Manajemen Pajak Terhadap Isu Transfer Pricing Perpajakan	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Business Intelligence and Analytics for Management Accounting	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	ASEAN CPA in Business Community	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021

Direktur	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
	Corporate Reporting Issue in Stock/Equip Investment	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Sertifikasi Gelar CRP & CRA	LSP-PM	2021
	Creating Harmonization Between Academician and Business : Management Accountant Roles (New Direction)	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Forum Akuntan Manajemen	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
Ninis Kesuma Adriani	Increase Corporate Value During Turbulence Time - 2021 Challenges	IAMI/Jakarta	2021
	Corporate Reporting Issues in Stock / Equity Investment	IAMI/Jakarta	2021
	MoU Signing and Interactive Webinar Business Performance Management : How Organisations Define, Assess and Improve the Delivery of Their Business Goals	IAMI/Jakarta	2021
	Management Accountants Against Covid-19 Role in Catalysing Economic Recovery	IAMI/Jakarta	2021
	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	BSMR/Jakarta	2021
R. Tjatur Herry Priyono	Manajemen Risiko Madya dan Utama	PT Utama Hanriz Indonesia	2021
	Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRA)	PT Utama Hanriz Indonesia	2021
	Corporate Reporting Issues in Stock/Equity Investment	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Asean CPA in Business Community	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Business Intelligence and Analytics for Management Accountant	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Alternatif Manajemen Pajak	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Empowering Future Global Women Leader	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Fiscal Policy and Benefit for Plastic Waste	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Understanding Data Science for Managements Accounting	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Modern Advanced Excel for Management Accountant	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Against Pandemic Covid-19	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Adaptive Financial Strategies Towards Pandemic	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Management Series Stress and Time Management	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
	Economic Outlook 2022: Investment Opportunities	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	2021
Kindaris	Sertifikat Kompetensi Bidang Lembaga Keuangan Mikro dengan Kualifikasi Pemimpin Cabang	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2021
	Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Utama / Certified Risk Professional (CRP)	LSP PM	2021
	Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Madya / Certified Risk Associated (CRA)	LSP PM	2021
	Sertifikasi HR Manager	LSP MSDM Kompeten Indonesia ; Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2021
Sunar Basuki	Certified Risk Associate (CRA)	PT Utama Hanriz Indonesia	2021
	Certified Risk Professional (CRP)	PT Utama Hanriz Indonesia	2021

Direktur	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
	Training Program for Certified Risk Associate (CRA)	PT Utama Hanriz Indonesia	2021
	Training Program for Certified Risk Professional (CRP)	PT Utama Hanriz Indonesia	2021
	Sosialisasi Certified Professional Management Accountant Jalur Professional Recognition Program	IAMI	2021

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, yang diterima oleh Direksi selama yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.001.042.556.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("POJK No. 34/POJK.04/2014"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-003/PNM-KOM/VII/2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 4 Juli 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam
 Sekretaris : Henry Yunus Kamang Pangemanan
 Anggota : Arif Rahman Hakim
 Anggota : Parman Nataatmadja

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-001/PNM-KOM/IX/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 7 September 2020, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/POJK.04/2014. Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 dan POJK No. 34/POJK.04/2014.

Uraian mengenai Riwayat hidup Veronica Colondam, Arif Rahman Hakim dan Parman Nataatmadja telah diungkapkan pada Prospektus ini pada Bab VIII, bagian Pengawasan dan Pengurusan halaman 89-92.

Henry Yunus K. Pangemanan

Riwayat kerja:

- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di Perseroan (hingga saat ini)
- Sekretaris Dewan Komisaris di PT Mitra Utama Madani (hingga saat ini)
- Penanggungjawab Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di Perseroan (2018)
- Penanggungjawab Wakil Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di Perseroan (2017-2018)
- Direktur PT Micro Madani Institute (2017)
- *General Manager Industrial and Employee Relation* di PT Bakrie Telecom Tbk (sejak 2006)

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No. PER-05/MBU/2006**”), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021**”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 November 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Meidyah Indreswari
Sekretaris dan Anggota : R. Yudha Praja Kusumah
Anggota : Edy Karim

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-003.a/PNM-KOM/VIII/18 tentang Penetapan Piagam Komite Audit tanggal 1 Agustus 2018, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/POJK.04/2015, serta telah dimuat pada situs web Perseroan dengan link <https://www.pnm.co.id/gcgs>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/POJK.04/2015. Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2006, Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021, dan POJK No. 55/POJK.04/2015.

Uraian mengenai Riwayat hidup Meidyah Indreswari telah diungkapkan pada Prospektus ini pada Bab VIII, bagian Pengawasan dan Pengurusan halaman 89-92.

R. Yudha Praja Kusumah

Warga negara Indonesia, 32 tahun

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran pada tahun 2012.

Riwayat kerja:

- Kepala Sub-bagian Protokol di Kementerian BUMN (2020-sekarang)
- Analis Keuangan di Kementerian BUMN (2019-2020)
- Analis Data di Kementerian BUMN (2015-2019)

Edy Karim

Warga negara Indonesia, 65 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1984 dan gelar Magister di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya pada tahun 2016.

Riwayat kerja:

- Tenaga Ahli Paruh Waktu di Badan Akuntabilitas Publik, DPD RI (2017-sekarang)
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengawasan BPKP (2015-2016)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (2012-2015)
- Direktur Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II BPKP (2011-2012)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (2008-2011)

Piagam Komite Audit dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pelaksanaan tugas Komite Audit dalam kaitannya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan di Perseroan. Piagam Audit bertujuan untuk menjamin terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif dan terwujudnya praktik GCG di Perseroan, yang didasarkan pada prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain namun tidak terbatas pada:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Selama yang berakhir 31 Desember 2021, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Meidyah Indreswari	12	12
R. Yudha Praja Kusumah	12	12
Edy Karim	12	12

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 14 Januari 2021 Pembahasan Kinerja Desember 2020
- 26 Februari 2021 Pembahasan Kinerja Januari 2021
- 31 Maret 2021 Pembahasan Kinerja Februari 2021
- 27 April 2021 Pembahasan Kinerja Maret 2021
- 27 Mei 2021 Pembahasan Kinerja April 2021
- 25 Juni 2021 Pembahasan Kinerja Mei 2021
- 28 Juli 2021 Pembahasan Kinerja Juni 2021
- 19 Agustus 2021 Pembahasan Kinerja Juli 2021
- 24 September 2021 Pembahasan Kinerja Agustus 2021
- 19 Oktober 2021 Pembahasan Kinerja September 2021
- 25 November 2021 Pembahasan Kinerja Oktober 2021
- 25 Desember 2021 Pembahasan Kinerja November 2021

Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("POJK No. 44/POJK.05/2020"), Perseroan telah

membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-011/PNM-DIR/IV/18 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko tanggal 13 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Arief Mulyadi
Sekretaris : Yoke Paramita
Anggota Tetap : Rahfie Syaefulshaaf
Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Holding

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 44/2020.

Uraian mengenai Riwayat hidup Arief Mulyadi telah diungkapkan pada Prospektus ini pada Bab VIII, bagian Pengawasan dan Pengurusan halaman 89-92.

Yoke Paramita

Riwayat kerja:

- Kepala Divisi Manajemen Risiko di Perseroan (hingga saat ini)
- Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar II di Perseroan (2018)
- Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan Mekaar I di Perseroan (2017-2018)
- Wakil Kepala Divisi Operasi dan Bisnis Support di Perseroan (2017)
- Kepala Divisi Bisnis Support Unit Bisnis Mekaar di Perseroan (2016-2017)

Rahfie Syaefulshaaf

Riwayat kerja:

- *Executive Vice President* Pengembangan dan Legal di Perseroan (hingga saat ini)
- *Executive Vice President* ULaMM dan Jasa Manajemen di Perseroan (2018)
- Kepala Divisi Remedial di Perseroan (2018)
- Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan ULaMM I di Perseroan (2017-2018)
- Kepala Divisi Pengelolaan dan Pembiayaan ULaMM II di Perseroan (2017)

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain namun tidak terbatas pada:

- 1) Menetapkan kebijakan dan peraturan yang berlaku universal di seluruh jajaran Perusahaan Induk (*Holding*) dan sebagai bahan acuan bagi Perusahaan/Afiliasi, terutama kebijakan yang berkaitan dengan bisnis dan operasional.
- 2) Menyetujui usulan rancangan kebijakan bisnis dari divisi/unit yang sebelumnya telah dievaluasi oleh divisi yang membawahi unit kerja bidang manajemen risiko berdasarkan aspek-aspek pengelolaan dan pengendalian risiko serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengkaji proposal mengenai aktivitas/produk baru dan menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas/produk baru tersebut melalui hasil review dari divisi yang membawahi unit kerja bidang manajemen risiko.
- 4) Menyusun *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*).
- 5) Memantau kecukupan permodalan perusahaan terhadap *risk exposure*.
- 6) Mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan.
- 7) Mempertimbangkan dan memberikan persetujuan/penolakan terhadap penyimpangan atas pedoman kebijakan yang telah ditetapkan.
- 8) Memantau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan risiko pengelolaan Perseroan berdasarkan laporan dari unit terkait.

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko melekat pada rapat bisnis Perseroan dan keputusan dilakukan secara sirkular.

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

No	Tanggal Register	No. Memo	Perihal
1	13 Januari 2021	M-014/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 001 Pemulihan BWMP Pejabat Kantor Cabang
2	14 Januari 2021	M-015/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 002 Implementasi Sistem LHTK ver 0.1 Pada Kantor Cabang Mekaar dan Mekaar Syariah
3	14 Januari 2021	M-016/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 003 PANTAS BIJAK
4	14 Januari 2021	M-017/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 004 PANTAS BIJAK Syariah
5	19 Januari 2021	M-019/PNM-MRI/I/21	Usulan Penetapan Surat Edaran Nomor SE-005/PNM-DIR/XII/21 Tentang Kebijakan Aplikasi Mekaar Digi Pembiayaan Mekaar/Mekaar Syariah
6	22 Januari 2021	M-022/PNM-MRI/I/21	Review MRI atas M 170 Permohonan Usulan Melakukan Penyaluran Pembiayaan dengan Menggunakan Agunan Kendaraan Roda 4 di Wilayah Kerja Kantor Cabang ULAMM Singaraja
7	22 Januari 2021	M-028/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 007 Pemberian BWMP KKU
8	26 Januari 2021	M-031/PNM-MRI/I/21	Usulan SE 008 Pemberian BWMP
9	2 Februari 2021	M-042/PNM-MRI/II/21	Usulan SE 009 Perubahan Nama Pejabat Yang Diberi BWMP Program Kemitraan
10	9 Februari 2021	M-053/PNM-MRI/II/21	Usulan SK-008/PNM-DIR/II/21 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Program Beasiswa Kepada Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
11	9 Februari 2021	M-054/PNM-MRI/II/21	Usulan SK 009 Pedoman K3
12	10 Februari 2021	M-059/PNM-MRI/II/21	Usulan SE 010 Pemberian BWMP Pejabat Kantor Cabang
13	10 Februari 2021	M-060/PNM-MRI/II/21	Usulan SE 011 Pemberian BWMP KKU Produk PANTAS
14	10 Februari 2021	M-061/PNM-MRI/II/21	Usulan SE 012 Pemberian dan Pemutusan BWMP KKU Produk PANTAS
15	16 Februari 2021	M-074/PNM-MRI/II/21	Reviu atas M-006,Perihal Perubahan di Sistem untuk Jangka Waktu Mekaar Plus Sebagai Syarat Pencairan Produk PANTAS BIJAK
16	23 Februari 2021	M-078/PNM-MRI/II/21	Reviu atas Memo M 034 Deviasi Permanen Agunan Kendaraan Kantor Cabang Denpasar
17	8 Maret 2021	M-090/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 013 Pemberian BWMP KKU Produk PANTAS
18	9 Februari 2021	M-092/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 014 Pemulihan BWMP
19	10 Maret 2021	M-094/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 015 Kebijakan Rescheduling Nasabah Mekaar
20	10 Februari 2021	M-096/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 016 Pemulihan BWMP Pejabat Kantor Cabang
21	10 Maret 2021	M-097/PNM-MRI/III/21	Reviu M-041 Rekomendasi Rencana Pengalihan 46 Data Program Kemitraan dari Eks PT Jamsostek
22	15 Februari 2021	M-101/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 017 Pemberian BWMP Pejabat Kantor Cabang
23	19 Maret 2021	M-107/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 018 Pemberian BWMP KKU Produk ULAMM PANTAS_PANTAS Syariah
24	19 Februari 2021	M-108/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 019 Pemberian BWMPU Pejabat Kantor Cabang
25	23 Maret 2021	M-114/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 020 Kebijakan Rescheduling Nasabah Mekaar Syariah_Mekaar Plus Syariah
26	25 Februari 2021	M-117/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 004 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Produk ULAMM PANTAS Bijak Syariah
27	25 Maret 2021	M-117A/PNM-MRI/III/21	Usulan SK 004 Kebijakan Pemberian Fasilitas Penunjang Kegiatan Bisnis Direksi PT PNM
28	30 Maret 2021	M-123/PNM-MRI/III/21	Usulan SE 021 Pemberian BWMP KKU Produk ULAMM PANTAS_PANTAS Syariah

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli

2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Didin Hafidhuddin
Anggota : Muhammad Syafii Antonio

Didin Hafidhuddin

Riwayat kerja:

- Ketua Umum di Badan Amil Zakat Nasional
- Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Bank BRISyariah
- Guru Besar di Institut Pertanian Bogor
- Direktur Pascasarjana di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor

Muhammad Syafii Antonio

Riwayat kerja:

- Dewan Pengawas Syariah di Perseroan (2004-hingga saat ini)
- *Member* di National Economic Council (2010)
- *Deputy Chairman Advisory Council of Dar Takaful* di Mawarid Finance and Insurance, Dubai (2008-2010)
- Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah di Bank Indonesia (2008)
- Dewan Syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2007-2008)
- *Sharia Advisory Council* di Central Bank of Malaysia (2006-2007)
- Penasihat Direksi di PT Bank Mega Syariah (2001)
- Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri (1999-2001)

Tujuan utama dibentuk DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Untuk mencapai tujuan tersebut, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi atas hal-hal yang menyangkut aspek syariah;
- 2) Sebagai mediator antara Perseroan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perseroan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

Pengangkatan DPS tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-352/DSB-MUI/XI/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Seluruh DPS, telah:

- 1) Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/NB.22/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didin Hafidhuddin Selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
 - b. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-22/NB.22/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Muhammad Syafii Antonio Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

- 2) Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, seluruh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Didin Hafidhuddin.
 - b. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Muhammad Syafii Antonio.

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, DPS telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota DPS sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Didin Hafidhuddin	4	4
Muhammad Syafii Antonio	4	4

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, DPS telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat DPS pada tanggal 10 Maret 2021
- Melaksanakan rapat DPS pada tanggal 15 Juni 2021
- Melaksanakan rapat DPS pada tanggal 23 November 2021
- Melaksanakan rapat DPS pada tanggal 15 Desember 2021

Satuan Pengawasan Internal (Unit Audit Internal)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/POJK.04/2015"), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-003/PNM/DIR/X/2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 18 Oktober 2021, Direksi Perseroan telah mengangkat Siswo Pujono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Fungsi dari SPI adalah sebagai berikut

- 1) Sistem pengendalian intern

Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan:

 - a. Membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
 - b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direviu oleh semua tingkatan manajemen.
 - c. Mengidentifikasi, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - d. Membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas manajemen risiko.
- 2) Penerapan manajemen risiko

SPI membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta berperan aktif melalui rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas manajemen risiko.
- 3) GCG

SPI membantu memberikan *assurance* mengenai penerapan tata Kelola perusahaan dengan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki proses tata Kelola perusahaan.

Dalam menjalankan fungsinya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- 2) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan;
- 3) Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang pembiayaan, operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya baik secara onsite atau audit jarak jauh;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
- 8) Melakukan audit khusus apabila diperlukan atau penugasan lainnya sesuai instruksi Direktur Utama;
- 9) Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil tindak lanjut audit;
- 10) Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perseroan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI serta sumber daya yang memadai;
- 11) Melakukan fungsi mitra kerja pihak pemeriksa eksternal serta pihak lain yang berkepentingan; dan
- 12) Bekerja sama dengan Komite Audit dalam rangka mendukung Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan yang tidak menduplikasi fungsi pengawasan lainnya di dalam Perseroan.

Asset and Liabilities Committee (ALCO)

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk *Asset and Liability Committee (ALCO)* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-008/PNM-DOR/IV/18 tentang Pembentukan Tim *Asset and Liability Committee (ALCO)* dan *Staff Supporting Group (SSG) ALCO – Ad Hoc* tanggal 10 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Anggota	: Seluruh Direksi Tony Wijayanto Kudiyanto Puji Riyanto Wisnandi Habang Endang Nurjani Dicky Fajrian Hersam Sudarisman Yoke Paramita Rahfie Syaefulshaaf
Sekretaris	: Tony Wijayanto
SSG ALCO - <i>Ad Hoc</i>	: Perwakilan dari setiap unit kerja yang ditunjuk

Uraian mengenai Riwayat hidup anggota Direksi telah diungkapkan pada Prospektus ini pada Bab VIII, bagian Pengawasan dan Pengurusan halaman 89-92.

Tony Wijayanto

Riwayat kerja:

- Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan di Perseroan (hingga saat ini)
- Komite Audit di PT PNM VS (hingga saat ini)
- Staf Ahli Komite Audit di PNMIM (hingga saat ini)
- Kepala Divisi Perencanaan, Riset, dan Afiliasi di Perseroan (2017)

- Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan di Perseroan (2015-2017)
- Penanggungjawab Kepala Divisi Keuangan di Perseroan (2014-2015)

Kudiyanto

Riwayat kerja:

- Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis ULaMM I di Perseroan (hingga saat ini)
- Kepala Divisi Pembinaan dan Monitoring Bisnis ULaMM di Perseroan (2019)
- Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan ULaMM di Perseroan (2019)
- Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok di Perseroan (2018)
- Wakil Kepala Divisi II, Penanggungjawab Kepala Divisi di Perseroan (2017)
- Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Mekaar II di Perseroan (sejak 2017)

Puji Riyanto

Riwayat kerja:

- Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis ULaMM II di Perseroan (hingga saat ini)
- Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis ULaMM I di Perseroan (2018)
- Pemimpin Cabang ULaMM Solo di Perseroan (2017-2018)
- Pemimpin Cabang ULaMM Yogyakarta di Perseroan (2015-2017)
- Pemimpin Cabang ULaMM Surabaya di Perseroan (2015)
- Pemimpin Cabang ULaMM Bandung di Perseroan (2013-2015)
- Kepala Divisi Pengelolaan Pembiayaan Mikro I di Perseroan (2013)
- Kepala Divisi Pengelolaan Pembiayaan Mikro II di Perseroan (2012-2013)

Wisnandi Habang

Riwayat kerja:

- Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar I di Perseroan (hingga saat ini).
- Wakil Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis ULaMM II di Perseroan (2018)
- Wakil Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan ULaMM II di Perseroan (2018)
- Wakil Kepala Divisi III Bidang PPL ULaMM dan Support di Perseroan (2018)
- Kepala Bagian Divisi Sumber Daya Manusia di Perseroan (2017-2018)
- Pemimpin Cabang ULaMM Surabaya di Perseroan (2017)

Endang Nurjani

Riwayat kerja:

- Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar II di Perseroan (hingga saat ini)
- Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar I di Perseroan (sejak 2018)
- Wakil Kepala Divisi, Penanggungjawab Kepala Divisi, dan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Mekaar I di Perseroan (2017-2018)
- Senior Spesialis *Team Task Force* Direktur Bisnis I di Perseroan (2017)
- Senior Spesialis Divisi Sumber Daya Manusia di Perseroan (2017)
- *Account Officer* di PT Bank BTPN Syariah (2008).

Dicky Fairian

Riwayat kerja:

- Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar III di Perseroan (hingga saat ini)
- Penanggungjawab Kepala Divisi dan Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan Mekaar II di Perseroan (2018)

- Wakil Kepala Divisi I Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Mekaar I di Perseroan (2017-2018)
- Spesialis *Team Task Force* Direktur Bisnis I di Perseroan (2017)
- Penugasan di PT PNM VS (sejak 2017).
- *Business Manager* di PT Bank BTPN Syariah (2016-2017)
- *Area Sales Manager* di PT Bank BTPN (sejak 2009).

Hersam Sudarisman

- Kepala Divisi Perencanaan Perusahaan di Perseroan (hingga saat ini)
- Kepala Divisi Perencanaan, Riset dan Afiliasi di Perseroan (2019),
- Kepala Divisi Manajemen Risiko dan GCG di Perseroan (2018-2019),
- Wakil Kepala Divisi, Penanggungjawab Kepala Divisi, dan Kepala Divisi Manajemen Risiko, GCG, dan PPL di Perseroan (2018)
- Wakil Kepala Divisi 2 Sumber Daya Manusia di Perseroan (2017-2018)
- Koordinator Divisi dan Wakil Kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Perseroan (2017)

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Penetapan suku bunga, *administration fee* dan *fee base income* lainnya dalam rangka mempertahankan tingkat profitabilitas, pertumbuhan aset yang stabil;
- 2) Menentukan tingkat likuiditas, dalam rangka mempertahankan ketersediaan dana dan menjaga agar alat-alat likuid yang ada sesuai dengan kebutuhan kas di masa depan;
- 3) Menentukan suku bunga dan jangka waktu pembiayaan, dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kesenjangan posisi antara aset dan liabilitas, seerta menata struktur aset dan liabilitas guna mencapai hasil yang maksimal; dan
- 4) Menentukan posisi *foreign exchange*, dalam rangka mengelola *foreign exchange risks*.

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, ALCO telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota ALCO sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Arief Mulyadi	23	23	Sri Indrajaya	23	23
Tjatur H. Priyono	23	23	Ramon Agustus	23	23
M. Q. Gunadi	23	23	Dedy Hartanto	23	23
Anton Fahlevie	23	23	Cut Ria Dewanti	23	23
Noer Fajriansyah	23	23	Prasetyo Heru	23	23
Kindaris	23	23	Hendrina Erning K	23	23
Sunar Basuki	23	23	Rulian B. Askadi	23	23
Errinto Pardede	23	23	Mira Damayanti	23	23
Henry Yunus K.P.	23	23	Nanda Hazra	23	23
Puji Riyanto	23	23	T. Ariffadillah	23	23
Tony Wijayanto	23	23	Farida	23	23
Kudiyanto	23	23	M. Dida Gusrida	23	23
Hersam Sudarisman	23	23	Satria Pujakesuma	23	23
Sutanto	23	23	Ibrahim Salim	23	23
Yoke Paramitha	23	23	Tirta Prasetya	23	23
Wisnandy Habang	23	23	Adhi Prasetyo B.	23	23
Endang Nurjani	23	23	Octo Wibisono	23	23
Dicky Fajrian	23	23	Sri Hardono	23	23
Siswo Pujono	23	23	Husein	23	23
Nono Widayatno	23	23	Agung Pribowo	23	23
Dwi Achirini Meirisa	23	23	Rizky Wisnoentoro	23	23

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2021, ALCO telah melaksanakan tugas sebagai berikut

- Rapat ALCO, tanggal 13 Januari 2021
- Rapat ALCO, tanggal 28 Januari 2021
- Rapat ALCO, tanggal 15 Februari 2021
- Rapat ALCO, tanggal 23 Februari 2021
- Rapat ALCO, tanggal 5 Maret 2021
- Rapat ALCO, tanggal 19 April 2021
- Rapat ALCO, tanggal 6 Mei 2021
- Rapat ALCO, tanggal 20 Mei 2021
- Rapat ALCO, tanggal 7 Juni 2021
- Rapat ALCO, tanggal 22 Juni 2021
- Rapat ALCO, tanggal 19 Juli 2021
- Rapat ALCO, tanggal 28 Juli 2021
- Rapat ALCO, tanggal 29 Juli 2021
- Rapat ALCO, tanggal 19 Agustus 2021
- Rapat ALCO, tanggal 24 September 2021
- Rapat ALCO, tanggal 18 Oktober 2021
- Rapat ALCO, tanggal 19 Oktober 2021
- Rapat ALCO, tanggal 21 Oktober 2021
- Rapat ALCO, tanggal 22 November 2021
- Rapat ALCO, tanggal 1 Desember 2021
- Rapat ALCO, tanggal 20 Desember 2021
- Rapat ALCO, tanggal 23 Desember 2021
- Rapat ALCO, tanggal 24 Desember 2021

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 16 Juli 2021 telah mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Dengan keterangan sebagai berikut:

Ada pun alamat korespondensi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka), Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220
Telp.(021) 2511404
Faks. (021) 2511371
Email: sekper@pnm.co.id

Lalu Dodot Patria Ary Suprianto

Warga negara Indonesia, 49 tahun

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Mataram pada tahun 1995 dan gelar Magister di bidang Pemasaran dari Unika Atmajaya pada tahun 2003.

Riwayat kerja:

- Direktur Utama di PT Micro Madani Institute (2017- 2021)
- Kadiv PPM II di Perseroan (2016-2017)
- Pemimpin Cabang di KC Madiun (2015-2016)
- Pemimpin Cabang di KC Jember (2014-2015)
- Pemimpin Cabang di KC Padang (2013-2014)
- Komisaris di BPR Rizky Barokah (2012-2013)
- PIC Kadiv Kredit Program/LKMS di Perseroan (2012-2013)
- Pemimpin Cabang di KC Pekanbaru (2011-2012)
- Pemimpin Cabang di KC Denpasar (2011)
- Komisaris di BPR Patuh Beramal (2010-2011)
- Direktur Utama di BPR Patuh Beramal (2006-2010)
- RM Grup Pembiayaan Jasa Manajemen Regional I di Perseroan (2004-2006)
- Account Officer di Perseroan (2003-2004)

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
- 4) Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Tidak terdapat program pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan selama tahun 2021.

Pengelolaan Risiko

Perseroan selalu berupaya untuk melakukan mitigasi atas faktor-faktor risiko yang dihadapi sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VI Prospektus ini. Secara garis besar, Perseroan melakukan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun secara *enterprise* antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi.

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Perseroan memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

Enterprise Risk Management (ERM) adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi risiko, pengintegrasian strategi transfer risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perseroan.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga serta pengukuran kinerja bisnis.

Secara lebih spesifik, berikut adalah mitigasi risiko yang diterapkan oleh Perseroan untuk faktor-faktor risiko yang telah dibahas pada Bab VI Prospektus ini:

Risiko kredit

Berikut ini adalah mitigasi risiko kredit yang dilakukan Perseroan:

1) *Prinsip mengenal nasabah*

Untuk mengelola risiko yang mungkin muncul, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya melaksanakan prinsip tersebut dengan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan pendukung.

2) *Kapasitas pembayaran nasabah*

Penerapan analisa kelayakan dari pendapatan atau penghasilan nasabah, sebelum plafon kredit diberikan. Apakah memiliki rekening koran yang aktif, alur kas keluar masuk yang stabil, atau masa lama kerjanya. Dengan begitu dapat memutuskan sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kredit mereka hingga lunas.

3) *Nilai jaminan pembiayaan*

Perseroan akan melihat lebih detail jenis jaminan dan nilai jaminan yang akan diberikan ke calon nasabah. Untuk menilai kemampuan nasabah dalam menyelesaikan angsurannya.

4) *Proses pengukuran tingkat risiko dengan risk scoring system*

Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan *risk scoring system* yang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai risiko kredit secara objektif dan realistis, sehingga menghasilkan skor risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya risiko dan untuk perencanaan dan manajemen portofolio kredit/pembiayaan.

Risiko likuiditas

Perseroan menerapkan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga dan pengelolaan likuiditas, melalui ALCO.

Fungsi ALCO adalah untuk meninjau indikator keuangan utama dan membahas topik pendanaan, meninjau risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko *funding gap*, menetapkan strategi *hedging* untuk mengurangi risiko tersebut, memantau *Net Interest Margin* Perseroan, memantau pemenuhan terhadap kewajiban Perseroan dalam perjanjian kredit, memantau pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengelola neraca secara efisien dengan asumsi atas perubahan ekonomi, peraturan, maupun perubahan lainnya.

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif pendanaan yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis.

Risiko pasar

Berikut ini adalah mitigasi risiko pasar yang dilakukan Perseroan:

- 1) Menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.
- 2) Secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perseroan.
- 3) Mengevaluasi antara lain kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan, analisa pengelolaan *earning* aset dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga *floating* terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan), dan strategi penetapan *pricing* produk.

Risiko operasional

Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan *database* pada dua tempat yang berbeda yaitu di Jl. Lembang dan di Jl. TB. Simatupang. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Perseroan memiliki asuransi aset, *cash in safe* dan *cash in transfer* untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

Perseroan memiliki *Key Risk Indicator* yang dirancang untuk meningkatkan *risk awareness* dan memberikan informasi berguna untuk meminimalkan dan memitigasi risiko operasional.

Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional. Senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah memperhatikan prinsip *four eyes principle*, *segregation of duty* dan penerapan sistem rotasi guna mengurangi potensi *self-dealing* dan penyembunyian dokumen ataupun kemungkinan transaksi *fraud*.

Risiko hukum

Perseroan melakukan kajian ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas *enforceability* dalam perjanjian guna memvalidasi hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Risiko reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemegang kepentingan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko strategi

Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan kajian ulang atas setiap kebijakan dan rencana strategis Perseroan secara periodik dengan melibatkan komite terkait, sehingga penetapan dan penerapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

Risiko kepatuhan

Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati dan selalu memastikan terpenuhinya segala ketentuan terkait, di samping melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Risiko sumber daya manusia

Untuk mengantisipasi risiko SDM, Perseroan selalu memberikan pelatihan agar SDM yang dimiliki selalu memenuhi spesifikasi. Selain itu, Perseroan juga menerapkan sistem *reward and punishment* yang disesuaikan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing karyawan.

Risiko persaingan usaha

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaingnya. Perseroan merupakan satu dari sedikit pelaku pasar yang selain menyediakan pembiayaan juga memberikan pendampingan dan konsultasi usaha kepada sektor UMK, seperti pengembangan kapasitas usaha untuk nasabah-nasabah ULaMM dan Mekaar.

Risiko investasi pada Perusahaan Anak

Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak akan mendukung kinerja Perseroan. Perseroan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan akan mengacu kepada strategi yang sudah ditentukan tersebut.

Risiko perubahan teknologi

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan teknologi terbaru untuk mendukung kegiatannya, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan sehubungan dengan bertambahnya jumlah nasabah Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menanggapi perubahan teknologi akan menyebabkan terhambatnya kegiatan bisnis Perseroan.

11. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan sejumlah 9.183 orang, yang terdiri dari 3.724 karyawan tetap dan 5.459 karyawan kontrak.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing periode/tahun:

Tabel komposisi karyawan menurut status

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Tetap	3.656	3.505
Kontrak	5.422	5.105
Sub Total	9.078	8.610
Perusahaan Anak		
Tetap	68	64
Kontrak	37	34
Sub Total	105	98
Jumlah	9.183	8.708

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Manajemen Puncak	19	23
Manajemen Menengah	351	340
Manajemen Pelaksana	2.110	1.893
Staf Administrasi	1.176	1.249
Sub Total	3656	3505
Perusahaan Anak		
Manajemen Puncak	3	3
Manajemen Menengah	9	9
Manajemen Pelaksana	32	30

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Staf Administrasi	24	22
Sub Total	68	64
Jumlah	3.724	3.569

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
S1/S2/S3	2.375	2.278
D3	504	500
SLTA	777	727
Di bawah SLTA	-	-
Sub Total	3656	3505
Perusahaan Anak		
S1/S2/S3	58	55
D3	7	6
SLTA	3	3
Di bawah SLTA	-	-
Sub Total	68	64
Jumlah	3.724	3.569

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
18 – 25 tahun	57	56
26 – 33 tahun	1.310	1.312
34 – 41 tahun	1.540	1.502
42 – 49 tahun	649	552
> 50 tahun	100	83
Sub total	3656	3505
Perusahaan Anak		
18 – 25 tahun	5	3
26 – 33 tahun	26	25
34 – 41 tahun	13	13
42 – 49 tahun	18	18
> 50 tahun	6	5
Sub Total	68	64
Jumlah	3.724	3.569

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Bisnis	2.015	1.842
Supporting	1.641	1.663
Sub Total	3656	3505
PNMIM		
Bisnis	16	13
Supporting	24	24
Sub Total	40	37
PNMVC		
Bisnis	8	8
Supporting	20	19
Sub Total	28	27
Jumlah	3.724	3.569

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Kantor Pusat	417	405
Aceh	30	30
Ambon	20	20
Balikpapan	19	22
Bandung	63	71
Bangka Belitung	8	6
Banjarmasin	47	46
Banjarnegara	36	34
Banyuwangi	45	46
Bau Bau	26	26
Bekasi	35	34
Blitar	26	29
Bogor	18	22
Bojonegoro	35	36
Cimahi	27	30
Cirebon	52	46
Denpasar	61	60
Depok	20	19
Garut	52	53
Indramayu	26	29
Jakarta	43	40
Jambi	53	48
Jember	64	58
Kabanjahe	40	-
Kaltara	4	4
Karawang	1	1
Kediri	55	56
Kendari	47	48
Lamongan	37	36
Lampung	62	62
Madiun	91	84

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Magelang	42	42
Makassar	78	79
Malang	53	58
Manado	39	40
Mataram	22	23
Medan	97	89
Mojokerto	29	27
Pacitan	28	30
Padang	74	76
Palembang	50	46
Palopo	44	45
Palu	28	30
Pati	48	47
Pekanbaru	54	59
Pematang Siantar	56	50
Pontianak	50	49
Probolinggo	33	38
Purwokerto	43	42
Samarinda	19	19
Semarang	60	60
Serang	24	19
Sidikalang	-	44
Singaraja	17	17
Sintang	21	20
Solo	91	97
Subang	42	43
Sukabumi	28	31
Sidikalang	-	44
Surabaya	78	76
Tangerang	28	28
Tasikmalaya	49	48
Tegal	69	71
Tulungagung	37	35
Wonogiri	42	41
Yogyakarta	80	72
Mekaar 1 - Medan	42	41
Mekaar 2 - Padang	22	17
Mekaar 3 - Palembang	43	30
Mekaar 4 - Jakarta	64	50
Mekaar 5 - Cirebon	29	21
Mekaar 6 - Bandung	38	38
Mekaar 7 - Tasikmalaya	44	35
Mekaar 8 - Yogyakarta	21	20
Mekaar 9 - Semarang	31	23
Mekaar 10 - Solo	7	17
Mekaar 11 - Malang	26	18
Mekaar 12 - Jember	39	26
Mekaar 13 - Surabaya	33	32
Mekaar 14 - Madiun	21	-
Mekaar 15 - Denpasar	35	20
Mekaar 16 - Makassar	17	8
Mekaar 17 - Manado	6	2
Mekaar 18 - Pontianak	5	-
Mekaar 19 - Tegal	20	15
	3.656	3.505

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perusahaan Anak		
IM Kantor Pusat	36	34
IM Surabaya	4	3
VC Kantor Pusat	10	10
VC Bandung	3	3
VC Banjarmasin	1	1
VC Cirebon	1	1
VC Jakarta	1	-
VC Karawang	2	3
VC Kediri	1	1
VC Solo	3	3
VC Surabaya	6	5
	68	64
Jumlah	3.724	3.569

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Karyawan kontrak yang dimiliki Perseroan bukan merupakan karyawan *outsourc*e, melainkan karyawan kontrak yang statusnya akan diubah menjadi karyawan tetap setelah melewati masa waktu tertentu.

Sarana pendidikan dan pelatihan

Sebagai bentuk perhatian Perseroan terhadap perkembangan sumber daya manusia sebagai aset yang berharga bagi kemajuan Perseroan, Perseroan secara rutin mengadakan program pelatihan untuk karyawan sebagai berikut:

1) Internal

Melalui Divisi Pendidikan & Pelatihan, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi karyawan dari kantor pusat hingga karyawan unit ULAMM seperti melalui program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis pembiayaan mikro serta *Program Officer Development Program (ODP)* sebagai kaderisasi karyawan-karyawan baru yang potensial untuk menjadi jajaran manajemen Perseroan kelak.

2) Eksternal

Mengikutsertakan karyawan Perseroan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dengan pihak luar agar kualitas karyawan Perseroan semakin terekspos pada perkembangan terbaru untuk yang berpotensi untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan.

Sarana kesejahteraan

Fasilitas dan sarana kesejahteraan lainnya yang disediakan Perseroan untuk karyawannya antara lain meliputi:

- 1) Tunjangan cuti, sejumlah 1 (satu) bulan gaji pokok untuk setiap tahun kerja dengan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Tunjangan Hari Raya (THR), sejumlah 1 (satu) bulan upah dan pembayarannya dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai ketentuan yang berlaku;

- 3) Tunjangan pengobatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk karyawan dan keluarga yang pelaksanaan dan penggantinya diatur sesuai dengan peraturan Perseroan. Plafon pengobatan rawat jalan adalah sebesar 1 bulan gaji pokok per tahun. Sedangkan pengobatan rawat inap ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Fasilitas dan keuntungan lainnya seperti Jamsostek, program dana pensiun, Pembiayaan Personal Karyawan (P2K), program asuransi kecelakaan dan tunjangan pajak diberikan sesuai dengan ketentuan Perseroan dan mengikuti aturan yang berlaku di Perseroan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan sudah telah dengan kompetensi/kualifikasi karyawan serta sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi.

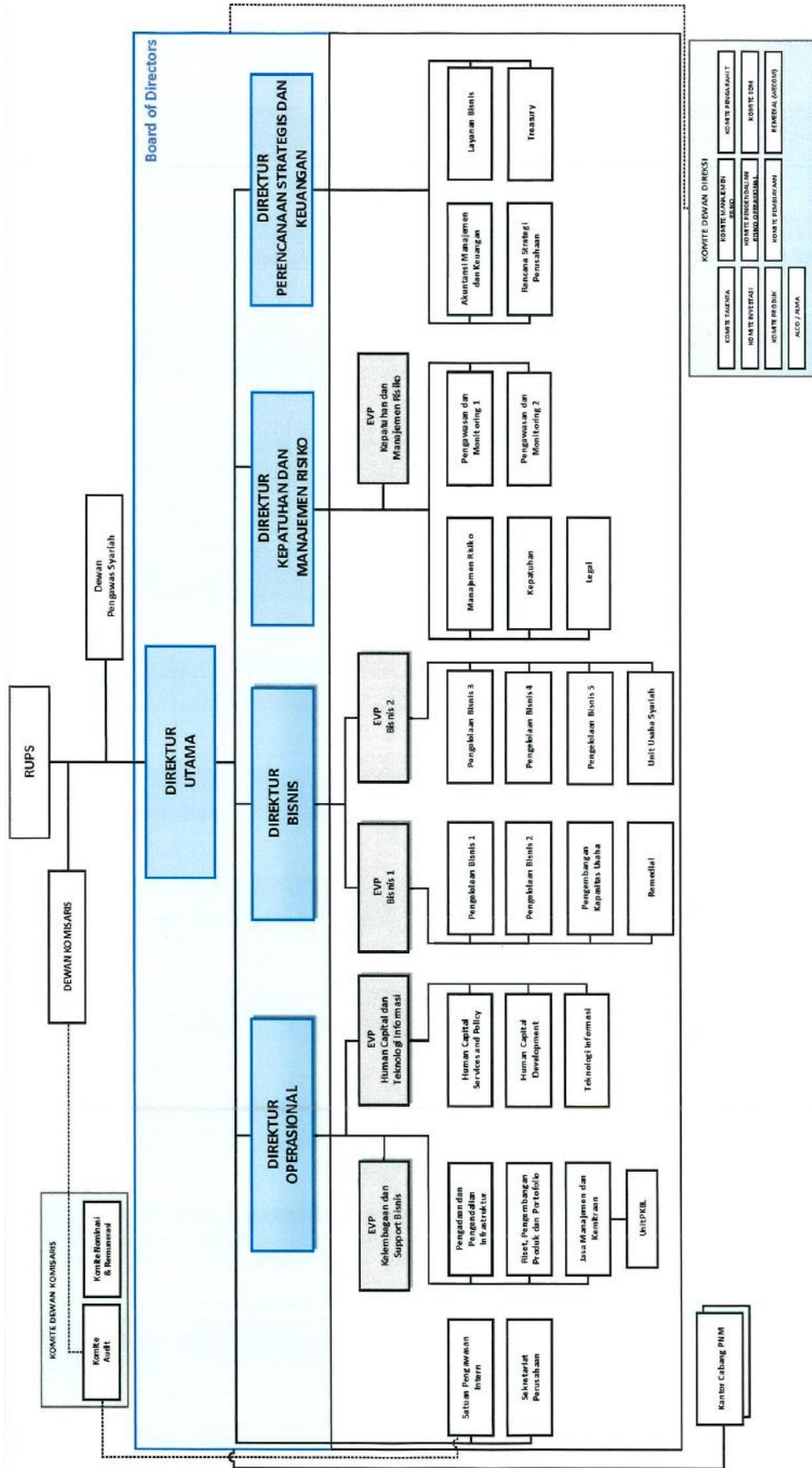
Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus di bidangnya.

Serikat pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

12. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada saat terbitnya Prospektus ini adalah sebagai berikut:



13. Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perkara Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam 90 (sembilan puluh) perkara perdata yang tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
1.	Perkara Perdata No. 96/Pdt.G/2020/PN.Rap tanggal 2 Desember 2020	Ariani sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat
2.	Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2021/PN.MDN tanggal 07 Januari 2021	Windie Larasati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan agar hak tanggungan atas objek jaminan dicabut Yang menjadai alasan dan latar belakang Penggugat melakukan gugatan adalah keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan
3.	Perkara Perdata No. 63/Pdt.Bth/2017/PN. Sim tanggal 4 September 2017	Suharlin sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
4.	Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN Kis tanggal 1 Juli 2019	Erik Irawan sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Diajukan Suami Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
5.	Perkara Perdata No. 35/Pdt. G/2019/PN Kis tanggal 1 Juli 2019	Erik Irawan sebagai Pebanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Medan
6.	Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2021/PN BNA tanggal 29 Oktober 2021	Said Mukarram dan Syarifah Muhira sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat III	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh
7.	Perkara Perdata No. 91/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 12 Oktober 2021	Jaiman sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kisaran
8.	Perkara Perdata No. 84/Pdt.G/2021/PN Rap tanggal 04 November 2021	Iskandar Arihsyah Bantah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rantau Parapat

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
9.	Perkara Perdata No. 451/PDT/2020/PT Bdj jo. 1/Pdt.G/2020/PN.Pwk tanggal 23 Januari 2020	Aceng Suhendi sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Permohonan Restrukturisasi Nasabah tidak dapat diberikan restrukturisasi karena sesuai ketentuan internal pengajuan restrukturisasi baru dapat diberikan setelah angsuran ke 12 (dua belas), dalam hal ini nasabah baru membayar 6 (enam) angsuran dan macet	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
10.	Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 24 Februari 2022	Abdul Rohman sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
11.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2020/PN.Clp tanggal 5 Oktober 2020	Sri Hastuti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) atas Jaminan yang digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cilacap
12.	Perkara Perdata No. 500/Pdt.G/2019/PN.Smg jo. 03/Pdt.G/2019/PN.Unr tanggal 11 Januari 2019	Fatchurrohman sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
13.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G. S/2022/PN Pms tanggal 01 Maret 2022	Perseroan sebagai Penggugat	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar
14.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Kds tanggal 10 Juli 2020	Kaswani sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kudus
15.	Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2019/PN.Kds tanggal 16 Desember 2019	Murni sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
16.	Perkara Perdata No. W2.U-11/1018/HK.02/2/2022 tanggal 6 Oktober 2021	Erlina Junailis sebagai Pebanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Medan
17.	Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2019/PN. Kdl tanggal 19 Februari 2019	Sumali sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
		sebagai Termohon Kasasi II	dilakukan oleh Perseroan	Mahkamah Agung Republik Indonesia
18.	Perkara Perdata No. 246/Pdt/2020/PT PBR tanggal 23 Januari 2020	Busra Alkhairi dan Rohana sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru
19.	Perkara Perdata No. 176/Pdt.Bth/2021/PN Jmb tanggal 29 November 2021	Idham sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan dari saudara nasabah atas lelang Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi
20.	Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2019/PN.Njk jo. 284/PDT/2020/PT SBY tanggal 18 Desember 2019	Soleh Khabibi sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas dasar perbuatan melawan hukum dan klausula baku Perjanjian Kredit Klausul baku yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah sehubungan dengan pemberian kuasa pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
21.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2019/PN.Gpr tanggal 4 April 2019	Hariyanto dan Muntinah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Eks Nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
22.	Perkara Perdata No. 134/Pdt.G/2021/PN PDG tanggal 26 Agustus 2021	Dasril sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Turut Terbanding	Gugatan saudara tiri nasabah atas objek nasabah yang dijaminan di Peerseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Padang
23.	Perkara Perdata No. 311/PDT/2021/PT SBY jo. 27/Pdt.G/2020/PN.Tlg tanggal 6 Juli 2020	Perseroan sebagai Pembanding melawan Supiyani sebagai Terbanding	Gugatan Penjamin terhadap Nasabah dan Perseroan terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai Jaminan Pembiayaan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
24.	Perkara Perdata No. 02/PDT/2022/PT JMB tanggal 2 September 2021	Suharni sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan dan tuntutan Restrukturisasi	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
25.	Perkara Perdata No. 14/Pdt.Bth/2020/PN.Jmr tanggal 29 Januari 2020	Supiyati sebagai Penggugat melawan	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
		Perseroan sebagai Tergugat I		Mahkamah Agung Republik Indonesia
26.	Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 24 Februari 2022	RD Ridwan sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas objek jaminan nasabah atas alasan bahwa objek jaminan diperoleh dari penipuan dan penggelapan Setiap pengikatan hak atas tanah dengan APHT harus mendapat persetujuan dari pemilik jaminan, baik melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi
27.	Perkara Perdata No. 136/Pdt.G/2022/PA Talu tanggal 7 Maret 2022	Irvan M. Nurdin sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Pasaman Barat
28.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Lmg tanggal 11 Agustus 2020	Nanik Hartutik sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Surabaya
29.	Perkara Perdata No. 73/PDT.G/2021/PN Sgl tanggal 8 Desember 2021	Sariyati sebagai Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sungailiat
30.	Perkara Perdata No. 164/PDT.G/2021/PN.TJK tanggal 21 Oktober 2021	Raden Iwan Setiawan sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat III	Gugatan suami nasabah atas objek jaminan nasabah yang dijaminan di Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang
31.	Perkara Perdata No. 274/PDT.G/2021/PN DPK tanggal 9 Januari 2020	Sujoko sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Turut Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Depok
32.	Perkara Perdata No. 767/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt tanggal 29 September 2021	Dr Tjiu Hamidi sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
33.	Perkara Perdata No. 32/Pdt.G/2021/PN Pml tanggal 25 Oktober 2021	Sri Sugiarni sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai TergugatI	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pematang

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			dilakukan oleh Perseroan	
34.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.Bth/2020/PN Pin tanggal 8 Januari 2020	H.P. Mana alias La Mana sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Pembanding III	Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar
35.	Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2022/PN Slw tanggal 4 Januari 2022	Hetti Sugiarti dan Rendi Sugiarto sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga (ahli waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Slawi
36.	Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2022/PN Tgl tanggal 4 Januari 2022	Purwanto sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Dasar gugatan keberatan atas eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tegal
37.	Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2020/PN.Mrs tanggal 23 Januari 2020	Yulianah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan Nasabah yang dijaminan di Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
38.	Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2022/PN Tgl tanggal 31 Januari 2022	Muhammad Yusro sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Baubau
39.	Perkara Perdata No. 3.Pk/Pdt.G/2019/PN.Plp tanggal 7 Juni 2016	A. Irni Sukmasari H sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia
40.	Perkara Perdata No. 2/Pdt/2018/PT.Mks tanggal 13 Oktober 2016	Sri Hastuti sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
41.	Perkara Perdata No. 3/PDT.G/2022/PN BBS tanggal 16 Februari 2022	Aceng Suhendi sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan keberatan Nasabah atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
42.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2020/PN Sbr tanggal 6 Februari 2020	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi	Gugatan istri nasabah atas asuransi kematian dan meminta pengembalian objek jaminan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
43.	Perkara Perdata No. 66/Pdt.G/2020 tanggal 17 November 2020	Herdalena sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan oleh Nasabah yang menggunakan data SLIK OJK saat fasilitas pembiayaannya masih belum lunas. Kondisi saat gugatan diajukan pembiayaan nasabah sudah dilunasi oleh Nasabah dan pihak ketiga yang membeli objek jaminan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
44.	Perkara Perdata No. 2/PDT.G/2022/PN MJL tanggal 9 Mei 2022	Elis Susilawati, Gun Gun Gunawan dan Indra Nurdiana sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan dan tuntutan restrukturisasi	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Majalengka
45.	Perkara Perdata No. 49/PDT.PLW/2021/PN CJR tanggal 1 Oktober 2021	Sugandi sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak ketiga (kakak penjamin) atas objek yang dijaminan nasabah di Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cianjur
46.	Perkara Perdata No. 215/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 2 November 2021	Rusdi sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Perlawanan oleh Nasabah atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pontianak
47.	Perkara Perdata No. 23/Pdt.Bth/2022/PN KLN tanggal 15 Februari 2022	Sunarni sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat III	Gugatan nasabah atas lelang Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klaten
48.	Perkara Perdata No. 83/PDT/2020/PT JMB jo. 1/Pdt.G/2020/PN. Mbn tanggal 23 Januari 2020	Isma Nur Aliyah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Permohonan Restrukturisasi Nasabah tidak dapat diberikan restrukturisasi karena sesuai ketentuan internal pengajuan restrukturisasi baru dapat diberikan setelah angsuran ke 12 (dua belas), dalam hal ini nasabah baru membayar 9 (sembilan) angsuran dan macet	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
49.	Perkara Perdata No. 13/PDT.G/2022/PN KLN tanggal 20 Januari 2022	Suparmi sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat VI	Gugatan Pihak Ketiga atas objek jaminan nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klaten
50.	Perkara Perdata No. 1/PDT.G/2022/PN BBS tanggal 5 Januari 2022	Sodikin sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah jaminan yang dikuasai oleh orang tua penggugat	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Brebes

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
51.	Perkara Perdata No. 581/Pdt.G/2019/PN.Smg jo. 60/Pdt.U/2020/PN.Smg tanggal 26 November 2019	Mercurio Mega Wardana sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan diajukan anak kandung Debitur terkait keberatan terhadap eksekusi lelang	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
52.	Perkara Perdata No. 18/PDT.G/2022/PN BTL tanggal 14 Februari 2022	Tri Setiyarni sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga (ahli waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bantul
53.	Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2021/PN.Bla tanggal 20 Agustus 2021	Kusaini dan Misri sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Blera
54.	Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 29 Maret 2022	Siti Fatimah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah karena tidak diberikannya surat roya kepada nasabah oleh Perseroan Setelah dilakukan penelusuran oleh Perseroan, diketahui bahwa pembiayaan nasabah dibantu pelunasannya oleh pihak ketiga, dimana antara nasabah dan pihak ketiga menyepakati untuk penyerahan jaminan dan surat roya diambil secara bersama-sama, sehingga Perseroan menunggu kesepakatan para pihak	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Magelang
55.	Perkara Perdata No. 70/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 16 Juni 2020	Tugiman sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Nasabah atas keberatan proses lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
56.	Perkara Perdata No. 46/Pdt.Bth/2020/PN Pwd tanggal 28 Desember 2020	Perseroan sebagai Pembanding	Gugatan Pihak Ketiga (ahli waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang
57.	Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2021/PN Kbm tanggal 6 Desember 2021	Agil Ariffianti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kebumen

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			dilakukan oleh Perseroan	
58.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2022/PN Kbm tanggal 8 Februari 2022	Puji Raharjo sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kebumen
59.	Perkara Perdata No. 29/PDT.G/2022/PN UNR tanggal 14 Februari 2022	Ali Anwari sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas keberatan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
60.	Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2021/PN.Mad tanggal 4 Februari 2021	Indah Lutfiati Rahayu sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Nasabah atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Madiun
61.	Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 14 Januari 2021	Muh. Akbar Bin H. Haeruddin sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
62.	Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 7 Januari 2021	Hj. Nuriati Baso dan Sri Hastuti sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga atas Objek Jaminan yang dijamin kepada Nasabah kepada Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar
63.	Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2021	Moh Shodig dan Kusriyah sebagai Pembanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Nasabah atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang
64.	Perkara Perdata No. 251/Pdt.G/2021/PN.Byw tanggal 21 Desember 2021	Subroto sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi
65.	Perkara Perdata No. 9/KAS/2021 tanggal 10 November 2020	Asih Purnomo sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan keberatan nasabah atas penjualan agunan secara sukarela	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
66.	Perkara Perdata No. 19/Pdt.Bth/2022/PN Wng tanggal 20 April 2022	Ramadhan Suryanto dan Sri Maryati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Muara Wonogiri
67.	Perkara Perdata No. 1114/PDT.G/2021/PA KLT tanggal 15 Juli 2021	Perseroan sebagai Penggugat melawan Tugiman sebagai Tergugat	Gugatan wanprestasi terhadap Nasabah ULaMM Syariah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Agama Klaten

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
68.	Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2019/PN Gpr tanggal 26 Maret 2021	Hariyanto dan Muntinah sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
69.	Perkara Perdata No. 140/Pdt.G/2021/PN Blt tanggal 9 Desember 2021	Sutrisno sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Blitar
70.	Perkara Perdata No. 874/PDT/2021/PT SBY tanggal 29 Juli 2021	Perseroan sebagai Pemanding	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan Putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, memutuskan: MENGADILI: DALAM PROVISI: - Menolak Tuntutan Provisi Penggugat. DALAM EKSEPSI: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 2. Menyatakan Penggugat berhak untuk mendapatkan fotokopi berkas-berkas-berkas data dokumen kredit atas nama Penggugat dari Pihak Tergugat; 3. Menyatakan Tergugat wajib untuk memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit atas nama Penggugat kepada Pihak Penggugat; 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat untuk	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			<p>memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit kepada Penggugat berupa fotokopi berkas-berkas data pengikatan jaminan pembiayaan atas Sertipikat Hak Milik No. 243/Gonfosuli antara lain berupa fotokopi berkas-berkas: (i) Sertipikat Hak Tanggungan perikat pertama (SHT – 1) No. 0344/2018; (ii) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 187/2018 tanggal 3 September 2018; (iii) salinan risalah lelang sebagai berita acara lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, berikut fotokopi berkas-berkas data (Surat Permohonan Lelang dan Surat Tugas); serta</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga Rupiah).</p>	
71.	Perkara Ekonomi Syariah No. 10/PDT.G/2022/PN BIL tanggal 8 Februari 2022	Hj. Astuti Hidayati sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan pihak ketiga terhadap objek yang dijaminan nasabah	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bangil
72.	Perkara Perdata No. 21/PDT.G/2022/PN BIt tanggal 22 Maret 2022	Pekih alias Fekeh sebagai Penggugat	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan yang dijaminan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
		melawan Perseroan sebagai Tergugat IV	nasabah kepada Perseroan	Pengadilan Negeri Blitar
73.	Perkara Perdata No. 39/Pdt.g/2021/PN Gsk tanggal 10 Juni 2021	Ahmad Yani dan Siti Marwyah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Gresik
74.	Perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2021/PN Krs tanggal 1 Desember 2021	Jumanten sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Krakasan
75.	Perkara Perdata No. 832/PDT/2020/PT Sby jo. 1/Pdt.G/2020/PN Bjn tanggal 09 Januari 2020	Puji Astutik, Hartinah, dan Guntur sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Turut Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas objek agunan nasabah	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
76.	Perkara Perdata No. 21/PDT.G/2022/PN.MJY tanggal 23 Juni 2022	Ibnu Umar sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseoran	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
77.	Perkara Perdata No. 29/PDT.G/2021/PN PNG tanggal 23 September 2021	Mariyono sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseoran	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Ponorogo
78.	Perkara Perdata No. 37/Pdt/G/2021/PN Stb tanggal 05 Juli 2021	Sukini sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Stabat
79.	Perkara Perdata No. 245/Pdt.G/2021/PN.PSPK tanggal 07 September 2021	Ridwan Kamiel Tanjung Bin Alm Tajuddin sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
80.	Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 8 Juli 2021	Jamaluddin sebagai Pebanding melawan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Mataram

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
81.	Perkara Perdata No. 473/PDT.G/2019/PN MKS tanggal 22 November 2019	Hj. A. Hanaeni sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
82.	Perkara Perdata No. 2/Pdt.Bth/2022/PN PIN tanggal 24 Januari 2022	La Hado sebagai Pengugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan suami dan nasabah atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dihargai terlalu murah	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Pinrang
83.	Perkara Perdata No. 26/PDT.G/2021/PN PIN tanggal 26 November 2021	Rohani Rahman sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Turut Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Pinrang
84.	Perkara Perdata No. 4/PDT.BTH/2022/PN MRS tanggal 13 Januari 2022	Hj A. Hasnaeni sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Turut Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Maros
85.	Perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 28 September 2021	A Wilson sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pemenang Lelang atas objek yang tidak sesuai ukurannya antara Sertipikat Hak Milik dan fisik aslinya	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Raha
86.	Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2022/PN. Pwr tanggal 18 April 2022	Dani Supriyani sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Purworejo
87.	Perkara Perdata No. 16/PDT.G/2021/PN Mar tanggal 13 Oktober 2021	Marma Lasandrang sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Marabahan
88.	Perkara Perdata No. 84/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 2 November 2021	Uswatul Choiriyah sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan melawan hukum sehubungan dengan hilangnya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nasabah yang sedang dalam proses pembebanan Hak Tanggungan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Palu

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
89.	Perkara Perdata No. 174/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 25 Agustus 2021	Margaretha Lisa sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Pontianak
90.	Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2021/PN.NJk tanggal 09 Juli 2021	Yudi Setyawan sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan adik nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan	Perkara ini masih dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Nganjuk

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

14. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi pendapatan kepada Perseroan
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatannya keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,71%
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,38%

A. PT PNM Investment Management (PNMIM)

RIWAYAT SINGKAT

PNMIM menjadi salah satu Perusahaan Anak Perseroan sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 28 September 1999 dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dalam Surat No. S-2242/PM/1999 tanggal 19 November 1999 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C-18749 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 yang laporannya telah

diterima dan dicatat oleh Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dengan No.C-18748 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090516723180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2000, Tambahan No. 2958 (**"Akta PNMIM No. 10/1999"**).

Akta PNMIM No. 10/1999 memuat anggaran dasar PNMIM yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UU PT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Investment Management No. 10 tanggal 9 September 2008 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-84306.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107538.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12477 (**"Akta PNMIM No. 10/2008"**) dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228637 tanggal 20 April 2022, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006681 tanggal 20 April 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 (**"Akta PNMIM No. 28/2022"**).

PNMIM beralamat di Menara Taspen, Lt. 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, dengan nomor telepon (021) 251 1395 dan faksimili (021) 251 1385.

KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan PNMIM sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 2/2020 adalah melakukan usaha di bidang Perusahaan Efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNMIM dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi (66311) yang mencakup kegiatan usaha pihak mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penasihat Investasi (66322) yaitu kegiatan penasihat investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNMIM menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNMIM sesuai dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 28/2022.

Kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PNMIM adalah Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (**"PP No. 5 Tahun 2021"**), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PNMIM tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko rendah dikarenakan penilaian potensi terjadinya bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hampir tidak mungkin terjadi sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh PNMIM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2021, Tambahan No. 026286 (“**Akta PNMIM No. 23/2016**”), yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	109.999	109.999.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	130.000	130.000.000.000	

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisari	: R. Tjatur Herry Priyono
Komisaris Independen	: Bagus Rumbogo

Direksi

Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Direktur	: Ade Santoso Djajanegara
Direktur	: Solahuddin

Berdasarkan Pasal 14 huruf g anggaran dasar PNMIM, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Berdasarkan Pasal 10 huruf f anggaran dasar PNMIM, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 1 Agustus 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0228659 tanggal 3 Agustus 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100730.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 3 Agustus 2018, sehubungan dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Komisaris yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-34/PM.21/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 sehubungan dengan pengangkatan Solahuddin dan Ade Santoso Djajanegara sebagai Direktur yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-413/PM.21/2018 tanggal 20 April 2018.
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM

berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 sehubungan dengan pengangkatan Arief Mulyadi sebagai Komisaris Utama yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-452/PM.21/2018 tanggal 2 Mei 2018

- 4) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018, sehubungan dengan pengangkatan Bambang Siswaji sebagai Direktur Utama dan menetapkan pengukuhan pengangkatan Bambang Siswaji sebagai Direktur Utama yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-907/PM.21/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
- 5) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 9 April 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0184466 tanggal 13 April 2020, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067408.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, sehubungan dengan pengangkatan Bagus Rumbogo sebagai Komisaris Independen yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-294/PM.21/2020 tanggal 18 Maret 2020.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNMIM yang angka-angkanya diambil dari:

Laporan keuangan PNMIM pada 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Laporan keuangan PNMIM pada 31 Desember 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Laporan posisi Keuangan

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2021	2020
Total aset	227.501.495.209	212.557.441.304
Total liabilitas	11.334.814.298	11.230.070.944
Total ekuitas	216.166.680.911	201.327.370.360

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Total aset PNMIM meningkat sebesar 7,03% menjadi Rp 227.501 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp 212.557 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp 6.979 juta atau 26,30%, dan portofolio efek sebesar 11.828 atau 7,21% yang masing-masing ditempatkan pada deposito berjangka dan produk reksa dana baru.

Total liabilitas PNMIM meningkat sebesar 0,93% menjadi Rp 11.335 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp 11.230 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar Rp 946 juta yang dipengaruhi oleh naiknya utang pajak penghasilan badan perusahaan seiring dengan meningkatnya laba kena pajak perusahaan pada tahun 2021.

Total ekuitas PNMIM meningkat sebesar 7,37% menjadi Rp 216.167 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp 201.327 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan sebesar Rp 14.839.

Laporan laba rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan usaha	66.258.005.865	61.256.012.734
Laba usaha	18.595.274.718	16.109.148.274
Laba sebelum pajak penghasilan	18.745.860.825	16.527.186.566
Laba periode/tahun berjalan	14.839.310.551	12.275.862.675
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	14.839.310.551	12.275.862.675

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan usaha PNMIM meningkat sebesar 8,17% menjadi 66.258 juta pada 31 Desember 2021 dari 61.256 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan kegiatan Manajer Investasi sebesar 3.280 juta atau 6,38% karena adanya kenaikan pendapatan dari penerbitan produk reksa dana khususnya reksa dana penyertaan terbatas. Selain itu, adanya peningkatan keuntungan penjualan efek - neto sebesar Rp 1.997 juta atau 22,39% karena adanya kenaikan NAB reksa dana milik perusahaan di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Laba tahun berjalan PNMIM meningkat sebesar 20,88% menjadi Rp 14.839 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp 12.276 juta pada 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan kegiatan manajer investasi dan keuntungan penjualan efek lebih besar dari peningkatan beban.

Pada 31 Desember 2021, kontribusi pendapatan usaha PNMIM terhadap pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar 12,97%

B. PT PNM Venture Capital ("PNM VC")

Riwayat Singkat

PNM VC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/I/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 ("Akta Pendirian PNM VC").

Akta Pendirian PNM VC memuat anggaran dasar PNM VC yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008 dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02 tanggal 10 Desember 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12373 ("Akta PNM VC No. 01/2008") dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 ("Akta PNM VC No. 12/2019").

PNM VC beralamat di Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, dengan nomor telepon (021) 251 1545 dan faksimili (021) 251 1546.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana Anggaran Dasar No 89 Tanggal 27 Desember 2017 Pasal 3 terkait Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha bahwa PNMVC menjalankan usaha modal ventura untuk menjalankan kegiatan usaha Modal Ventura untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNM VC dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas termasuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNM VC dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

- a. Penyertaan saham;
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;
- c. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. Pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas, PNM VC dapat mengelola Dana Ventura.

- Selain usaha Modal Ventura, PNM VC dapat menyelenggarakan kegiatan usaha:

- a. Kegiatan jasa berbasis *fee*; dan/atau
- b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan PNM VC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta PNM VC No. 12/2019, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 364.200 (tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus) saham.
Modal Disetor	: Rp364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham PNM VC adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	364.199	364.199.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	364.200	364.200.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	635.800	635.800.000.000	

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi *)
Komisaris	: Agus Wibowo **)
Komisaris Independen	: Lowong

Direksi

Direktur Utama	: Rahfie Syaefulshaaf *)
Direktur	: Prasetyo Heru *)
Direktur	: Feber Netyantaka *)

*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/2016.

**) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/2016. Komisaris PNM VC atas nama Agus Wibowo telah melaksanakan proses wawancara sehubungan dengan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Maret 2022, namun sampai dengan tanggal Prospektus ini, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Agus Wibowo selaku Komisaris PNM VC belum diterima oleh PNMVC. Agus Wibowo akan efektif menjabat sebagai Komisaris PNM VC setelah Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC yang sedang menjabat saat ini dinyatakan dalam:

- 1) Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1152/NB.11/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Arief Mulyadi Selaku Calon Komisaris Utama PT PNM Venture Capital tanggal 26 Desember 2018.
- 2) Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-704/NB.11/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Feber Netyantaka Selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital.
- 3) Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-163/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rahfie Syaefulshaaf Selaku Calon Direktur Utama PT PNM Venture Capital tanggal 28 Maret 2022.
- 4) Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-164/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Prasetyo Heru Selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital tanggal 28 Maret 2022.
- 5) Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-180/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Agus Wibowo Selaku Calon Komisaris PT PNM Venture Capital tanggal 1 April 2022.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) anggaran dasar PNMVC, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PNMVC.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 48 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0471466 tanggal 10 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196713.AH.01.11.Tahun 2021

- tanggal 10 November 2021, sehubungan dengan pengangkatan (i) Rahfie Syaefulshaaf sebagai Direktur Utama PNMVC; dan (ii) Prasetyo Heru sebagai Direktur PNMVC.
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 09 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0433838 tanggal 4 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132558.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021, sehubungan dengan pengangkatan Agus Wibowo sebagai Komisaris PNMVC.
 - 3) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 35 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0071490 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019078.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019, sehubungan dengan pengalihan penugasan Arief Mulyadi yang semula adalah Komisaris menjadi sebagai Komisaris Utama PNMVC.
 - 4) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 54 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0238886 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115956.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Feber Netyantaka sebagai Direktur PNMVC.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PNM VC belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Komisaris Independen PNM VC sehingga saat ini jabatan Komisaris Independen PNM VC lowong.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNM VC yang angka-angkanya diambil dari:

Laporan keuangan PNMIM pada 31 Desember 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA.

Laporan posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total aset	3.100.502.525.873	2.826.241.611.149
Total liabilitas	2.605.064.531.783	2.396.710.123.241
Total ekuitas	495.437.994.090	429.531.487.908

Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020

Total aset mengalami peningkatan sebesar Rp274.261 juta atau 9,70% dari Rp2.826.242 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.100.503 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan yang cukup signifikan terutama pada kas dan setara kas, piutang lain-lain (pihak berelasi), dan aset tetap dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar Rp200.399 juta atau 56,32% dari Rp355.792 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp556.191 juta pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena penerimaan kas dari aktivitas pendanaan melalui penerbitan sukuk sebesar Rp262.700 juta, utang bank dan lembaga keuangan non-bank sebesar Rp48.233 juta dan pinjaman pihak berelasi sebesar Rp78.993 juta.
- b. Piutang lain-lain – pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar Rp63.544 juta atau 126,66% dari Rp50.168 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp113.712 juta pada tanggal 31 Desember 2021 karena di tahun 2021 seluruh debitor PNM baik Mekaar maupun ULaMM diwajibkan menggunakan asuransi penjamin kredit.

Realisasi total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp208.354 juta atau sebesar 8,69% dari Rp2.396.710 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.605.065 juta pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena:

- Utang bank/lembaga keuangan/medium term notes dan sukuk mengalami peningkatan sebesar Rp66.903 juta atau 4,55% dari Rp1.471.327 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.538.230 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan utang tersebut karena Perusahaan dan entitas anak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan, dan menerbitkan sukuk yang sebagian besar digunakan sebagai pendanaan untuk menyalurkan pembiayaan usaha produktif dan bagi hasil.
- Utang lain-lain pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar Rp79.054 juta atau 1574,88% dari Rp5.020 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp84.074 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan utang lain-lain pihak berelasi tersebut karena adanya penerimaan uang talangan untuk penambahan kantor cabang PNM.
- Utang lain-lain pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar Rp53.765 juta atau 21,26% dari Rp252.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp306.705 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan utang lain-lain pihak ketiga karena meningkatnya dana cadangan nasabah atas angsuran dan denda serta biaya notaris dan asuransi yang dibayar nasabah pada awal pencairan serta meningkatnya uang muka proyek.

Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp65.907 juta atau 15,34% dari Rp429.531 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp495.438 juta pada tanggal 31 Desember 2021 karena peningkatan saldo laba sebesar Rp56.623 juta atau 115,49% dari Rp49.029 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp105.652 juta pada tanggal 31 Desember 2021, karena peningkatan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.

Laporan laba rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan bunga dan syariah	82.670.934.930	104.462.120.896
Laba usaha	- 20.142.803.273	14.134.888.340
Laba sebelum pajak penghasilan	62.774.948.772	30.798.855.868
Laba tahun berjalan	62.887.435.428	30.637.377.538
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	82.670.934.930	104.462.120.896

Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Penyaluran pembiayaan usaha produktif dan bagi hasil tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp10.534 juta atau 1,70% dari Rp621.126 juta tahun 2020 menjadi Rp631.660 juta, sedangkan realisasi pendapatan bunga dan syariah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp21.791 juta atau 20,86% dari Rp104.462 juta tahun 2020 menjadi Rp82.671 juta tahun 2021, karena komposisi penyaluran pembiayaan usaha produktif pada tahun 2021 lebih besar kepada pihak berelasi yang dikonsolidasikan dibandingkan kepada pihak ketiga sehingga terdapat efek eliminasi intercompany yang berdampak pada penurunan pendapatan bunga dan syariah.

Realisasi pendapatan alih daya tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp694.741 juta atau 44,38% dari Rp1.565.384 juta tahun 2020 menjadi Rp2.260.125 juta tahun 2021, karena kenaikan jumlah tenaga kerja alih daya untuk ekspansi PNM, dan adanya kenaikan tarif jasa alih daya.

Laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 1,04% menjadi Rp 31.976 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp 30.798 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya pendapatan alih daya sebesar 44,38% dan pendapatan sewa sebesar 39,13% di tahun 2021.

15. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan didirikan sebagai realisasi komitmen nyata Pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Perseroan menjadi sebuah solusi strategis dalam pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam proses melahirkan pelaku-pelaku UMKMK yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Secara strategis, Perseroan diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKMK.

Perseroan berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKMK dengan menerapkan studi kelayakan yang memadai dalam setiap solusi finansial yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, efektifitas operasional serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan dalam hal pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menerapkan pendekatan solusi non konvensional yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh industri perbankan. Secara strategis, solusi non finansial yang diberikan Perseroan kepada para pelaku UMKMK telah memberikan dampak positif kepada pelaku UMKMK dalam mengelola aspek permodalan usaha mereka. Hal ini memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, berkontribusi terhadap 90% dari pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKMK.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dengan Pemerintah untuk kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

A. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi (KPS/USP), dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan *channeling* melalui LKM/S serta pembiayaan kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp32,15 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui ULaMM diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	6.408.686	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	789.281	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	872	91	s/d	120	Hari
Diragukan	4.321	120	s/d	180	Hari
Macet	144.038	Lebih dari 180			Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 87,23% dan 88,25%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah masing-masing sebesar 2,03% dan 2,66%.

Kualitas pembiayaan ULaMM yang disalurkan Perseroan untuk periode bulan yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan untuk tahun 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektabilitas	31 Desember			
	2021	%	2020	%
1	6.408.686	87,23	6.271.151	88,25
2	789.281	10,74	645.936	9,09
3	872	0,01	1.574	0,02
4	4.325	0,06	3.427	0,05
5	144.038	1,96	183.705	2,59
Jumlah	7.347.202	100,00	7.105.792	100,00

Berikut adalah data *Non Performing Financing* (NPF) untuk ULaMM Syariah pada 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	%
31 Des 2021	531	1.509.846	13.866	0,92
31 Des 2020	529	896.699	15.255	1,70

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita pra-sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta dalam skema konvensional dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 (dua belas) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil mengembangkan pembiayaan Mekaar tanpa mengorbankan nilai NPLnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan Mekaar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp25,94 triliun yang telah tumbuh dari sebesar Rp1,72 miliar saat pertama didirikan serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 31 Desember 2021 yang terus terjaga di kisaran 0,09%.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	25.839.379	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	76.629	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	8.184	61	s/d	90	Hari
Diragukan	11.545	91	s/d	120	Hari
Macet	3.426	Lebih dari 120			Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk Mekaar yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar 99,62% dan 95,81%, serta tingkat NPL pembiayaan Mekaar adalah masing-masing sebesar 0,09% dan 0,13%.

Kualitas pembiayaan Mekaar yang disalurkan Perseroan untuk tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektabilitas	31 Desember			
	2021	%	2020	%
1	25.839.379	99,62	14.745.485	95,81
2	76.629	0,30	624.307	4,06
3	8.184	0,03	1.893	0,01
4	11.545	0,04	8.862	0,06
5	3.426	0,01	9.039	0,06
Jumlah	25.939.163	100,00	15.389.587	100,00

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Pada 31 Desember 2021, Mekaar Syariah telah memiliki 6.496.506 nasabah.

Berikut adalah data NPF untuk Mekaar Syariah pada 31 Desember 2021 dan 2020:

Periode	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	%
31 Des 2021	6.496.506	15.403.525	11.526	0,07
31 Des 2020	3.628.158	7.282.442	10.672	0,15

B. Jasa manajemen

Bidang usaha ini merupakan salah satu layanan non-finansial yang ditawarkan oleh Perseroan dengan tujuan meningkatkan kinerja ULamm dan Mekaar yang dikelola dengan harapan dapat meningkatkan nilainya. Dalam membantu peningkatan kapasitas pelaku UMKMK, kegiatan pembiayaan telah dilakukan secara intensif melalui program PKU dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan konsultasi. Program PKU merupakan bagian dari bisnis Perseroan yang mengintegrasikan bisnis pembiayaan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring. Hal ini merupakan keunggulan sekaligus pembeda Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Program Pendampingan Sentra Usaha (Klasterisasi Industri)

Untuk memaksimalkan manfaat Program PKU, Perseroan juga melaksanakan Program Pendampingan Sentra Usaha atau Klasterisasi Industri sektoral untuk mengembangkan potensi unggulan lokal. Program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki cakupan yang komprehensif. Program ini merupakan program pendampingan intensif kepada sekelompok UMK yang dikelompokkan ke dalam satu industri sejenis atau ke dalam suatu rantai produksi, sehingga memberikan kemudahan kepada pelaku UMK untuk mengembangkan program pemasaran dan *knowledge sharing*. Kegiatan pelatihan mencakup aspek keuangan, aspek produksi dan aspek pemasaran, termasuk penguatan aspek kelembagaan. Setelah melakukan pelatihan, Perseroan juga terus melakukan pendampingan agar pelatihan yang telah diberikan

dapat diterapkan dengan baik. Program Pendampingan Sentra Usaha ini dijalankan dalam suatu periode tertentu antara 6 - 11 bulan.

Pada tahun 2018, Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok telah membentuk 101 klaster baru. Klaster tersebut antara lain klaster petani sayuran, klaster SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit), klaster pembuat dan pedagang makanan kecil, klaster peternak ikan, klaster kerajinan kain tapis Lampung, klaster petani tebu, klaster pengrajin bordir, dan lain-lain.

Perusahaan Anak

A. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 112 (seratus dua belas) reksa dana yang terdiri dari:

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2;
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3;
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5;
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investas 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3; dan
65. 48 (empat puluh delapan) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pada 31 Desember 2021, total dana yang dikelola PNMIM adalah sebesar Rp14,524 triliun.

B. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

16. Strategi Usaha

Kondisi yang dialami pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, juga terpengaruhi oleh kinerja Perseroan secara umum dan kemampuan Perseroan untuk menyalurkan oembiayaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya dijabarkan sebagai berikut.

Aspek bisnis

- 1) Fokus pada pembiayaan ULaMM dengan plafon Rp100 juta ke bawah dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum;
- 2) Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok;
- 3) Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut;
- 4) Selain mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan pendanaan campuran pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan *lending rate* ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk menekan ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan dari perbankan.
- 5) Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat merespon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum bagi nasabah; dan
- 6) Meningkatkan sinergi bisnis antara Perseroan dan Perusahaan Anak.

Aspek operasional

- 1) Mengembangkan sistem TI baru sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan;
- 2) Menjalin sinergi dengan BUMN/Anak Usaha BUMN dalam penyediaan sistem dan infrastruktur digitalisasi *front end* pembiayaan Mekaar;
- 3) Melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis (melalui sejak inisiasi sampai dengan *monitoring*); dan
- 4) Fokus pada pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa dan daerah yang masih belum banyak mendapat akses ke layanan pembiayaan, serta mengoptimalkan unit yang sudah dimiliki sehingga dapat tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Aspek tanggung jawab sosial

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran untuk sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun program ini terbagi dua yakni:

- 1) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (Program Pendanaan UMKM); dan
- 2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana Perseroan menyalurkan dana kepada korban bencana alam, sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian alam serta sarana ibadah.

Aspek sumber daya manusia

- 1) Melakukan rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Perseroan (dan Perusahaan Anak) sebagai penyedia jasa alih daya/*outsourcing*;
- 2) Melakukan pemetaan bakat/*talent mapping* termasuk talenta perempuan dan talenta milenial; dan
- 3) Memberikan pelatihan kepada karyawan Perseroan secara rutin, baik secara tatap muka atau jarak jauh melalui platform *e-learning*.

Strategi di tengah COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, dimana sektor usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu yang paling besar terdampak. Efek yang muncul dari pandemi secara langsung dirasakan oleh nasabah Perseroan, baik nasabah ULaMM, yaitu para pelaku UMK, maupun nasabah Mekaar, antara lain para perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha ultra mikro. Perseroan sangat memahami kondisi

nasabah-nasabahnya dan para pelaku usaha sektor UMK secara umum. Untuk itu, berbagai langkah dan kebijakan telah diambil Perseroan dalam menghadapi kondisi ini.

Untuk membantu meringankan beban nasabahnya, Perseroan telah memberikan relaksasi pembiayaan kepada para nasabah serta turut menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro kepada para nasabah Mekaar. Disisi lain, untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah, Perseroan tetap melakukan penyaluran pembiayaan secara selektif dengan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap kondisi usaha di setiap area layanan Perseroan yang tersebar di 34 provinsi.

Perseroan juga mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi sehingga meskipun ditengah pandemi, Perseroan tetap dapat memberikan layanan yang optimal kepada para nasabahnya. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan pendampingan dan pelatihan usaha, yang diharapkan dapat membantu mereka mengatasi kondisi ekonomi saat ini.

Disisi lain, Perseroan juga melakukan efisiensi dan relokasi anggaran biaya untuk hal-hal yang bersifat lebih penting dalam menjaga keberlangsungan operasional Perseroan. Kebijakan dan langkah yang ditempuh Perseroan ini menunjukkan hasil yang positif, tercerminkan dari laba tahun berjalan yang dibukukan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021.

17. Keunggulan Bersaing

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

Aspek bisnis

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tuntutan kualitas dan kecepatan layanan serta tingkat *lending rate*. Untuk itu, Perseroan menerapkan strategi yang berfokus pada hal-hal yang dapat meningkatkan daya saing Perseroan, yaitu:

- 1) jasa Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok sebagai komplementer pembiayaan; dan
- 2) Kualitas dan kecepatan layanan yang konsisten dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Aspek operasional

Dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia dan TI yang dimiliki, Perseroan mampu menawarkan pelayanan unggulan yang modern dan penuh persaudaraan demi mendukung kemajuan para pelaku UMK di Indonesia melalui:

- 1) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta proses bisnis akan berpengaruh positif terhadap percepatan penyediaan produk dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah; dan
- 2) Pengembangan sistem TI yang dilakukan Perseroan secara *in-house* memudahkan Perseroan dalam melakukan perbaikan sistem apabila terdapat perubahan proses usaha atau fokus bisnis karena tidak tergantung pada vendor.

Aspek tanggung jawab sosial

Nama baik Perseroan terkespos dan lebih dikenal masyarakat berkat program PKBL yang selain dapat menjadi kontribusi Perseroan secara sosial juga dapat memperluas potensi pangsa pasar Perseroan.

Aspek sumber daya manusia

Adanya pemenuhan SDM dan peningkatan kompetensi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Perseroan.

18. Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat kesehatan perusahaan diukur menggunakan metodologi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 4 Juli 1992 dengan rincian sebagai berikut:

Golongan Tingkat Kesehatan	Nilai Bobot Kinerja
Sehat Sekali	>110
Sehat	100-110
Kurang Sehat	90-100
Tidak Sehat	<90

Berdasarkan pasal 5 SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992, penghitungan penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai bobot Perseroan didasarkan atas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam RUPS sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan bisnis Perseroan.
- 2) Rentabilitas dihitung dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata modal yang digunakan (*capital employed*) dalam tahun yang bersangkutan dimana laba sebelum pajak tersebut tidak termasuk laba hasil penjualan aset tetap.
- 3) Modal rata-rata yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah rata-rata aset lancar ditambah dengan aset tetap - bersih termasuk penyertaan, pada awal dan akhir tahun.
- 4) Likuiditas dihitung dari aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar.
- 5) Solvabilitas dihitung dari jumlah aset dibagi jumlah liabilitas.
- 6) Indikator tambahan adalah faktor penilai atas produktivitas perusahaan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha perusahaan.

Berdasarkan metode penilaian tersebut, berikut tingkat kesehatan perusahaan dari Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Keterangan	2021	2020	2019	2018
Tingkat Kesehatan	131,92	143,47	136,34	184,49
Kategori Tingkat Kesehatan	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali

19. Pemasaran

Dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang dan kantor Unit Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia, Perseroan dapat menawarkan akses pembiayaan ke masyarakat rural yang cenderung lebih sulit untuk mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan. Saat ini, dengan jumlah jaringan yang dimiliki, Perseroan mampu melayani lebih dari 4.450 kecamatan seluruh Indonesia. Perseroan, ke depannya berencana untuk terus meningkatkan fokus terhadap pembiayaan mikro langsung melalui ULaMM dengan memperluas layanan jaringan ke area terpencil dan daerah-daerah lain yang belum/tidak mendaftarkan akses ke industri pembiayaan mikro.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya menawarkan dan mendistribusikan jasa dan produknya melalui cabang yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak melakukan penawaran melalui cabang perusahaan lain.

Berikut penjabaran dari jumlah pembiayaan yang disalurkan Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Keterangan	(dalam Ruiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pembiayaan LKMS	84.277.243.874	61.544.574.581
Pembiayaan ULaMM	7347.202.357.595	7.105.792.200.197
Pembiayaan Mekaar	25.939.163.210.195	15.389.586.641.997
Pembiayaan PNM VC	1.717.637.602.262	1.532.919.507.336
Total	35.088.280.413.926	24.089.842.924.112

Berikut penjabaran dari pendapatan bunga dan syariah Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020
Pendapatan LKMS	-	-
Pendapatan ULaMM	1.419.478.612.600	1.309.985.220.238
Pendapatan Mekaar	6.926.854.873.118	41.76.089.073.652
Pendapatan Bagi Hasil BPR/S	-	-
Pendapatan Jasa Manajemen	11.143.593.117	15.696.441.225
Pendapatan Modal Ventura	74.848.332.704	115.038.110.100
Pendapatan Investment Mgmt	54.674.825.894	51.421.228.815
Pendapatan Usaha Lainnya	181.562.138.746	108.027.291.624
Total	8.668.562.376.179	5.776.257.365.655

20. Teknologi Informasi

Arsitektur dan infrastruktur TI yang dimiliki Perseroan bersifat terpusat. Perseroan saat ini memiliki *data center* di Jakarta yang sudah terintegrasi dengan 626 Unit/Outlet ULaMM dan 2.735 Kantor Mekaar di seluruh Indonesia. Strategi Perseroan untuk bidang TI ke depannya adalah untuk melakukan penyempurnaan infrakstruktur TI yang dimiliki guna mendukung kebutuhan bisnis Perseroan sesuai dengan rencana jangka panjang Perseroan. Seiring dengan itu, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan *core system* baru yang diharapkan akan menciptakan proses bisnis yang lebih *seamless* sehingga meningkatkan efektivitas kerja Perseroan.

21. Persaingan Usaha

Pembiayaan kepada UMK pada saat ini menjadi bisnis yang berkembang pesat. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani dan sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam krisis.

Kondisi tersebut tidak asing bagi pesaing Perseroan, yang terefleksikan dari meningkatnya jumlah perusahaan yang mulai menjajaki sektor pembiayaan mikro. Maraknya *peer to peer lending* yang berbasis teknologi saat ini belum merupakan ancaman yang signifikan terhadap usaha Perseroan berhubung basis nasabah Perseroan masih banyak meliputi masyarakat *non-bankable* yang cenderung belum terekspos pada teknologi. Meski begitu, Perseroan sudah mengantisipasi perkembangan pengguna teknologi di Indonesia yang terus meningkat, terutama dipercepat oleh situasi pandemi yang sedang berlangsung. Untuk saat ini, Perseroan masih berfokus untuk mengembangkan jasa pendampingan usaha kecil yang menjadi salah satu keunggulan Perseroan dibandingkan pesaing lainnya. Namun, Perseroan berencana untuk mengembangkan platform digitalnya agar dapat memfasilitasi nasabah-nasabahnya yang mulai beralih ke metode pembiayaan secara *online*.

Pemain pasar yang dapat dikategorikan sebagai pesaing Perseroan antara lain adalah BPR/S dan *venture capital* yang bersaing dengan Perseroan secara langsung. Selain itu Perseroan juga bersaing secara generik dengan perbankan, di antaranya Unit BRI milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Mandiri Mikro milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mega Syariah milik PT Bank Mega Tbk dan juga lembaga-lembaga keuangan mikro dan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu sekitar 15 tahun, Perseroan mampu membangun jaringan ULaMM yang saat ini terdiri dari 626 Unit/Outlet ULaMM dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp7,3 triliun dengan rata-rata produktifitas per unit sebesar Rp11,6 miliar di masing-masing ULaMM. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, pada Desember 2020, pangsa pasar produk ULaMM dalam industri pembiayaan usaha mikro adalah sebesar 0,84% dari total pasar. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan ULaMM untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat plafond maksimal Rp500 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

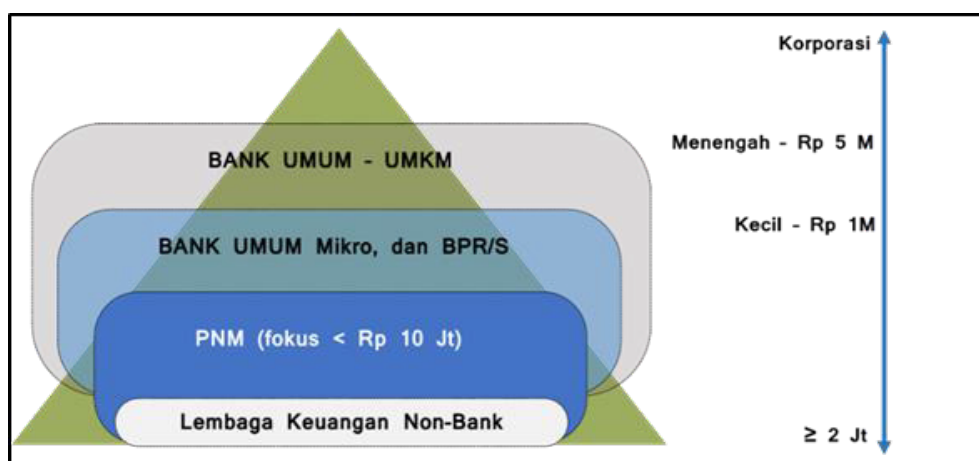
Untuk kegiatan usaha Mekaar, Perseroan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang menawarkan jenis pembiayaan yang serupa. Dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun, Perseroan mampu

membangun jaringan Mekaar yang saat ini terdiri dari 2.735 Kantor Mekaar dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp19,1 triliun. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan Mekaar untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat plafond maksimal Rp5 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Nama Perseroan	Jasa	Pangsa Pasar		Penjualan	
		(Jml Nasabah)	Ket	(Outstanding)	%
PNM	Keuangan	11,508,742	Mikro, Kecil	28,581,807,200,720	55.84%
MBK	Keuangan	1,428,417	Mikro, Kecil	3,286,390,555,000	6.42%
KOMIDA	Keuangan	774,490	Mikro, Kecil	2,044,481,676,413	3.99%
BTPN SYARIAH	Keuangan	4,100,000	Mikro, Kecil	10,618,000,000,000	20.75%
AMARTHA	Keuangan	1,032,563	Mikro, Kecil	5,390,199,230,000	10.53%
BINA ARTHA	Keuangan	417,211	Mikro, Kecil	1,260,000,000,000	2.46%

Posisi daya saing: Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan bank dan non-bank yang fokusnya adalah pembiayaan usaha mikro dan kecil, termasuk di dalamnya adalah BPR/S dan Lembaga Pembiayaan berbasis *group peer lending*.

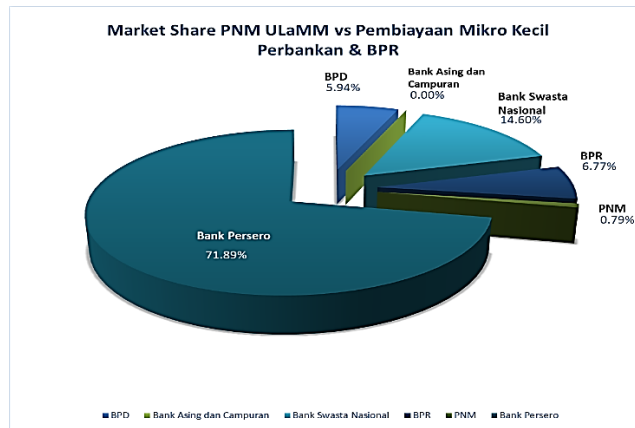
Posisi Produk PNM



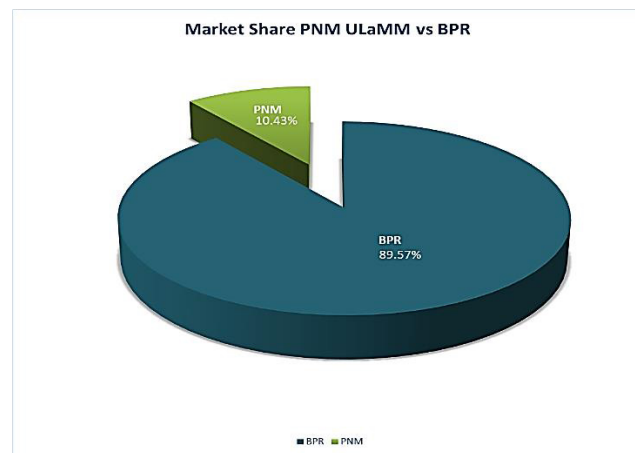
Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan ultra mikro dan mikro. Selain memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMK melalui ULaMM, saat ini melalui PNM Mekaar perusahaan juga menyalurkan pembiayaan ultra mikro dengan plafon mulai Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta untuk PNM Mekaar Reguler dan plafon Rp7 juta sampai dengan Rp25 juta untuk PNM Mekaar Plus yang umumnya berhadapan langsung dengan lembaga keuangan yang menawarkan produk sejenis.

Adapun pangsa pasar PNM ULaMM terhadap pesaing utama BPR adalah 10,43%, sedangkan proporsi pembiayaan ULaMM di pasar mikro secara keseluruhan (Unit Mikro Bank Umum) yaitu 0,79% dari total pembiayaan mikro kecil. Sedangkan proporsi pembiayaan Mekaar di pasar ultra mikro secara keseluruhan yaitu 60,10% dari total pembiayaan ultra mikro.

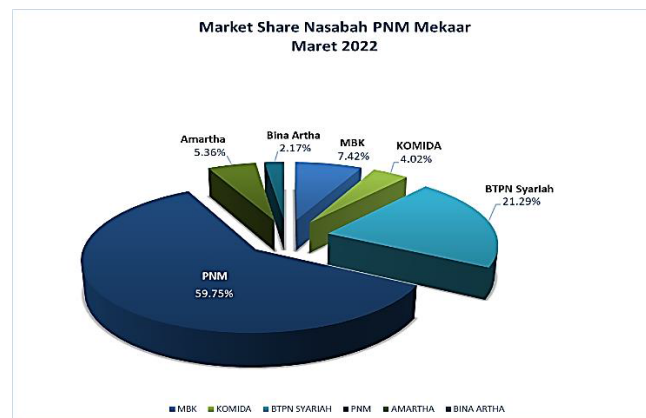
Pangsa Pasar ULaMM



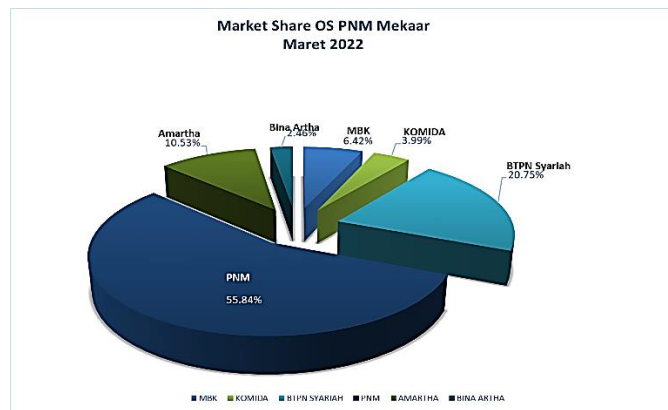
Pangsa Pasar ULaMM terhadap BPR/S



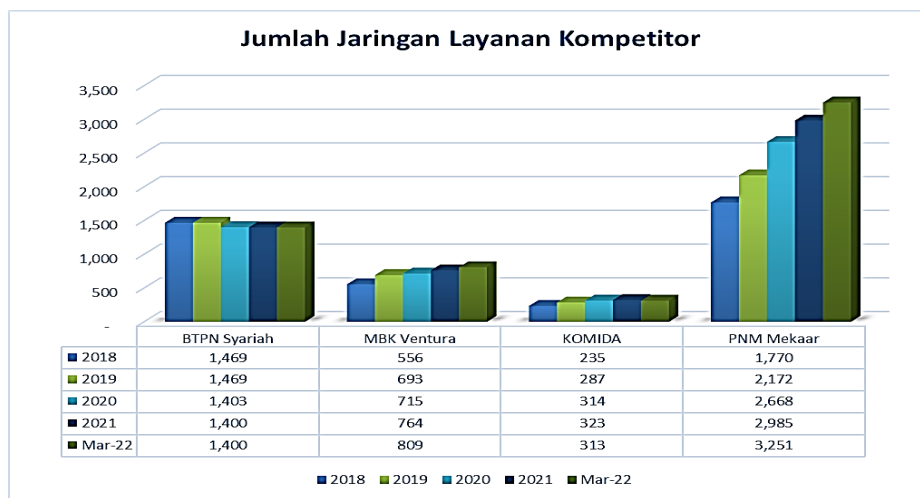
Market Share Nasabah PNM Mekaar terhadap Kompetitor



Market Share Outstanding PNM Mekaar terhadap Kompetitor



Jumlah Jaringan Layanan terhadap Kompetitor



Sumber data: Laman Perusahaan, Survey PNM, diolah.

Berdasarkan data untuk Triwulan I-2022 ini kompetitor yang memiliki jumlah jaringan layanan yang paling banyak adalah BTPN Syariah sebanyak 1.400 jaringan, diikuti oleh MBK Ventura 809 jaringan dan KOMIDA, 313 jaringan. Sementara PNM Mekaar, pada akhir Triwulan I-2022 memiliki jaringan sebanyak 3.251 yang tersebar di 34 provinsi.

22. Tanggung Jawab Sosial

Setiap tahun, seiring dengan peningkatan kinerja bisnis serta eksistensi Perseroan, cakupan kegiatan sosial yang dilakukan juga semakin meluas dan berjalan secara lebih intensif. Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial Perseroan adalah dilaksanakannya Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (“PKBL”).

No	Cabang Pemohon	Program	Tahun Pelaksanaan
1	Aceh	Bantuan baksos untuk pembelian sembako	2021
		Bantuan masker	2021
		Bantuan sosial persatuan tuna netra indonesia (Pertuni)	2021
		Ruang Pintar Aceh	2021
		Santunan anak yatim	2021
2	Ambon	Bantuan bencana alam gempa	2021
		Ruang Pintar Cabang Ambon	2021
3	Atambua	Bantuan nasabah kebakaran	2021

No	Cabang Pemohon	Program	Tahun Pelaksanaan
4	Balikpapan	Bantuan sembako dan vitamin untuk Nasabah Mekaar dan masyarakat sekitar	2021
		Pameran Katumbiri	2021
		Ruang pintar Cabang Balikpapan	2021
5	Bandung	Bantuan Covid-19 Kel Kacapiring	2021
		Bantuan sembako	2021
		Renovasi masjid Al-Muhajirin	2021
		Ruang Pintar Cabang Bandung	2021
6	Banjarmasin	Bantuan bencana banjir Kalsel	2021
		Bantuan korban terdampak banjir dan kebakaran di Banjarmasin	2021
		Pengobatan gratis Kerjasama program ramadhan 1442 H Bersama BAZNAS provinsi Kalsel	2021
		Ruang pintar Banjarmasin	2021
7	Banjarnegara	Bantuan etalase	2021
		Ruang Pintar Banjarnegara	2021
		Ruang Pintar cabang Banjarnegara	2021
8	Banyuwangi	Bantuan gerobak usaha untuk nasabah Mekaar	2021
		Pembuatan gapura untuk desa binaan PNM	2021
		Ruang Pintar Banyuwangi	2021
9	Baubau	Ruang Pintar Baubau	2021
10	Bekasi	Bantuan kepada Nasabah Mekaar terdampak banjir	2021
		Bantuan paket gizi ruang pintar cabang Bekasi	2021
		Bantuan renovasi mushola mimini	2021
		Program ruang pintar Bekasi	2021
		Ruang Pintar (paket buku)	2021
11	Blitar	Bantuan peralatan perpustakaan	2021
		Pemberian vaksin Covid-19 untuk masyarakat Blitar Tahap 1	2021
		Pemberian vaksin Covid-19 untuk masyarakat Blitar Tahap 2	2021
		Ruang Pintar	2021
12	Bogor	Bantuan pembangunan MCK di lokasi ruang pintar	2021
		Ruang Pintar Cabang Bogor	2021
		Bantuan pondok pesantren Tahfidz Tanbihul Ghofilin	2021
13	Bogor Tengah	Bantuan nasabah kebakaran	2021
14	Cimahi	Ruang Pintar Cimahi	2021
15	Cirebon	Bantuan bank sampah (desa binaan Cirebon)	2021
		Perpanjangan ruang pintar	2021
		Ruang Pintar Cabang Cirebon	2021
		Ruang Pintar titik ke-2	2021
16	Denpasar	Penanaman mangrove serangkaian HUT PT PNM ke 22	2021
		Program bantuan paket sembako untuk nasabah mekaar terdampak pandemi Covid 19	2021
		Ruang Pintar Cabang Denpasar	2021
17	Depok	Bantuan alat usaha untuk UMKM	2021

No	Cabang Pemohon	Program	Tahun Pelaksanaan
18	Garut	Bantuan korban terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang	2021
		Bantuan korban terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Sukaresmi dan Sukawening	2021
		Desa Binaan Garut	2021
		Ruang Pintar Cabang Garut	2021
19	Indramayu	Bantuan banjir di Indramayu Barat	2021
		Ruang Pintar Cabang Indramayu	2021
		Ruang Pintar Indramayu	2021
20	Jakarta	Bakti sosial barisan muda Kosgoro 1442 H	2021
		Bakti sosial gema ramadhan 1442 H	2021
		Bantuan pembagian takjil dan buka puasa bersama kepada masyarakat Jakarta Utara	2021
		Bantuan pembangunan gedung olahraga Dojo Serbaguna INKANAS	2021
		Paket gizi, honorer dan sumbangan buku untuk ruang pintar Cilincing	2021
		Pembagian sembako kepada Nasabah ULamm dan Mekaar dan masyarakat sekitar kantor Cabang yang terdampak bencana banjir di daerah DKI Jakarta	2021
		Program ruang pintar Jakarta Utara	2021
		Ruang Pintar Cabang Jakarta	2021
		Santunan anak yatim dan duafa	2021
21	Jambi	Bantuan tabung oksigen untuk RS	2021
		Ruang Pintar Jambi	2021
22	Jember	Bantuan alat usaha untuk desa binaan PNM cabang Jember	2021
		Bantuan Bencana Semeru	2021
		Bantuan kepada Nasabah Mekaar terdampak banjir	2021
		Ruang Pintar Al Bahriya	2021
23	JML Pusat	Bantuan musibah kebakaran nasabah Mekaar	2021
		Bantuan pendidikan beasiswa untuk karyawan PNM yang merupakan dari keluarga sejahtera	2021
		Bantuan peralatan kasur, dll untuk Ruang Pintar Cabang Bekasi dan pembuatan 51 Figura Ruang Pintar	2021
		Bantuan sembako untuk OB, security dan Cleaning Service	2021
		Bantuan sembako untuk warga sekitar PNM	2021
		Belajar seasik bermain	2021
		Kolaborasi penanaman 10.000 pohon mangrove di hari menanam nasional	2021
		MEA 2021 Entrepreneur Class	2021
		Pembelian 51 figura tulisan KBUMn untuk ruang pintar	2021
		Pemberdayaan desa akuakultur di Sumedang	2021
		Pengolahan sampah di Bantar Gebang	2021
		Program vaksinasi covid-19 untuk karyawan PNM	2021
Ruang Pintar Bilmana	2021		

No	Cabang Pemohon	Program	Tahun Pelaksanaan
		Ruang pintar PNM Cilincing	2021
		MEA 2021 Entrepreneur Competition	2021
24	Kaliwates	Bantuan Nasabah Banjir	2021
25	Karangreja	Bantuan nasabah kebakaran	2021
26	Kediri	Pemberian bantuan kepada Nasabah Mekaar dan ULaMM terdampak banjir dan tanah Longsor	2021
		Ruang Pintar Cabang Kediri	2021
		Ruang pintar kediri	2021
27	Kendari	Bantuan pembangunan MCK di lokasi ruang pintar	2021
		Ruang pintar Kendari	2021
		Ruang Pintar Kendari titik ke 2	2021
28	Kota Timur	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
		Bantuan nasabah kebakaran	2021
29	Lamongan	Ruang Pintar Cabang Lamongan	2021
		Santunan kepada 50 ibu-ibu difabel	2021
30	Lampung	Bantuan beasiswa	2021
		Bantuan gerobak dagang UMKM	2021
		Ruang pintar Cabang Lampung	2021
31	Madiun	Bantuan sarana lingkungan umum (lapak UMKM)	2021
		Bantuan Sewa Rest Area KM 597 B Ngawi Kertosono	2021
		Paket Masker dan desinfektan	2021
		Ruang Pintar Cabang Madiun	2021
		Ruang Pintar Madiun	2021
32	Magelang	Ruang Pintar Magelang	2021
		Santunan anak yatim	2021
33	Makassar	Bantuan bencana banjir badang	2021
		Bantuan bencana Gempa Mamuju	2021
		Bantuan berupa smart TV sebagai saran belajar mengajar dan penilaian dalam beberapa kelas yang beraplikasi E-learning	2021
		Bantuan nasabah kebakaran	2021
		Bantuan pembangunan masjid Arrayan	2021
		Ruang Pintar Makassar	2021
34	Malang	Bantuan bencana banjir bandang Cabang Malang	2021
		Bantuan Bencana Semeru	2021
		Bantuan santunan untuk anak yatim di Panti Asuhan Al-Husna	2021
		Bantuan sembako kepada Nasabah Mekaar Cabang Ampelgading, Dampit 1, Dampit 2, Pronojiwo dan Tirtoyudo	2021
		Ruang pintar Cabang Malang	2021
35	Manado	Bantuan sembako untuk anak yatim	2021
		Ruang pintar Cabang Manado	2021
36	Mataram	Aksi tanggap PNM peduli berikan bantuan kepada Nasabah Mekaar korban banjir di wilayah NTT dan NTB	2021
		Bantuan alat angkut sampah di Bima	2021

No	Cabang Pemohon	Program	Tahun Pelaksanaan
		Bantuan bencana banjir di NTB	2021
		Bantuan paket gizi ruang pintar di Maros	2021
		Bantuan santunan anak yatim dan sembako ibu-ibu Prasejahtera	2021
		Program Sinergi BL Pendidikan dan Kesehatan dengan ITDC	2021
		Sarana bantuan air bersih tandon air	2021
		Sponsorship Internasional World Superbike di Mandalika	2021
37	Medan	Bantuan khitanan massal	2021
		Pembangunan aula belajar pembebasan buta aksara Al-quran	2021
		Ruang Pintar Cabang Medan	2021
38	Mekaar Dewantara	Bantuan musibah kebakaran nasabah Mekaar	2021
39	Mekaar Bajeng Barat	Bantuan nasabah kebakaran	2021
40	Mekaar Biang Pidie	Bantuan nasabah kebakaran	2021
41	Mekaar Cabang Lahat	Bantuan Musibah Kebakaran (1 NOA)	2021
42	Mekaar Cabang Sukaluyu	Bantuan musibah kebakaran nasabah Mekaar	2021
43	Mekaar Cempaka Mulya	Bantuan korban longsor Nasabah Mekaar (32 NoA)	2021
44	Mekaar Cipongkor Region Subang	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
45	Mekaar Cisolok	Bantuan musibah kebakaran nasabah Mekaar	2021
46	Mekaar Galesong	Bantuan musibah kebakaran nasabah Mekaar	2021
47	Mekaar Kluet Utara, Aceh Selatan	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
48	Mekaar Mamajang	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
49	Mekaar Mamuju	Bantuan musibah gempa bumi	2021
50	Mekaar Medan Selayang	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
51	Mekaar Pademangan	Bantuan banjir Pademangan	2021
52	Mekaar Pangandaran	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
53	Mekaar Sungai Raya	Bantuan nasabah kebakaran	2021
54	Mekaar Tamalete	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
55	Mekaar Tamansari Bogor	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
56	Mekaar Tambora 2 dan Taman Sari	Bantuan Musibah Kebakaran	2021
57	Mekaar Tasifeto Timur	Bantuan musibah kebakaran nasabah Mekaar	2021
58	Moh Toha	Bantuan Musibah Kebakaran	2021

No	Cabang Pemohon	Program	Tahun Pelaksanaan
59	Mojokerto	Bantuan nasabah Mekaar dan ULaMM terdampak Banjir	2021
		Perpanjangan ruang pintar	2021
		Ruang Pintar Cabang Mojokerto	2021
60	Pacitan	Pembagian 100 paket sembako untuk warga tidak mampu	2021
		Ruang Pintar cabang Pacitan	2021
61	Padang	Pembuatan MCK di lokasi ruang pintar	2021
		Ruang Pintar Cabang Padang	2021
62	Palembang	Bantuan alat produksi usaha berupa mesin pemipil jagung dan alat cetak batu bata	2021
		Pameran Bazaar Klaster Mantriku	2021
		Pameran Sriwijaya Expo 2021	2021
		Renovasi tempat ibadah	2021
		Ruang Pintar Palembang	2021
		Ruang Pintar Palembang Titik ke 2	2021
63	Palopo	Bantuan gerobak dagang UMKM untuk ramadhan	2021
		Pelatihan online pengenalan investasi	2021
		Ruang Pintar Angkona	2021
		Ruang Pintar Palopo	2021
		Ruang pintar PNM Palopo	2021
		Ruang Pintar Sukamaju	2021
64	Palu	Ruang Pintar Dongkas	2021
		Ruang Pintar Tawaeli	2021
65	Pati	Bantuan peralatan produksi eggroll	2021
		Bantuan Sarana dan prasarana pondok pesantren	2021
		Bantuan sembako dan APD	2021
		Bantuan sembako untuk musibah banjir	2021
		Ruang Pintar Cabang Pati	2021
66	Pekanbaru	Ruang pintar Pekanbaru	2021
67	Pematang Siantar	Desa Binaan Wonorejo Pematang Siantar	2021
		pembagian paket sembako kepada kaum duafa, fakir miskin dan yatim piatu	2021
		Ruang pintar cabang Pematang Siantar	2021
		Ruang Pintar titik ke-2	2021
68	Pontianak	Bantuan renovasi Surau Baitul Makmur	2021
		Donor darah (300 orang)	2021
		Ruang Pintar	2021
		Ruang Pintar Pontianak	2021
69	Probolinggo	Bantuan Rombongan Warung Mekaar kepada Ibu Ima (Nasabah Mekaar Cab Kapongan Reg Situbondo)	2021
		Pemberian bantuan kepada Nasabah Mekaar terdampak banjir di Dringu	2021
		Ruang Pintar Cabang Probolinggo	2021
		Ruang Pintar Probolinggo	2021
70	Purwokerto	Ruang Pintar Cabang Purwokerto	2021
		Ruang pintar Purwokerto	2021

No	Cabang Pemohon	Program	Tahun Pelaksanaan
		Tong Sampah Purwokerto	2021
71	Samarinda	Ruang Pintar Samarinda	2021
72	Seilepan	Bantuan musibah kebakaran nasabah Mekaar	2021
73	Semarang	Bantuan alat usaha pasar rakyat sederhana	2021
		Bantuan beasiswa pendidikan untuk anak Nasabah Mekaar atas nama Sumarsono	2021
		Paket Sembako untuk bencana banjir di Semarang	2021
		Pelatihan Capacity Building	2021
		Perpanjangan ruang pintar Lodoyong	2021
		Perpanjangan ruang pintar Roban	2021
		Perpanjangan ruang pintar Boja	2021
		Renovasi ruang pintar Semarang	2021
		Ruang Pintar Cabang Semarang	2021
		Ruang Pintar Demak	2021
74	Serang	Pembangunan MCK di lokasi ruang pintar	2021
		Ruang Pintar	2021
		Ruang Pintar Serang titik ke 2	2021
75	Sidikalang	Ruang Pintar Sidikalang	2021
76	Sintang	Bantuan korban terdampak banjir	2021
77	Solo	Bantuan Sarana air bersih	2021
		Pemberian Bantuan pembelian dan pemasangan pompa air	2021
		Perbaikan Jalan di desa Girioto	2021
		Ruang Pintar PNM Solo	2021
78	Subang	Bantuan berupa paket sembako&obat-obatan bagi nasabah dan karyawan terdampak banjir di wilayah Subang	2021
		Bantuan Sarana air bersih	2021
		Ruang Pintar cabang Subang	2021
79	Sukabumi	Bantuan alat usaha untuk Nasabah Mekaar	2021
		Program ruang pintar Sukabumi	2021
80	Surabaya	Bantuan mesin pengolahan daging	2021
		Bantuan wakaf Al-Quran dan santunan anak yatim	2021
81	Tamalate	Bantuan nasabah kebakaran	2021
82	Tangerang	Bantuan musibah banjir kepada Nabasah Mekaar	2021
		Bantuan pelatihan seminar sehari "Suksesi fatayah NU: Mencari solusi ekonomi ditengah pandemi"	2021
		Bantuan renovasi masjid	2021
		Bantuan sarana prasarana pembuatan pos keamanan	2021
		Ruang Pintar Cabang Tangerang	2021
83	Tasikmalaya	Bantuan gerobak usaha untuk Nasabah Mekaar di Tasikmalaya	2021
		Desa Binaan Papayan Tasikmalaya	2021
		Pembagian takjil yayasan pendidikan islam Bani Syuja	2021
		Ruang Pintar Tasikmalaya	2021

No	Cabang Pemohon	Program	Tahun Pelaksanaan
84	Tegal	Bantuan Pemberian Mie instan kepada masyarakat kabupaten Pemalang yang terdampak Covid-19	2021
		Paket Sembako untuk bencana banjir di Pekalongan	2021
		Paket Sembako untuk korban banjir	2021
		Ruang Pintar Cabang Tegal	2021
		Ruang Pintar Desa Slawi	2021
85	Tulungagung	Ruang Pintar	2021
86	Wonogiri	Bantuan pengadaan soundsystem mushola kelurahan Wuryorejo	2021
		Ruang pintar Cabang Wonogiri	2021
		Ruang pintar PNM Wonogiri	2021
87	Yogyakarta	Bantuan gerobak usaha untuk Nasabah Mekaar di Kebumen	2021
		Bantuan renovasi pondok pesantren Al Falahiyyah	2021
		Bantuan sembako untuk 400 pelaku UMKM di Kawasan Malioboro bekerjasama dengan Baznas, BNI, Jamkrindo, Askrindo, Telkom	2021
		Ruang Pintar Cabang Yogyakarta	2021

Program Kemitraan

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/ MBU/2013 tanggal 10 September 2013, Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil, Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil mencakup kegiatan ekonomi rakyat dengan berskala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Adapun program kemitraan yang secara konsisten dilakukan oleh Perseroan adalah pemberian pinjaman untuk modal kerja, pemberian dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan.

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan kesehatan masyarakat, serta bantuan pelestarian alam.

23. Prospek Usaha

Dampak pandemi dan dukungan Pemerintah

Di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 menunjukkan peningkatan sebesar 1,06% (QoQ). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen.

Sesuai dengan APBN pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% - 5,5%, inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga di kisaran 3,5%. Fokus Pemerintah pada tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Seiring dengan upaya Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perusahaan terus berupaya membantu nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan seterusnya. Perusahaan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM.

Peluang inovasi

- 1) Perseroan melakukan pendampingan kepada nasabah terpilih dengan tujuan peningkatan kapasitas dan memberi nilai lebih pada produk nasabah agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan kinerja usahanya yang akan berujung pada meningkatkan kesejahteraan nasabah.
- 2) Pengembangan produk dan teknik manajemen risiko untuk dapat melayani segmen pasar UMK dan Ultra Mikro yang belum dapat dijangkau oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 3) Pengembangan produk untuk nasabah Mekaar yang “naik kelas,” dalam arti nasabah-nasabah Mekaar yang sudah lama bergabung dan menunjukkan rekam jejak baik, memiliki usaha serta kemampuan bayar yang mencukupi.

24. Transaksi Afiliasi

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	OS 31 Maret 2022	Jatuh Tempo	Hubungan Afiliasi
1	Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan PT Bank Tabungan Negara Tbk (“Bank BTN”)	<p>Fasilitas Kredit</p> <p>Bank BTN memberikan kredit modal kerja yang bersifat <i>non-revolving</i> kepada dan untuk kepentingan Perseroan, sampai setinggi-tingginya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), untuk penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Mekaar) dengan pola <i>reimbursement</i></p> <p>Bunga</p> <p>Perseroan harus membayar kepada Bank BTN, bunga atas pokok jumlah kredit yang terutang sebesar 9,00% (sembilan koma dua nol persen) per tahun</p>	Bank BTN	395.833.333.333,33	20 Oktober 2023	Memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia
2	Akta Perjanjian Kredit No. 001 tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Andi Fatma Hasia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama (Addendum) Perjanjian Kredit No. 005 tanggal 11 September 2020 yang dibuat di hadapan Andi Fatma Hasia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad	<p>Plafond Kredit</p> <p>Plafond kredit dalam Perjanjian adalah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)</p> <p>Bunga</p> <p>Bunga yang diatur dalam Perjanjian adalah sebesar 8,50% (delapan koma tujuh lima persen) per annum efektif (<i>adjustable rate</i>)</p>	Bank BTN	103.083.333.333	07 sep 2022	Memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	OS 31 Maret 2022	Jatuh Tempo	Hubungan Afiliasi
	Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Bank BTN					
3	Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Bank BTN	Plafond Kredit Plafond kredit dalam Perjanjian adalah sebesar Rp750.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) Bunga Suku bunga sebesar 7,25% (sembilan koma lima nol persen) per annum efektif <i>fixed</i> selama jangka waktu kredit	Bank BTN	658.645.276.292,-	07 Sept 2024	Memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia
4	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> (Mudharabah) No. 13 tanggal 26 April 2019 dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank BRI Syariah Tbk ("BRI Syariah")	Fasilitas Pembiayaan BRI Syariah bersedia menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan untuk jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) Tujuan Penggunaan Bahwa Fasilitas Pembiayaan diberikan dalam rangka modal kerja yang disediakan oleh BRI Syariah tersebut, untuk disalurkan kepada produk Pembiayaan Syariah Mekaar	BRI Syariah	3.178.134.740,71	26 Oktober 2022	Memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia
5	Akta Perjanjian kredit modal kerja No. WCO.KP/025/KMK/2021 No. 37 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Limit Fasilitas Kredit Bank Mandiri setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) Bunga Atas fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar 8,50% (delapan koma lima puluh persen) per annum (<i>fixed rate</i>)	Bank Mandiri	557.106.366.102	23 Oktober 2022	Memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia
6	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 111 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI")	Plafond Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam bentuk Withdrawal Approval maksimum Credit Overeenskomst (Co) menurun Non-Revolving. Bunga Suku Bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun	Bank BRI		28 Desember 2022	Memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia

Selain dari perjanjian kredit yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal Prospektus ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak-pihak terafiliasi yang seluruhnya dilakukan secara wajar dan telah memenuhi ketentuan

anggaran dasar Perseroan serta prosedur-prosedur yang berlaku di internal Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1	Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Layanan Pialang Asuransi No. 016/PKS/PNM/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Proteksi Madani ("MPM")	Kerja sama untuk melakukan pengelolaan asuransi yang dibutuhkan Perseroan dalam rangka menunjang operasional dan kegiatan usaha Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh jaringan dengan menggunakan jasa MPM sebagai perusahaan pialang (broker) asuransi dan konsultan asuransi (<i>insurance manager</i>)	MPM	23 April 2030	Besaran Nilai Premi disepakati dengan perusahaan asuransi yang akan memberikan pertanggungan.	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MPM terjadi dikarenakan MPM merupakan anak perusahaan dari PNMVC
2	Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Keperluan Sewa Bagi Perseroan di Seluruh Indonesia No. PKS-003/PNM-PPI/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Niaga Madani ("MNM")	Kerja sama sehubungan dengan penyewaan dari MNM atas tanah bangunan yang merupakan aset MNM yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukan kantor Perseroan dan MNM menyatakan kesediaannya untuk menyewakan kepada Perseroan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud kepada Perseroan	MNM	18 Agustus 2027	Harga sewa disepakati di kemudian hari sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MNM terjadi dikarenakan MPM merupakan anak perusahaan dari PNMVC
3	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa ("KPBJ") mengenai Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-048A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Utama Madani ("MUM")	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MUM	29 Desember 2025	Biaya/fee pengelolaan atau manajemen tenaga kerja alih daya dengan ketentuan perhitungan berjenjang sebagai berikut: a. Nominal Tagihan Rp0,00 (nol Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) maka biaya/fee sebesar 10% (sepuluh persen). b. Nominal Tagihan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) maka biaya/fee sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). c. Biaya sebagaimana dimaksud butir a ketentuan ini, berlaku sejak tagihan bulan Januari 2021.	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MUM terjadi dikarenakan MUM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
4	KPBJ mengenai Pengadaan Kendaraan dan Genset No. KPBJ-042/PNM-PPI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat di bawah	Kerja sama terkait penyewaan aset MBM berupa kendaraan dan genset yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna	MBM	31 Maret 2024	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan kemudian oleh Para Pihak melalui Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MBM terjadi dikarenakan MBM merupakan anak

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
	tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Bisnis Madani ("MBM")	peruntukkan kantor Perseroan				perusahaan dari PNMVC.
5	KPBJ mengenai Pengadaan <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> No. 093A/PNM-PPI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Tekno Madani ("MTM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MTM berupa <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MTM	29 September 2024	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan kemudian oleh Para Pihak melalui Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MTM terjadi dikarenakan MTM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
6	KPBJ mengenai Pengadaan <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> No. 074/PNM-PPI/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Dagang Madani ("MDM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MDM berupa <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MDM	9 Juli 2024	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan kemudian oleh Para Pihak melalui Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MDM terjadi dikarenakan MDM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
7	KPBJ mengenai Pelatihan, Sertifikasi, dan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-047A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Micro Madani Institute ("MMI")	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MMI	31 Desember 2025	Biaya/ <i>Fee</i> pengelolaan atau manajemen tenaga kerja alih daya yang dibebankan kepada PNM sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nominal tagihan.	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MMI terjadi dikarenakan MMI merupakan anak perusahaan dari PNMVC.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas merupakan transaksi Afiliasi dengan perusahaan terkendali dan transaksi Afiliasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan terkendali, serta transaksi Afiliasi dengan lembaga keuangan perbankan, sehingga dikecualikan dari kewajiban Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

25. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI merupakan aspek yang sangat penting bagi Perseroan karena seluruh HAKI yang dimiliki Perseroan digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan. Sebagai ciri khas Perseroan, HAKI tidak bisa lepas dari produk yang ditawarkan Perseroan, maka perlindungan atas merek dan sistem yang dimiliki Perseroan bersifat esensial bagi Perseroan agar tidak digunakan oleh pihak lain. Perseroan telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya sebagaimana diuraikan di bawah ini ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

- 1) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000550171 atas nama Perseroan tanggal 10 Oktober 2014 untuk pendaftaran merek "PNM Permodalan Nasional Madani" dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 10 Oktober 2024.

- 2) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000663502 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar” dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- 3) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000755041 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar”, dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- 4) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000755042 atas nama Perseroan tanggal 6 April 2016 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar”, dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 6 April 2028.
- 5) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000640231 atas nama Perseroan tanggal 28 Agustus 2015 untuk pendaftaran merek “ULaMM Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 9), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 28 Agustus 2025.
- 6) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000712339 atas nama Perseroan tanggal 28 Agustus 2015 untuk pendaftaran merek “Madani Microbanking Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 9 (NCL 11) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2028.
- 7) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703658 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- 8) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703623 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- 9) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000703643 atas nama Perseroan tanggal 28 September 2018 untuk pendaftaran merek “PNM Mekaar Syariah” dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2028.
- 10) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000708511 atas nama Perseroan tanggal 11 Mei 2018 untuk pendaftaran merek “PNMagz” dengan Kelas Barang/Jasa 16 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2028.
- 11) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000708898 atas nama Perseroan tanggal 11 Mei 2018 untuk pendaftaran merek “PNMagz” dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2028.
- 12) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722104 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 16 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- 13) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722083 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 35 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- 14) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000722001 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 36 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- 15) Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000721848 atas nama Perseroan tanggal 8 Maret 2019 untuk pendaftaran merek “PKU PNM” dengan Kelas Barang/Jasa 41 (NCL 11), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2029.
- 16) Surat Pencatatan Ciptaan Nomor 00138232 atas nama Perseroan tanggal 27 September 2018 untuk pendaftaran ciptaan “M2Pay – Mikro Madani Payment” dengan jenis ciptaan Program Komputer, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 27 September 2068.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan aspek keuangan Perseroan sehingga informasi keuangan yang disampaikan tidak dapat dijadikan indikasi keuangan masa mendatang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

26. Riset dan Pengembangan

Perseroan menerapkan kebijakan riset dan pengembangan sebagai berikut:

- Riset kepuasan pelanggan (CSI) setiap tahun.

- Riset dampak kerjasama dengan lembaga riset & kampus untuk mengetahui dampak dari pembiayaan Mekaar.
- Riset evaluasi produk setiap tahun.
- Riset tematik dan riset pengembangan kampung sebagai bentuk dukungan Perseroan untuk pengembangan usaha & komunitas (kampung/dusun).

27. Asuransi yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Asuransi yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
1.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015319000848 berlaku sejak 2 November 2021 sampai dengan 2 November 2022	Cabang Bau-bau UlaMM Bau-bau UlaMM Raha UlaMM Lombe UlaMM Pasarwajo UlaMM Ereke	4.015.606.642,00	PNM Cabang Bau-Bau	3.543.578,21	PT BRI Asuransi Indonesia
2.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 1212016120000607 berlaku sejak 2 November 2021 sampai dengan 2 November 2022	Cabang Bau-bau UlaMM Bau-bau UlaMM Raha UlaMM Lombe UlaMM Pasarwajo UlaMM Ereke	4.015.607.142,00	PNM Cabang Bau-Bau	3.219.097,26	PT BRI Asuransi Indonesia
3.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00016 berlaku sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 2 November 2022	Cabang Kaltara Unit Tarakan Unit Tanjung Selor	3.916.577.120,00	PNM Cabang Kaltara	3.407.422,09	PT Asuransi Binagriya Upakara
4.	Property All Risk Insurance No. 1010111220400485 berlaku sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan 19 Februari 2023	Cabang Lampung Unit Kedaton Unit Pringsewu Unit Kalianda Unit Sidomulyo Unit Kota Agung Unit Kalirejo Unit Bandar Sribhawono Unit Metro Unit Gedong Tatatan Seputih banyak Bandarjaya Kotabumi Bukit Kemuning Liwa Mulya Asri Simpang Pemantang	21.910.109.897,34	PNM Cabang Bandar Lampung	19.061.795,61	PT Asuransi Binagriya Upakara
5.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000862 berlaku sejak 1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus	Kantor Cabang Madiun Kantor Cabang Pulung Kantor Cabang Jetis UlaMM Ponorogo Kota	7.087.282.693,30	PNM Cabang Madiun	6.123.438,20	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	2022	UlaMM Ponorogo Sumoroto UlaMM Madiun Dolopo UlaMM Gorang Gareng UlaMM Magetan Kota UlaMM Magetan Plaosan UlaMM Magetan Barat UlaMM Madiun Kota UlaMM Ngawi Kota UlaMM Ngawi Jogorogo UlaMM Ngawi Walkukun UlaMM Ngawi Karangjati UlaMM Caruban UlaMM Balong UlaMM Kedunggalur UlaMM Kendal				
6.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 121201532000086 berlaku sejak 1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2022	Kantor Cabang Madiun Kantor Cabang Pulung Kantor Cabang Jetis UlaMM Ponorogo Kota UlaMM Ponorogo Sumoroto UlaMM Madiun Dolopo UlaMM Gorang Gareng UlaMM Magetan Kota UlaMM Magetan Plaosan UlaMM Magetan Barat UlaMM Madiun Kota UlaMM Ngawi Kota UlaMM Ngawi Jogorogo UlaMM Ngawi Walkukun UlaMM Ngawi Karangjati UlaMM Caruban UlaMM Balong UlaMM Kedunggalur UlaMM Kendal	7.087.282.693,30	PNM Cabang Madiun	7.137.282,69	PT BRI Asuransi Indonesia
7.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 1212016120000549 berlaku sejak 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus	Kantor Unit Secang Kantor Unit Kebumen Kantor Unit Jenar Syariah Kantor Unit Purworejo	4.083.423.562,00	PNM Cabang Magelang	5.515.349,47	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	2022	Kantor Unit Salaman Kantor Unit Pingit Kantor Unit Temanggung Kota Kantor Unit Ngadirejo Kantor Unit Prembun Kantor Unit Magelang Kota Kantor Unit Muntilan Kantor Cabang Magelang				
8.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000895 berlaku sejak 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2022	Kantor Unit Secang Kantor Unit Kebumen Kantor Unit Jenar Syariah Kantor Unit Purworejo Kantor Unit Salaman Kantor Unit Pingit Kantor Unit Temanggung Kota Kantor Unit Ngadirejo Kantor Unit Prembun Kantor Unit Magelang Kota Kantor Unit Muntilan Kantor Cabang Magelang	4.083.423.562,00	PNM Cabang Magelang	3.602.578,50	PT BRI Asuransi Indonesia
9.	Asuransi Property All Risk (sharia) No. 21201532200062 Berlaku Sejak 15 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2023	Untuk seluruh Kantor Unit Syariah dan Kantor Cabang Syariah yang menjadi wilayah PNM Cabang Medan	15.644.882.216,29	PNM Cabang Medan	13.661.047,53	PT BRI Asuransi Indonesia
10.	Earthquake Insurance (sharia) No.: 21201612200060 Berlaku Sejak 15 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2023	Untuk seluruh Kantor Unit Syariah dan Kantor Cabang Syariah yang menjadi wilayah PNM Cabang Medan	15.644.882.216,29	PNM Cabang Medan	23.441.025,61	PT BRI Asuransi Indonesia
11.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (syariah) No. 1212015320000997 berlaku sejak 2 November 2021 sampai dengan 2 November 2022	Cabang Mojokerto ULaMM Mojokerto Kota ULaMM Dlanggu ULaMM Ngoro ULaMM Mojosari ULaMM Mojoagung ULaMM Ploso	4.939.954.442,47	PNM Cabang Mojokerto	4.347.760,36	PT BRI Asuransi Indonesia
12.	Asuransi Property All	Untuk seluruh	4.697.588.762,30	PNM Cabang	4.086.902,22	PT Asuransi

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	Risk No. 01001.2.2101.00190.0 Berlaku Sejak 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2023	Kantor Unit dan Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Pacitan		Pacitan		Chubb Syariah Indonesia
13.	Asuransi Property All Risk (sharia) No. 01001.2.2102.00444.0 berlaku sejak 4 Januari 2022 sampai dengan 4 Januari 2023	Untuk seluruh Kantor Unit dan Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Palu	6.019.285.611,00	PNM Cabang Palu	5.338.785,15	PT BRI Asuransi Indonesia
14.	Earthquake Insurance (sharia) No. 1212016122000189 berlaku sejak 4 Januari 2022 sampai dengan 4 Januari 2023	Untuk seluruh Kantor Unit dan Kantor Cabang yang menjadi wilayah PNM Cabang Palu	6.019.285.611,00	PNM Cabang Palu	10.568.813,00	PT BRI Asuransi Indonesia
15.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000873 berlaku sejak 01 Oktober 2021 sampai dengan 01 Oktober 2022	Kantor Unit Bandar Kantor Unit Limpung Kantor Unit Sukorejo Kantor Unit Weleri Kenda Kantor Unit Kaliwungu Kantor Unit Boja Kantor Unit Ngaliyan Kantor Unit Gayamsari Kantor Unit Demak Syariah Kantor Unit Godong Kantor Unit Gubug Kantor Unit Ungaran Kantor Unit Ambarawa Kantor Unit Bandungan Kantor Unit Bringin Kantor Unit Salatiga Kantor Cabang Semarang	12.221.330.581,00	PNM Cabang Semarang	10.682.557,61	PT BRI Asuransi Indonesia
16.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000527 berlaku sejak 01 Oktober 2021 sampai dengan 01 Oktober 2022	Kantor Unit Bandar Kantor Unit Limpung Kantor Unit Sukorejo Kantor Unit Weleri Kenda Kantor Unit Kaliwungu Kantor Unit Boja Kantor Unit Ngaliyan Kantor Unit Gayamsari Kantor Unit Demak Syariah Kantor Unit Godong Kantor Unit Gubug Kantor Unit Ungaran Kantor Unit	12.221.330.581,00	PNM Cabang Semarang	12.819.527,49	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		Ambarawa Kantor Unit Bandung Kantor Unit Bringin Kantor Unit Salatiga Kantor Cabang Semarang				
17.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000884 berlaku sejak 01 Oktober 2021 sampai dengan 01 Oktober 2022	Cabang Serang dan Unit Rau Serang Unit Cikande Unit Ciruas Unit Rangkasbitung Unit Cilegon	2.599.552.500,00	PNM Cabang Serang	2.311.610,68	PT BRI Asuransi Indonesia
18.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000538 berlaku sejak 01 Oktober 2021 sampai dengan 01 Oktober 2022	Cabang Serang dan Unit Rau Serang Unit Cikande Unit Ciruas Unit Rangkasbitung Unit Cilegon	2.599.552.500,00	PNM Cabang Serang	3.767.360,08	PT BRI Asuransi Indonesia
19.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00017 berlaku sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 2 November 2022	Unit Tulungagung Gunut Unit Rejotangan Unit Dongko Unit Tulungagung Kota Unit Trenggalek Unit T.A Bandung Unit Blitar Kademangan Unit Gandusari Trenggalek Unit Kalangbret Unit Wonodadi (Syariah) Cabang Tulungagung	6.811.100.651,00	PNM Cabang Tulungagung	7.091.007,56	PT Asuransi Binagriya Upakara
20.	Earthquake Insurance No. 01.F32.20.00016 berlaku sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 2 November 2022	Unit Tulungagung Gunut Unit Rejotangan Unit Dongko Unit Tulungagung Kota Unit Trenggalek Unit T.A Bandung Unit Blitar Kademangan Unit Gandusari Trenggalek Unit Kalangbret Unit Wonodadi (Syariah) Cabang Tulungagung	6.811.100.651,00	PNM Cabang Tulungagung	5.925.657,57	PT Asuransi Binagriya Upakara
21.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. berlaku sejak 1	Kantor Cabang Wonogiri UlaMM Wonogiri	3.545.000.000,00	PNM Cabang Wonogiri	3.560.450,00	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2023	UlaMM Sukoharjo Kota UlaMM Nguter UlaMM Pracimantoro UlaMM Baturetno UlaMM Jatisrono UlaMM Purwanto				
22.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016122000167 berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2023	Kantor Cabang Wonogiri UlaMM Wonogiri UlaMM Sukoharjo Kota UlaMM Nguter UlaMM Pracimantoro UlaMM Baturetno UlaMM Jatisrono UlaMM Purwanto	3.545.000.000,00	PNM Cabang Wonogiri	5.820.050,00	PT BRI Asuransi Indonesia
23.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016119000264 berlaku sejak 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2022 Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, perpanjangan atas Asuransi ini masih dalam proses	Cabang Bangka Belitung QQ Diana UlaMM Pangkalpinang Toman QQ Diana UlaMM Sungailiat QQ Novita UlaMM Kepala QQ Ali Basir	1.443.267.682,00	PNM Bangka Belitung	1.336.878,60	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
24.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015319000358 berlaku sejak 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2022 Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, perpanjangan atas Asuransi ini masih dalam proses	Cabang Bangka Belitung QQ Diana UlaMM Pangkalpinang Toman QQ Diana UlaMM Sungailiat QQ Novita UlaMM Kepala QQ Ali Basir	1.443.267.682,00	PNM Bangka Belitung	1.305.642,88	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
25.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000391 berlaku sejak 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2022 Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, perpanjangan atas Asuransi ini masih dalam proses	Cabang Bangka Belitung QQ Saryadi UlaMM Pangkalpinang Toman QQ Diana UlaMM Sungailiat QQ Novita UlaMM Kelapa QQ Ali Basir	1.559.058.127,00	PNM Cabang Bangka Belitung	1.404.425,03	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
26.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000678 berlaku sejak 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2022 Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, perpanjangan atas Asuransi ini masih dalam proses	Cabang Bangka Belitung QQ Saryadi UlaMM Pangkalpinang Toman QQ Diana UlaMM Sungialiat QQ Novita UlaMM Kelapa QQ Ali Basir	1.559.058.127,00	PNM Cabang Bangka Belitung	1.406.380,57	PT BRI Asuransi Indonesia
27.	Earthquake Insurance No. 01.F32.20.00012 berlaku sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan 18 Agustus 2022	QQ PNM Cabang Samarinda Unit Bontang Unit Lempake Unit Pasar Segiri - Samarinda Unit Samarinda - Seberang Unit Sangatta Unit Sunga Kunjang	5.299.478.769,00	PNM Cabang Samarinda	3.978.030,83	PT Asuransi Binagriya Upakara
28.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00013 berlaku sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan 18 Agustus 2022	QQ PNM Cabang Samarinda Unit Bontang Unit Lempake Unit Pasar Segiri - Samarinda Unit Samarinda - Seberang Unit Sangatta Unit Sunga Kunjang	5.299.478.769,00	PNM Cabang Samarinda	4.610.546,53	PT Asuransi Binagriya Upakara
29.	Property All Risk Insurance No. 01.F31.20.00014 berlaku sejak 2 Agustus 2021 sampai dengan 2 Agustus 2022	Cabang Bojonegoro UlaMM Dander UlaMM Bojonegoro Kota UlaMM Rengel UlaMM Sumberrejo UlaMM Jatirogo	3.122.304.120,00	PNM Cabang Bojonegoro	2.716.404,58	PT Asuransi Binagriya Upakara
30.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 21201612200062 berlaku sejak 28 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2023	Cabang Tegal Unit Tegal Kota Unit Jatibarang Brebes Unit Slawi Unit Talang Tegal Unit Randudongkal Unit Brebes Kota Unit Ketanggungan Unit Wiradesa Unit Kajen Unit Kedungwuni Unit Comal Unit Batang Unit Pemasang Unit Petarukan Unit Bojong	10.337.859.827,99	PNM Cabang Tegal	10.941.141,58	PT BRI Asuransi Indonesia
31.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia)	Cabang Tegal Unit Tegal Kota	10.337.859.827,99	PNM Cabang Tegal	9.052.638,05	PT BRI Asuransi

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
	No. 21201532100183 berlaku sejak 28 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2023	Unit Jatibarang Brebes Unit Slawi Unit Talang Tegal Unit Randudongkal Unit Brebes Kota Unit Ketanggungan Unit Wiradesa Unit Kajen Unit Kedungwuni Unit Comal Unit Batang Unit Pemalang Unit Petarukan Unit Bojong				Indonesia
32.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016120000471 berlaku sejak 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, perpanjangan atas Asuransi ini masih dalam proses	Cabang DKI Unit Pasar Minggu Unit Cililitan Unit Ciracas Unit Pondok Labu Unit Sawah Besar Unit Pasar Senen Unit Pondok gede Unit Cakung Unit Pluit Unit Tanah Abang	9.175.635.138,00	PNM Cabang Jakarta	13.171.158,25	PT BRI Asuransi Indonesia
33.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015320000827 berlaku sejak 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, perpanjangan atas Asuransi ini masih dalam proses	Cabang DKI Unit Pasar Minggu Unit Cililitan Unit Ciracas Unit Pondok Labu Unit Sawah Besar Unit Pasar Senen Unit Pondok gede Unit Cakung Unit Pluit Unit Tanah Abang	9.175.635.138,00	PNM Cabang Jakarta	8.032.802,57	PT BRI Asuransi Indonesia

BAB IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3, atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B. Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (3 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Atas bunga dari obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. Atas diskonto dari obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. Diskonto dari obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk, atas nama Perseroan, menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi				
PT BRI Danareksa Sekuritas	250.000.000.000	65.000.000.000	315.000.000.000	31,50%
PT CIMB Niaga Sekuritas	210.000.000.000	30.000.000.000	240.000.000.000	24,00%
PT Indo Premier Sekuritas	239.000.000.000	15.000.000.000	254.000.000.000	25,40%
PT Mandiri Sekuritas	185.000.000.000	6.000.000.000	191.000.000.000	19,10%
Jumlah	884.000.000.000	116.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, dengan PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Sementara PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain terdiri dari: (i) hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*); (ii) kondisi pasar Obligasi; (iii) acuan terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi); dan (iv) *risk premium* (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi).

BAB XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Cyber 2 Tower, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Telp: (021) 2283 6086
Faks: (021) 2283 6096

Nama Rekan : Tjahjo Dahono, S.E., CPA
STTD : STTD.AP-512/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP. 0518
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Surat Penunjukan:

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. SPK-190/PNM-PPI/V/2022 tanggal 12 Mei 2022.

Tugas dan kewajiban pokok dari Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini berdasarkan audit yang dilakukan.

KONSULTAN HUKUM

Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office

Office 8, Lantai 15, Suite H, SCBD Lot 8
Jl. Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190, Indonesia
Telp: (021) 2933 2858
Faks: (021) 2933 2857

Nama Rekan : Helen Joni Marsinih
STTD : STTD.KH-14/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200427
Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Surat Penunjukan:

Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa mengenai Pengadaan Konsultan Hukum Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi V PNM Tahun 2022 No. KPBJ-016A/PNM-PPI/IV/2022 tanggal 27 April 2022.

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telp: (021) 7917 5000
Faks: (021) 7990 720

STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000
Keanggotaan Asosiasi : No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat Penunjukan:

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No.S-138/PNM-PPI/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.

Tugas dan kewajiban pokok dari Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160, Indonesia

STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta No. 205.5.041.221146
Pedoman Kerja : Ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik Notaris.

Surat Penunjukan:

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No.S-113/PNM-PPI/IV/2022 tanggal 15 April 2022.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah menyiapkan dan membuat perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT**PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**

Panin Tower Senayan City, Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia

Pedoman Kerja : *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). Anggota-anggota IOSCO terdiri dari otoritas pasar modal lebih dari 100 negara.

Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari *Association of Credit Rating Agencies in Asia* (ACRAA). ACRAA merupakan asosiasi yang didirikan oleh *Asian Credit Rating Agencies*, dan diawasi oleh *Asian Development Bank* (ADB).

Surat Penunjukan:

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. S-085/PNM-PPI/IV/2022 tanggal 1 April 2022.

Berdasarkan penjelasan pasal 1, angka 1, juncto angka 23 di UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab X Prospektus ini, seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini menyatakan tidak akan:

- 1) Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang akan diwaliamanati sesuai dengan ketentuan dalam POJK 19/2020, dan/atau
- 2) Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
- 3) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

BAB XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk., sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020 dan POJK 20/2020. Namun, Perseroan memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Mega Tbk. dengan nilai total kredit sebesar 0,91% (nol koma sembilan satu persen) dari nilai outstanding Obligasi dan/atau Sukuk yang diwaliamanati oleh PT Bank Mega Tbk. Meski begitu, PT Bank Mega Tbk. tetap bisa menjadi Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 atas dasar nilai kredit tidak mencapai atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf b POJK 19/2020. PT Bank Mega Tbk. telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan didasari oleh:

- 1) Surat pernyataan No. 1084/CAMS-WA/22 tanggal 24 Mei 2022, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No.19/2020; (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- 2) Surat pernyataan No. 1085/CAMS-WA/22 tanggal 24 Mei 2022, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- 3) Surat pernyataan No. 1086/CAMS-WA/22 tanggal 24 Mei 2022, Wali Amanat menyatakan telah melakukan due diligence terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-

682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 11 tertanggal 25 Februari 2022, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0014873.AH.01.02 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041329.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Maret 2022.

Susunan Direksi terakhir sesuai dengan akta tertanggal 1 Maret 2019 No. 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0127049 tanggal 1 Maret 2019, sedangkan untuk susunan Dewan Komisaris terakhir sesuai dengan akta tertanggal 25 Februari 2022 No. 10, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0133673 tanggal 28 Februari 2022.

2. Struktur Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 28 Februari 2022 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/III/2022-2799 tanggal 2 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	4.040.231.622	2.020.115.811.000	58,018
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	2.923.543.584	1.461.771.782.000	41,982
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	3.481.887.603.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.036.224.794	10.018.112.397.000	

3. Perizinan

PT Bank Mega Tbk telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor : 20 / STTD-WA / PM / 2000 tanggal 2 Agustus 2000

4. Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2019 dan Akta No. 10 tanggal 25 Februari 2022, yang semuanya dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Direktur : Madi Lazuardi
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Indivara Erni
 Direktur : Lay Diza Larentie
 Direktur : C. Guntur Triyudianto
 Direktur Independen : Yuni Lastianto

5. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2021, Bank Mega telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Fungsional sebanyak 386 Cabang.

6. Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal

Wali Amanat (Trustee)

- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016	- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016	- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016	- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016	- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016	- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
	- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
	- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
	- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019

<ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 - Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 - Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 - Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016 - Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 - Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 - Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016 - Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 - Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016 - Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 - Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 - Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 - Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap I - Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 - Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020 - Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 - Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017 - Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 - Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 - Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 - Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 - Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 - Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 - Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 - Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 - Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021 - Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 - Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 - Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 - Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agen Penjaminan (*Security Agent*)

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK

8. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal.
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- h. atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui mekanisme RUPO.
- i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- j. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020.
- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

9. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan Bank Mega per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Januari 2022:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
Kas	900.919	969.421
Giro pada Bank Indonesia	6.126.614	2.191.077
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	103
Pihak ketiga	753.987	595.805
Total	754.091	595.908
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.198)	(2.232)
Giro pada bank lain - neto	751.893	593.676
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	9.810.711	3.934.751
Efek-efek		
Pihak Berelasi	207.922	-
Pihak Ketiga	25.480.314	27.566.351
Total	25.688.236	27.566.351

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
Dikurangi :		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(969)	(2.022)
Efek-efek - neto	25.687.267	27.564.329
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	630.099	-
Pihak ketiga	19.156.221	18.820.544
Total	19.786.320	18.820.544
Tagihan derivatif	50.532	110.860
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	205.644	646.067
Pihak ketiga	60.535.250	47.948.055
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(63.479)	(107.598)
Total Kredit yang diberikan	60.677.415	48.486.524
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(507.139)	(459.449)
Kredit yang diberikan - neto	60.170.276	48.027.075
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	625
Pihak ketiga	525.823	661.161
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(431)	(648)
Tagihan akseptasi - neto	525.392	661.138
Aset tetap	7.594.102	7.515.437
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.938.277)	(1.682.622)
Aset tetap - neto	5.655.825	5.832.815
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	190.193	149.558
Pihak ketiga	3.223.448	3.347.409
TOTAL ASET	132.879.390	112.202.653
LIABILITAS		
Liabilitas segera	169.559	304.097
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	473.042	900.079
Pihak ketiga	15.886.768	7.613.413
Tabungan		
Pihak berelasi	101.320	77.193
Pihak ketiga	14.350.105	13.672.562
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	2.717.539	2.464.715
Pihak ketiga	65.378.237	54.458.340
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	56.992	3.112
Pihak ketiga	2.206.690	1.949.091
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.158.035	10.663.223

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
Liabilitas derivatif	27.895	47.150
Utang pajak penghasilan	110.754	19.469
Utang akseptasi	525.823	661.786
Pinjaman yang diterima	285.050	281.000
Liabilitas pajak tangguhan	37.090	256.832
Liabilitas imbalan pasca kerja	225.227	196.922
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	6.564	11.293
Pihak ketiga	968.186	364.226
TOTAL LIABILITAS	113.734.926	93.994.503
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.587	1.576
Saldo laba	10.473.226	8.331.574
Penghasilan komprehensif lain	3.139.002	4.344.351
TOTAL EKUITAS	19.144.464	18.208.150
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.879.390	112.202.653

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	8.110.291	8.046.281
Beban bunga	(3.269.215)	(4.132.838)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	4.841.076	3.913.443
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	2.120.386	1.617.722
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	946.302	959.580
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	68.044	329.857
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(4.029)	6.486
Lain-lain	9.072	5.697
Total pendapatan operasional lainnya	3.139.775	2.919.342
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(10.731)	(9.883)
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	-	-
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(104.083)	(114.855)
Beban umum dan administrasi	(1.600.044)	(1.703.998)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.322.686)	(1.268.792)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.943.307	3.735.257
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	9.309	(20.204)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.952.616	3.715.053
BEBAN PAJAK - NETO	(944.565)	(706.742)

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
LABA TAHUN BERJALAN	4.008.051	3.008.311
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(39.730)	3.607
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(932.007)	909.684
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.036.314	3.921.602
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	576	432

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id /
Website: www.bankmega.com
Up.: *Capital Market Services*

BAB XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di mana pun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di mana pun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagai berikut:

PT BRI Danareksa Sekuritas

Faks. (021) 3501 817
Email: ib-group1@brids.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Faks. (021) 5088 7220
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Faks. (021) 5084 7849
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Faks. (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;
sett_fisd@mandirisek.co.id

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada tanggal 2 – 8 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-075/OBL/KSEI/0522 tanggal 25 Mei 2022 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti

- pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
 - c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
 - d. Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
 - f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 9 Agustus 2022.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada

Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat pemesan mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2022 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. rek. 0671.01.000680.30.4
a./n. PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. rek. 0701254635
a./n. PT Indo Premier Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. rek. . 800163442600
a./n. PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. rek. 1020005566028
a./n. PT Mandiri Sekuritas

Setelah itu para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Agustus 2022. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dilakukan melalui transfer.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

12. Pembatalan dan Penundaan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

- 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

BAB XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum yang berlangsung dari tanggal 2 – 8 Agustus 2022. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp. (021) 5091 4100
Faks. (021) 3501 817
Email: ib-group1@brids.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 5084 7848
Faks. (021) 5084 7849
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id
www.cns.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (021) 5088 7168
Faks. (021) 5088 7220
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta 12190
Telp. (021) 526 3445
Faks. (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;
sett_fisd@mandirisek.co.id
www.mandirisekuritas.co.id

BAB XV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pelunasan Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Jakarta Stock Exchange, Tower I, Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp. (021) 5299 1099

Faks. (021) 5299 1199

BAB XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Kepada Yth.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Menara Taspen, Lantai 10
Jalan Jendral Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220, Indonesia

Sebagai Penjamin Pelaksana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022:

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)

Gedung BRI II, Lantai 23
Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

Menara Mandiri Tower, Lantai 25
Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52
Jakarta 12190, Indonesia

PT CIMB NIAGA SEKURITAS

Graha CIMB Niaga, Lantai 28
Jalan Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PM.22/2018, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas yang berkantor pusat di Menara Taspen, Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa mengenai Pengadaan Konsultan Hukum Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi V PNM Tahun 2022 No. KPBJ-016A/PNM-PPI/IV/2022 tanggal 27 April 2022, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Obligasi Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM dengan target dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I**"), yang terdiri dari:
 - a. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp884.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun.
 - b. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah), tingkat bunga sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun.

2. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan /atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM dikurangi dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM.

Dalam rangka penawaran umum dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat dan telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 34 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 45 tanggal 21 Juni 2022, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 21 tanggal 6 Juli 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 55 tanggal 21 Juli 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“**POJK No. 19/POJK.04/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, namun memiliki hubungan kredit dengan Perseroan yang nilai total kreditnya sebesar 0,91% (nol koma sembilan satu persen) dibandingkan dengan *outstanding* obligasi dan/atau sukuk yang diwaliamanati oleh PT Bank Mega, Tbk. Sehingga, PT Bank Mega Tbk, tetap dapat menjadi Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 karena nilai kredit tidak mencapai atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi dan/atau sukuk yang diwaliamanati sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK No. 19/POJK.04/2020.

Selain itu, Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas, keempatnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut “**Penjamin Pelaksana Emisi**”) dan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 35 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 46 tanggal 21 Juni 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 22 tanggal 6 Juni 2022, dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 57 tanggal 21 Juli 2022, seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Seluruh dana yang akan diterima dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Mengingat bahwa penggunaan dana atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, sehingga dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/POJK.04/2020**”) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 42/POJK.04/2020 (“**POJK No. 42/POJK.04/2020**”), sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak diperlukan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 dan POJK No. 42/POJK.04/2020.

Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut “**Pefindo**”) untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022. Pefindo telah memberikan peringkat *id*AA (*Double A*) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pefindo No. RC-447/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Periode 18 April 2022 sampai dengan 1 April 2023, dengan nilai maksimum sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah). Hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Pefindo tersebut, telah sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Sehubungan dengan pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Ref. No.: 8155/MMI-HJM/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Ref. No.: 8177/MMI-HJM/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Ref. No.: 8156/MMI-HJM/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBatasan

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi aspek (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatangani Pendapat Hukum ini, dan (b) hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").
2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas anak-anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas anak-anak perusahaan Perseroan sebagai berikut:

- 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas anak perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak perusahaan tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mengendalikan perusahaan tersebut melalui anak perusahaan Perseroan ("**Perusahaan Anak**"); dan
- 2.2 Sehubungan dengan penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perusahaan Anak memiliki penyertaan saham. Mengingat penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain tidak memberikan kontribusi yang material terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan dengan Perseroan, kami melakukan pemeriksaan hukum terbatas sesuai kebutuhan Konsultan Hukum dan memberikan laporan dari segi hukum terbatas atas penyertaan Perusahaan Anak di perusahaan lain yang terkonsolidasi dengan Perseroan dalam bab keabsahan penyertaan saham di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perusahaan Anak.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya menyangkut bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 21 Juli 2022.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Seluruh modal ditempatkan dan disetor pada saat pendirian, seluruhnya telah diambilbagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 25 Mei 1999 dan dibuktikan dengan pencatatan pada Laporan Auditor Independen Hans Tuanakotta & Mustofa No. 040200 PNM OS SA tanggal 4 Februari 2000 perihal Laporan Auditor Independen.

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam:
 - 2.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Icku Sugiarto, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113404.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 2009, Tambahan No. 18222 ("**Akta No. 71/2008**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2.2 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 20 tanggal 15 Oktober 2009, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21416 tanggal 20 November 2009, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079378.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 3 September 2010, Tambahan No. 1178 (“**Akta No. 20/2009**”).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dengan mencabut ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.3 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 06 Juni 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0077602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0060138 tanggal 23 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 September 2017, Tambahan No. 29838 (“**Akta No. 12/2016**”).

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk merubah jenis saham Perseroan dari yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

- 2.4 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 42 tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093860 tanggal 28 Oktober 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 29839 (“**Akta No. 42/2016**”).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.5 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 31 tanggal 26 Januari 2017, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0073385 tanggal 20 Februari 2017, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Februari 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 1285/L (“**Akta No. 31/2017**”).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.6 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 (**"Akta No. 28/2020"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.7 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 (**"Akta No. 12/2021"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) melakukan pengeluaran saham dalam simpanan (portopel) sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia; dan (ii) menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.8 Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 (**"Akta No. 59/2021"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan (i) Pasal 1 ayat (1) terkait perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani atau PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) menjadi PT Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM; (ii) Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait dengan modal ditempatkan dan disetor; (iii) Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8) terkait dengan hak atas saham; (iv) Pasal 10 ayat (7) terkait dengan Direksi; (v) Pasal 11 ayat (2) dan (10); (vi) Pasal 14 ayat (10) dan (32) terkait dengan Dewan Komisaris; dan (vii) Pasal 26 terkait penggunaan laba.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta pada butir 2.1 sampai dengan 2.8 di atas, yang selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**. Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/POJK.04/2014**”). Belum disesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, dikarenakan Direksi Perseroan masih melakukan penelaahan atas ketentuan-ketentuan yang akan disesuaikan. Berdasarkan Surat Pernyataan No. S-350/PNM-DIR.PDL/TRS/VI/22 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, menyatakan bahwa Perseroan berkomitmen dan mengupayakan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan. Dengan belum disesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, tidak mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014 serta berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Perseroan.

Lebih lanjut, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 59/2021, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya Akta No. 59/2021 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka pengesahan yang diperoleh oleh Perseroan belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 29 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Surat Perseroan No. S-409/PNM-DIRKMR/SPR/XII/20 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk pelaporan Akta No. 28/2020.
 - b. Surat Perseroan No. S-300/PNM-DIRKMR/SPR/VI/21 tanggal 8 Juni 2021 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk pelaporan Akta No. 12/2021; dan
 - c. Surat Perseroan No. S-662/PNM-DIRKMR/SPR/XI/21 tanggal 3 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani, untuk pelaporan Akta No. 59/2021.
3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Jasa Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng;
- b. Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S);
- c. Jasa manajemen dan kemitraan.

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5 Tahun 2021**”), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi dikarenakan harus memastikan aspek keselamatan jaminan serta perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (“**NIB OSS-RBA**”) dan Izin dalam hal ini Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("**PP No. 73/2021**") dan POJK No. 16/2019, yang mana bidang usaha yang dicantumkan dalam peraturan-peraturan tersebut, tidak terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2020**"). Perseroan telah memperoleh NIB OSS-RBA No. 0101220005059 tanggal 1 Januari 2022 yang berlaku efektif. Oleh karenanya, Perseroan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28/2020 jo. Akta No. 12/2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- b. Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.
- b. Rp3.799.999.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1		1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk		3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham Dalam Portepel	-	6.900.000	-	6.900.000.000.000,00	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh Para Pemegang Saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (“**PP No. 72 Tahun 2016**”) dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

5. Berdasarkan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Permodalan Nasional Madani No. 09 tanggal 12 Mei 2022, Perseroan telah mencadangkan sebesar Rp760.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan pada Pasal 70 ayat (1) UU No. 40/2007.

6. Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2016. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU pada tanggal 9 Februari 2021, pemilik manfaat yang didaftarkan oleh Perseroan adalah Direktur Utama Perseroan atas nama Arief Mulyadi. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Arif Rahman Hakim *)
Komisaris Independen	: Veronica Colondam **)
Komisaris Independen	: Meidyah Indreswari **)
Komisaris	: Parman Nataatmadja *)
Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto ***)

Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi **)
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	: Ninis Kesuma Adriani *)
Direktur Bisnis	: R. Tjatur Herry Priyono **)
Direktur Operasional	: Sunar Basuki *)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris *)

- *) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (“**POJK No. 16/POJK.05/2019**”).
- ***) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pertama kali pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/POJK.05/2019 berlaku bagi Perseroan.
- ***)) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-133/MBU/05/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 78 tanggal 22 Mei 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0212442 tanggal 05 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077393.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2018, sehubungan dengan pengangkatan Meidyah Indreswari sebagai Komisaris Independen dan Veronica Colondam sebagai Komisaris Independen.

- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127520.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-101/MBU/04/2022, No. 0009-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 32 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 32/2022**"), sehubungan dengan pengangkatan Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Akta No. 32/2022, sedang dalam proses permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan No. 031/NOT/IV/2022 tanggal 19 April 2022, dibuat oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta.
- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-67/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 4 April 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 11 tanggal 06 April 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127991 tanggal 18 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050156.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, sehubungan dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Direktur Keuangan.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.

- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 30 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0444476 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151143.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 September 2021, sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, dan pengalihan tugas R.Tjatur Heri Priyono semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Operasional.
- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 No. 51-DIR/CSC/01.2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madanitentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 14 Januari 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031241 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009328.AH.01.22.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022, sehubungan dengan pengalihan tugas Kindaris semula Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan pengangkatan Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Keuangan dan Operasional.
- i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-102/MBU/04/2022, No. 0010-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 33 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0007622 tanggal 22 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, sehubungan dengan pengangkatan kembali Arief Mulyadi sebagai Direktur Utama, pengangkatan kembali R. Tjatur Heri Priyono sebagai Direktur Bisnis, perubahan nomenklatur jabatan Ninis Kesuma Adriani semula sebagai Direktur Keuangan dan Operasional menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan; dan perubahan nomenklatur jabatan Sunar Basuki semula sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Di dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikan susunan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan sesuai dengan POJK No. 16/POJK.05/2019.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris, telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019. Terhadap Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019, belum dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Dewan Komisaris. Perseroan telah mengajukan permohonan perolehan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Iwan Taufiq Purwanto kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. S-344/PNM-DIRUT/SPR/VI/22 tanggal 14 Juni 2022 perihal Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Komisaris. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, belum terdapat jadwal dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, sebagaimana dibuktikan terakhir kali dengan Surat Perseroan No. S-248/PNM-DIRKMR/SPR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani.

8. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Didin Hafidhuddin
Anggota : Muhammad Syafii Antonio

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-352/DSB-MUI/XI/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Susunan Dewan Pengawas sebagaimana diungkapkan di atas yang dibuktikan dengan Surat Perusahaan No. S-388/PNM-DIRKEU/SPR/XI/20 tanggal 25 November 2020 perihal Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah PT PNM (Persero).

Masa jabatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Seluruh Dewan Pengawas Syariah, telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan POJK No. 16/POJK.05/2019 dan telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Didin Hafidhuddin; dan
- b. Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Muhammad Syafii Antonio.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/POJK.04/2014**"), Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 16 Juli 2021 telah mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. S-406/PNM-DIRKDO/SPR/VII/21 tanggal 19 Juli 2021 dan telah mengungkapkan pada *website* Perseroan dengan link <https://www.pnm.co.id/news/pnm-tunjuk-dodot-patria-ary-jadi-sekretaris-perusahaan>. Pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014.

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-05/MBU/2006**"), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 November 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Meidyah Indreswari
Sekretaris dan Anggota : R. Yudha Praja Kusumah
Anggota : Edy Karim

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-003.a/PNM-KOM/VIII/18 tentang Penetapan Piagam Komite Audit tanggal 1 Agustus 2018, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/POJK.04/2015, serta telah dimuat pada situs web Perseroan dengan link <https://www.pnm.co.id/gcgs>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/POJK.04/2015. Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2006, Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 *jo.* Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021, dan POJK No. 55/POJK.04/2015.

11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 *jo.* Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-003/PNM-KOM/VII/2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 4 Juli 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam
Sekretaris : Henry Yunus Kamang Pangemanan
Anggota : Arif Rahman Hakim
Anggota : Parman Nataatmadja

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-001/PNM-KOM/IX/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 7 September 2020, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/POJK.04/2014.

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 jo. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 dan POJK No. 34/POJK.04/2014.

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Chapter) tanggal 2 Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-056/PNM-KOM/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-003/PNM/DIR/X/2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 18 Oktober 2021, Direksi Perseroan telah mengangkat Siswo Pujono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Siswo Pujono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-679/PNM-DIRKMR/SPR/XI/21 tanggal 10 November 2021. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

13. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("**POJK No. 44/POJK.05/2020**"), Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-011/PNM-DIR/IV/18 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko tanggal 13 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko
Anggota Tetap : Direksi Holding EVP
Anggota Tidak Tetap : Anak Perusahaan Kepala Divisi Holding

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020.

14. Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk Asset and Liability Committee (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-008/PNM-DOR/IV/18 tentang Pembentukan Tim *Asset And Liability Committee* (ALCO) dan *Staff Supporting Group* ALCO – AD HOC tanggal 10 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Anggota : Seluruh Direksi
EVP
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja Bisnis
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja Perencanaan
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko dan GCG
Sekretaris : Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko dan GCG
SSG ALCO – Ad Hoc : Perwakilan dari setiap unit kerja yang ditunjuk

15. Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani tanggal 31 Januari 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2022 yang menjelaskan rencana penerbitan penawaran umum berkelanjutan baru minimal Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah).

16. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, Perseroan telah menunjuk Pefindo untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022. Pefindo telah memberikan peringkat *AA (Double A)* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pefindo No. RC-447/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Periode 18 April 2022 sampai dengan 1 April 2023, dengan nilai maksimum sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah). Hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Pefindo tersebut, telah sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

17. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) Kantor Mekaar dan 629 (enam ratus enam puluh sembilan) Unit/Outlet ULaMM yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, kecuali Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan Pasal 179 PP No. 5/2021 untuk seluruh Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan. Sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen, maka berdasarkan PP No. 5/2021 ketiadaan Izin Lokasi sebagaimana diatur pada Pasal 179 PP No. 5/2021 tidak memiliki konsekuensi hukum dan tidak memiliki dampak material yang menghambat kegiatan usaha Perseroan pada Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki NIB serta Izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perizinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang jasa pembiayaan dan jasa manajemen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta seluruh perizinan yang dimiliki merupakan milik Perseroan dan masih berlaku.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

18.1 Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 15 (lima belas) sertifikat merek, yang masa berlindungannya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran dan 1 (satu) hak cipta, yang masa berlindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Perseroan selaku pemilik merek-merek terdaftar sebagaimana disebutkan di atas, tidak memberikan Lisensi atau mengadakan suatu Perjanjian Lisensi atas merek-merek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

18.2 Perseroan memiliki surat berharga dalam bentuk deposito pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dan PT Bank Mega Syariah yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.

19. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas aset material yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pada beberapa lokasi usaha Perseroan sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, pencurian dan penggelapan pada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Binagriya Upakara, dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur, dengan jumlah nilai pertanggungan yang memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung oleh Perseroan sebagaimana telah dinyatakan oleh Perseroan dalam

Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kindaris selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan melangsungkan kegiatan usaha. Asuransi yang melindungi harta kekayaan Perseroan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

20. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2020 - 2021, yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1021/PHIJSK-PK/PP/IX/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 02 September 2020, yang berlaku terhitung sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan 01 September 2022.
21. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
22. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
23. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan.
24. Perseroan membentuk Koperasi Karyawan yang beranggotakan karyawan-karyawan Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Madani (Kopkar Madani), yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 1372/BH/KWK.9/II/1999 tanggal 27 September 1999, berkedudukan di Gedung Arthaloka Lantai 4, Jalan Jendral Sudirman No. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanag Abang, Jakarta Pusat.
25. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pimpinan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Perseroan) No. S-8347/PNM-SDM/XI/20 Perihal Permohonan Pencatatan LKS Bipartit tanggal 18 November 2020, yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2975 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020, masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan
26. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - 26.1 Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan Perseroan konsolidasi dengan Perusahaan Anak yaitu sebagai berikut:
 - a. PT Permodalan Nasional Madani Investasi Management (“**PNMIM**”), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230 (**"Akta Pendirian PNMIM"**). Akta Pendirian PNMIM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228637 tanggal 20 April 2022, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006681 tanggal 20 April 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

Perseroan melakukan penyertaan pada PNMIM sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rashid Hussein Asset Management No. 10 tanggal 28 September 1999, dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp109.999.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNMIM sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2021, Tambahan No. 026286.

Dalam rangka melakukan penyertaan pada PNMIM, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 1 tanggal 5 Juli 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta serta Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Badan Pembina BUMN No. 001/KPS/PNM/IX/1999 perihal Persetujuan Pemegang Saham atas pengalihan Kepemilikan Saham PT Rashid Hussain Asset Management (PT RHAM); dan
 - ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 004/Dekom/IX/99 tanggal 15 September 1999 perihal Rekomendasi Komisaris atas pengalihan Kepemilikan Saham PT Rashid Hussain Asset Management (PT RHAM).
- b. PT Permodalan Madani Venture Capital (**"PNM VC"**), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/1/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 (**"Akta Pendirian PNM**

VC). Akta Pendirian PNM VC anggaran dasar PNM VC telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dinyatakan dalam: i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008, yang dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37, Tambahan No. 12373; ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 33 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142850 tanggal 6 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072095.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017; iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 89 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0001854.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011248.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018; dan iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 ("**Akta No. 12/2019**").

Perseroan melakukan penyertaan pada PNMVC sejak pendirian. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 364.199 (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp364.199.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNM VC sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 12/2019.

Dalam rangka melakukan pendirian PNMVC, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2000 tanggal 22 Desember 1999; dan
- ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 01/KOM-PNM/MV/X/99 tanggal 22 Oktober 1999 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tentang Pendirian Anak Perusahaan dalam Bidang Modal Ventura.

Penyertaan modal dan/atau pendirian oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 6 POJK No. 16/POJK.05/2019 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 73/2021, dikarenakan kegiatan usaha Perusahaan Anak digolongkan sebagai lembaga keuangan non-bank yang dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang administrasi hukum dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007 serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan, tidak sedang menjadi objek suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

26.2 Penyertaan secara tidak langsung melalui PNM VC:

- a. PT Permodalan Nasional Venture Syariah ("**PNM VS**") (dahulu bernama PT PNM Techno Venture) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 14 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Keputusan No. 0-10637HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 27 Juni 2000 ("**Akta Pendirian PNM VS**").

Akta Pendirian PNM VS mengalami penyesuaian UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 61 tanggal 28 November 2008, dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Ventura Syariah No. 10 tanggal 10 Januari 2018, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0002554.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015639.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018.

Akta Pendirian PNM VS berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PNM VS**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atau sebesar 126.398 (seratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PNM VS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PNM VS.

- b. PT Mitra Niaga Madani ("**MNM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Niaga Madani No. 47 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-41172.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062689.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2011, Tambahan No. 29070/2011 ("**Akta Pendirian MNM**").

Akta Pendirian MNM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 16 tanggal 17 Mei 2019, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0028488.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084999.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 ("**Akta MNM No. 16/2019**").

Akta Pendirian MNM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MNM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) atau sebesar 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MNM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MNM.

- c. PT Mitra Utama Madani ("**MUM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-83721.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 ("**Akta Pendirian MUM**").

Akta Pendirian MUM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0008943.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026925.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021.

Akta Pendirian MUM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MUM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MUM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MUM.

- d. PT Mitra Tekno Madani ("**MTM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Tekno Madani No. 02 tanggal 4 April 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 ("**Akta Pendirian MTM**").

Akta Pendirian MTM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Tekno Madani No. 56 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0048486.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0291644 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114101.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MTM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MTM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen) atau sebesar 9.897 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MTM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM.

- e. PT Mitra Bisnis Madani ("**MBM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-2469548.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan NO. AHU-3586911.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 ("**Akta Pendirian MBM**").

Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 43 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0040645.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017563.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Akta Pendirian MBM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MBM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MBM.

- f. PT Mitra Proteksi Madani ("**MPM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Proteksi Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-30337.40.10.2014 tanggal 20 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian MPM**").

Akta Pendirian MPM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Proteksi Madani No. 55 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0291686 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114115.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MPM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MPM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MPM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MPM.

- g. PT Micro Madani Institute ("**MMI**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Micro Madani Institute No. 33 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0015256.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 6 April 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039721.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 ("**Akta Pendirian MMI**").

Akta Pendirian MMI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Micro Madani Institute No. 59 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0048487.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0114105.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MMI berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MMI**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 94,44% (sembilan puluh empat koma empat empat persen) atau sebesar 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MMI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MMI.

- h. PT Mitra Dagang Madani ("**MDM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Dagang Madani No. 32 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0057209.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154541.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 ("**Akta Pendirian MDM**").

Akta Pendirian MDM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dagang Madani

No. 54 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0048488.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0114107 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0114107.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MDM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) atau sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MDM.

- i. PT Karya Digital Madani ("**KDM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Karya Digital Madani No. 15 tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0078951.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218698.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 ("**Akta Pendirian KDM**").

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 53,00% (lima puluh tiga persen) atau sebesar 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada KDM sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian KDM.

Penyertaan secara tidak langsung melalui PNM VC telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007 serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PNM VC dan anggaran dasar masing-masing anak perusahaan PNM VC.

27. Perusahaan Anak telah didirikan secara sah sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak, kecuali PNM VC yang belum memperoleh pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PNM VC akibat belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka pengesahan yang diperoleh oleh PNM VC belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap Perseroan, pemegang saham lain, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PNM VC.
28. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak.
29. Permodalan pada Perusahaan Anak, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung fakta adanya penyetoran modal tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perusahaan Anak serta izin-izin yang diperoleh Perusahaan Anak masih berlaku.

31. Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:
 - 31.1 Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perusahaan Anak kepada tenaga kerja yang dipekerjakan Perusahaan Anak telah melebihi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah di mana Perusahaan Anak menempatkan tenaga kerjanya.
 - 31.2 Perusahaan Anak telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh tenaga kerja Perusahaan Anak dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Perusahaan Anak.
 - 31.3 Perusahaan Anak telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
 - 31.4 Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan, kecuali PNM VC yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Peraturan Perusahaan yang telah diajukan oleh PNM VC belum memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Bukti Penyampaian Peraturan Perusahaan PNM VC dengan Nomor #210217014 pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang statusnya pada tanggal Pendapat Hukum ini, sedang dikembalikan kepada PNM VC untuk diperbaiki.
32. Kepemilikan harta kekayaan oleh PNMIM, berupa benda bergerak yang tidak berwujud yaitu 9 (sembilan) deposito dan 6 (enam) hak kekayaan intelektual, telah dimiliki dengan sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PNMIM serta dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Harta kekayaan PNMIM, bebas dari segala jaminan, pertanggungjawaban, dan penyitaan dalam bentuk apapun. PNM VC tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
33. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, perjanjian antara Perusahaan Anak, kecuali PNM VC, dengan Perseroan, seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak dan Perseroan serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi, yang menghalangi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022. PNM VC dengan Perseroan tidak membuat atau menandatangani perjanjian.
34. Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak seluruhnya tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022.
35. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-

keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, dalam hal ini Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur pada saat setelah dilaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I.

Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan seperti perolehan persetujuan atau pemberitahuan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi dan dapat menghalangi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I.

Sampai dengan Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan, yang timbul atas adanya perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku sebagaimana diungkap di atas. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, tidak akan menyebabkan dilanggarnya rasio permodalan terkait ketentuan batas *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 16/POJK.05/2019.

36. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
- 36.1 Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri B sebesar Rp1.246.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 Maret 2023.
 - 36.2 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 Seri B sebesar Rp599.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.
 - 36.3 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri A sebesar Rp586.500.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 28 November 2022; dan (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp763.500.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 November 2024.
 - 36.4 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri A sebesar Rp55.100.000.000,00 (lima puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 April 2023; dan (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp194.900.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 30 April 2025.
 - 36.5 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri B sebesar Rp537.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2023; dan (ii) Obligasi Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua

ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2025.

- 36.6 Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri B sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2024; dan (ii) Obligasi Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.
- 36.7 Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari (i) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 20 Desember 2022; (ii) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 10 Desember 2024; dan (iii) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri C sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.
- 36.8 Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022, yang terdiri dari (i) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri A sebesar Rp2.373.500.000.000,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 2 Mei 2023; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri B sebesar Rp626.500.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 April 2025.
- 36.9 Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 19,00% (sembilan belas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.
- 36.10 Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap II Seri E sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan (dua puluh lima) hari sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
- 36.11 Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019, yang terdiri dari: (i) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 3,90% (tiga koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022; (ii) Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp322.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 17,94% (tujuh belas koma sembilan empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 20 Februari 2023; (iii) Sukuk Mudharabah Seri E sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022; (iv) Sukuk Mudharabah Seri F sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 6,69% (enam koma enam sembilan persen), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 20 Februari 2023; dan (v) Sukuk Mudharabah Seri H sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen), berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.

- 36.12 Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahap I Tahun 2020 Seri A sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023.
- 36.13 Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020, yang terdiri dari: (i) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp712.000.000.000,00 (tujuh ratus dua belas miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 37,38% (tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023; (ii) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp780.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 40,95% (empat puluh koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 10 Maret 2024; dan (iii) Sukuk Mudharabah Seri D sebesar Rp308.000.000.000,00 (tiga ratus delapan miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 16,17% (enam belas koma satu tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan tanggal 19 Januari 2024.
- 36.14 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 08 Juli 2024; dan (iii) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 08 Juli 2026.

Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 secara *paripasu*, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, mengingat Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing obligasi dan sukuk yang masih terutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing obligasi dan sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk.

37. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, namun memiliki hubungan kredit dengan Perseroan yang nilai total kreditnya sebesar 0,91% (nol koma sembilan satu persen) dibandingkan dengan *outstanding* obligasi dan/atau sukuk yang diwaliamanati oleh PT Bank Mega, Tbk. Sehingga, PT Bank Mega Tbk, tetap dapat menjadi Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 karena nilai kredit tidak mencapai atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi dan/atau sukuk yang diwaliamanati sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK No. 19/POJK.04/2020.
38. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 38.1 Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM No. 33 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM No. 20 tanggal 6 Juli 2022 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM No. 54 tanggal 21 Juli 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.

- 38.2 Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 34 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 45 tanggal 21 Juni 2022, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 21 tanggal 6 Juli 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 55 tanggal 21 Juli 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, sebagai Wali Amanat yang telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- 38.3 Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 56 tanggal 21 Juli 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
- 38.4 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 35 tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 46 tanggal 21 Juni 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 22 tanggal 6 Juli 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 57 tanggal 21 Juli 2022, seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas.
- 38.5 Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi No. 36 tanggal 25 Mei 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk untuk Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek yaitu Pefindo, Wali Amanat yaitu PT Bank Mega Tbk dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

39. Perseroan telah memenuhi “persyaratan pihak” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/POJK.04/2014**”) yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I telah mematuhi “persyaratan efek” yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.

40. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Mengingat bahwa Penggunaan dana atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, sehingga dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2017 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/POJK.04/2017") serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 42/POJK.04/2020 ("POJK No. 42/POJK.04/2020"), sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak diperlukan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2017 dan POJK No. 42/POJK.04/2020.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kemudian, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

41. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 90 (sembilan puluh) perkara perdata, sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, rencana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I dan rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, sekalipun Perseroan tidak memenangkan perkara yang bersangkutan dan dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai tuntutan yang diajukan.

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022.

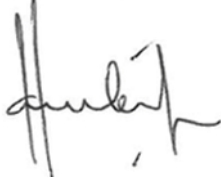
42. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. STTD.KH-14/PM.22/2018

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

**BAB XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN**

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI AND SUBSIDIARIES

*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(SEBELUMNYA
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Halaman/
Page**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-2	<i>.....Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	3-4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and OtherComprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	5	<i>.....Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	6-7	<i>.....Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	8-259	<i>.....Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan: Informasi Keuangan Entitas Induk (Lampiran I-X).....	260-268	<i>Supplementary Information: Financial Information of Parent Entity(Attachment I-X)</i>

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK (SEBELUMNYA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK) LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI AND ITS SUBSIDIARIES (FORMERLY PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES) CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : Arief Mulyadi
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Nomor Telepon : (021) 2511 404
Alamat Rumah : Jl. Bougenville B VI-73, Jatibening Permai, RT 003/RW 011, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : Ninis Kesuma Adriani
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Nomor Telepon : (021) 2511 404
Alamat Rumah : Jl. Lumba-Lumba II no. 29, RT 001/RW 011, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur
Jabatan : Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan

menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak);
- Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak) telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 - Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned :

- Name : Arief Mulyadi
Office Address : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telephone : (021) 2511 404
Residential Address : Jl. Bougenville B VI-73, Jatibening Permai, RT 003/RW 011, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi
Title : President Director
- Name : Ninis Kesuma Adriani
Office Address : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telephone : (021) 2511 404
Residential Address : Jl. Lumba-Lumba II no. 29, RT 001/RW 011, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur
Title : Strategic Planning and Finance Director

declare that:

- We are responsible for the preparation and the presentation of PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) Consolidated Financial Statements;
- PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;
- All information in the PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) Consolidated Financial Statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) Consolidated Financial Statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
- We are responsible for PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) internal control system.

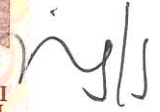
We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 20 Juni 2022 / June 20 ,2022

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Directors 


Arief Mulyadi
Direktur Utama/
President Director




Ninis Kesuma Adriani
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan /
Strategic Planning and Finance Director

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00854/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/VI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00854/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/VI/2022

The Shareholder, Boards of Commissioners and Directors
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 2

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai

Page 2

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor's consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) and its subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) and its subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) (Parent Entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statement of cash flows for the years then ended (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 3

“Informasi Keuangan Entitas Induk”), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Hal-hal lain

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 atas laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

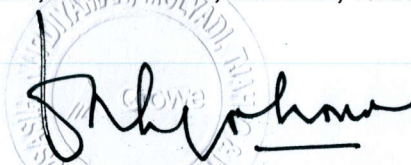
Page 3

presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements.

Other matter

We have issued the independent auditors' report No. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 dated February 7, 2022 on the consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani and its Subsidiaries for the years ended December 31, 2021 and 2020. In relation to the Company's plan to conduct Shelf Registration Bonds V Phase I Year 2022 Offering in Indonesia Stock Exchange, as described in Note 47 to the consolidated financial statements, the Company reissued its consolidated financial statements as of December 31, 2021 and 2020, with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements, as described in Note 48 to the consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the Company's plan to conduct Shelf Registration Bonds V Phase I Year 2022 Offering in Indonesia Stock Exchange, as discussed in Note 47 to the accompanying consolidated financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN**Tjahjo Dahono, SE, CPA**

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0518

20 Juni 2022/June 20, 2022



00854

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2e,2d,4,27	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Cash and cash equivalents
Portofolio efek				Portfolio of securities
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2e,5,27	1.184.264.100.940	524.808.898.763	measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.259.105.270.346 dan Rp674.515.381.879	2e,6,27,2h	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp1,259,105,270,346 and Rp674,515,381,879, respectively
Pembiayaan modal - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp116.667.690.278 dan Rp114.731.525.571	2e,7,27,2h	768.094.030.173	846.572.933.315	Capital financing - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp116,667,690,278 and Rp114,731,525,571, respectively
Piutang jasa manajemen - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.775.638.666 dan Rp1.131.889.737	2e,8,27	5.634.889.481	7.194.005.688	Management services receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp4,775,638,666 and Rp1,131,889,737, respectively
Pendapatan masih akan diterima	2e,9,27	130.096.791.910	117.946.355.821	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	2e,10a,27	7.286.747.464	8.043.481.660	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.262.553.263 dan Rp13.235.563.278	2e,11,27	87.561.426.240	57.711.206.701	Other receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp13,262,553,263 and Rp13,235,563,278, respectively
Pajak dibayar di muka	2z,22a	72.543.712.091	59.324.836.214	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2f,12	414.757.419.043	252.346.681.532	Advances and prepayments
Aset pajak tangguhan	2z,22e	375.803.163.709	215.587.444.020	Deferred tax assets
Aset tetap dan aset hak guna - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp913.178.915.432 dan Rp792.021.410.183	2g,13	2.364.978.848.035	1.475.606.978.180	Fixed assets and right of use assets - net of accumulated depreciation as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp913,178,915,432 and Rp792,021,410,183, respectively
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2e,14,27	-	5.665.228.119	Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income
Aset takberwujud - setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp191.952.532.972 dan Rp114.437.061.200	2i,2k,15	117.955.394.071	168.073.632.504	Intangible assets - net of accumulated amortization as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp191,952,532,972 and Rp114,437,061,200, respectively
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2s,16	11.036.222.656	1.137.240.496	Non-current assets classified as held for sale
Aset lain-lain - bersih	17	1.774.497.608.922	1.373.687.742.854	Other assets - net
TOTAL ASET		43.712.294.587.564	31.664.889.050.308	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang bank dan lembaga keuangan	2e,18,27	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	2e,19,27	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	2e,20,27	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bonds payable
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	2e,21,27	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Utang pajak	2z,22b	338.434.594.191	122.292.791.187	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	2e,23,27	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	2e,10b,27	1.477.865	4.144.473	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	2e,24,27	323.368.663.976	384.107.996.141	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	2e,25,27	296.450.868.847	415.692.220.754	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	2z,22e	5.503.808.922	5.761.818.004	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2q,26	29.174.700.086	58.558.122.085	Employees benefit liabilities
Total Liabilitas		37.274.340.682.674	26.077.979.249.069	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:				Equity attributable to owners of the parent entity:
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal				Share capital - Common stock
Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				at par value of Rp1,000,000 per share as of December 31, 2021 and 2020
Modal dasar - 9.200.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				authorized - 9,200,000 shares as of December 31, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham per 31 Desember 2021 dan 2.300.000 lembar saham per 31 Desember 2020	29	3.800.000.000.000	2.300.000.000.000	Issued and fully paid 3,800,000 shares as of December 31, 2021 and 2,300,000 shares as of December 31, 2020
Penyertaan modal negara	30	-	1.500.000.000.000	State capital investment
Saldo laba:				Retained earnings:
Telah ditentukan penggunaannya:				Appropriated retained earnings:
Cadangan umum	31	537.241.280.550	537.241.280.550	General reserves
Cadangan bertujuan	31	30.632.515.845	30.632.515.845	Appropriated reserves
Belum ditentukan penggunaannya		2.045.597.843.110	1.204.819.762.884	Unappropriated retained earnings
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain		(5.619.911.552)	45.316.567	Unrealized gain (loss) on financial assets at fair value through other comprehensive income
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja		7.194.154.787	294.036.285	Actuarial gain on employee benefit program
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		6.415.045.882.740	5.573.032.912.131	Total equity attributable to owners of the parent:
Kepentingan non-pengendali	28	22.908.022.150	13.876.889.108	Non-controlling interest
Total Ekuitas		6.437.953.904.890	5.586.909.801.239	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		43.712.294.587.564	31.664.889.050.308	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
Pendapatan bunga dan syariah	2t,33	8.425.155.643.903	5.605.264.350.638	Interest and sharia revenue
Beban bunga dan syariah	2t,34	(2.306.081.020.171)	(1.689.807.858.648)	Interest and sharia expenses
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH - BERSIH		6.119.074.623.732	3.915.456.491.990	INTEREST AND SHARIA REVENUE - NET
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	2t,35	96.724.483.396	106.598.063.881	Interest revenue on current account, dividend and time deposits
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	2t	54.674.825.894	51.421.228.815	Revenue from investment manager activities
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	35	13.905.735.088	10.678.267.117	Realized gains on sale of securities
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	2t	5.958.672.800	190.455.200	Revenue from management consulting services
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	2r	-	2.105.000.004	Revenue from Java Reconstruction Fund
Beban usaha	2t,36	(5.345.940.120.307)	(3.870.282.142.486)	Operating expenses
Rugi penjualan aset tetap	2t,13	(464.707.625)	-	Loss on sale of fixed assets
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2u	449.904.899	(145.360.609)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	2r,2t,37	142.288.162.295	183.113.150.445	Others - net
LABA USAHA		1.086.671.580.172	399.135.154.357	OPERATING INCOME
Manfaat (beban) pajak penghasilan:				Income tax benefit (expense):
Pajak kini	2z,22c	(401.478.334.283)	(153.962.384.697)	Current tax
Pajak tangguhan	2z,22c	159.934.681.350	113.421.875.677	Deferred tax
Total beban pajak penghasilan		(241.543.652.933)	(40.540.509.020)	Total income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		845.127.927.239	358.594.645.337	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain: Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Other comprehensive income: Item that will not be reclassified to profit or loss:
Kerugian atas perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	38	(5.665.228.119)	-	Loss on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	38	7.215.917.942	(6.922.673.712)	Remeasurement of employee benefit liabilities
Total Penghasilan Komprehensif Lain		1.550.689.823	(6.922.673.712)	Total Other Comprehensive Income
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		846.678.617.062	351.671.971.625	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE
INCOME (continued)
For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		840.778.080.226	358.180.083.833	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali	28	4.349.847.013	414.561.504	<i>Non-controlling interest</i>
Total		845.127.927.239	358.594.645.337	Total
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Other comprehensive income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		842.328.769.367	351.257.408.540	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali	28	4.349.847.695	414.563.085	<i>Non-controlling interest</i>
Total		846.678.617.062	351.671.971.625	Total
Laba per saham Dasar dan dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2m,39	221.257	244.214	<i>Earnings per share Basic and diluted, profit for the year attributable to owners of the parent</i>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))
AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Penyertaan Modal Negara State Capital/ Investment	Saldo Laba Ditetapkan Penggunaannya/Appropriated Retained Earnings		Saldo Laba belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earnings	Keuntungan (Kerugian) Aktual/ atas Program Imbalan Kerja/ Actuarial Gains (Losses) on Employee Benefits Program	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Aset Keuangan melalui Penghasilan Komprehensif lain/ Unrealized Gains on Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	Total Ekuitas Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Total Equity Attributable to Owners of the Parents	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Aset Keuangan melalui Penghasilan Komprehensif lain/ Unrealized Gains on Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	Balances as of January 1, 2020
			Cadangan Umum/ General Reserves	Cadangan Bertujuan/ Appropriated Reserves						
Saldo per 1 Januari 2020	1.300.000.000.000	-	537.241.280.550	30.632.515.845	846.639.679.051	8.396.805.564	2.722.955.597.577	14.945.285.279	2.737.900.882.856	
Modal saham	1.000.000.000.000	(1.000.000.000.000)	-	-	-	-	-	-	Share capital	
Penyertaan modal negara	-	2.500.000.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000.000	-	State capital investment	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	358.180.083.633	-	358.180.083.633	414.561.504	Income for the year	
Kerugian komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	(6.922.674.155)	(6.922.674.155)	(443)	Other comprehensive loss	
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(1.482.957.232)	Non-controlling interest	
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	(1.180.095.124)	(1.180.095.124)	-	Equity Reclassification	
Saldo per 31 Desember 2020	2.300.000.000.000	1.500.000.000.000	537.241.280.550	30.632.515.845	1.204.819.762.884	294.036.285	5.573.032.912.131	13.876.889.108	5.586.909.801.239	
Modal saham	1.500.000.000.000	(1.500.000.000.000)	-	-	-	-	-	-	Share capital	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	840.778.080.226	-	840.778.080.226	4.349.847.013	Income for the year	
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	7.215.917.260	1.550.689.141	682	Other comprehensive income	
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	4.681.285.347	Non-controlling interest	
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	(315.798.758)	(315.798.758)	-	Equity reclassification	
Saldo per 31 Desember 2021	3.800.000.000.000	-	537.241.280.550	30.632.515.845	2.046.597.843.110	7.194.154.787	6.415.045.882.740	22.908.022.150	6.437.953.904.890	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pengembalian penyaluran pinjaman	2d,2e,6	31.773.403.568.384	20.662.775.841.636	Payment of loan disbursement
Penerimaan dari pendapatan bunga	2d,33	8.487.250.073.163	5.359.063.272.103	Proceeds from interest income
Penerimaan usaha lainnya	2d,35	517.905.061.177	123.240.442.627	Other operating income
Pengembalian pembiayaan modal ventura	2d,2e,7	157.115.986.400	208.604.762.182	Payment on capital financing
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	2d,2t	105.883.187.585	112.350.637.322	Interest income on current account and deposits
Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura	2d,33	82.932.238.026	73.278.911.404	Proceeds from capital financing revenue
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi	2d,2e,2t	70.551.137.954	62.640.290.454	Proceeds from financial and management consulting services and investment
Keuntungan penjualan portofolio efek	2d,2e,2t	2.365.144.906	860.483.198	Gain on sales of securities portfolio
Kenaikan penyaluran pinjaman	2d,2e,6	(42.712.862.420.708)	(25.495.011.124.926)	Increase in loan disbursement
Pembayaran kepada pegawai	2d,36	(3.793.533.093.176)	(2.634.795.267.192)	Payment for employees
Pembayaran bunga pinjaman dan kepada pihak ketiga	2d,34	(1.745.830.391.656)	(1.973.295.783.992)	Payments on loan interest and to the third parties
Pembayaran pajak	2d,2z,22	(544.311.116.311)	(204.791.421.536)	Payment for taxes
Kenaikan pembiayaan modal ventura	2d,2e,7	(155.724.882.303)	(126.981.987.948)	Increase in capital financing
Pembelian efek - bersih	2d,2e,5	(298.145.636)	(8.516.317.084)	Purchases on securities - net
Penerimaan lain-lain	2d,37	303.848.631.875	105.191.363.525	Other proceeds
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(7.451.305.020.320)	(3.735.385.898.227)	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan efek - bersih	2d,2e,5	200.000.000.000	139.126.049.169	Sales on marketable securities - net
Penjualan aset tetap	2d,13	76.785.736.508	7.822.484.700	Sales of fixed assets
Divestasi pada entitas asosiasi	2d,2e	-	18.799.394.177	Divestment in associates
Pembelian efek - bersih	2d,2e,5	(1.130.000.000.000)	(459.158.815.528)	Purchases on marketable securities - net
Pembelian aset tetap	2d,13,49	(1.121.135.717.140)	(224.644.253.034)	Purchases of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(1.974.349.980.632)	(518.055.140.516)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank	2d,2e,	16.685.426.455.430	8.531.019.951.846	Proceeds from bank borrowings
Penerimaan dana dari MTN	2d,2e,19	4.470.700.000.000	692.000.000.000	Proceeds from MTN
Penerimaan dana dari obligasi	2d,2e,20	3.666.200.000.000	1.983.800.000.000	Proceeds from bonds
Penerimaan dana dari hibah	2d,2e,2r,37	61.000.000.000	189.394.478.322	Receipt from the grant
Penerimaan dana dari pihak non-bank	2d,2e,2r,37	2.375.000.000	-	Receipt from non-bank
Penerimaan dari Penyertaan Modal Negara	2d,2e,30	-	2.500.000.000.000	Receipt from State Capital Investment
Pembayaran pinjaman bank	2d,2e,18	(10.662.297.685.706)	(7.138.312.760.726)	Payment for bank borrowing
Pembayaran pokok obligasi		(2.997.800.000.000)	(750.000.000.000)	Payment for bond settlement
Pembayaran untuk MTN	2d,2e,19	(2.229.500.000.000)	(390.000.000.000)	Payment for MTN
Pembayaran biaya emisi obligasi	2d,2e,20	(9.162.068.668)	(3.004.316.983)	Payment of bond issuance cost
Pembayaran dana kepada pihak non-bank	2d,2e	(2.875.560.000)	-	Payment of funds to non-bank
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		8.984.066.141.056	5.614.897.352.459	Net cash flows provided by financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(441.588.859.896)	1.361.456.313.716	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		4.462.197.480.623	3.100.741.166.907	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2d, 4	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS
TERDIRI DARI:				COMPRISE OF:
Kas	2d, 4	11.602.944.098	13.271.959.722	Cash on hand
Bank	2d, 4	3.016.948.001.897	3.087.305.520.901	Cash in bank
Deposito jangka pendek	2d, 4	992.057.674.732	1.361.620.000.000	Short-term deposits
Total		4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, yang pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01. 01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH.09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 ("Akta No. 1").

Akta No.1 tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 59 tanggal 28 Oktober 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah dicatat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani Nomor AHU-AH.01.03.0468167 pada tanggal 2 November 2021. Akta tersebut juga telah dicantumkan dalam Berita Negara No.089 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 034232 pada tanggal 3 November 2021.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pembiayaan, Penyertaan, serta Jasa Manajemen dan Kemitraan. Sejalan dengan 9 agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. GENERAL INFORMATION

a. Company Establishment

The Company was established based on the Government Regulation of Republic Indonesia No. 38 in 1999 dated on May 25, 1999 on the State Capital Investment of the Republic of Indonesia for Establishment of the Company (Persero) In Order to Development Cooperation, Small & Medium Enterprise, which it's establishment stated in Deed of Establishment No. 1 dated June 1, 1999, made by Ida Sofia, S.H., Notary in Jakarta, where the deed has been approved by the Minister of Law and Human Right of Indonesia No. C-11.609.HT.01. 01.TH.99 on June 23, 1999, and was registered in the Companies Registration Office of Central Jakarta Municipality under No. 4758/BH.09.05/VIII/99 dated August 27, 1999 and was published in Supplement No. 5681 of State Gazette No. 73 dated September 10, 1999. ("Deed No.1").

The Deed No.1 has been amended several times, with the latest amendment contained in the Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 59 dated October 28, 2021 made before Hadijah, SH, Notary in Jakarta, whose notification of the amendment has been recorded in the Legal Entity Administration System database. Ministry of Law and Human Rights concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of PT Permodalan Nasional Madani Number AHU-AH.01.03.0468167 on November 2, 2021. The deed has also been included in the State Gazette No.089 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 034232 on November 3, 2021.

The purpose and objective of the Company is to conduct business in the field of empowerment and development of micro, small, medium, and cooperatives by carrying out business activities on Financing Services, Participation, and Management and Partnership Services. In line with the 9 priority agenda of the Government of the Republic of Indonesia (NAWACITA) which aims towards Indonesia being politically sovereign, and economically independent and peculiar in culture.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan menjalankan bisnis komersil sejak tahun 1999 berdasarkan PP No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2008 Perusahaan melakukan *turn-around* bisnisnya dengan melakukan pembiayaan langsung kepada pengusaha mikro, kecil, dan UKM melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sejak bulan Agustus tahun 2008. Dimulai dengan 12 unit ULaMM sebagai *pilot project*, saat ini Total unit ULaMM telah menjadi 1.163 unit ULaMM.

Pada akhir tahun 2015, Perusahaan melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita prasejahtera dengan produk Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada 31 Desember 2021 dan 2020, Total nasabah Mekaar masing-masing sudah mencapai 11.011.194 nasabah dan 7.802.806 nasabah (tidak diaudit).

Kontribusi pendapatan dari pembiayaan Mekaar dan ULaMM pada pendapatan usaha Perusahaan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 82,22% dan 16,84%.

Pada 31 Desember 2021, Perusahaan berkedudukan di Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta dan memiliki 62 kantor cabang ULaMM dan 2.985 kantor cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan berkedudukan di Menara Taspen (d.h. Gedung Arthaloka) Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta dan memiliki 62 kantor cabang ULaMM dan 2.668 kantor cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

Arif Rahman Hakim
M. Sholeh Amin
Meidyah Indreswari
Veronica Colondam
Parman Nataatmadja

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan dan Operasional
Direktur Bisnis
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
Tjatur Herry Priyono
Kindaris
Sunar Basuki
Anton Fahlevi

1. GENERAL (continued)

a. Company Establishment (continued)

The company began its commercial business since 1999 in according to the PP No. 38 year 1999. In 2008 the Company conducted *turn-around* its business with direct financing to micro, small, and SMEs through Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) since August of 2008. Starting with 12 units ULaMM as a pilot project, the current number of units has been a 1,163 ULaMM.

At the end of 2015, the Company has done a business expansion to Company of underprivileged women through product of Mekaar (Fostering Economic Family Welfare). As of December 31, 2021 and 2020, the customers of Mekaar has reached 11,011,194 customers and 7,802,806 customers, respectively (unaudited).

The revenue contribution from financing of Mekaar and ULaMM on the Company's operating revenues as of December 31, 2021 were 82.22% and 16.84%, respectively.

As of December 31, 2021, the Company is domiciled at Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta and has 62 ULaMM branch offices and 2,985 Mekaar branch offices spread throughout Indonesia.

The Company is located in Taspen Tower (formerly known as Arthaloka Building), 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta and had 62 branch offices of ULaMM and 2,668 branch offices of Mekaar spread throughout Indonesia.

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2021 are follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Finance and Operation Director
Business Director
Institutional and Planning Director
Compliance and Risk Management Director

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani, Kementerian BUMN memberhentikan dengan hormat Sdr. Rully Indrawan dan mengangkat Sdr. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani, Kementerian BUMN memberhentikan dengan hormat Sdr. M.Q. Gunadi sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Sdr. Noer Fajrieansyah sebagai Direktur Kelembagaan Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani.

Selanjutnya Kementerian BUMN mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Sebelumnya	Menjadi
Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan dan Operasional
Direktur Kelembagaan	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

Selain itu, Kementerian BUMN juga mengalihugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Sebelumnya/Formerly	Menjadi/Current
Direktur Keuangan/ <i>Finance Director</i>	Tjatur H. Priyono
Direktur Bisnis/ <i>Business Director</i>	Anton Fahlevie

Selain itu, Kementerian BUMN juga mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Direktur Bisnis	Kindaris
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan	Sunar Basuki

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the General Meeting of Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 dated April 16, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of the Company PT Permodalan Nasional Madani, Ministry of SOEs respectfully dismissed Mr. Rully Indrawan and appointed Mr. Arif Rahman Hakim as President Commissioner of the Company PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the General Meeting of Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 dated May 28, 2021 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Tasks, and Appointment of Members -Members of the Board of Directors of the Company PT Permodalan Nasional Madani, Ministry of SOEs honorably dismiss Mr. M.Q. Gunadi as Director of Compliance and Risk Management and Mr. Noer Fajrieansyah as Institutional Director of the Company PT Permodalan Nasional Madani.

Furthermore, the Ministry of SOE's changed the nomenclature of the positions of the members of the Board of Directors of the Company, as follows:

Formerly	Current
<i>Finance Director</i>	<i>Director of Finance and Operational</i>
<i>Institutional Director</i>	<i>Director of Institutional and Planning</i>

In addition, the Ministry of SOE's has also appointed the names below as members of the Board of Directors of the Company, as follows:

Formerly	Current
	Direktur Keuangan dan Operasional/ <i>Finance and Operations Director</i>
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko/ <i>Compliance and Risk Management Director</i>

In addition, the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) has also appointed the names below as members of Directors of the Company, as follows:

	<i>Business Director</i>
	<i>Institutional and Planning Director</i>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

Rully Indrawan
M. Sholeh Amin
Meidyah Indreswari
Veronica Colondam
Parman Nataatmadja

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Bisnis
Direktur Kelembagaan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
Tjatur Herry Priyono
Anton Fahlevie
Noer Fajrieansyah
M.Q. Gunadi

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam pelaksanaan manajemen Perusahaan agar berfungsi secara maksimal. Masing-masing anggota Dewan Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Pembagian tugas Direksi PT Permodalan Nasional Madani mengacu kepada Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. S-042/PNM-KOM/IX/20 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Persetujuan Struktur Organisasi PT Permodalan Nasional Madani yang berlaku efektif tanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut:

- 1) **Direktur Utama**
 - Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Satuan Pengawas Intern;
 - Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Sekretariat Perusahaan;
 - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas Unit Usaha Syariah;
 - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Bisnis *Support* dan Pengembangan Portofolio Mekaar.
- 2) **Direktur Bisnis**
 - Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* ULaMM;
 - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar I;

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2020 are follows:

Board of Commissioners

President Commissioner/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Finance Director
Business Director
Institutional Director
Compliance and Risk Management Director

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors

Board of Directors is the Company organ that carries the collegial duties and responsibilities in implementing corporate management to its maximum function. Every member of the Board of directors carries the duty and makes decisions according to their respective job divisions and authorities.

Segregation duties of the Board of Directors of PT Permodalan Nasional Madani refers to the Approval Letter of the Board of Commissioners No. S-042/PNM-KOM/IX/20 dated October 14, 2020 on the Approval of Organizational Structure PT Permodalan Nasional Madani effective on October 14, 2020 as follows:

- 1) **President Director**
 - Responsible for the functioning of the Internal Audit Unit;
 - Responsible for the function of Corporate Secretary;
 - Coordinating and be responsible for Sharia Business Unit;
 - Coordinating and responsible for the implementation of Business Support and Development of Portfolio Mekaar.
- 2) **Business Director**
 - Coordinating and responsible for the implementation of Executive Vice President ULaMM duties;
 - Coordinating and responsible for the implementation of Business Management of Mekaar I;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan
(lanjutan)**

**Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab
Dewan Direksi (lanjutan)**

2) Direktur Bisnis (lanjutan)

- Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar II;
- Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar III;
- Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Mekaar.

3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- Mengkoordinir dan mendukung seluruh aktivitas Direksi dalam hal implementasi dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP dan RJPP dengan berlandaskan *Good Corporate Governance*;
- Bertanggung jawab untuk memonitor, mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya *Key Performance Indicator* (KPI) sesuai dengan Kontrak Manajemen;
- Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi manajemen risiko dan *Good Corporate Governance*;
- Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* Pengembangan dan Legal.

4) Direktur Keuangan dan Operasional

- Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* Keuangan dan Operasional.

5) Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

- Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi sistem teknologi informasi, baik pengembangan strategis teknologi informasi maupun infrastruktur dan operasional teknologi informasi;
- Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Perencanaan dan Riset;
- Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pengelolaan Jasa Manajemen dan Kemitraan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK);

1. GENERAL (continued)

**b. Board of Commissioners, Directors and
Employees (continued)**

**The Scope and Responsibilities of the
Board of Directors (continued)**

2) Business Director (continued)

- Coordinating and responsible for the implementation of *Business Management of Mekaar II*;
- Coordinating and responsible for the implementation of *Business Management of Mekaar III*;
- Coordinating and responsible for the implementation of *Business Support and Development of Mekaar*.

**3) Director of Compliance and Risk
Management**

- Coordinate and support all activities of the Directors in terms of the implementation of the entire program of work set out in RKAP and RJPP on the basis of *Good Corporate Governance*;
- Responsible for monitoring, coordinating and ensuring the achievement of *Key Performance Indicator* (KPI) in accordance with *Contract Management*;
- Responsible for function of risk management and *Good Corporate Governance*;
- Coordinating and responsible for the implementation of *Executive Vice President Development and Legal* duties.

4) Director of Finance and Operations

- Responsible for the management and development of *Human Resources*;
- Coordinating and responsible for the implementation of *Executive Vice President Finance and Operational* duties.

5) Institutional and Planning Director

- Responsible for the function of *information technology system, both strategic development of information technology and information technology infrastructure and operations*;
- Responsible for the function of *Planning and research*;
- Coordinating and responsible of *Management Services for Small and Micro Enterprises (SME)*;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan
(lanjutan)**

**Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab
Dewan Direksi (lanjutan)**

- 5) Direktur Kelembagaan dan Perencanaan (lanjutan)
- Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pengelolaan LKMS, PKBL, serta pengendalian afiliasi dan entitas anak;
 - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Usaha.
- 6) *Executive Vice President* ULaMM
- Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas aktivitas penagihan dan remedial untuk menjaga aset Perusahaan;
 - Bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan ULaMM;
 - Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan ULaMM I di Wilayah Barat (Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat);
 - Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan ULaMM II di Wilayah Timur (Seluruh Indonesia kecuali Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat).
- 7) *Executive Vice President* Pengembangan dan Legal
- Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi *corporate legal*;
 - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi Perencanaan dan Riset;
- 8) *Executive Vice President* Keuangan dan Operasional
- Bertanggungjawab atas pengelolaan fungsi-fungsi *accounting, treasury* dan pendanaan;
 - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi dan sistem operasi;
 - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi pendukung dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung proses bisnis Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 total karyawan tetap Perusahaan masing-masing berjumlah 3.841 karyawan (tidak diaudit) dan 3.683 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

- 5) *Institutional and Planning Director (continued)*
- *To coordinate and be responsible for the management and control LKMS, PKBL, affiliates and subsidiaries;*
 - *Coordinating and be responsible for the implementation of the Capacity Development of Business.*
- 6) *Executive Vice President of ULaMM*
- *Coordinating and responsible for collecting and remedial activities to safeguard the Company's assets;*
 - *Responsible for the development and supervision of ULaMM;*
 - *Responsible for the management and development of ULaMM I in the Western Region (Sumatera, DKI Jakarta, and West Java);*
 - *Responsible for the management and development of ULaMM II in the Eastern Region (Throughout Indonesia except for Sumatera, DKI Jakarta, and West Java).*
- 7) *Executive Vice President of Development and Legal Functions*
- *Coordinating and responsible of corporate legal functions;*
 - *Responsible for the function of Planning and Research;*
- 8) *Executive Vice President of Finance and Operations*
- *Responsible for managing accounting, treasury and funding functions;*
 - *Responsible for operations function and system;*
 - *Responsible for supporting the functioning and maintenance of infrastructure to support the business processes of the Company.*

As of December 31, 2021 and 2020 the Company's has total employees of 3,841 (unaudited) and 3,683 (unaudited), respectively.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	Meidyah Indreswari
Anggota	Edy Karim
Anggota	R. Yudha Kusumah

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-004/PNM-KOM/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, Dewan Komisaris mengangkat Sdr. Edy Karim sebagai Anggota Komite Audit sekaligus merangkap Sekretaris Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, Dewan Komisaris mengangkat Sdr. R. Yudha Praja Kusumah sebagai Anggota Komite Audit sekaligus merangkap Sekretaris Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

Manajemen kunci Perusahaan cakupannya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Executive Vice President;
4. Kepala Divisi;
5. Kepala SPI;
6. Kepala SPR;
7. Pemimpin Cabang ULaMM;
8. Kepala Regional Mekaar;
9. Koordinator Pengawas Mekaar;
10. Komite Audit;
11. Komite Nominasi dan Remunerasi;
12. Dewan Pengawas Syariah.

1. GENERAL (continued)

c. Audit Committee

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Chairman
Member
Member

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-004/PNM-KOM/IX/2020 dated September 1, 2020 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani, the Board of Commissioners appointed Mr. Edy Karim as a Member of the Audit Committee and concurrently as Secretary of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 dated November 25, 2020 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani, the Board of Commissioners appointed Mr. R. Yudha Praja Kusumah as a Member of the Audit Committee and concurrently as Secretary of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

The scope of key managements of the Company as follows:

1. Boards of Commissioners;
2. Boards of Directors;
3. Executive Vice President;
4. Head of Division;
5. Head of SPI;
6. Head of SPR;
7. Leader of ULaMM Branch;
8. Head of Mekaar Regional;
9. Coordinators of Mekaar Controller;
10. Audit Committee;
11. Remuneration and Nominative Committee;
12. Boards of Controller Sharia.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Satuan Pengawasan Intern

Sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.1.7, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah mengesahkan *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit) pada tanggal 8 April 2021, dan selanjutnya Direksi Perusahaan telah menunjuk Sdr. Siswo Pujono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) berdasarkan Surat Direksi Perusahaan No.SK-0033/PNM/DIR/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Audit Intern diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan membantu terciptanya *Good Corporate Governance* bagi Perusahaan. Untuk mewujudkan misi tersebut, misi SPI adalah memberikan suatu penilaian secara independen kepada manajemen mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen pada semua kegiatan Perusahaan melalui *assurance* (pengujian dan penilaian dan pemberian jasa konsultansi).

Fungsi

1) Peran Auditor Intern

Memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, proses *governance* dengan melaksanakan audit operasional dan keuangan Perusahaan.

2) *Good Corporate Governance*

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada SPI adalah untuk meningkatkan kontribusi SPI dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process* dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, independensi, responsibilitas, akuntabilitas, dan kewajaran.

1. GENERAL (continued)

d. Internal Audit Unit

In accordance with the Regulation of FSA No. IX.1.7, Board of Directors and Commissioners has endorsed the Internal Audit Charter (Charter of Internal Audit) dated April 8, 2021, and then the Board of Directors of the Company has been appointed Mr. Siswo Pujono as Head of Internal Control Units by the Board of Directors Letter No.SK-0033/PNM/DIR/X/2021 dated October 21, 2021.

Internal audit is expected to be able to provide added value and help to promote Good Corporate Governance for the Company. To achieve this mission, SPI's mission is to provide an independent assessment to management on the adequacy and effectiveness of management control systems on all of its activities through assurance (testing and assessment and provision of consultancy services).

Function

1) *Role of the Internal Auditor*

Provide independent and objective assurance and consulting services for providing value added services and enhance the effectiveness of the Company's operational activities through evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, governance processes to implement the Company's operational and financial audits.

2) *Good Corporate Governance*

The main purpose of applying Good Corporate Governance (GCG) in SPI is to increase the contribution of SPI in making assessments and give recommendations and solutions to improve the governance process by increasing the principles of transparency, independence, responsibility, accountability and fairness.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Kedudukan dan Ruang Lingkup

1) Kedudukan

- a) SPI berada langsung di bawah Direktur Utama, sehingga laporan yang diterbitkan juga langsung disampaikan kepada Direktur Utama;
- b) SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- c) Kepala SPI dapat diberhentikan oleh Direktur Utama apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor SPI sebagaimana diatur dalam *Internal Audit Charter* dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- d) Auditor yang berhak duduk dalam SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan audit intern tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a) Mereviu dan menilai kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian keuangan dan administrasi;
- b) Mencakup segala aspek dan unsur dari Perusahaan, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1) Tugas dan tanggung jawab SPI

- a) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- b) Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dan selanjutnya melakukan pemantauan, analisis dan pelaporan terkait pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

1. GENERAL (continued)

The Status and Scope

1) The Status

- a) SPI are directly under the President Director, so that the published reports are also directly submitted to the President Director;
- b) SPI headed by Chief SPI appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, and responsible to President Director;
- c) Head of SPI may be removed by the President Director if which concerned not fulfill requirements referred to in SPI auditor Internal Audit Charter and failed or incompetent or run errands;
- d) Auditors are entitled to sit in the SPI are directly responsible to the Head of Internal Audit.

2) Scope

The scope of internal audit work are not limited to the following:

- a) Review and assess the adequacy and effectiveness of the financial control and administrative structure;
- b) Covering all aspects and elements of the Company, so it can support the analysis of the optimal in helping the process of decision making by the Company's management.

Duties, Responsibilities and Authorities

1) Duties and responsibilities of SPI

- a) Testing and evaluating the implementation of the internal control and risk management systems in accordance with the Company's policy;
- b) Make the analysis and assessment of the efficiency in the areas of finance, accounting, operations and other activities through direct inspection and supervision indirectly;
- c) Suggest improvements and objective information about the activities examined at all levels of management and subsequent monitoring, analysis and reporting related to the follow-up improvements that have been suggested;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Satuan Pengawasan Intern (lanjutan)

**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
(lanjutan)**

- 1) Tugas dan tanggung jawab SPI (lanjutan)
 - d) Bekerjasama dengan Komite Audit dan berkoordinasi hal-hal dalam hubungan dengan kegiatan pemeriksa eksternal.
- 2) Kewenangan SPI
 - a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - b) Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal;
 - c) Melakukan rapat secara berkala dan insidental, serta melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan para anggotanya.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Manajemen:
 - a) Menerapkan kebijakan mengenai teknologi informasi, sistem pengendalian intern yang efektif, serta manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perusahaan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan;
 - c) Bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan atas kecurangan (*fraud*);
 - d) Melaksanakan tindak lanjut dan koreksi atas hasil audit SPI.

Pelaporan

Kepala SPI menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada:

- 1) Direktur bidang yang terkait langsung dengan objek audit;
- 2) Komisaris melalui Komite Audit;
- 3) Kepala Divisi/Unit yang diaudit untuk diketahui dan selanjutnya ditindaklanjuti.

1. GENERAL (continued)

d. Internal Audit Unit (continued)

**Duties, Responsibilities and Authorities
(continued)**

- 1) *Duties and responsibilities of SPI (continued)*
 - d) *Corporate with the Audit Committee and coordinate matters in connection with the activities of the external auditor.*
- 2) *Internal Audit Authority*
 - a) *To access whole relevant information about the Company in relation to the duties and functions;*
 - b) *Coordinating activities with the activities of the external auditor;*
 - c) *Conducting regular meetings and incidental, and communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Audit Committee and it's members.*
- 3) *Duties and responsibilities of the Management:*
 - a) *Implementing the policies regarding information technology, effective system of internal control, and risk management in a consistent and thorough manners, both of operational and non-operational;*
 - b) *Applying the principles of Good Corporate Governance in the management of the Company to maximize the value of the Company;*
 - c) *Responsible for prevention of fraud;*
 - d) *Implementing the follow-up and corrective activities of the results of the SPI audit.*

Reporting

Head of SPI submits the audit reports to the President Director with copies to:

- 1) *Director of field directly related to the object of the audit;*
- 2) *Commissioners through the Audit Committee;*
- 3) *Head of Division/Unit to be audited to be known and then followed up.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Satuan Pengawasan Intern (lanjutan)

Pelaporan (lanjutan)

Secara periodik *Internal Audit Charter* ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat optimal. *Internal Audit Charter* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Perusahaan, maka *Internal Audit Charter* ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.

e. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.4 dan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: S-033/PNM-KOM/VII/21 tanggal 15 Juli 2021, tentang Pengesahan Jabatan Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani telah menyetujui penggantian pejabat Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani dari posisi sebelumnya dijabat oleh Sdr. Errinto Pardede dan digantikan oleh Sdr. L. Dodot Patria Ary.

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan Perusahaan;
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- 4) Sebagai penghubung atau *contact person* dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat.

f. Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan ditetapkan berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor: SK-146/MBU/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani.

1. GENERAL (continued)

d. Internal Audit Unit (continued)

Reporting (continued)

Periodically the *Internal Audit Charter* needs to be assessed for adequacy by the President Director and the Board of Commissioners that the implementation of the *Internal Audit Charter* is always at the optimum level. *Internal Audit Charter* shall come into force on the date and in the future if there is a development of the Company's business activities, the *Internal Audit Charter* will take the necessary adjustment.

e. Corporate Secretary

In accordance with Bapepam-LK Regulation No.IX.1.4 and based on the Letter of the Board of Commissioners Number: S-033/PNM-KOM/VII/21 dated July 15, 2021, regarding Ratification of Position of Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani has approved the replacement of officials of Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani from the previous position held by Mr. Errinto Pardede to and replaced by Mr. L. Dodot Patria Ary.

The principal duties and responsibilities of the Company secretary are follows:

- 1) Following the development of the Capital Market in particular rules that apply in the Capital Market;
- 2) Providing the public with any information needed investors relating to the Company;
- 3) Advise the Directors to comply with the statutory provisions in force in the Capital Market;
- 4) As a liaison or contact person with the Financial Services Authority (OJK) and the public.

f. Sharia Supervisory Board

The composition of the Company's Sharia Supervisory Board is determined based on the Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS Number: SK-146/MBU/07/2019 dated July 3, 2019 concerning the Appointment of Members of PT Permodalan Nasional Madani's Sharia Supervisory Board of Companies.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Pengawas Syariah (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	K.H. Didin Hafidhuddin	Chairman
Anggota	Muhammad Syafii Antonio	Member

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 2) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Dewan Direksi dalam hal ini melalui Direktur Bisnis Perusahaan.
- 3) Sebagai mediator antara Perusahaan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 4) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perusahaan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perusahaan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

g. Penawaran Umum Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.

1. GENERAL (continued)

f. Sharia Supervisory Board (continued)

The Company's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

Chairman	K.H. Didin Hafidhuddin
Member	Muhammad Syafii Antonio

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board is as follows:

- 1) Assisting to supervise the activities of the business units of the Company which run business based on sharia principles in order not to deviate from the rules and principles of Sharia has regulated by the Sharia National Council (DSN).
- 2) As advisors and providers of advice to the Board of Directors in this regard through the Company's Director of Micro Business I and II.
- 3) As a mediator between the Company and DSN to communicate proposals and suggestions development of sharia financial products and services that require further investigation and the fatwa of DSN.
- 4) As a representative DSN placed in the Company where DPS will report the business activities and the development of The Company as conditions regulated by the DSN.

g. Public Offering of Bonds

Revolving Bonds IV PNM Tranche I Year 2021

On December 13, 2021, the Company issued Revolving Bond IV PNM Year 2021 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (FSA=OJK) based on Decree No.S-227/D.04/2021 dated November 30, 2021.

The Company publishes and offers Revolving Bond IV PNM Tranche I in 2021 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 13, 2021. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate of 3.75% per year, a period of 370 calendar days.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 (lanjutan)

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A, 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp168.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bonds IV PNM Tranche I Year 2021 (continued)

- Series B: Total principal amount of Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate of 5.50% per year, a period of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate of 6.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of March 10, 2022 until December 20, 2022 for Series A Bonds, December 20, 2024 for the Series B Bonds and December 20, 2026 for the Series C Bonds.

Revolving Bond III PNM Tranche V Year 2021

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (FSA=OJK) based on Decree No.S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche V in 2021 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on March 18, 2021. The bonds of the Company consists of:

- Seri A: Total principal amount of Rp168,000,000,000, fixed interest rate of 6.25% per annum, a period of 370 calendar days.
- Seri B: Total principal amount of Rp159,000,000,000, fixed interest rate of 7.25% per annum, a period of 3 years.
- Seri C: Total principal amount of Rp339,200,000,000, fixed interest rate of 8.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of June 17, 2021 until March 17, 2022 for Series A Bonds, March 17, 2024 for the Series B Bonds and March 17, 2026 for the Series C Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offered Revolving Bonds III PNM Tranche IV in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2020. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp904,800,000,000, fixed interest rate of 6.50% per annum, a period of 370 calendar days.
- Series B: Total principal amount of Rp537,000,000,000, fixed interest rate of 7.75% per annum, a period of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp292,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from March 4, 2021 to December 4, 2021 for Series A Bonds and December 4, 2023 for the Series B Bonds and December 4, 2025 for the Series C Bonds.

Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2020 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S- 58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020 (continued)

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche III in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 4, 2020. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp55,100,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp194,900,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from July 30, 2020 to April 30, 2023 for Series A Bonds and April 30, 2025 for the Series B Bonds.

Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche II year 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 29, 2019. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp586,500,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp763,500,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of August 28, 2019 until November 28, 2022 for Series A Bonds and November 28, 2024 for the Series B Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2019. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,401,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp599,000,000,000, fixed interest rate of 9.85% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from August 28, 2019 until May 28, 2022 for Series A Bonds and May 28, 2024 for the Series B Bonds.

Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bond II PNM Year 2017 with principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds had been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company published and offered Revolving Bond II PNM Tranche II in 2018 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on April 16, 2018. The Company bonds consist of:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 (lanjutan)

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018 (continued)

- Series A: Total principal amount of Rp1,254,000,000,000, fixed interest rate of 8.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp1,246,000,000,000, fixed interest rate of 8.50% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from July 13, 2018 until April 13, 2021 for Series A Bonds and April 13, 2023 for the Series B Bonds.

Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bond II PNM Tranche Year 2017 with principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company published and offered Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on July 13, 2017. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 9.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment will be paid 3 (three) months from October 12, 2017 to July 12, 2020 for Series A Bonds and July 12, 2022 for the Series B Bonds.

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016

On December 12, 2014, the Company issued Revolving Bonds I PNM Tranche I Year 2014 with principal amount of Rp2,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-534/D.04/2014 dated December 12, 2014.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 November 2019 untuk Obligasi Seri A dan 3 November 2021 untuk Obligasi Seri B.

h. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki penyertaan langsung lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016 (continued)

The Company publishes and offers Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 4, 2016. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp661,000,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp839,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from February 3, 2017 to November 3, 2019 to Series A Bonds and November 3, 2021 for the Series B Bonds.

h. The Subsidiaries Structure

The Company has direct ownership investment of more than 50% and/or has control on the Subsidiaries' management as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</u>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2021	99,9991%	227.041.871.091
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2021	99,9997%	3.067.855.025.224
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</u>					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 99,998%/ Owned by PNM VC at 99.998%	727.137.592.531
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 99,953%/ Owned by PNM VC at 99.953%	1.029.408.510.154

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

h. The Subsidiaries Structure (continued)

2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Alih Dayal/ Outsourcing Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90.000%	37.203.797.556
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 98,966%/ Owned by PNM VC at 98.966%	88.131.055.348
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90.000%	86.601.152.646
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 94,444%/ Owned by PNM VC at 94.444%	183.004.546.492
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 99,897%/ Owned by PNM VC at 99,897%	498.371.506.331
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 99,96%/ Owned by PNM VC at 99,96%	24.090.384.498
PT Crom Madani Indonesia	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 100%/ Owned by PNM VC at 100%	5.616.670.369
PT Karya Digital Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 53%/ Owned by PNM VC at 537%	10.000.000.000
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar 76,372%/ Owned by PNM VS at 76.372%	26.808.184.535
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar 64,659%/ Owned by PNM VS at 64.659%	109.006.515.543
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar 86,667%/ Owned by PNM VS at 86.667%	56.245.626.000
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Juni/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar 74,710%/ Owned by PNM VS at 74.710%	64.105.803.496

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

h. The Subsidiaries Structure (continued)

2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</u>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec, 2020	99,9991%	212.557.441.304
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec, 2020	99,9997%	2.826.241.611.149
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</u>					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,998%/ Owned by PNM VC at 99.998%	561.445.045.231
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,953%/ Owned by PNM VC at 99.953%	1.033.703.813.135
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Alih Daya/ Outsourcing Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90.000%	22.019.565.538
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 98,966%/ Owned by PNM VC at 98.966%	47.845.029.359
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90.000%	36.101.661.965
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 94,444%/ Owned by PNM VC at 94.44%	147.224.714.917
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,897%/ Owned by PNM VC at 99.897%	329.140.211.983
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,957%/ Owned by PNM VC at 99.957%	39.363.888.072
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 76,372%/ Owned by PNM VS at 76.372%	73.915.357.045
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 64,659%/ Owned by PNM VS at 64.659%	106.605.134.195

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

h. The Subsidiaries Structure (continued)

2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ (lanjutan)</u> <i>Indirect Investment: (continued)</i>					
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 86,667%/ Owned by PNM VS at 86.667%	56.275.903.000
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 51,950%/ Owned by PNM VS at 51.950%	62.198.358.733

PT PNM Investment Management, berdiri dan beroperasi pada tanggal 7 Mei 1996 di Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha manajemen investasi, penasihat investasi, dan aktivitas lain yang berhubungan dengan manajemen investasi sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Perusahaan memiliki karyawan masing-masing sejumlah 47 dan 37 karyawan (tidak diaudit).

PT PNM Investment Management, was established and operated on May 7, 1996 in Jakarta is engaged in investment management, business advisory services and other activities relating to investment management in accordance with the capital market regulations and other related laws. As of December 31, 2021 and 2020, the Company had a total of 47 and 37 employees, respectively (unaudited).

PT PNM Venture Capital, berdiri dan beroperasi pada tanggal 28 Oktober 1999, bergerak dalam bidang usaha modal ventura untuk membiayai usaha skala menengah, khususnya yang bersifat investasi dengan pola penyertaan modal, (diharapkan akan melepas investasinya di perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan), akuisisi melalui obligasi konversi dan bagi hasil. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Perusahaan memiliki karyawan masing-masing sejumlah 91 dan 99 karyawan (tidak diaudit).

PT PNM Venture Capital, established and operated on October 28, 1999 in Jakarta, is engaged in venture capital to finance medium-size enterprises, especially the character of the investment with the pattern of capital investment, (is expected to release its investment in the venture is within a predetermined time), acquisitions through convertible bonds and profit sharing. As of December 31, 2021 and 2020, the Company had a total of 91 and 99 employees, respectively (unaudited).

i. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

i. Completion of the Consolidated Financial Statements

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup"). Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah diotorisasi oleh Dewan Direksi pada tanggal 20 Juni 2022.

The Directors are responsible for the preparation of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries ("Group"). These Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries were authorised by the Board of Directors on June 20, 2022.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang terdiri dari PSAK dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") serta Peraturan No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip kesinambungan usaha serta mengikuti konvensi harga historis, nilai kini, nilai realisasi bersih, dan/atau nilai wajar. Kebijakan akuntansi ini ditetapkan secara konsisten, kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, kecuali bagi penerapan beberapa SAK diubah. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait, beberapa diubah dan standar akuntansi diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing masing akun tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements are set out below:

a. Compliance with the Financial Accounting Standards

The consolidated financial statements the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), which comprise the SFAS and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("FASB") and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Guidance on Financial Statements Presentation and Disclosures.

The consolidated financial statements are prepared based on going concern principle and historical cost basis, present value, net realizable value, and/or fair value. The accounting policies set out consistently, except when stated to a change in accounting policy.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021, except for the adoption of several amended FAS. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2021 and 2020.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi untuk akun aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp") penuh, kecuali dinyatakan lain, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Laporan keuangan Entitas Anak disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan Induk. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan dan Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi kritis tertentu. Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang melibatkan tingkat yang lebih tinggi dari penilaian atau kompleksitas, atau area di mana asumsi dan estimasi yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (continued)

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost concept, as modified by financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss. The consolidated financial statements have been prepared using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flow.

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the Group's functional currency.

b. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statements

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified, which is the functional currency of the Company and Subsidiaries.

The financial statements of the Subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Parent. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Company and its Subsidiaries, unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal Grup. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2021.

- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 13: "Properti Investasi";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 48: "Penurunan nilai aset";
- PSAK No. 112 "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK No. 22 "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK No. 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK No. 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK No. 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK No. 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK No. 73: "Sewa";
- PSAK No. 110: "Akuntansi Sukuk"; dan
- PSAK No. 111: "Akuntansi Wa'd".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Statement of Financial Accounting Standards (ISFAS)

The Group adopted new and revised of Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") that are effective from that date. Changes in the Group accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2021.

- Annual improvement SFAS No. 1: "Presentation of financial statements";
- Annual improvement SFAS No. 13: "Investment properties";
- Annual improvement PSAK No. 48: "Asset impairment"
- SFAS No. 112 "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS No. 22 "Business combination";
- Amendment of SFAS No. 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS No. 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS No. 62: "Insurance contract";
- Amendment of SFAS No. 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS No. 73: "Lease";
- SFAS No. 110: "Sukuk Accounting"; and
- SFAS No. 111: "Wa'd Accounting"

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial years.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan memperoleh pengendalian, dan terus dikonsolidasi sampai dengan tanggal ketika kontrol tersebut berhenti. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*),
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- c. Hak suara dan hak suara potensial Perusahaan.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai ketika Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas Entitas Anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan menghentikan pengendalian atas Entitas Anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of the Consolidated Financial Statement Presentation

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiary, more than half of the voting power of an entity.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:

- a. *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee),*
- b. *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- c. *The ability to use its power over the investee to affect the amount of its returns.*

When the Company has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. *The contractual arrangement with the other vote holders.*
- b. *Rights arising from other contractual arrangements.*
- c. *The Company's voting rights and potential voting rights.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiaries begins when the Company obtains control over the Subsidiaries and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a Subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the Subsidiaries.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar Perusahaan dieliminasi. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perusahaan juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali (KNP) yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan KNP juga dicatat pada ekuitas.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh pengendalian, dan terus dikonsolidasi sampai dengan tanggal ketika kontrol tersebut berhenti. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-Pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan dan Entitas Anak:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan total tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of the Consolidated Financial Statement Presentation (consolidated)

Intercompany transactions, balances, and unrealized gains and losses on transactions between Company's companies are eliminated. All intra-Company assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company are also eliminated in full on consolidation. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Company's accounting policies.

Transactions with Non-Controlling Interest (NCI) that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Company and its Subsidiaries as one business entity.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company and its Subsidiaries obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiary, more than half of the voting power of an entity.

Losses within a subsidiary are attributed to the Non-Controlling Interest (NCI) even if that results in a deficit balance for the NCI.

In case of loss of control over a subsidiary, the Company and subsidiaries:

- derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiaries;*
- derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- g. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian Perusahaan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Perusahaan akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Kepentingan Non-Pengendali (KNP) mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi dengan entitas non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Perbedaan antara nilai wajar yang dibayar dan saham yang diakuisisi atas nilai tercatat aset entitas anak dicatat pada ekuitas.

d. Kas dan Setara Kas

Dalam laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, deposito on call, investasi jangka pendek lainnya yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat yang ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" sebagai bagian dari Aset Lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of the Consolidated Financial Statement Presentation (consolidated)

- d. recognizes the fair value of the consideration received;
- e. recognizes the fair value of any investment retained;
- f. recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- g. reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities.

Non-Controlling Interest (NCI) represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiaries not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent.

The transactions with non-controlling entity that do not result in a loss of control are accounted for as an equity transaction (i.e., a transaction with owners in their capacity as owner). The difference between the fair value of any consideration paid and in the relevant acquired share of the carrying value of the net assets of the subsidiary is recorded in equity.

d. Cash and Cash Equivalents

In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and are subject to an insignificant risk of changes in value.

Restricted cash and cash equivalents which will be used to pay maturing obligations are presented as "Restricted Cash" under the assets section of the consolidated statement of financial position.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan

e. Financial Instruments

(i) Klasifikasi

(i) Classification

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at amortized cost.

Grup menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga (*solely payment of principal and interest (SPPI)*) dari aset keuangan.

The Group uses 2 (two) basis for classifying financial assets, namely the Group's business model for managing financial assets and the contractual cash flow characteristic of payments of principal and interest (*solely payment of principal and interest (SPPI)*) of financial assets.

Pengujian SPPI

SPPI Test

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Grup menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah instrumen keuangan yang diuji memenuhi pengujian SPPI.

As the first step of the classification process, the Group assesses the financial contractual requirements to identify whether the tested financial instruments meet the SPPI testing.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

The loan principal for testing purposes is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and is subject to change over the life of the financial asset (for example, if there are principal payments or amortization of premiums/discounts).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian kredit adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Grup menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

The most significant element of interest in a credit agreement is a consideration of the time value of money and credit risk. In making the assessment of SPPI, the Group applies judgment and takes into account relevant factors such as the currency in which financial assets are denominated and the period when interest rates are determined.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo maka dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Classification (continued)

SPPI Test (continued)

Conversely, contractual terms that provide more than *de minimis* exposure to risk or volatility in contractual cash flows that are not related to the basis of the loan arrangement, do not create SPPI's contractual cash flows on the total balance so in such a case, the financial assets are required to be measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

At initial recognition, the Group may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola;
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Classification (continued)

SPPI Test (continued)

At initial recognition, the Group can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Evaluation of business models

The business model is determined at a level that reflects how Group of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model carried out by considering, but not limited to, the following:

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Company's key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and
- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau total arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau total arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cashflows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Group considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>	Golongan (ditentukan oleh Perusahaan)/ <i>Class (as determined by the Company)</i>	Subgolongan/ <i>Subclasses</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portfolio efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>
		Pinjaman yang diberikan - bersih/ <i>Loans - net</i>
		Pembiayaan modal - bersih/ <i>Capital financing - net</i>
		Piutang jasa manajemen - bersih/ <i>Management services receivables - net</i>
		Pendapatan masih akan diterima/ <i>Accrued income</i>
Piutang kegiatan manajer Investasi/ <i>Investment management activities receivables</i>		
Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	Portofolio efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Utang bank dan lembaga keuangan/ <i>Bank and financial institution borrowings</i>
		Surat utang jangka menengah dan sukuk/ <i>Medium-term notes and sukuk</i>
		Utang obligasi/ <i>Bonds payable</i>
		Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri/ <i>Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution</i>
		Dana cadangan angsuran/ <i>Installment reserve fund</i>
		Utang kegiatan manajer investasi/ <i>Investment management activities payables</i>
		Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>
		Beban yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i>

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pengakuan dan Pengukuran

Aset Keuangan

(ii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Perusahaan pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi mencakup aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Classification (continued)

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Recognition and Measurement

Financial Assets

(ii) Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets at amortised cost.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The Company's financial assets at amortized cost consist of cash and cash equivalents, restricted cash equivalents, trade receivables, other receivables and other non-current assets.

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(ii) Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada PKL. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Liabilitas Keuangan

1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur, setelah pengakuan awal, pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali efek diskon tidak material, dalam hal ini mereka dinyatakan sebesar biaya perolehan. Beban bunga terkait diakui dalam "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Assets (continued)

(ii) Subsequent measurement (continued)

or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term.

For debt instruments at FVTOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

Financial Liabilities

1. Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Finance Costs" in profit or loss. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

2. Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value in the consolidated statements of financial position. Any gains or losses arising from changes in fair value of the financial liabilities are recognized in the profit or loss.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iii) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan akan dihapus bukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Perusahaan dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang Tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(iii) Derecognition

- a. Financial assets are derecognized when:
- the Contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
 - the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Company and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iii) Penghentian pengakuan (lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(iv) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada total tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(iii) Derecognition (continued)

- b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

If an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

(iv) Income and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iv) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok aset keuangan dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(v) Reklasifikasi aset keuangan

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(iv) Income and expense recognition (continued)

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(v) Reclassification of financial assets

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(v) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

(vi) Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(v) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

(vi) Offsetting of Financial Instruments

At the time of initial recognition, financial assets are measured at fair value, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets. Subsequent measurement of financial assets depends on their classification of assets.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vi) Saling Hapus dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam total neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(vii) Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*); referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisis arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(vi) Offsetting of Financial Instruments (continued)

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(vii) Fair value of financial instruments

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

*For financial instruments that do not have an active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include the use of market transactions is reasonable between the parties who understand and desire (*arm's length market transactions*); reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.*

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vii) Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(vii) Fair value of financial instruments (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry Company, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Company establishes fair value using a valuation technique.

The Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vii) Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Perusahaan. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko kredit counterparty. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direviu dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(vii) Fair value of financial instruments (continued)

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Company holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the consolidated statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted if necessary, particularly in view of the current market developments.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).
- Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vii) Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran kembali atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(vii) Fair value of financial instruments (continued)

- The Group recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.
- There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.
- The Group measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:
- debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

The Company considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

(viii) Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of financial assets

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Ekspektasian	Kerugian	Kredit
--------------------------------	-----------------	---------------

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Group in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Group);
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;
- For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi (lanjutan)

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Restructured Financial Assets (continued)

- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.
- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, the Group assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;
- Breach of contract, such as a default or arrears;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Memburuk (lanjutan)

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini: (lanjutan)

- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Credit-impaired Financial Assets (continued)

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events: (continued)

- The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;
- There is possibility that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or
- Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.
- Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.

Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara Individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Consolidated Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in consolidated the statement of financial positions as follows:

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the consolidated statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Individual impairment calculation

The Group determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have significant value; or
- Restructured loans which individually have significant value.

Collective impairment calculation

The Group determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have insignificant value; or
- Restructured loans which individually have insignificant value.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapus bukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau melakukan pengendalian dialihkan dari aset, aset tersebut diakui dengan keterlibatan berkelanjutan Perusahaan dalam aset.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur secara yang mencerminkan hak dan liabilitas yang Perusahaan telah ditahan.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai terendah antara nilai tercatat atas aset keuangan dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

Derecognition

Financial Assets

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement in the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the carrying amount of the financial asset and the maximum amount of consideration received that may have to be paid back.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

g. Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun/Year	Tarif/Rate	
Bangunan	20	5,00%	Building
Kendaraan	5	20,00%	Vehicles
Peralatan dan Perabotan Kantor	3 dan/and 5	33,33% dan/and 20,00%	Furniture, Fixtures and Equipment Office
Partisi Kantor	5	20,00%	Office Partition

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

g. Fixed Assets and Right of Use Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dibebankan pada laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

Aset tetap yang dihentikan dan dimiliki untuk dijual, berhenti dari yang disusutkan dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dalam kelompok aset lainnya. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai terendah antara nilai buku atau nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

Land is stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as an intangible asset and amortized over the legal life of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

The Group analyzes the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73, "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16, "Property, plant and equipment".

Fixed asset which is discontinued and held for sale, ceased of being depreciated and reclassified as non-current asset held for sale in other assets account. Non-current assets held for sale are measured at the lower of book value or fair value.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Biaya Pinjaman

Pinjaman yang diberikan dan piutang pembiayaan modal diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan - bersih dan pembiayaan modal - bersih mencerminkan hak tagihan Perusahaan yang sah kepada para debitur dikurangi dengan pendapatan yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari debitur dan jumlah pokok pinjaman, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, yang akan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan suku bunga efektif.

Biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi adalah pendapatan administrasi dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pinjaman tersebut.

Penyelesaian kontrak sebelum masa perjanjian berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak dan keuntungan yang timbul diakui dalam laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Grup mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan aset apabila biaya pinjaman tersebut dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian. Grup mengakui biaya pinjaman lainnya sebagai beban pada periode terjadinya.

Grup mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal, yaitu tanggal ketika Perusahaan pertama kali memenuhi semua kondisi berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Borrowing Costs

Loans and capital financing are classified as financial assets at amortized cost.

Loans - net and capital financing - net represent the Company's recourse to debtors less unrecognized income and allowance for impairment losses.

Unrecognized income represents the difference between the total installment payments to be received from the debtor and the principal amount of the loan, plus (less) unamortized transaction costs (income), which will be recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate.

Unamortized transaction costs (revenues) are the first incurred administration and transaction costs that are directly related to the loan.

The settlement of the contract before the agreement period ends is treated as a cancellation of the contract and the resulting gain is recognized in the current year's consolidated profit or loss.

The Group capitalizes borrowing costs as part of the cost of that asset when borrowing costs are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. Group recognize other borrowing costs as an expense in the period incurred.

The Group began to capitalize borrowing costs as part of the cost of a qualifying asset at an early date, that is the date when the company first meet all of the following conditions:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Biaya Pinjaman (lanjutan)

- a) terjadinya pengeluaran untuk aset;
- b) terjadinya biaya pinjaman;
- c) Grup telah melakukan aktivitasnya yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya telah selesai.

i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal dengan biaya. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat aset takberwujud yang dinilai baik terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diamortisasi selama umur ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin terganggu. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada akhir setiap periode pelaporan. Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Borrowing Costs (continued)

- a) the expenditures for the asset;
- b) the cost of borrowing;
- c) The Group has conducted its activities necessary to prepare the asset to be used or sold in accordance with the point.

The Group stop the capitalization of borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset to be used or sold in accordance with the intention has been completed.

i. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa tak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa tak terbatas terus terbukti. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dibuat secara prospektif.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup mengakui aset takberwujud apabila kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Grup mengakui aset takberwujud sebesar biaya perolehan.

Grup melakukan pengukuran setelah pengakuan awal aset takberwujud dengan menggunakan metode biaya, dimana suatu aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Sumber terjadinya aset takberwujud Grup yang berasal dari pembelian pengukuran nilai wajar dan penangguhan biaya.

Akun ini antara lain mencakup:

Beban ditangguhkan, adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu;

- Hubungan pelanggan kontrak diperoleh dalam kerjasama usaha diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hubungan kontraktual pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus selama umur yang diharapkan dari hubungan pelanggan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Intangible Assets (continued)

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

The Group recognizes an intangible assets if it is likely will acquire economic benefits in the future period from such assets and cost of that asset can be measured reliably. The Group recognizes an intangible assets at acquisition cost.

The Group take measurements after the initial recognition of intangible assets using the cost method, whereby an intangible asset carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Sources of the Group intangible assets arising from the purchase of fair value measurement and deferred charges.

These accounts include:

Deferred charges is expenses that spent and having benefit for more than one year, namely;

- *Contractual customer relationships acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. The contractual customer relations have a limited useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight line method over the expected life of the customer relationship.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Takberwujud (lanjutan)

- Beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Beban ditangguhkan meliputi perangkat lunak komputer, beban penawaran perdana reksadana dan lain-lain. Beban ditangguhkan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai taksiran masa manfaat selama 3 (tiga) tahun. Tarif amortisasi aset takberwujud adalah sebesar 33,33 % per tahun.

Perusahaan menghentikan pengakuan aset takberwujud jika dilepas atau tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

j. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih yang dapat diidentifikasi Entitas Anak, asosiasi atau pengendalian bersama entitas pada tanggal efektif akuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi mereka dari aset teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

Jika biaya perolehan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang diakuisisi, selisih tersebut diakui langsung dalam laporan laba-rugi konsolidasian. *Goodwill* pada akuisisi entitas asosiasi dan entitas yang dikendalikan bersama-sama termasuk dalam investasi pada entitas asosiasi dan *jointly controlled entities*. *Goodwill* dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai.

Goodwill atas akuisisi entitas anak diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya. *Goodwill* dialokasikan untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan pengujian penurunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Intangible Assets (continued)

- *Rehabilitation expense of leased building shall be amortized as per the benefit period. Deferred charges include computer software, charge in relation to initial offering of mutual funds, and others. Differed charges are amortized over their estimated useful lives.*

Intangible assets are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 3 (three) years. Amortization of intangible assets amounted to 33.33% per year.

Derecognition of an intangible asset company if released or not there anymore future economic benefits are expected from its use or disposal.

j. Goodwill

Goodwill represents the excess of the acquisition cost and the fair value of the Group portion of the net assets of Subsidiaries, associates or jointly controlled entity, that can be identified, at the effective date of acquisition. Non-controlling interests are measured at their proportion of identifiable assets at the acquisition date.

If the cost of acquisition is less than the fair value of net assets acquired, the difference is recognized directly in the consolidated income statement. Goodwill on acquisition of associates and jointly controlled entities together are included in investments in associates and jointly controlled entities. Goodwill is recorded at cost less accumulated impairment losses.

Goodwill on acquisition of subsidiaries is tested for impairment annually. Goodwill is allocated to cash-generating units or group of cash-generating units for impairment testing purposes.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Goodwill (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak, asosiasi dan pengendalian bersama termasuk nilai tercatat *goodwill* yang berkaitan dengan entitas dijual.

Goodwill memiliki masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa tak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa tak terbatas terus terbukti. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dibuat secara prospektif.

k. Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan

Grup menilai pada setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah lebih tinggi dari aset atau nilai wajar UPK yang dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain atau kelompok aset. Dimana nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkan, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menilai nilai pakai, taksiran aliran kas bersih masa depan didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Goodwill (continued)

The profit or loss on disposal of subsidiaries, associates and jointly controlled entities includes the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

k. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, The Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statements of comprehensive income as "impairment losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan
(lanjutan)

Jika tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi, model valuasi yang tepat digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset. Perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terakhir diperhitungkan, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa sebelumnya diakui kerugian penurunan nilai diakui untuk aset selain *goodwill* mungkin sudah tidak ada atau mungkin telah menurun. Bila terdapat indikasi, jumlah terpulihkan diperkirakan. Sebuah kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika itu terjadi, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi, tidak ada rugi penurunan nilai diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, biaya penyusutan aset tersebut disesuaikan pada periode mendatang untuk mengalokasikan revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)

If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan
(lanjutan)

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin diturunkan nilainya. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tiap UPK (kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika Total terpulihkan dari UPK kurang dari Total tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode mendatang.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

l. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan kecuali jika kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar berkaitan dengan kewajiban tersebut sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya arus kas masuk dari aset tersebut cukup besar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for *goodwill* by assessing the recoverable amount of each CGU (or Company's CGUs) to which the *goodwill* relates. If the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to *goodwill* cannot be reversed in future periods.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as of December 31, 2021 and 2020.

l. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode berjalan sesuai dengan PSAK No. 56 tentang "Laba per Saham".

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan, yaitu obligasi konversi dan opsi saham.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yang digunakan dalam menghitung laba per saham dilusian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 3.800.000 lembar saham dan 1.300.000 lembar saham.

n. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset dan
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Earnings per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of shares outstanding during the current period in accordance with SFAS No. 56, "Earnings per Share".

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company, which are convertible bonds and stock option.

Total weighted average of shares outstanding used in computing diluted earnings per share on December 31, 2021 and 2020 are 3,800,000 shares and 1,300,000 shares, respectively.

n. Right-of-use assets and lease liabilities

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to operate the assets and
- The Group has designed the assets in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Grup mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 48 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara- substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

The Group recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No. 48.

On the initial lease date, the Group recognized lease liabilities which measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Group and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Group exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not depends on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK No. 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

o. Efek-efek yang Diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan oleh Grup dan Entitas Anak termasuk obligasi, surat utang jangka menengah (MTN) dan sukuk, pada pengukuran awal disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan/penerbitan efek-efek yang diterbitkan. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo dari efek-efek yang diterbitkan.

Efek-efek yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS No. 73 will be treated the same as operating leases in PSAK No. 30. The Group will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of SFAS No. 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;
- Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- Separates the total amount of cash paid within operating activities) in the statement of cash flows.

o. Issued Securities

Securities issued by the Group and Subsidiaries, including bonds, medium-term debt securities (MTN) and sukuk, are stated at their initial measurement at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition/issuance of the securities issued. Transaction costs are then amortized at the effective interest rate until the maturity date of the securities issued.

Issued securities are classified as financial liabilities at amortized cost.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Dana Cadangan Angsuran

Dana Cadangan Angsuran yang terdiri dari dana cadangan nasabah, uang titipan nasabah dan uang pertanggungjawaban nasabah merupakan dana milik nasabah yang dititipkan kepada Grup tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah.

q. Imbalan Kerja

Program Imbalan Pasca Kerja

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti atau program asuransi jaminan hari tua untuk seluruh karyawan tetapnya sesuai peraturan Perusahaan.

Liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komperhensif lainnya pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Installment Reserve Fund

The Installment Reserve Fund, which consists of customers' reserve funds, customers' deposits and customers' responsibility funds, are funds owned by customers that are deposited with the Group without requiring customer approval when there is a lack of payment of customer obligations.

q. Employee Benefits

Post-Retirement Benefits Program

The Group established defined benefits pension plans or insurance program covering post-retirement for all their permanent employees in accordance with their policies.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Imbalan Kerja (lanjutan)

q. Employee Benefits (continued)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Other Long-Term Employee Benefits

Selain program pensiun, Grup memberikan penghargaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan pensiun normal (manfaat purna jasa), dan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun (penghargaan masa kerja), sesuai dengan kebijakan Perusahaan didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021 dan No. 13 Tahun 2003 pada tahun 2020. Imbalan kerja ini merupakan imbalan pasti tanpa pendanaan, sehingga liabilitas imbalan kerja diakui dalam laporan keuangan. Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui dalam laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut.

In addition to the pension plan, the Group subsidiaries provide award to their employees who have reached normal retirement (post retirement benefit), and to employees who have already rendered 20 years of service (long service award), in accordance with the Company's policies based on Labor Law No. 11/2020 concerning Job Creation in 2021 and No. 13 Year 2003 in 2020. Such benefits is an unfunded defined benefit hence the corresponding obligation is recorded in the financial statements. Current service cost is charged to operations in the current period. Past service cost as the effect of changes in actuarial assumption for active employees are charged to operations over the estimated average remaining working lives of employees.

Imbalan kerja lainnya dihitung secara aktuarial. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk imbalan kerja tanpa pendanaan ini adalah metode *projected unit credit*.

Other employee benefits are actuarially determined. The actuarial method used by the actuary for the unfunded benefits is the *projected unit credit method*.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari:

The Group recognizes gains and losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. Gains or losses on the curtailment or settlement consists of:

- 1) Perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti;
- 2) Perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset program;
- 3) Keuntungan dan kerugian dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

- 1) Changes in the present value of the defined benefit obligation;
- 2) Changes in the fair value of the plan assets;
- 3) Gains and losses and past service costs that have not been recognized previously.

Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

Employee separation benefit is recognized as liability and expense when incurred.

r. Hibah

r. Grants

Grup menetapkan kriteria mengenai pengakuan hibah dan bantuan pemerintah, penyajian hibah terkait dengan aset maupun penghasilan, serta pengungkapan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 61 "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah".

The Group determines establish the criteria for recognition of government grants and assistance, the presentation of grants related to assets or income, and the disclosures in the financial statements based on SFAS No. 61 "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance".

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Hibah (lanjutan)

Grup menggunakan pendekatan penghasilan dalam mengakui hibah, dimana hibah diakui dalam laba rugi selama satu atau lebih periode. Grup mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi dengan dasar sistematis dan rasional selama periode dimana Grup mengakui beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan sebagai hibah. Pengakuan hibah dalam laba rugi atas dasar penerimaan dilakukan apabila tidak terdapat dasar lain untuk mengalokasikan hibah kepada periode selain periode hibah diterima.

Perusahaan menyajikan hibah terkait dengan penghasilan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif dalam akun "pendapatan lain-lain".

s. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual

Aset tidak lancar (atau grup lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Aset tidak lancar (atau Grup lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk mendistribusikan.

Grup mengakui rugi penurunan nilai awal atau selanjutnya atas penurunan nilai ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset (atau kelompok lepasan).

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Entitas Induk

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Grants (continued)

The Group using the income approach in recognize grants, where grants are recognized in profit or loss over one or more periods. The Group recognizes the government grants in profit or loss by a systematic and rational basis over the period in which the Group recognizes the cost on related expenses that are intended to be compensated as a grant. Grants recognition in profit or loss made on the basis of acceptance if there is no other basis for allocating a grants to periods other than the period of the grant is received.

The Group presentates grants related to income as a credit in the comprehensive income statements in "other income" account.

s. Non-Current Assets Classified as Held for Sale

Non-current asset (or Group of removable) that are classified as held for sale are measured at the lower value between the carrying amount and fair value net of costs to sell. Non-current asset (or Group of removable) that are classified as held for distribution to owners be measured at the lower value between the carrying amount and fair value less costs to distribute.

The Group recognized an impairment loss on initial or subsequent to the impairment of fair value less costs to sell the asset (or Company removable).

t. Revenue and Expense Recognition

Parent Entity

Interest income and expense for all interest bearing financial instruments are recognized in the consolidated statements of comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, as shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak untuk kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan bunga dari kredit program, pembiayaan usaha kecil, menengah dan koperasi diakui dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pendapatan jasa penasihat keuangan dan konsultan manajemen diakui pada saat Perusahaan telah menyerahkan dan memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian yang mendasari. Sedangkan pendapatan jasa pengelolaan reksadana diakui dan dihitung secara harian.

Entitas Anak (PT PNM Venture Capital)

Pendapatan dari piutang pembiayaan modal ventura diakui sebagai berikut:

(i) Penyertaan saham.

PT PNM Venture Capital memperoleh pendapatan berupa jasa manajemen, dividen yang akan diterima setiap tahun dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan investasi;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions fees and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

If a financial asset or Group of similar financial assets value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Interest income from credit programs, small, medium enterprise and cooperative financing are recognized by amortizing the carrying value of loan with the effective interest rate method.

Revenue from financial advisory and management consulting services are recognized when the Company has delivered all the significant risks and benefits to the customers in accordance with the underlying agreement. Meanwhile, revenue from mutual fund management services is recognized and determined on a daily basis.

Subsidiary (PT PNM Venture Capital)

Revenue from venture capital financing receivables are recognized as follows:

(i) Equity participation.

PT PNM Venture Capital earns income such as management services, annual dividends and profit arising from the disposal of investments;

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Entitas Anak (PT PNM Venture Capital) (lanjutan)

- (ii) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

PT PNM Venture Capital memperoleh penghasilan bunga dari kupon obligasi dan mempunyai hak opsi untuk mengkonversikan obligasi tersebut menjadi penyertaan saham dalam periode tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

- (iii) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha yang dilaksanakan oleh PT PNM Venture Capital kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dilakukan dengan pola:

- a) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*)
b) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*)

PT PNM Venture Capital memperoleh pendapatan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PT PNM Venture Capital dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Pendapatan investasi berupa bunga dari obligasi dan deposito, serta instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, pada nilai nominal dan tingkat suku bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan dari pembagian hasil usaha koperasi dan pendapatan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian sisa hasil usaha dan dividen diterima.

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara PT PNM Venture Capital sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Subsidiary (PT PNM Venture Capital) (continued)

- (ii) *Convertible bonds participation.*

PT PNM Venture Capital earns interest income from a bond coupon and has an option to convert the bond into equity within a certain period set out in the agreement;

- (iii) *Profit sharing financing*

Financing based on the distribution of the operations results carried out by PT PNM Venture Capital to the Investee Company (PPU) is performed by scheme:

- a) *Distribution of the operations result based on profit (profit sharing)*
b) *Distribution of the operations result based on revenue (revenue sharing)*

PT PNM Venture Capital earn revenue on a certain percentage that has been agreed in advance and set forth in a written agreement between PT PNM Venture Capital with the Investee Company (PPU).

Investment revenue such as interest derived from bonds, time deposits and money market instruments are recognized on an accrual basis over the term period, at the nominal value and applicable interest rate. Profit sharing revenue from cooperatives and dividends income are recognized when the related acknowledgement letters are received.

Mudharabah financing is a joint venture agreement between the PT PNM Venture Capital as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a fund manager (mudharib) to do business with the ratio of profit sharing (profit or loss) in accordance with an agreement in advance.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Entitas Anak (PT PNM Venture Capital) (lanjutan)

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Perusahaan menetapkan penyisihan penghapusan berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami rugi sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian PT PNM Venture Capital. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. PT PNM Venture Capital menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing *account*.

Beban diakui pada saat terjadinya secara akrual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Subsidiary (PT PNM Venture Capital) (continued)

Mudharabah financing stated at their outstanding less allowance for uncollectible balances. The Company provides allowance for removal based on a review of the quality of each account.

If part of Mudharabah financing a loss prior to the commencement of business because of the damage or for other reasons without the negligence or fault of the manager of the fund, then the loss is reducing the balance Mudharabah financing PT PNM Venture Capital and is recognized as a loss. If most of Mudharabah financing disappeared after the start of the business in the absence of negligence or fault fund the losses are calculated at the time of the results.

Musharakah financing is an agreement of cooperation that occurs between the owners of capital (Musharakah partners) to combine capital and do business together in a partnership with the ratio of dividends in accordance with the agreement, while losses covered in proportion to the capital contribution.

Musharakah financing balances are stated at financing less allowance for uncollectible balances. The PT PNM Venture Capital provides allowance for write-off in accordance with the quality of the financing based on a review of each account.

Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

Entitas Anak (PT PNM Investment
Management)

Pendapatan

Transaksi efek dan pendapatan komisi

Perdagangan transaksi efek yang lazim dicatat pada tanggal perdagangan, seolah-olah transaksi efek telah diselesaikan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi efek yang merupakan tanggungan dan risiko PT PNM Investment Management dicatat berdasarkan tanggal perdagangan. Transaksi efek pelanggan dilaporkan pada tanggal penyelesaian dan pendapatan komisi dan beban terkait dilaporkan pada tanggal perdagangan. Total piutang dan utang dari transaksi efek yang belum mencapai tanggal penyelesaian kontraknya dicatat bersih pada laporan posisi keuangan.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan secara netting yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara *netting* untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Komisi dan biaya terkait kliring dicatat berdasarkan tanggal perdagangan saat terjadinya transaksi efek.

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

Pendapatan dari jasa penjaminan emisi dan penjualan efek meliputi keuntungan, kerugian, dan jasa, setelah dikurangi biaya sindikasi, yang timbul dari penawaran efek dimana PT PNM Investment Management bertindak sebagai penjamin emisi atau agen. Pendapatan dari konsesi penjualan dicatat pada tanggal penyelesaian, dan jasa penjaminan emisi diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi telah selesai dan Total pendapatan telah dapat ditentukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

t. Revenue and Expense Recognition
(continued)

Subsidiary (PT PNM Investment
Management)

Revenue

Securities transaction and commission income

Common trading securities transactions are recorded on the trade date, as if the securities transaction has been completed. Gains and losses arising from securities transactions and the risk is borne by the PT PNM Investment Management are recorded at the trade date. Customer securities transactions are reported on the settlement date and commission income and expense reported on the trade date. Total receivables and debt securities transactions that have not yet reach the contract settlement date are recorded net on the statement of financial position.

Recording payables and receivables funds with Clearing and Guarantee Institution arising from Exchange Transactions conducted netting the settlement due on the same day.

Recording debt and receivables fund with customers arising because of Exchange Transactions in regular market is done for each customer netting settlement due on the same day.

Commissions and expenses that related to clearing are recorded at the trade date of the securities transactions.

Services underwriting and sale of securities

Revenues from underwriting and sale of securities includes gains, losses, and services, net of syndicated fees, which arise from offering securities in which the PT PNM Investment Management acts as an underwriter or agent. Revenue from concession sales are recorded on the settlement date, and underwriting services are recognized when the underwriting activities have been completed and the amount of revenue can be determined.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Entitas Anak (PT PNM Investment Management) (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dividen dan bunga

Pendapatan dividen dari investasi diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada PT PNM Investment dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Pendapatan bunga diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada PT PNM Investment dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga diakui atas dasar waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan tingkat diskonto yang tepat untuk mengestimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan ke jumlah tercatat aset pada saat pengakuan awal.

Beban

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Pada saat diketahui bahwa kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya.

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Grup dicatat dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Subsidiary (PT PNM Investment Management) (continued)

Revenue (continued)

Dividend and interest income

Dividend income from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established (provided that it is probable the economic benefits will flow to the PT PNM Investment Management and the amount of revenue can be measured reliably).

Interest income is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the PT PNM Investment and the amount of revenue can be measured reliably. Interest income is recognized on a time basis, by reference to the principal and the effective interest rate applicable, which is the appropriate discount rate to estimate the future cash receipts through the expected life of the financial asset to the asset's carrying amount on initial recognition.

Expenses

Expenses incurred in connection with the underwriting process are accumulated and charged at the time of underwriting revenue is recognized. At the moment it is known that the activities are not completed underwriting and underwriting canceled, the underwriting expense is charged against the income statement.

Other expenses are recognized based on its benefits.

u. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group's bookkeeping is recorded in Rupiah. Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the transaction date. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rate set by Bank Indonesia on those dates.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah diakui dalam arus laba konsolidasi periode atau rugi, kecuali untuk keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan operasi asing pertukaran ke dalam mata uang penyajian dari Grup, yang diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Dolar AS	14.269

v. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya dalam Standar ini disebut sebagai "entitas pelapor".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (b) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (c) Personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period consolidated profit or loss, except for the exchange gains and losses arising on the translation of the foreign operation's financial statements into the presentation currency of the Group, which are recognized directly in other comprehensive income.

The exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2020	
	14.105	US Dollar

v. Transaction with Related Parties

A related party is a person or entity related to the entity that is preparing its financial statements in this Standard referred to as "reporting entity".

- 1) Person or member's family is related to a Company if that person:
 - (a) Has control or joint control over the Company;
 - (b) Has significant influence over the Company; or
 - (c) Key management personnel of the Company or Parent reporting.
- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following:
 - (a) Entity and the reporting entity is a member of the same Company (which means a parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company, which the other entity is a member);

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

v. Transaction with Related Parties (continued)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following: (continued)

- (c) Both entities are joint ventures of the same third party;
- (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- (e) the Entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
- (f) the Entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (g) a Person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (h) the Entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan yang relevan di sini.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes here.

w. Kombinasi Bisnis

w. Business Combination

Grup mencatat kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Grup selaku pihak pengakuisisi mencatat akuisisi pada tanggal dimana Grup memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi.

The Group recorded business combination by applying the acquisition method. The Group as the acquirer records acquisition at the date when the Group obtains control over the acquiree.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Perusahaan selaku pihak pengakuisisi mengakui *goodwill* pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih dari (a) nilai agregat imbalan yang dialihkan yang diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi dengan (b) jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengakui kombinasi bisnis sebagai pembelian dengan diskon, apabila nilai (b) melebihi nilai (a) pada paragraf di atas. Grup mengakui keuntungan pembelian dengan diskon dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi dan keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap akan mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan (kerugian) yang dihasilkan dalam laporan laba rugi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengakui nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan kontinjensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran untuk pihak yang diakuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui *goodwill* pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih atas nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, total setiap kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas pada tanggal akuisisi dengan selisih jumlah aset teridentifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Business Combination (continued)

Corporate acquirer recognizes goodwill as of the acquisition date is measured as the difference of (a) the aggregate value of the consideration transferred is measured using the fair value at the acquisition date, the amount of any non-controlling interest in the acquiree, and the fair value of the equity interests held by the acquirer in the acquiree with (b) the number of identifiable assets acquired and liabilities taken over on the date of acquisition.

Group as the acquirer recognizes as a purchase business combination with a discount, if the value of (b) exceeds the aggregate value (a) in the above paragraph. Group recognized gains of purchase with a discount in the income statement at the date of acquisition and the gain attributable to the acquirer.

Group as the acquirer in a business combination is achieved in stages will re-measure previously held equity interest at acquisition date fair value and recognizes gains (losses) resulting in the income statement.

Group as the acquirer recognizes the fair value on the date of acquisition contingent consideration as part of the consideration transferred in exchange for the acquiree.

The Group as the acquirer to measure the identifiable assets acquired and liabilities taken over by the fair value at the acquisition date.

The Group recognized goodwill on the acquisition date, measured as the difference between the aggregate value of the benefit transferred, the amount of non-controlling interest of the acquired and the fair value of equity interests at the date of acquisition by the difference in the number of assets identified.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal atas kombinasi bisnis sebagai berikut:

1. Hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset takberwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual;
2. Liabilitas kontinjensi diakui pada nilai yang lebih tinggi antara jumlah yang seharusnya diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (revisi 2009) dan jumlah yang pada awalnya diakui setelah dikurangi akumulasi amortisasi yang diakui sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2010);
3. Kolektibilitas aset indemnifikasi;
4. Perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi yang bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran;
5. Grup melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* secara periodik.

x. Kombinasi Bisnis di Bawah Pengendalian Bersama

Kombinasi bisnis yang melibatkan entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK No 38. Berdasarkan PSAK ini, kombinasi bisnis entitas sepengendali transaksi sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas yang berada dalam Perusahaan yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan secara keseluruhan atau untuk entitas individu dalam Perusahaan.

Sejak transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi dipertukarkan kepemilikan bisnis, transaksi tersebut diakui dalam jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal entitas berada di bawah sepengendali. Nilai tercatat unsur-unsur laporan keuangan tersebut adalah nilai tercatat entitas bergabung dalam kombinasi bisnis sepengendali. Perbedaan antara imbalan yang dialihkan dan Total tercatat dari kombinasi bisnis apapun di bawah transaksi sepengendali dalam ekuitas dan disajikan pada tambahan modal disetor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Business Combination (continued)

Measurement after initial recognition of the business combination as follows:

1. The recoverable rights that recognized as intangible assets are amortized over the remaining contractual period;
2. Contingent liabilities recognized at the higher value between the amount that should be recognized in accordance with SFAS No. 57 (revised 2009) and the amount initially recognized less accumulated amortization recognized in accordance with SFAS No. 23 (revised 2010);
3. Collectibility of indemnification asset;
4. Changes in fair value of contingent benefits that are not measurement period adjustments;
5. The Group testing impairment value of goodwill on a periodic basis.

x. Business Combination of Entities Under Common Control

Business combinations involving entities under common control are recorded in accordance with SFAS No. 38. This GAAP, the business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of entities within the Company are the same, not a change of ownership in terms of substance economy, so that the transaction does not result in a gain or loss to the Company and its Subsidiaries as a whole or for individual entities within the Company.

Since the transaction of business combination of entities under common control does not lead to changes in economic substance exchanged business ownership, the transaction is recognized in the carrying amount based on the pooling of interest method.

In applying the pooling of interest method, the components of financial statements for periods where there is restructuring and for other periods presented for comparative purposes are presented as if the restructuring had occurred since the beginning of the entities were under common control. The carrying amount of financial statement elements are joined in the carrying amount of an entity under common control business combination. The difference between the consideration transferred and the carrying amount of any business combinations under common control transactions in equity and presented in the additional paid-in capital.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Group dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Group menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Perubahan kebijakan akuntansi disebabkan karena implementasi PSAK No.5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Sebelumnya, segmen operasi ditentukan dan disajikan sesuai dengan PSAK No.5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen". Kebijakan akuntansi baru sehubungan dengan pengungkapan atas segmen operasi disajikan berikut ini:

Grup menyajikan informasi berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: pembiayaan, pembiayaan syariah, manajer investasi, modal ventura, dan pembiayaan syariah.

z. Pajak Penghasilan

Pajak Final

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final disajikan sebagai bagian dari beban pajak.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, diakui proporsional dengan total pendapatan menurut akuntansi pada periode berjalan. Selisih antara total pajak penghasilan final telah dibayar dan jumlah dibebankan sebagai beban pajak pada perhitungan laba rugi komprehensif konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Operating Segment

The segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-Group balances and intra-Group transactions are eliminated as part of consolidation process.

The Group determines and presents operating segments based on the information that internally is provided to the chief operating decision maker. This change in accounting policy is due to the adoption of SFAS No. 5 (2009 Revision), "Operating Segments". Previously operating segments were determined and presented in accordance with SFAS No.5 (2000 Revision), "Segment Reporting". The new accounting policy in respect of operating segment disclosures is presented as follow:

The Group present information on the following business segments: financing, sharia financing, investment manager, venture capital, and sharia financing.

z. Income Tax

Final Tax

Taxes on income subject to final tax is presented as part of the tax expense.

Tax expenses on income subjected to final income tax is recognized proportionally with total income recognized during the current period for accounting purposes. The difference between total final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statements of comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Non-Final

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung dalam ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan beda temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang, kecuali aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan permanen yang dapat dikurangkan timbul dari pengakuan awal aset dan liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Income Tax (continued)

Non-Final Tax

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized on temporary differences of assets and liabilities between commercial and tax reporting dates at each reporting date. Future tax benefits, such as carry forward tax losses are recognized to the extent that it is probable that the tax benefits will be realized.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

bisnis dan, pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak; namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait dengan investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan diakui hanya sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

Kecuali aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan permanen yang dapat dikurangkan timbul dari pengakuan awal aset dan liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan, pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak; namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait dengan investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan diakui hanya sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi nilai tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam nilai yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

Except where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are included in the consolidated statement of comprehensive income of the current year.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

aa. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah akhir tahun yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Grup membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajemen Grup, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

aa. Events After Reporting Date

Post year-end events that need adjustments and provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting event) are reflected in the consolidated financial statements.

Any post year-end event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the financial statements of the Group require a various assessments or valuation, estimates, and assumptions by the Group's management, which have an impact on the amount of revenues, expenses, assets, liabilities, and disclosure of contingent liabilities are reported at the end of the reporting period. However, uncertainty regarding the assumptions and estimates could cause a material adjustment to the carrying value of assets or liabilities that will be affected in the future.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, Manajemen telah membuat penilaian-penilaian, yang terpisah dari estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang dibuat, yang memberikan dampak yang paling signifikan terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Kelangsungan Usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha. Rincian terkait masalah ini diungkapkan dalam Catatan 41.

Konsolidasi entitas terstruktur

Entitas terstruktur adalah entitas yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga hak suara atau hak serupa bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan siapa yang mengendalikan entitas, seperti ketika hak suara hanya berkaitan dengan masalah administratif dan aktivitas relevan diarahkan melalui pengaturan kontraktual.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments

In the process of applying of the Group accounting policies, the Company's Management has made assessments, apart from these estimates and assumptions made, which have the most significant impact on the presented amount in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Instruments

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

Going Concern

The Group's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements continue to be prepared on the going concern basis. Details related to this matter are disclosed in Note 41.

Consolidation of structured entities

A structured entity is an entity that has been designed so that voting or similar rights are not the dominant factor in deciding who controls the entity, such as when the voting rights relate to administrative matters only and the relevant activities are directed by means of contractual arrangements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Dalam kasus-kasus di mana Grup mendirikan entitas, atau memiliki kepemilikan di entitas tersebut, untuk memungkinkan pelanggannya mengakses investasi tertentu, atau untuk mentransfer risiko atau untuk tujuan lain, sesuai dengan kriteria dan prosedur internal dan dengan peraturan yang berlaku, Grup menentukan apakah pengendalian atas entitas tersebut benar-benar ada dan oleh karena itu apakah entitas tersebut harus dikonsolidasi. Metode dan prosedur tersebut menentukan apakah terdapat pengendalian oleh Grup, dengan mempertimbangkan bagaimana keputusan dibuat tentang aktivitas relevan, menilai apakah Grup memiliki semua kekuasaan atas elemen, eksposur, atau hak yang relevan, atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas *investee* untuk memengaruhi jumlah pengembalian investor.

Manajemen telah menilai apakah entitas di mana Grup berinvestasi harus diklasifikasikan sebagai entitas terstruktur dan telah menyimpulkan bahwa reksa dana tertentu harus diklasifikasikan sebagai entitas terstruktur dan bahwa Grup mengendalikan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penentuan mata uang fungsional

Grup mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan mata uang fungsionalnya:

- a) Mata uang (i) yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa; dan (ii) dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa Perusahaan.
- b) Mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa.

Penentuan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup memiliki berbagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, dimana untuk menentukan nilai wajar tersebut, membutuhkan penggunaan estimasi akuntansi dan penilaian yang tepat, yaitu:

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

In those cases where the Group sets up entities, or has a holding in such entities, in order to allow its customers access to certain investments, or to transfer risks or for other purposes, in accordance with internal criteria and procedures and with applicable regulations, the Company determines whether control over the entity in question actually exists and therefore whether it should be subject to consolidation. Such methods and procedures determine whether there is control by the Company, considering how the decisions are made about the relevant activities, assesses whether the Company has all power over the relevant elements, exposure, or rights, to variable returns from involvement with the investee; and the ability to use power over the investee to affect the amount of the investor's returns.

The management has assessed whether the entities in which the Group invests should be classified as structured entities and has concluded that certain mutual funds should be classified as structured entities and that the Group controls these entities. Therefore, these entities are consolidated in the Group's consolidated financial statements.

Determination of functional currency

The Group consider the following factors in determining its functional currency:

- a) *Currency (i) that most influence the selling price of goods and services, and (ii) states that its strength of competition and its rules largely determine the selling price of goods and services of the Company.*
- b) *Currency that most influence the cost of labor, raw materials, and other costs of procurement of goods or services.*

Determination of fair value of financial assets and liabilities

The Group has a various of financial assets and liabilities are measured at fair value, which is to determine fair value, requiring the use of a proper accounting estimates and assessments, namely:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

- a) Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (misalnya efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual) ditentukan berdasarkan harga pasar pada tanggal pelaporan.
- b) Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif (misal: *derivative over the counter*) ditentukan dengan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan berbagai metode dan membuat asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tanggal pelaporan.

Penentuan klasifikasi sewa

Grup memiliki beberapa sewa sedangkan Perusahaan dan entitas Anak bertindak sebagai *lessee* dalam hal kendaraan sewa dan gedung perkantoran sewa. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan ditransfer berdasarkan PSAK No. 73 "Sewa", yang mensyaratkan Grup untuk membuat penilaian dan perkiraan transfer risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh Grup untuk perjanjian sewa terkait, sewa gedung kantor diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan kendaraan sewa sebagai sewa pembiayaan.

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaruan dan penghentian - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

- a) *The fair value of financial instruments traded in active markets (such as trading and available-for-sale securities) is determined based on quoted market prices at the reporting date.*
- b) *The fair value of financial instruments that are not traded in active market (for example: over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. The Company uses a variety of methods and makes assumptions that are based on market conditions existing at each reporting date.*

Determination of lease classification

The Group has several leases whereas the Group and its Subsidiaries acts as lessee in respect of vehicles under lease and office building rental. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on SFAS No. 73 "Lease", which requires the Group to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

Based on the review performed by the Group for the related lease agreements, the rental of office building is classified as operating lease and vehicles under lease as finance lease.

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options - Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan klasifikasi sewa (lanjutan)

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Grup cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Group. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Determination of lease classification (continued)

The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Group is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimation of useful lives of fixed assets

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be within 5 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

dimana Perusahaan dan entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13 dan 36.

Grup memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbaharui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial, legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Provisi ekspektasi kerugian kredit pinjaman yang diberikan

Saat mengukur ECL, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimation of useful lives of fixed assets (continued)

Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Notes 13 and 36.

The Group estimates the useful lives of fixed assets based on the period over which assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of fixed assets are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolesces and legal or other limits on the use of the assets.

Provision for expected credit losses of loans

When measuring ECL the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. *Probability of default* is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Provisi ekspektasi kerugian kredit pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Informasi mengenai ECL pada pinjaman yang diberikan Grup diungkapkan dalam Catatan 6.

Estimasi imbalan pasca kerja dan imbalan kerja lainnya

Penentuan utang biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 26.

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang dari program tersebut, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Provision for expected credit losses of loans (continued)

The information about the ECLs on the Group's loans is disclosed in Note 6.

Estimation of post-employment and other employee benefits

The determination of the Group's obligations cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 26.

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian dari pada unit tersebut.

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Perusahaan sebagai lessee

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

The Group evaluate the impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Company considers important which could trigger an impairment review include as following:

- Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- Significant changes in of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- Negative significant industry or economic trends.

The Group recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use (or cash-generating unit's). Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

The Group evaluates impairment of assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of assets may not be recoverable. The Company recognizes an impairment loss if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable value. Recoverable amount is the higher value between fair value minus costs to sell and value in use an asset (or cash-generating unit).

Determine the contract term with extension and contract termination options - the Company as lessee

The Group determines the lease term as non cancellable term, along with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably not to be exercised.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2021	2020	
Kas	11.602.944.098	13.271.959.722	Cash on hand
Kas di Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	978.752.142.596	772.526.865.830	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	501.282.555.667	1.156.308.078.779	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	363.783.933.975	274.685.041.463	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	126.231.304.238	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.577.333.798	195.965.032.117	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	157.097.576	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Subtotal	2.024.784.367.850	2.399.485.018.189	Subtotal
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	465.607.617.021	67.290.584	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	188.829.398.292	84.466.852.728	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	79.042.426.046	78.889.249.718	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mega Syariah	73.749.577.462	140.449.974.395	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	52.816.109.770	3.748.928.589	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Central Asia Tbk	38.555.411.674	38.978.303.062	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	25.443.236.734	-	PT Bank Jtrust Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	18.207.634.775	687.285.295	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	11.604.940.866	4.635.990.545	PT Bank Pembangunan Daerah DKI
PT Bank Permata Syariah	7.537.417.386	-	PT Bank Permata Syariah
PT Bank National Nobu Tbk	5.911.945.086	10.282.166.345	PT Bank National Nobu Tbk
PT Bank BCA Syariah	5.826.059.586	50.541.197.399	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Aceh Syariah	5.000.000.000	-	PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.310.112.063	3.244.486.215	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	1.738.542.663	1.651.404.612	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.183.663.901	40.528.591.245	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT BPRS Dinar Asri	1.038.229.653	-	PT BPRS Dinar Asri
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	984.896.126	304.512.131	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Nagari Syariah	862.584.989	1.390.280.311	PT Bank Nagari Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	641.998.552	631.033.521	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	629.946.517	129.839.590	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT BPRS Tanjung Amnah	491.240.744	45.829.783	PT BPRS Tanjung Amnah
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	453.762.596	-	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk	416.095.506	135.235.153	PT Bank Victoria International Tbk
PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Surabaya	369.082.452	145.300.858	PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Surabaya
PT Bank Danamon Syariah	352.830.423	-	PT Bank Danamon Syariah
PT Bank Bukopin Syariah	324.652.676	2.516.194	PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	272.376.287	74.393.662.078	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT BPRS Al Hijrah	227.939.241	163.019.592	PT BPRS Al Hijrah
PT Bank Mega Tbk	127.789.450	-	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	111.862.426	111.917.772	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT BPRS Kota Mojokerto	98.259.313	10.458.332	PT BPRS Kota Mojokerto
PT Bank Mayora	49.534.000	5.181.243	PT Bank Mayora
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	30.474.263	30.160.959	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
PT Bank KEB Hana	26.538.460	292.532.322	PT Bank KEB Hana
PT Bank Oke Indonesia	24.878.000	20.050.661	PT Bank Oke Indonesia
PT BPRS Al Makmur	24.343.413	33.195.055	PT BPRS Al Makmur
PT BPR IDS	24.164.000	23.835.552	PT BPR IDS
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	9.207.167	9.447.167	PT Bank BRI Agroniaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga (Syariah) Tbk	5.118.380	-	PT Bank CIMB Niaga (Syariah) Tbk
PT BPR INA	2.500.000	-	PT BPR INA
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BNI Syariah)	-	84.623.300.050	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRI Syariah Tbk)	-	34.466.163.057	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRI Syariah Tbk)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Syariah Mandiri)	-	29.914.161.026	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	2.042.694.984	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	-	56.572.000	PT Bank ANZ Indonesia
Subtotal	991.964.397.959	687.152.620.123	Subtotal
Total	3.016.748.765.809	3.086.637.638.312	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2021	2020	
Dolar AS			US Dollar
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	199.236.088	667.882.589	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Total Kas di Bank	3.016.948.001.897	3.087.305.520.901	Total Cash in Banks
Deposito Berjangka			Time Deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	326.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.050.000.000	115.550.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	42.500.000.000	280.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.000.000.000	9.650.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal	436.550.000.000	405.200.000.000	Subtotal
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank DKI	150.000.000.000	400.000.000.000	PT Bank DKI
PT Bank Mega Syariah	110.000.000.000	135.000.000.000	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	70.037.674.732	103.300.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	31.200.000.000	50.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	25.000.000.000	56.500.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT J TRUST Indonesia Tbk	25.000.000.000	-	PT Bank J TRUST Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	23.700.000.000	13.100.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mega Tbk	20.000.000.000	20.000.000.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	20.000.000.000	-	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	15.000.000.000	-	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
PT Bank Bukopin Tbk	13.700.000.000	-	PT Bank Bukopin Tbk
PT BPD Kalimantan Tengah	10.000.000.000	-	PT BPD Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	7.250.000.000	7.250.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
PT Bank Syariah Bukopin	5.800.000.000	3.000.000.000	PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	13.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah	5.000.000.000	3.700.000.000	PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah
PT BPRS Dinar Asri	2.500.000.000	2.000.000.000	PT BPRS Dinar Asri
PT BPRS Artha Madani	2.500.000.000	1.500.000.000	PT BPRS Artha Madani
PT BPRS Adeco	1.500.000.000	1.000.000.000	PT BPRS Adeco
PT BPRS Mojokerto	1.200.000.000	1.200.000.000	PT BPRS Mojokerto
PT BPRS Mulia Berkah Abadi	1.000.000.000	1.000.000.000	PT BPRS Mulia Berkah Abadi
PT BPRS Al Ihsan	1.000.000.000	500.000.000	PT BPRS Al Ihsan
PT BPRS HIK Parahyangan	1.000.000.000	-	PT BPRS HIK Parahyangan
PT BPRS Al Moeslim	1.000.000.000	-	PT BPRS Al Moeslim
PT BPRS Fajar Sejahtera Bali	1.000.000.000	-	PT BPRS Fajar Sejahtera Bali
PT Bank Nagari Syariah	750.000.000	1.250.000.000	PT Bank Nagari Syariah
PT BPRS Al Hijrah Amanah	750.000.000	750.000.000	PT BPRS Al Hijrah Amanah
PT BPRS Artha Fisabilillah	500.000.000	700.000.000	PT BPRS Artha Fisabilillah
PT BMI Dana Amanah Surakarta	500.000.000	500.000.000	PT BMI Dana Amanah Surakarta
PT BPRS Muamalat Harkat	500.000.000	500.000.000	PT BPRS Muamalat Harkat
PT BPRS Al Makmur	500.000.000	500.000.000	PT BPRS Al Makmur
PT BPRS Bumi Artha Sampang	500.000.000	500.000.000	PT BPRS Bumi Artha Sampang
PT BPRS Attaqwa	500.000.000	500.000.000	PT BPRS Attaqwa
PT BPRS Asri Madani Nusantara	500.000.000	-	PT BPRS Asri Madani Nusantara
PT BPRS Carana Kiat Andalas	300.000.000	-	PT BPRS Carana Kiat Andalas
PT BPRS Ampek Angkek Candung	250.000.000	250.000.000	PT BPRS Ampek Angkek Candung
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	250.000.000	250.000.000	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo	200.000.000	200.000.000	PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo
PT Bank Oke Indonesia	100.000.000	100.000.000	PT Bank Oke Indonesia
PT BPRS Al Salaam Amal Salman	20.000.000	20.000.000	PT BPRS Al Salaam Amal Salman
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	82.250.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk)	-	50.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRISyariah Tbk)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Syariah Mandiri)	-	2.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri)
PT Bank Neo Commerce Tbk	-	2.000.000.000	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Amar Indonesia Tbk	-	1.000.000.000	PT Bank Amar Indonesia Tbk
PT BPRS Tulen Amanah	-	1.000.000.000	PT BPRS Tulen Amanah
PT BPRS Rifatul Ummah	-	100.000.000	PT BPRS Rifatul Ummah
Subtotal	555.507.674.732	956.420.000.000	Subtotal
Total Deposito Berjangka	992.057.674.732	1.361.620.000.000	Total Time Deposits
Total Kas dan Setara Kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Total Cash and Cash Equivalents

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2021
Tingkat bunga per tahun:	
Rupiah	3,50%-5,00%
Jangka waktu	1 Bulan/Month

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada (Catatan 40).

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada (Catatan 27).

Kas dan setara kas Perusahaan tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Kas dan setara kas Perusahaan tidak dijamin sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Average interest rate per annum:

	2020	Interest rate per annum Rupiah Maturity date
Average interest rate per annum:		
5,00% - 7,00%		
1 Bulan/Month		

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in (Note 40).

Information regarding the classification and fair value of cash and cash equivalents are disclosed in (Note 27).

The Company's cash and cash equivalents cannot be used by the group as of December 31, 2021 and 2020.

The Company's cash and cash equivalents are not pledged as collateral as of December 31, 2021 and 2020.

5. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI

	2021
Rupiah	
Pihak berelasi	1.182.939.950.940
Pihak ketiga	1.324.150.000
	1.184.264.100.940
Total	1.184.264.100.940

**Reksadana
Pihak Berelasi**

RDPU PNM Dana Tunai	1.001.272.851.473
RDSPT PNM Multiyekspor I	11.357.440.000
RDS Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara	10.498.494.000
PNM Dana Kas Platinum	10.139.952.000
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN seri V	10.109.681.000
RD PNM PUAS	10.085.997.611
RD PNM Dana Maxima 2	10.002.887.000
RD PNM Money Market Fund USD	8.186.829.087
PNM Saham Agresif	7.402.481.898
RD PNM Syariah	6.314.668.751
PNM Saham Unggulan	6.180.225.257
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.512.103.374
RDPT Multisektoral VI	5.124.865.000
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016	5.120.726.500
RDSPT Multisektoral V	5.115.286.500
RDPT PNM Pos Indonesia	5.105.209.000
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	5.091.353.000
RDPT PNM Multisektoral VII	5.073.948.500
RDSPT PNM Multisektoral XII	5.061.009.500
RDSPT Mikro BUMN Seri II	5.058.395.500
RD PNM ETF CORE LQ45	5.052.969.383
RDSPT PNM Multisektoral XI	5.051.718.000
RDPT PNM Multisektoral X	5.000.000.000

5. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS

	2020	Rupiah Related parties Third parties
	523.772.748.763	
	1.036.150.000	
	524.808.898.763	
Total	524.808.898.763	Total

**Mutual Funds
Related Parties**

RDPU PNM Dana Tunai	200.050.410.959
RDSPT PNM Multiyekspor I	24.346.094.400
RDS Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara	-
PNM Dana Kas Platinum	130.053.595.496
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN seri V	5.062.436.000
RD PNM PUAS	-
RD PNM Dana Maxima 2	-
RD PNM Money Market Fund USD	-
PNM Saham Agresif	7.520.193.328
RD PNM Syariah	-
PNM Saham Unggulan	6.092.614.384
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.529.115.615
RDPT Multisektoral VI	-
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016	5.134.946.500
RDSPT Multisektoral V	5.097.470.500
RDPT PNM Pos Indonesia	5.114.844.500
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	5.096.335.000
RDPT PNM Multisektoral VII	-
RDSPT PNM Multisektoral XII	5.068.335.000
RDSPT Mikro BUMN Seri II	5.068.666.000
RD PNM ETF CORE LQ45	11.432.704.000
RDSPT PNM Multisektoral XI	5.021.105.500
RDPT PNM Multisektoral X	5.052.212.000

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI
WAJAR MELALUI LABA RUGI (lanjutan)**

	2021	2020
Reksadana (lanjutan)		
Pihak Berelasi (lanjutan)		
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	5.000.000.000	5.019.009.000
RDPT PNM Multisektoral IX	5.000.000.000	5.018.171.000
RDPT Multisektoral III	4.995.123.000	4.971.690.500
RDSPT PNM Indah Karya	4.962.724.500	5.013.947.500
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.841.321.500	4.838.384.500
RDPT PNM Multisektoral XVI	4.835.541.000	4.757.761.500
PNM Ekuitas Syariah	386.148.606	429.162.637
RD PNM Amanah Syariah	-	36.686.019.870
RDSPT Mikro BUMN Seri III	-	10.047.453.000
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	-	5.157.008.500
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	-	5.036.018.000
RDPT Multisektoral I	-	5.018.305.500
RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima	-	1.038.738.074
Subtotal	1.182.939.950.940	523.772.748.763
Total Reksadana	1.182.939.950.940	523.772.748.763
Ekuitas		
Pihak Ketiga		
PT AKR Corporindo Tbk	824.000.000	636.000.000
Total Ekuitas	824.000.000	636.000.000
Obligasi		
Pihak Ketiga		
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) II Tahun 2008 Seri A	150.000	150.000
Total Obligasi	150.000	150.000
Portofolio Efek Lain-lain		
Pihak ketiga		
BMT Salam Amanah Madani	500.000.000	400.000.000
Total Portofolio Efek Lain-lain	500.000.000	400.000.000
Total	1.184.264.100.940	524.808.898.763
Rincian Total lembar saham dan warant		
Pihak Ketiga		
PT AKR Corporindo Tbk	200.000	200.000

Portofolio efek tersebut diatas tidak dijaminkan, tidak di-repo-kan dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain.

Portofolio efek pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam kegiatan operasi dalam laporan arus kas konsolidasian.

Perubahan pada nilai portofolio efek pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian dicatat dalam laporan posisi keuangan.

Nilai wajar untuk efek utang ditetapkan berdasarkan dari *Indonesia Bonds Pricing Agency (IBPA)* dan efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh BEI, sedangkan nilai wajar Reksa Dana ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih pada akhir periode pelaporan.

**5. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED
AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND
LOSS (continued)**

	2021	2020
Mutual Funds (continued)		
Related Parties (continued)		
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	5.019.009.000	5.018.171.000
RDPT PNM Multisektoral IX	5.013.947.500	4.971.690.500
RDPT Multisektoral III	4.838.384.500	5.013.947.500
RDSPT PNM Indah Karya	4.757.761.500	4.838.384.500
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.835.541.000	4.757.761.500
RDPT PNM Multisektoral XVI	429.162.637	36.686.019.870
PNM Ekuitas Syariah	36.686.019.870	10.047.453.000
RD PNM Amanah Syariah	10.047.453.000	5.157.008.500
RDSPT Mikro BUMN Seri III	5.157.008.500	5.036.018.000
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	5.036.018.000	5.018.305.500
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	5.018.305.500	1.038.738.074
RDPT Multisektoral I	1.038.738.074	-
RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima	-	-
Subtotal	523.772.748.763	-
Total Mutual Funds	523.772.748.763	-
Equity		
Third Parties		
PT AKR Corporindo Tbk	636.000.000	-
Total equity	636.000.000	-
Bonds		
Third Parties		
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) II Year 2008 Series A	150.000	-
Total bonds	150.000	-
Other Portfolio Of Securities		
Third Parties		
BMT Salam Amanah Madani	400.000.000	-
Total Other Portfolio Of Securities	400.000.000	-
Total	524.808.898.763	-
Details of number of shares and warrants		
Third Party		
PT AKR Corporindo Tbk	200.000	-

The above portfolio of securities are not pledged, not in the repo, and not lent to other parties.

The portfolio of securities at fair value through profit or loss are presented in operating activities in the consolidated statement of cash flows.

Changes in the portfolio of securities value at fair value through profit or loss recorded in the statement of financial position.

The fair values of debt instruments were determined by *Indonesia Bonds Pricing Agency (IBPA)* and equities instruments are traded on the *Stock Exchange* determined by market value issued by the *Indonesia Stock Exchange*, while the fair value of *Mutual Fund* is determined based on net asset value at the reporting date.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 27.

5. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS (continued)

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding the classification and fair value of portfolio of securities are disclosed in Note 27.

6 PINJAMAN YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2021	2020
Rupiah Pihak Berelasi Entitas Induk		
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277.243.874	277.243.874
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277.243.874)	(277.243.874)
Subtotal	-	-
Pihak Ketiga Entitas Induk		
Pembiayaan Mekaar	26.255.405.216.933	15.692.303.922.944
Pembiayaan ULAMM	7.280.576.815.669	6.982.930.020.712
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	84.000.000.000	67.534.452.842
Pembiayaan Modal Kecil dan Menengah	16.021.605.972	20.454.645.325
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.258.828.026.472)	(674.238.138.005)
Subtotal	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818

6. LOANS

a. By relationship and transaction type

Rupiah Related Parties Parent Entity
MSE Financing for MFI/S
Less: Allowance for Impairment Losses
Subtotal
Third Parties Parent Entity
Mekaar Financing
Financing for ULAMM
MSE Financing for MFI/S
SME Capital Financing
Less: Allowance for impairment losses
Subtotal
Net Value

b. Berdasarkan jangka waktu kredit

Plafon pinjaman yang diterima oleh debitur sesuai dengan jangka waktu kredit adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Kurang dari 1 tahun	21.096.268.806.328	15.820.151.181.803
1 - 2 tahun	6.067.801.617.930	681.898.539.204
Lebih dari 2 tahun	6.472.210.458.190	6.261.450.564.690
	33.636.280.882.448	22.763.500.285.697
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.259.105.270.346)	(674.515.381.879)
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818

b. By credit period

The loan credit limit which is received by the debtors in accordance with the credit period are as follows:

Less than 1 year
1 - 2 years
More than 2 years
Less: Allowance for Impairment Losses
Net Value

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

6. LOANS (continued)

c. Berdasarkan umur tunggakan

c. By days past due

	2021	2020	
Belum jatuh tempo	32.582.850.622.016	21.257.045.029.058	
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(657.748.563.023)	(247.408.392.315)	Allowance for Impairment Losses
Subtotal	31.925.102.058.993	21.009.636.636.743	Subtotal
Lewat jatuh tempo	1.053.430.260.432	1.506.455.256.639	Over due
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(601.356.707.323)	(427.106.989.564)	Allowance for Impairment Losses
Subtotal	452.073.553.109	1.079.348.267.075	Subtotal
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Net Value

d. Berdasarkan sektor ekonomi

d. By economic sector

	2021	2020	
Perdagangan, Restoran dan Hotel	20.351.112.372.034	19.508.378.007.588	Trade, Restaurants and Hotels
Pertanian	4.983.168.262.168	631.209.122.175	Agricultures
Jasa-jasa	1.405.094.665.333	475.700.885.570	Services
Perindustrian	862.036.396.977	191.794.660.200	Industries
Lain-lain	6.034.869.185.937	1.956.417.610.164	Others
	33.636.280.882.449	22.763.500.285.697	
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.259.105.270.347)	(674.515.381.879)	Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Net Value

e. Berdasarkan status pembiayaan

e. By financing status

Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp2.891.432.636.138 dan Rp3.355.684.554.988.

Loans that have been restructured on December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp2,891,432,636,138 and Rp3,355,684,554,988, respectively.

Restrukturisasi atas pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari restrukturisasi normal dan restrukturisasi dalam rangka relaksasi bagi nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19 masing-masing sebesar Rp562.511.937.498 dan Rp2.328.920.698.640.

Restructuring of loans as of December 31, 2021 and 2020 consisted of normal restructuring and restructuring in the context of relaxation for customers affected by Pandemic Covid-19 amounted to Rp562,511,937,498 and Rp2,328,920,698,640, respectively.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Berdasarkan status pembiayaan (lanjutan)

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan; dan/atau
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

f. Berdasarkan penurunan nilai

	2021	2020
Pinjaman dinilai secara Kolektif	33.458.293.593.282	22.547.271.239.571
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.146.064.853.374)	(522.105.940.566)
Subtotal	32.312.228.739.908	22.025.165.299.005
Pinjaman dinilai secara Individual	177.987.289.167	216.229.046.126
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113.040.416.973)	(152.409.441.313)
Subtotal	64.946.872.194	63.819.604.813
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818

Pinjaman yang dinilai secara individual seluruhnya merupakan pinjaman yang mengalami penurunan nilai. Pinjaman yang dinilai secara kolektif adalah pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai. Penjelasan atas penurunan nilai dari aset keuangan telah dijelaskan pada Catatan 2.

6. LOANS (continued)

e. By financing status (continued)

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) *Rescheduling, which changes in the debtor's payment schedule or the duration;*
- 2) *Reconditioning, which changes in some or all of the financing requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum loan credit limit of financing; and/or*
- 3) *Restructuring, the change in financing requirements concerning the addition of financing facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal interest to the new financing that can be accompanied by rescheduling and/or reconditioning.*

f. By impairment losses

	2021	2020
Pinjaman dinilai secara Kolektif	33.458.293.593.282	22.547.271.239.571
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.146.064.853.374)	(522.105.940.566)
Subtotal	32.312.228.739.908	22.025.165.299.005
Pinjaman dinilai secara Individual	177.987.289.167	216.229.046.126
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113.040.416.973)	(152.409.441.313)
Subtotal	64.946.872.194	63.819.604.813
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818

Individually assessed loans are all impaired loans. Collectively assessed loans are loans that are not impaired. Explanation for impairment of financial assets has been described in Note 2.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

g. Mutasi pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pihak berelasi		
<u>Entitas induk</u>		
Saldo awal	(277.243.874)	(277.243.874)
(Penyisihan)/pemulihan selama tahun berjalan	-	-
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-
Saldo akhir	(277.243.874)	(277.243.874)
Pihak ketiga		
<u>Entitas induk</u>		
Saldo awal	(674.238.138.005)	(273.549.904.320)
Koreksi saldo awal	-	(72.764.930.736)
Penyisihan selama periode berjalan	(683.776.368.483)	(402.516.660.161)
Penghapusbukuan selama periode berjalan	99.186.480.015	74.593.357.212
Saldo akhir	(1.258.828.026.473)	(674.238.138.005)
<u>Entitas anak</u>		
Saldo awal	-	(2.634.556.818)
Penyisihan selama tahun berjalan	-	2.634.556.818
Saldo akhir	-	-
Total	(1.259.105.270.347)	(674.515.381.879)

6. LOANS (continued)

g. The movements of allowance for impairment losses on loans are as follow:

	2021	2020
Related parties		
<u>Parent Entity</u>		
Beginning balances		
(Allowance)/recovery during the year		
Write-off/unused allowance reserved		
Ending balances		
Third parties		
<u>Parent</u>		
Beginning balances		
Beginning balances correction		
Allowance during the period		
Write-off/unused allowance reserved		
Ending balances		
<u>Subsidiaries</u>		
Beginning balances		
Allowance during the year		
Ending balances		
Total		

2021 (dalam jutaan/in million)

	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	157.538	347.491	169.486	674.515	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	(1.724.442)	1.724.442	-	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	300.055	(300.055)	-	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(3.899)	(136.144)	140.043	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Penambahan (pemulihan) penyisihan selama tahun berjalan	1.928.497	(1.147.418)	(97.303)	683.776	Additional (reversal) provision during the year
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(99.186)	(99.186)	Write-off during the year
Saldo akhir	657.749	488.316	113.040	1.259.105	Ending balance

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2020 (dalam jutaan/in million)

	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	67.036	171.958	110.233	349.227	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	(922.435)	922.435	-	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	154.732	(154.732)	-	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(3.134)	(85.027)	88.161	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Penambahan (pemulihan) penyisihan selama tahun berjalan	861.339	(507.143)	45.686	399.882	Additional (reversal) provision during the year
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(74.594)	(74.594)	Write-off during the year
Saldo akhir	157.538	347.491	169.486	674.515	Ending balance

Penyisihan dibentuk dengan menggunakan metode kolektif dan individual.

Perusahaan melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan kepada pihak ketiga yang macet pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp99.186.480.015 dan Rp74.593.357.212.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya penghapusbukuan pada tahun 2021 dan 2020 adalah:

1. Pinjaman yang diberikan harus sudah tergolong pada kolektibilitas macet.
2. Debitur tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kredit atau debitur sudah tidak mempunyai kemampuan membayar atau debitur tidak kooperatif (sulit ditemui/melarikan diri/hilang) atau usaha debitur dinyatakan pailit (bangkrut).
3. Upaya restrukturisasi sudah tidak dapat dilakukan.

6. LOANS (continued)

- g. The movements of allowance for impairment losses on loans are as follow: (continued)

Provision established using the collective and individual method.

The Company made write-off of financing to third parties that were stalled in December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp99,186,480,015 and Rp74,593,357,212, respectively.

The conditions that led to write-offs in 2021 and 2020 are:

1. Loans must already be classified as collectibility of loss.
2. The debtor has no commitment to settle the loan or the debtor has no ability to pay or the debtor is uncooperative (difficult to be found/escape/lost) or the debtor's business is declared bankrupt (bankrupt).
3. The restructuring effort can not be done.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

4. Upaya pelunasan berupa penebusan/ penjualan jaminan sudah dilakukan.
5. Upaya lelang telah dilakukan untuk agunan yang dipasang hak tanggungan.
6. Pembiayaan bermasalah yang *di-cover* oleh asuransi kredit telah dilakukan pengajuan hak klaim kecuali hak klaim yang sudah kedaluwarsa.

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman yang diberikan telah memadai.

Informasi penting sehubungan dengan pinjaman yang diberikan:

a. Agunan Kredit

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima.

b. Kredit LKMS

Pembiayaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) kepada LKMS dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP), Bank Pembangunan Asia untuk Penataan Lingkungan dan Pemukiman (NUSSP), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan pembiayaan kepada Lembaga-lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pembiayaan dana SUP, NUSSP dikelola Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan No. KP-018/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan No. SLA-1184/DP3/2005 (lihat Catatan 21 dan 46).

Perusahaan memperoleh pendapatan bunga/bagi hasil selama tahun 2021 (sampai dengan Desember) dan 2020 masing-masing 14,00% per tahun dari piutang pembiayaan LKMS dana *Equity*, SUP, dan NUSSP serta LPEI.

6. LOANS (continued)

4. *Repayment efforts in the form of redemption/sale of the guarantee have been made.*
5. *An auction effort has been made for the mortgaged mortgage.*
6. *Problem financing covered by credit insurance has been made claiming rights except claims rights that have expired.*

Management believes that the Allowance for Impairment Losses of loans is adequate.

Significant information related to loans:

a. Collateral for loans

Loans are generally secured by pledged collateral, binded with the rights of powers of attorney to sell, time deposits or other acceptable collateral.

b. Loans - LKMS

Small and Micro Enterprise financing receivables to LKMS from Government Promissory Notes (SUP), Asian Development Bank for Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP), Indonesia Exim Bank (LPEI) fund represents executing financial institution financing, which is funded by Government Loans. The SUP and NUSSP financing is managed by the Company in accordance with Loan Agreement between the Company and the Government of the Republic of Indonesia No. KP-018/DP3/2004 on May 14, 2004 and No. SLA-1184/DP3/2005 (see Notes 21 and 46).

The Company earned interest income/profit sharing during 2021 (until December) and 2020 14.00% per annum, respectively, from Equity, Government Promissory Notes, NUSSP and LPEI financing.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Informasi penting sehubungan dengan pinjaman yang diberikan: (lanjutan)

c. Java Reconstruction Fund

Java Reconstruction Fund (JRF) dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan platform yang memobilisasi sumberdaya negara-negara donor dan menyalurkan bantuan keuangan dalam rangka mendukung tindakan pemerintah Indonesia bagi rekonstruksi dan rehabilitasi Provinsi Yogyakarta - Jawa Tengah akibat gempa bumi.

Perusahaan mendapatkan dana hibah dalam jumlah setara US\$4.820.000 yang digunakan dalam bentuk pembiayaan. Karena Perusahaan menerima dalam mata uang rupiah, jumlah hibah JRF adalah sebesar Rp42.100.000.000.

Jangka waktu pengelolaan dana hibah oleh Perusahaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman yang diberikan diungkapkan pada Catatan 27.

6. LOANS (continued)

Significant information related to loans: (continued)

c. Java Reconstruction Fund

The *Java Reconstruction Fund* (JRF) was established for the purpose of providing a common platform to mobilize donor resource and channel financial assistance in support of the Republic of Indonesia's Action Plan for Yogyakarta-Central Java Reconstruction and Rehabilitation.

The Company gets a grant in the amount equivalent to US\$4,820,000 which is used in the form of financing. Because the Company received in the rupiah currency, the amount of JRF grant is equal Rp42,100,000,000.

The period of grant fund management by The Company is for 10 (ten) years.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding the classification and fair value of loans are disclosed in Note 27.

7. PEMBIAYAAN MODAL

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2021	2020
Pihak Ketiga		
<u>Entitas Induk</u>		
Rupiah		
Induk Koperasi Simpan Pinjam	2.000.000.000	2.000.000.000
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)
Total	-	-

7. CAPITAL FINANCING

a. By relationship and transaction type

Third Parties
<u>Parent Entity</u>
Rupiah
Induk Koperasi Simpan Pinjam
Less:
Allowance for Impairment Losses
Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PEMBIAYAAN MODAL(lanjutan)

- a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi (lanjutan)

	2021	2020
<u>Entitas Anak</u>		
Pembiayaan bagi hasil		
Konvensional	455.596.037.793	490.041.786.765
Syariah	425.237.819.570	465.089.661.057
Pembiayaan penyertaan saham	1.927.863.088	4.173.011.064
	882.761.720.451	959.304.458.886
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(114.667.690.278)	(112.731.525.571)
Subtotal	768.094.030.173	846.572.933.315
Nilai Bersih	768.094.030.173	846.572.933.315

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang pembiayaan modal telah memadai.

- b. Berdasarkan umur tunggakan

	2021	2020
0 - 90 hari	827.788.971.349	898.457.548.353
Lebih dari 90 hari	56.972.749.102	62.846.910.533
Total	884.761.720.451	961.304.458.886
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)
Nilai Bersih	768.094.030.173	846.572.933.315

- c. Berdasarkan jangka waktu kredit

Plafon pinjaman yang diterima dari debitur sesuai dengan jangka waktu kredit adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Kurang dari 1 tahun	437.577.310.616	370.212.099.695
1 - 2 tahun	263.819.067.303	276.036.050.899
Lebih dari 2 tahun	183.365.342.532	315.056.308.292
Total	884.761.720.451	961.304.458.886
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)
Nilai Bersih	768.094.030.173	846.572.933.315

7. CAPITAL FINANCING (continued)

- a. By relationship and transaction type (continued)

	<u>Subsidiaries</u>
	<i>Financing through profit sharing</i>
	<i>Conventional</i>
	<i>Sharia</i>
	<i>Financing in share participation</i>
	<i>Less:</i>
	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
	<i>Subtotal</i>
	<i>Net Value</i>

Management believes that the Allowance for Impairment Losses on the capital financing receivables is adequate.

- b. By days past due

	<i>0 - 90 days</i>
	<i>More than 90 days</i>
	<i>Total</i>
	<i>Less:</i>
	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
	<i>Net Value</i>

- c. By credit period

The loan credit limit, which is received by the debtors in accordance with credit period are as follows:

	<i>Less than 1 year</i>
	<i>1 - 2 years</i>
	<i>More than 2 years</i>
	<i>Total</i>
	<i>Less:</i>
	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
	<i>Net Value</i>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

d. Berdasarkan sektor ekonomi

	2021	2020	
Perdagangan, restoran dan hotel	570.731.241.019	534.522.355.491	Trade, restaurants and hotels
Jasa-jasa	67.692.539.679	207.388.478.172	Services
Perindustrian	77.091.685.747	70.260.333.895	Industries
Pertanian/peternakan/kehutanan	1.462.546.069	1.687.347.869	Agricultures/ranch/forestry
Lain-lain	167.783.707.937	147.445.943.459	Others
Total	884.761.720.451	961.304.458.886	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)	Less: Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	768.094.030.173	846.572.933.315	Net Value

7. CAPITAL FINANCING (continued)

d. By economic sector

e. Berdasarkan status pembiayaan

Pembiayaan modal yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp598.458.994.064 dan Rp610.744.986.101.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan; dan/atau
- 3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

e. By financing status

Restructured capital financing as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp598,458,994,064 and Rp610,744,986,101, respectively.

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) *rescheduling* is a changes in the debtor's payment schedule or the duration;
- 2) *reconditioning* is a changes in some or all of the financing requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum credit limit of financing; and/or
- 3) *restructuring* is a change in financing requirements concerning the addition of financing facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal interest to the new financing that can be accompanied by rescheduling and/or reconditioning.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Pihak ketiga			Third parties
Saldo awal	(114.731.525.571)	(9.397.384.205)	Beginning balances
Koreksi saldo awal (Catatan 2)	-	(96.024.209.057)	Beginning balances correction (Note 2)
Pemulihan selama tahun berjalan	(1.936.164.707)	(9.309.932.309)	Provision during the period
Total	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)	Total

Perusahaan melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan kepada pihak ketiga yang macet pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil dan nihil.

The Company made write-off of financing to third parties that were stalled in December 31, 2021 and 2020 amounting to nil and nil, respectively.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya penghapusbukuan adalah:

The conditions that are causing the write off are as follows:

- 1) Pembiayaan modal harus sudah tergolong pada kolektibilitas macet.
- 2) Pasangan usaha/debitur tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kredit atau debitur sudah tidak mempunyai kemampuan membayar atau debitur tidak kooperatif (sulit ditemui/melarikan diri/hilang) atau usaha debitur dinyatakan pailit (bangkrut).
- 3) Upaya restrukturisasi sudah tidak dapat dilakukan.
- 4) Upaya pelunasan berupa penebusan/penjualan jaminan sudah dilakukan.
- 5) Upaya lelang telah dilakukan untuk agunan yang dipasang hak tanggungan.
- 6) Pembiayaan bermasalah yang di-cover oleh asuransi kredit telah dilakukan pengajuan hak klaim kecuali hak klaim yang sudah kedaluwarsa.

- 1) Capital financing must already be classified as collectibility of loss.
- 2) The investee company/debtor has no commitment to settle the loan or the debtor has no ability to pay or the debtor is uncooperative (difficult to be found/escape/lost) or the debtor's business is declared bankrupt (bankrupt).
- 3) The restructuring effort can not be done.
- 4) Repayment efforts in the form of redemption/sale of the guarantee have been made.
- 5) An auction effort has been made for the mortgaged mortgage.
- 6) Problem financing covered by credit insurance has been made claiming rights except claims rights that have expired.

Informasi penting sehubungan dengan Pembiayaan Modal

- a. Penyertaan modal pada Penerima Modal Usaha yang signifikan pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Significant information related to Capital Financing

- a. Equity Participation in the Investee Company that significant as of December 31, 2021 and 2020.

	2021		2020		
	Rp	%	Rp	%	
PT Mitra Niaga Madani	107.075.000.000	99,953	107.075.000.000	99,953	PT Mitra Niaga Madani
PT PNM Ventura Syariah	63.199.000.000	99,998	63.199.000.000	99,998	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Bisnis Madani	48.500.000.000	99,897	48.500.000.000	99,897	PT Mitra Bisnis Madani
PT Mitra Dagang Madani	4.998.000.000	99,960	4.998.000.000	99,96	PT Mitra Dagang Madani
PT Mitra Tekno Madani	4.948.500.000	98,970	4.962.500.000	98,96	PT Mitra Tekno Madani
PT Micro Madani Institute	4.722.000.000	94,440	4.722.000.000	94,44	PT Micro Madani Institute
PT Mitra Proteksi Madani	4.500.000.000	90,000	4.500.000.000	90,000	PT Mitra Proteksi Madani
PT Mitra Utama Madani	4.500.000.000	90,000	4.500.000.000	90,000	PT Mitra Utama Madani
PT Crom Madani Indonesia	7.488.000.000	100,000	-	-	PT Crom Madani Indonesia
PT Karya Digital Madani	5.300.000.000	53,000	-	-	PT Karya Digital Madani

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

**Informasi penting sehubungan dengan
Pembiayaan Modal (lanjutan)**

b. Induk Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi antara Perusahaan dan Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) sebagaimana tercantum dalam akta notaris Arry Supratno, S.H., No. 120 tanggal 30 November 1999 Perusahaan setuju untuk melakukan penyertaan modalnya di IKSP sebesar Rp2.000.000.000. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan antara Perusahaan dengan IKSP adalah sebesar 20% : 80%. Jangka waktu modal penyertaan tidak terbatas, kecuali diputuskan untuk dihentikan oleh Perseroan dan IKSP disebabkan oleh kejadian wanprestasi.

c. Pembiayaan Modal

Pembiayaan dengan bagi hasil adalah pembiayaan atas bagi hasil berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*) dalam jadwal angsuran dengan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Pembiayaan dengan bagi hasil terdiri dari pembiayaan bagi hasil konvensional dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk utama bagi hasil syariah adalah M-Plus Syariah.

M-Plus Syariah merupakan pembiayaan syariah modal kerja atau modal investasi kepada usaha kecil dan menengah dengan pola bagi hasil (Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah). Pembiayaan ini mempunyai plafon minimal Rp200.000.000 sampai dengan Rp3.000.000.000, dengan jangka waktu minimal 12 bulan sampai dengan maksimal 60 bulan.

Pembiayaan dengan obligasi konversi adalah pembiayaan berdasarkan pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan hukum Perusahaan terbatas.

Pembiayaan dengan penyertaan saham adalah penyertaan modal secara langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan hukum Perusahaan terbatas dalam jangka waktu tertentu dengan batas maksimal 10 (sepuluh) tahun.

7. CAPITAL FINANCING (continued)

**Significant information related to Capital
Financing (continued)**

b. Induk Koperasi Simpan Pinjam

Based on the Investment in the Cooperative Agreement between the Company and Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) set out in notarial deed No. 120 dated on November 30, 1999 of Arry Supratno, S.H., the Company agreed to invest its funds in IKSP amounting to Rp2,000,000,000. Profit sharing from business activities funded by equity capital between the Company and IKSP is 20%: 80%. The term of the equity is not limited unless it is decided to be terminated by the Company and IKSP due to the event of default.

c. Capital financing

Profit sharing financing is based on profit sharing revenue at installment schedule with a certain percentage agreed in advance and must be set forth in a written agreement between the Company and the Investee Company (PPU).

Profit sharing financing consist of conventional financing and financing based on sharia principles. One of the main products of the sharia profit sharing is the M-Plus Sharia.

M-Plus Syariah is a sharia financing for working capital or capital investment to small and medium enterprises with revenue sharing scheme (Mudharaba and/or Musharaka Contract). The financing has a minimum credit limit of Rp200,000,000 up to Rp3,000,000,000, with a minimum period of 12 months to a maximum of 60 months.

Financing with convertible bond financing is financing based on purchase of convertible bonds issued by the Investee Company (PPU) which incorporated limited company.

Financing with equity investments is directly to the Investee Company (PPU) which incorporated limited company within a specified period to a maximum of 10 (ten) years.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

c. Pembiayaan Modal (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan modal dikarenakan perubahan nilai realisasi jaminan yang dipengaruhi kondisi dan jenis usaha masing-masing debitur.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas seluruh piutang pembiayaan modal entitas induk dan entitas anak telah memadai.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pembiayaan modal diungkapkan pada Catatan 27.

8. PIUTANG JASA MANAJEMEN

Piutang jasa manajemen merupakan piutang yang berasal dari jasa pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jasa IT, pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP), pelatihan, pendampingan dan *community development* untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah dan Koperasi (UKMK).

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2021	2020	
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
Entitas Induk	10.293.002.147	8.325.895.425	Parent Entity
Entitas Anak	117.526.000	-	Subsidiaries
	10.410.528.147	8.325.895.425	
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.775.638.666)	(1.131.889.737)	Allowances for Impairment Losses
Total	5.634.889.481	7.194.005.688	Total

b. Berdasarkan jangka waktu kredit

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	6.648.050.645	8.325.895.425	Less than 1 years
1 - 2 tahun	2.290.357.310	-	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	1.472.120.192	-	More than 2 years
	10.410.528.147	8.325.895.425	
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.775.638.666)	(1.131.889.737)	Allowances for impairment losses
Total	5.634.889.481	7.194.005.688	Total

7. CAPITAL FINANCING (continued)

c. Capital financing (continued)

Allowance for impairment losses on capital financing due to changes in the value of realization of collateral affected by the condition and type of business of each debtor.

Management believes that the allowance for impairment losses on all parent entity capital financing and subsidiary receivables is adequate.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding the classification and fair value of capital financing are disclosed in Note 27.

8. MANAGEMENT SERVICES RECEIVABLES

Management services receivables is generated from the establishment services of Micro Finance Institutions (MFIs), IT services, setting standard operating procedures (SOPs), training, assistance and community development for the development of Micro Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMEC).

a. By relationship and transaction type

b. By credit period

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020, and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG JASA MANAJEMEN (lanjutan)

8. MANAGEMENT SERVICES RECEIVABLES (continued)

c. Berdasarkan umur tunggakan

c. *By days past due*

	2021	2020	
0 - 90 hari	5.498.463.481	357.202.192	0 - 90 days
Lebih dari 90 hari	4.912.064.666	7.968.693.233	More than 90 days
Total	10.410.528.147	8.325.895.425	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.775.638.666)	(1.131.889.737)	Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	5.634.889.481	7.194.005.688	Net Value

d. Berdasarkan sektor ekonomi

d. *By economic sector*

	2021	2020	
Jasa-jasa	10.410.528.147	8.325.895.425	Services
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.775.638.666)	(1.131.889.737)	Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	5.634.889.481	7.194.005.688	Net Value

e. Berdasarkan status pembiayaan

e. *By financing status*

Tidak terdapat Piutang Jasa Manajemen yang direstrukturisasi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

None of the Management Services Receivables are restructured as of December 31, 2021 and 2020.

f. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang jasa manajemen adalah sebagai berikut:

f. *The movement of Allowance for Impairment management services receivables losses are as follows:*

	2021	2020	
Pihak Ketiga:			Third Parties:
Saldo awal	(1.131.889.737)	(1.123.067.921)	Beginning balances
Penyisihan selama periode berjalan	(3.643.748.929)	(8.821.816)	Provision during the period
Saldo Akhir	(4.775.638.666)	(1.131.889.737)	Ending Balances

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang jasa manajemen telah memadai.

Management believes that the Allowance for Impairment Losses of management services receivable is adequate.

Pinjaman yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp4.775.638.666 dan Rp1.131.889.737.

Loans that has been due and impaired on December 31, 2021 and 2020 was Rp4,775,638,666 and Rp1,131,889,737, respectively.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang jasa manajemen diungkapkan pada Catatan 27.

Information regarding the classification and fair value of management services receivables are disclosed in Note 27.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

	2021
Pendapatan bunga yang masih akan diterima:	
Bunga pembiayaan ULaMM	60.461.288.050
Bunga pembiayaan Mekaar	34.629.180.315
Bunga Deposito	1.076.222.131
Bunga pembiayaan LKMS	92.363.392
Subtotal	96.259.053.888
<u>Entitas Anak</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari pembiayaan modal ventura	33.837.738.022
Total	130.096.791.910

9. ACCRUED INCOME

	2020	
	54.423.857.375	<i>Accrued interest income:</i>
	16.501.785.696	<i>Interest of ULaMM financing</i>
	7.122.471.518	<i>Interest of Mekaar financing</i>
	114.307.693	<i>Interest of Time Deposits</i>
		<i>Interest of LKMS financing</i>
Subtotal	78.162.422.282	<i>Subtotal</i>
		<i>Subsidiaries</i>
	39.783.933.539	<i>Accrued interest income from</i>
		<i>venture capital financing</i>
Total	117.946.355.821	Total

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pendapatan masih akan diterima diungkapkan pada Catatan 27.

Information regarding the classification and fair value of accrued incomes are disclosed in Note 27.

10. PIUTANG DAN UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI

a. Piutang Kegiatan Manajer Investasi

	2021
<u>Piutang management fee Pihak Berelasi</u>	
RDSPT PNM Indah Karya	2.455.463.700
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI	982.804.465
RDSPT PNM Multi Ekspor 1	572.366.912
KPD - PT PNM (Persero)	401.946.782
RDPT PNM Multisektoral VII	329.262.112
RDPT PNM Jamkrindo Fund	280.299.858
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VII	252.455.846
RD PNM Saham Unggulan	208.395.706
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	207.175.057
RD PNM Dana Bertumbuh	205.702.872
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VIII	202.960.825
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V	162.236.868
RDPT PNM Multisektoral X	151.395.308
RD PNM Dana Kas Platinum 2	108.745.022
RDPT PNM Multisektoral XII	98.864.122
RDSPU PNM Faaza	96.182.854
RD PNM Amanah Syariah	86.335.886
RDPT PNM Multisektoral IX	52.586.230
RDSPT PNM Multisektoral V	35.162.468
RD PNM Saham Agresif	32.806.681
RD PNM ETF Core LQ45	31.804.362
PNM Surat Berharga Negara 90	31.720.357
RDPT PNM Multisektoral XI	27.257.947
RD Pasar Uang PNM Dana Maxima	25.434.117
RD PNM Ekuitas Syariah	24.315.374
RD PNM Dana Sejahtera 2	23.722.273
PNM Surat Berharga Negara II	21.783.163
RD PNM Dana Kas Likuid	20.824.461
RDPU PNM Dana Maxima 2	19.373.832
RDT PNM Terproteksi Investa 29	17.124.908
RD PNM Dana Kas Platinum	16.728.677

10. INVESTMENT MANAGER RECEIVABLES AND PAYABLES

a. Investment Manager Activities Receivables

	2020	
	1.138.293.089	<u>Management fee receivables Related Parties</u>
		<i>RDSPT PNM Indah Karya</i>
		<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI</i>
		<i>RDSPT PNM Multi Ekspor 1</i>
		<i>KPD - PT PNM (Persero)</i>
		<i>RDPT PNM Multisektoral VII</i>
		<i>RDPT PNM Jamkrindo Fund</i>
		<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VII</i>
		<i>RD PNM Saham Unggulan</i>
		<i>RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II</i>
		<i>RD PNM Dana Bertumbuh</i>
		<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VIII</i>
		<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V</i>
		<i>RDPT PNM Multisektoral X</i>
		<i>RD PNM Dana Kas Platinum 2</i>
		<i>RDPT PNM Multisektoral XII</i>
		<i>RDSPU PNM Faaza</i>
		<i>RD PNM Amanah Syariah</i>
		<i>RDPT PNM Multisektoral IX</i>
		<i>RDSPT PNM Multisektoral V</i>
		<i>RD PNM Saham Agresif</i>
		<i>RD PNM ETF Core LQ45</i>
		<i>PNM Surat Berharga Negara 90</i>
		<i>RDPT PNM Multisektoral XI</i>
		<i>RD Pasar Uang PNM Dana Maxima</i>
		<i>RD PNM Ekuitas Syariah</i>
		<i>RD PNM Dana Sejahtera 2</i>
		<i>PNM Surat Berharga Negara I</i>
		<i>RD PNM Dana Kas Likuid</i>
		<i>RDPU PNM Dana Maxima 2</i>
		<i>RDT PNM Terproteksi Investa 29</i>
		<i>RD PNM Dana Kas Platinum</i>

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG DAN UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI (lanjutan)

10. INVESTMENT MANAGER ACTIVITIES RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

a. Piutang Kegiatan Manajer Investasi (lanjutan)

a. Investment Manager Activities Receivables (continued)

	2021	2020	
Piutang <i>management fee</i> (lanjutan)			Management fee receivables (continued)
Pihak Berelasi (lanjutan)			Related Parties (continued)
RD PNM Dana Tunai	14.822.979	33.063.084	RD PNM Dana Tunai
RD PNM Syariah	14.003.834	6.126.487	RD PNM Syariah
RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah	13.959.846	14.647.822	RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah
RD PNM PUAS	12.592.602	-	RD PNM PUAS
RDSPT PNM Kaffah	11.263.409	33.138.134	RDSPT PNM Kaffah
RDSPU PNM Falah	5.999.595	11.519.765	RDSPU PNM Falah
RDPT Multisektoral XVI	9.169.908	19.919.806	RDPT Multisektoral XVI
RDSPU PNM Falah 2	5.051.260	10.608.874	RDSPU PNM Falah 2
RDT PNM Terproteksi Investa 30	5.002.691	6.228.784	RDT PNM Terproteksi Investa 30
RD PNM Terproteksi Dana Investa 11	4.256.089	6.221.663	RD PNM Terproteksi Dana Investa 11
RDT PNM Terproteksi Investa 28	2.189.588	7.064.309	RDT PNM Terproteksi Investa 28
RDSPU PNM Arafah	1.763.694	134.345.564	RDSPU PNM Arafah
RDT PNM Terproteksi Investa 31	1.748.619	10.215.902	RDT PNM Terproteksi Investa 31
PNM Surat Berharga Negara	1.649.269	32.812.196	PNM Surat Berharga Negara
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III	35.000	417.686.868	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	32	232.312.595	RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19	2	2	RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II	2	2	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II
RDPT PNM Perikanan Nusantara	-	883.636.364	RDPT PNM Perikanan Nusantara
RDPT PNM Multisektoral VI	-	340.820.926	RDPT PNM Multisektoral VI
RDST PNM PNM Misbah 4	-	338.177.777	RDST PNM PNM Misbah 4
RD Terproteksi PNM Investa 25	-	161.230.977	RD Terproteksi PNM Investa 25
RDSPT Mikro BUMN Seri II	-	160.675.583	RDSPT Mikro BUMN Seri II
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016	-	117.164.740	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	-	114.845.514	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV
RDPT PNM POS Indonesia	-	91.365.224	RDPT PNM POS Indonesia
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	-	39.048.761	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN
RD PNM Terproteksi Dana Investa 3	-	23.399.394	RD PNM Terproteksi Dana Investa 3
RD PNM Pasar Uang Syariah	-	2.286.988	RD PNM Pasar Uang Syariah
Subtotal	7.286.747.464	8.024.289.898	Subtotal
Pihak Ketiga			Third Party
KPD - Jely Sunjoto	-	19.191.762	KPD - Jely Sunjoto
Total	7.286.747.464	8.043.481.660	Total

Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang kegiatan manajer investasi dapat tertagih seluruhnya. (Catatan 40)

The Company does not establish an allowances for impairment losses, because the Company's management believes that the receivables from investment managers activities are fully collectible. (Note 40)

b. Utang Kegiatan Manajer Investasi

b. Investment Manager Activities Payables

	2021	2020	
Pihak-pihak Ketiga:			Third Parties:
PT BNI Life Insurance	903.698	903.698	PT BNI Life Insurance
PT Indo Premier	293.600	1.753.421	PT Indo Premier
PT Bank Commonwealth	245.510	257.539	PT Bank Commonwealth
PT Bank CIMB Niaga Tbk	35.057	745.050	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Philip Securities Indonesia	-	332.848	PT Philip Securities Indonesia
PT Bank Permata Tbk	-	85.768	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	66.149	PT Bank DBS Indonesia
Total utang <i>management fee</i>	1.477.865	4.144.473	Total management fee payable

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG LAIN-LAIN

	2021
Pihak ketiga	
Piutang karyawan	11.484.662.378
Piutang lain-lain	89.339.317.125
Subtotal	100.823.979.503
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.262.553.263)
Total	87.561.426.240

Piutang lain-lain merupakan piutang yang diakibatkan oleh transaksi dengan pihak ketiga yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang pembiayaan, piutang jasa manajemen, piutang kegiatan manajer investasi, serta piutang lain-lain yang berasal dari konsolidasi Kontrak Pengelolaan Dana.

Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain sudah mencukupi untuk menutupi kerugian atas piutang lain-lain tidak tertagih.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 27.

12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2021
Uang muka kerja	124.372.976.337
Biaya dibayar di muka:	
Asuransi	199.672.855.476
Sewa kantor/rumah dinas/kendaraan	53.319.386.274
Provisi dan administrasi pinjaman	37.392.200.956
Total	414.757.419.043

Uang muka kerja merupakan uang yang diambil dalam rangka aktivitas operasional Perusahaan.

Biaya sewa dibayar di muka terdiri dari sewa kantor, sewa rumah dinas, dan sewa kendaraan dibayar di muka. Biaya asuransi dibayar di muka terdiri dari asuransi penjaminan kredit, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan asuransi kantor dibayar di muka.

Biaya dibayar dimuka Perusahaan merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa yang bukan menjadi objek PSAK 73.

11. OTHER RECEIVABLES

	2020	
		Third parties
	5.967.955.702	Employee receivables
	64.978.814.277	Other receivables
Subtotal	70.946.769.979	Subtotal
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.235.563.278)	Less: Allowances for Impairment Losses
Total	57.711.206.701	Total

Other receivables represent receivables arising from transactions with third parties that can not be categorized as financing receivables, management service receivables, investment manager activities receivables, and other receivables arising from Fund Management Contract consolidation.

The Company believes that the allowance for impairment losses on other receivables is adequate to cover losses on uncollectible accounts.

Information regarding the classification and fair value of other receivables are disclosed in Note 27.

12. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	2020	
		Advances
	66.872.381.214	Prepaid expenses:
		Insurance
	103.964.973.325	Office/house on duty/vehicle rent
	49.744.422.501	Provision and loan administration
	31.764.904.492	
Total	252.346.681.532	Total

Advances for work are money taken for the framework of the operational activities of the Company's.

Prepaid rental costs consist of office rent, official house rental, and prepaid vehicle rental. Prepaid insurance costs consist of credit guarantee insurance, life insurance, vehicle insurance, and prepaid office insurance.

Advances and prepayment of the Company are its not become object of PSAK 73.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS

2021						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Pemilikan langsung:						<i>Direct ownership:</i>
Tanah	553.109.224.081	309.396.740.000	3.355.549.822	-	859.150.414.259	Land
Bangunan	454.513.233.326	345.681.560.821	-	-	800.194.794.147	Building
Kendaraan	456.137.553.534	144.013.620.992	36.118.484.963	-	564.032.689.563	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	523.569.412.427	159.474.891.707	67.403.270.049	-	615.641.034.085	Furnitures, fixtures, and equipments
Partisi kantor	133.401.491.913	36.003.263.834	3.729.037.202	-	165.675.718.545	Office partition
Aset Hak Guna:						Right of use asset:
Bangunan	142.251.137.000	66.050.329.178	-	-	208.301.466.178	Building
Kendaraan	2.188.821.900	55.277.909.543	-	-	57.466.731.443	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	2.457.514.182	5.237.401.065	-	-	7.694.915.247	Furnitures, fixtures, and equipments
Subtotal	2.267.628.388.363	1.121.135.717.140	110.606.342.036	-	3.278.157.763.467	Subtotal
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung:						<i>Direct ownership:</i>
Bangunan	76.707.769.337	17.811.307.499	-	-	94.519.076.836	Building
Kendaraan	195.037.729.367	16.263.961.271	39.792.921.689	-	171.508.768.949	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	350.422.645.212	40.238.567.872	3.619.432.006	-	387.041.781.078	Furnitures, fixtures, and equipments
Partisi kantor	100.749.878.796	18.456.804.392	308.906.160	-	118.897.777.028	Office partition
Aset Hak Guna:						Right of use asset:
Bangunan	67.179.015.792	23.992.174.657	-	-	91.171.190.449	Building
Kendaraan	547.205.474	40.007.049.132	-	-	40.554.254.606	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	1.377.166.205	8.108.900.281	-	-	9.486.066.486	Furnitures, fixtures, and equipments
Subtotal	792.021.410.183	164.878.765.104	43.721.259.855	-	913.178.915.432	Subtotal
Nilai buku bersih	1.475.606.978.180				2.364.978.848.035	Net book value
2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Pemilikan langsung:						<i>Direct ownership:</i>
Tanah	515.288.736.372	-	-	37.820.487.709	553.109.224.081	Land
Bangunan	397.539.873.769	1.407.381.691	-	55.565.977.866	454.513.233.326	Building
Kendaraan	378.727.225.312	84.663.182.222	23.305.472.428	16.052.618.428	456.137.553.534	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	423.071.391.605	110.480.064.438	9.982.043.616	-	523.569.412.427	Furnitures, fixtures and equipments
Partisi kantor	117.634.085.810	16.772.449.103	1.005.043.000	-	133.401.491.913	Office partition
Aset Hak Guna:						Right of used assets:
Bangunan	63.070.246.472	79.180.890.528	-	-	142.251.137.000	Building
Kendaraan	-	2.188.821.900	-	-	2.188.821.900	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	-	2.457.514.182	-	-	2.457.514.182	Furnitures, fixtures and equipments
Subtotal	1.895.331.559.340	297.150.304.064	34.292.559.044	109.439.084.003	2.267.628.388.363	Subtotal
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung:						<i>Direct ownership:</i>
Bangunan	48.800.763.526	27.907.005.811	-	-	76.707.769.337	Building
Kendaraan	117.030.109.311	83.048.499.002	15.752.715.823	10.711.836.877	195.037.729.367	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	275.120.600.119	85.278.694.514	9.976.649.421	-	350.422.645.212	Furnitures, fixtures, and equipments
Partisi kantor	84.203.081.326	16.546.797.470	-	-	100.749.878.796	Office partition

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS
(continued)**

	2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna:						Accumulated Depreciation
Bangunan	-	67.179.015.792	-	-	67.179.015.792	Right of used assets:
Kendaraan	-	547.205.474	-	-	547.205.474	Building Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	-	1.377.166.205	-	-	1.377.166.205	Furnitures, fixtures and equipments
Subtotal	525.154.554.282	281.884.384.268	25.729.365.244	10.711.836.877	792.021.410.183	Subtotal
Nilai buku bersih	<u>1.370.177.005.058</u>				<u>1.475.606.978.180</u>	Net book value

Informasi mengenai Aset Tetap yang diperoleh dan dimiliki oleh entitas induk dan entitas anak dalam Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Information about Fixed Assets obtained and owned by the parent and subsidiary entities as of December 31, 2021 and 2020 Consolidated Financial Statements are as follows:

Seluruh aset tetap Perusahaan digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

All of the Company's fixed assets are used for operational activities and there are no temporarily unused fixed assets as of December 31, 2021 and 2020.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp313.148.363.286 dan Rp236.822.873.513.

The gross carrying amount of each fully depreciated fixed asset and used by the Company as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp313,148,363,286 and Rp236,822,873,513, respectively.

Perhitungan penjualan aset tetap sebagai berikut:

The sales of fixed assets is calculated as follows:

	2021	2020	
Hasil penjualan neto	76.785.736.507	7.822.484.700	Proceed - neto
Dikurangi: nilai buku	77.250.444.132	7.822.484.700	Less: book value
Rugi penjualan aset tetap	<u>(464.707.625)</u>	<u>-</u>	Loss on sale of fixed assets

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 aset tetap diasuransikan pada PT BRI Asuransi Indonesia. Asuransi tersebut meng-cover kerugian karena kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan dan kecurian dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar nilai perolehan aset tetap. Perusahaan tidak memiliki hubungan berelasi dengan pihak asuransi. Manajemen berpendapat, nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap dipertanggungjawabkan.

On December 31, 2021 and 2020 fixed assets were insured with PT BRI Asuransi Indonesia. The insurance cover loss due to fire, flood, earthquakes, damage and theft of the insured value of each property and equipment at cost. The Company has no related relationship with the insurance company. The Company's management believes the insurance coverage is adequate to cover possible losses on fixed assets insured.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Pengurangan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp58.039.861.581 dan Rp34.292.559.044, serta penghapusan akumulasi depresiasi sebesar Rp59.985.221.126 dan Rp25.729.365.244 merupakan penghapusanbuku aset tetap.

Tidak terdapat perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap yang material pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Aset tetap yang dimiliki Entitas Induk tidak dijaminkan ke pihak lain.

Beban penyusutan dialokasikan ke dalam beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

	2021
Beban Penyusutan (Catatan 36)	
Entitas Induk	14.126.314.700
Entitas Anak	150.752.450.404
Total	164.878.765.104

Beban penyusutan sebesar Rp164.878.765.104 dan Rp281.884.384.268 untuk 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan jumlah total nilai beban penyusutan untuk aset tetap yang digunakan untuk tujuan operasional oleh entitas induk dan entitas anak/afiliasi serta beban penyusutan atas bangunan untuk disewakan (properti investasi) milik entitas afiliasi.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Manajemen Perusahaan telah melakukan pengkajian ulang aset tetap dan berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian aset hak guna.

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS
(continued)**

The deduction in the value of fixed assets as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp58,039,861,581 and Rp34,292,559,044, and write-off the accumulated depreciation amounting to Rp59,985,221,126 and Rp25,729,365,244, respectively, represents the write-off of fixed assets.

There are no significant between the fair value and the carrying value of fixed assets on December 31, 2021 and 2020.

The Parent's fixed assets are not use as collateral to the third parties.

Depreciation expenses are allocated into operating expenses on consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Depreciation expenses was allocated as follows:

	2021	2020	
Beban Penyusutan (Catatan 36)			Depreciation expenses (Note 36)
Entitas Induk	14.126.314.700	133.187.814.516	Parent Entity
Entitas Anak	150.752.450.404	148.696.569.752	Subsidiaries
Total	164.878.765.104	281.884.384.268	Total

Depreciation expenses amounted to Rp164,878,765,104 and Rp281,884,384,268 for December 31, 2021 and 2020, respectively represent the total value of depreciation expense for property, plant and equipment used for operational purposes by the parent and subsidiaries/affiliates and custody expenses the building for rent (investment property) belonging to the affiliates.

Management has reviewed over the estimated useful life, depreciation methods, and salvage values at the end of each reporting date.

The Company's Management has conducted a review of the fixed assets and rights of use assets and believe that there were no events or changes in circumstances indicate impairment of fixed assets on the consolidated statement of financial position and right of use asset.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Berdasarkan jenis:

	2021
Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40)	
<u>Entitas Induk</u>	
Saham PT Syarikat Takaful Indonesia	5.785.109.997
Kerugian yang belum direalisasi	(5.785.109.997)
Total	-

Informasi penting sehubungan dengan Portofolio Efek Tersedia dengan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain:

Kepemilikan Perusahaan pada PT Syarikat Takaful Indonesia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 6,92%.

Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas Portofolio Efek - Tersedia dengan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya. Metode pengukuran nilai wajar menggunakan input level 2, yaitu: selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Portofolio efek tersebut di atas tidak dijaminkan, tidak di-repo-kan dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain.

Perubahan pada nilai portofolio efek pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diungkapkan pada Catatan 27.

14. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

By type:

	2020	
		<i>Related Parties (Note 40)</i>
		<i>Parent entity</i>
		<i>Shares of PT Syarikat Takaful Indonesia</i>
		<i>Unrealized Loss</i>
	5.785.108.997	
	(119.880.878)	
Total	5.665.228.119	Total

Significant information related to Portfolio of Securities Fair Value Through Other Comprehensive Income:

The ownership of the Company in PT Syarikat Takaful Indonesia as of December 31, 2021 and December 31, 2020 is 6.92%.

Increase (decrease) in fair value of the Portfolio Securities - Fair Value Through Other Comprehensive Income is recorded to Other Comprehensive Income. Method of measuring fair value is using Level 2 inputs, namely: in addition quotation prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

The above portfolio of securities are not pledged, not in the repo, and not lent to other parties.

Changes in the portfolio of securities value at fair value through profit or loss recorded in the consolidated statement of financial position.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding classification and fair value of portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income are disclosed in Note 27.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

2021						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan Software	264.296.108.104	27.397.233.339	-	-	291.693.341.443	Acquisition Cost Software
Biaya pra-Operasional Pengembangan software	2.127.709.474	-	-	-	2.127.709.474	Pre-operational costs
	16.086.876.126	-	-	-	16.086.876.126	Software development
Subtotal	282.510.693.704	27.397.233.339	-	-	309.907.927.043	Subtotal
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Software	112.309.351.726	77.515.471.772	-	-	189.824.823.498	Software
Biaya pra-operasional	2.127.709.474	-	-	-	2.127.709.474	Pre-operational costs
Subtotal	114.437.061.200	77.515.471.772	-	-	191.952.532.972	Subtotal
Nilai buku bersih	168.073.632.504				117.955.394.071	Net book value
2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan Goodwill	1.339.900.118	-	1.339.900.118	-	-	Acquisition Cost Goodwill
Software	242.070.102.362	30.207.652.647	7.981.646.905	-	264.296.108.104	Software
Biaya pra-Operasional Pengembangan software	5.162.133.474	-	3.034.424.000	-	2.127.709.474	Pre-operational costs
	192.615.920	15.894.260.206	-	-	16.086.876.126	Software development
Subtotal	248.764.751.874	46.101.912.853	12.355.971.023	-	282.510.693.704	Subtotal
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Software	44.581.748.704	72.654.123.598	4.926.520.576	-	112.309.351.726	Software
Biaya pra-operasional	2.127.709.474	-	-	-	2.127.709.474	Pre-operational costs
Subtotal	46.709.458.178	72.654.123.598	4.926.520.576	-	114.437.061.200	Subtotal
Nilai buku bersih	202.055.293.696				168.073.632.504	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas goodwill.

Management believes that there is no impairment on goodwill.

Pembebanan amortisasi adalah sebagai berikut:

Amortization expenses was allocated as follows:

	2021	2020	
Beban amortisasi (Catatan 36)			Amortization expense (Note 36)
Entitas Induk	75.433.020.945	72.654.123.598	Parent Entity
Entitas Anak	2.082.450.827	-	Subsidiaries
Total	77.515.471.772	72.654.123.598	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

	2021
Agunan diambil alih	
PT PNM Venture Capital	10.911.109.496
PT Permodalan Nasional Madani	24.330.000
	10.935.439.496
Dikurangi :	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(24.330.000)
Subtotal	10.911.109.496
Aset tetap siap untuk dijual	
Mobil	68.701.576
Motor	56.411.584
Subtotal	125.113.160
Total Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.036.222.656

Informasi penting sehubungan dengan Aset Tidak lancar yang dimiliki untuk dijual:

Agunan diambilalih

Penilaian akhir aset berdasarkan laporan Penilaian Aset KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Mitra tertanggal 20 Januari 2016 telah menjadi penilaian aset seperti luas lahan 35.083 m² dan 281.821 m² di kabupaten Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow Timur Propinsi Sulawesi Utara dengan nilai pasar sebesar Rp2.830.000.000.

Aset tetap dimiliki untuk dijual

Aset tetap dimiliki untuk dijual adalah aset kendaraan motor dan mobil yang masa sewanya telah berakhir. Kendaraan tersebut sudah tidak digunakan atau disewakan dan tersedia untuk dijual dalam jangka waktu dekat.

Manajemen Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, karena manajemen memiliki keyakinan yang memadai bahwa nilai yang dapat direalisasikan atas aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual berada di atas nilai tercatat dan tidak ada penurunan nilai yang material.

Manajemen melakukan penilaian internal secara periodik atas agunan yang diambilalih dan aset tetap dimiliki untuk dijual.

16. NON-CURRENT ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE

	2020	
		Foreclosed assets
		PT PNM Venture Capital
		PT Permodalan Nasional Madani
	1.137.240.496	
	24.330.000	
	1.161.570.496	
		Less:
		Allowance for impairment losses
	(24.330.000)	
	1.137.240.496	Subtotal
		Fixed Asset for sale
		Cars
		Motorcycle
		Subtotal
		Total Non current assets classified as Held for sale
	1.137.240.496	

Significant information related to Non-current assets classified as held for sale:

Foreclosed assets

A final assessment of the assets based on reports Asset Valuation of KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori and Partners dated January 20, 2016 has been an assessment of assets such as land area of 35,083 m² and 281,821 m² in North Minahasa Regency and East Bolaang Mongondow, North Sulawesi Province with a market value of Rp2,830,000,000.

Fixed Asset held-for-sale

Fixed assets held-for-sale are the assets of motorcycles and cars whose rental period has expired. The vehicle is no longer used or leased and is available for sale in the near future.

The Company's management does not provide allowance for impairment losses on non-current assets held for sale, as the management believes that the realizable value of non-current assets held for sale is above the carrying amount and there is no material impairment.

Management conduct periodic internal assessments on foreclosed properties and fixed assets held-for-sale.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. ASET LAIN-LAIN - BERSIH

	2021
Bank dibatasi penggunaannya	1.623.897.404.486
Penyertaan pada entitas asosiasi	6.451.293.592
Sewa kantor	6.442.663.594
Telepon	214.673.125
Lain-lain	137.491.574.125
Total	1.774.497.608.922

17. OTHER ASSETS - NET

	2020	
	1.343.807.998.658	Restricted bank
	3.904.874.299	Investment in associates
	1.414.766.580	Office rent
	207.173.125	Telephone
	24.352.930.192	Others
Total	1.373.687.742.854	Total

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Perusahaan diperkenankan untuk menerima titipan dana dari nasabah Mekaar. Atas titipan dana tersebut Perusahaan membukakan rekening atas nama Perusahaan dan mencatatkan nilainya dalam akun "Bank dibatasi penggunaannya" dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.05/2019 dated June 12, 2019 concerning Supervision of PT Permodalan Nasional Madani, in the context of increasing financial literacy the Company is permitted to receive funds from Mekaar customers. For the funds deposited, the Company opens an account in the name of the Company and records its value in the "Bank restricted use" account in the Consolidated Statements of Financial Position.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.05/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 138/PMK.05/2020 dated September 28, 2020 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Pandemic Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 150/PMK.05/2021 dated October 25, 2021 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 19 November 2021 Pemerintah telah menyalurkan subsidi bunga/subsidi margin kepada Perusahaan sebesar Rp930.226.274.768. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2021 Perusahaan telah menyalurkan seluruh subsidi bunga/subsidi margin tersebut melalui dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

On November 19, 2021, the Government has distributed interest subsidies/margin subsidies to the Company amounting to Rp930,226,274,768. Furthermore, on December 31, 2021, the Company has distributed the entire interest subsidy/margin subsidy through an installment reserve fund for ULaMM customers and as Customer Deposit or Interest Subsidy for Mekaar customers.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

Pada tanggal 26 Oktober 2020 dan 4 Desember 2020 Perusahaan telah menerima subsidi bunga/subsidi margin dari Pemerintah masing-masing sebesar Rp119.613.007.638 dan Rp914.967.881.770. Perusahaan mengakui subsidi bunga/subsidi margin tersebut sebagai dana cadangan angsuran untuk nasabah ULamm dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo bank dibatasi penggunaannya yang bersumber dari subsidi bunga/subsidi margin sebesar Rp915.048.033.570.

17. OTHER ASSETS - NET (continued)

On October 26, 2020 and December 4, 2020, the Company has received interest subsidy/margin subsidy from the Government amounting to Rp119,613,007,638 and Rp914,967,881,770, respectively. The Company recognize the interest subsidy/margin subsidy as an installment reserve fund for ULamm customers and as a deposit for customers or interest subsidy fund for Mekaar customers. As of December 31, 2020, the restricted bank from the interest subsidy/margin subsidy amounting to Rp915,048,033,570.

18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

- a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi

	2021	2020
Pihak Berelasi (catatan 40)		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.899.682.853.634	1.700.260.184.481
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	897.316.847.703	62.520.260.004
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	744.630.751.862	626.861.056.899
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	495.900.000.000	266.666.666.669
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	473.841.787.830	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	177.147.691.698	-
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	26.437.480.000	15.041.660.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.758.429.234	-
Subtotal	4.732.715.841.961	2.671.349.828.053
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank DKI	2.606.704.708.356	1.057.833.186.079
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	866.488.501.806	900.000.031
PT Bank Permata Tbk	404.166.666.671	83.333.333.333
PT Maybank Indonesia Tbk	390.000.000.000	284.722.222.222
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	357.502.486.311	-
PT Bank Mega Tbk	349.742.790.384	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	291.666.666.670	91.666.666.667
PT Bank Mega Syariah	238.645.300.903	199.930.214.727
PT Bank Central Asia Tbk	152.866.983.766	78.169.654.590
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	144.939.066.807	93.504.163.292
PT Bank Pembangunan Daerah - D.I. Yogyakarta	144.118.702.789	86.111.111.000
PT Bank Victoria International Tbk	124.925.436.071	250.000.000.000
PT Maybank Syariah Indonesia	118.055.555.556	-
PT Danareksa Finance	100.000.000.000	74.734.865.864
State Bank of India Indonesia	99.615.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah	66.527.806.378	216.666.666.663
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	42.794.208.143	100.000.000.000

18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION BORROWINGS

- a. By the third parties and the related parties transactions

	2021	2020
Related Parties (note 40)		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.700.260.184.481	1.700.260.184.481
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.520.260.004	62.520.260.004
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	626.861.056.899	626.861.056.899
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	266.666.666.669	266.666.666.669
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-
Indonesia Eximbank	-	-
Revolving Fund Management Institution	15.041.660.000	15.041.660.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	-
Subtotal	2.671.349.828.053	2.671.349.828.053
Third Parties		
Rupiah		
PT Bank DKI	1.057.833.186.079	1.057.833.186.079
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	900.000.031	900.000.031
PT Bank Permata Tbk	83.333.333.333	83.333.333.333
PT Maybank Indonesia Tbk	284.722.222.222	284.722.222.222
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-	-
PT Bank Mega Tbk	-	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	91.666.666.667	91.666.666.667
PT Bank Mega Syariah	199.930.214.727	199.930.214.727
PT Bank Central Asia Tbk	78.169.654.590	78.169.654.590
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat	93.504.163.292	93.504.163.292
PT Bank Pembangunan Daerah -D.I. Yogyakarta	86.111.111.000	86.111.111.000
PT Bank Victoria International Tbk	250.000.000.000	250.000.000.000
PT Maybank Syariah Indonesia	-	-
PT Danareksa Finance	74.734.865.864	74.734.865.864
State Bank of India Indonesia	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah	216.666.666.663	216.666.666.663
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000	100.000.000.000

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

- a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

	2021
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	40.000.000.004
PT Bank Nationalnobu Tbk	24.979.087.067
PT Bank BCA Syariah	15.228.442.029
PT Bank Mayora Tbk	1.558.600.000
PT Bank Danamon	154.060.278
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BNI Syariah)	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRIsyariah Tbk)	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	-
Subtotal	6.580.680.069.989
Total	11.313.395.911.950

- b. Berdasarkan jatuh tempo

	2021
Kurang dari 1 tahun	5.069.803.105.522
1 - 2 tahun	1.343.092.061.301
Lebih dari 2 tahun	4.900.500.745.127
Total	11.313.395.911.950

Grup telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa cession atas nasabah ULamm dan/atau Mekaar. Cession tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur. Informasi mengenai jaminan fasilitas pinjaman diungkapkan pada Catatan 6.

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 30 September 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

- a. By the third parties and the related parties transactions (continued)

	2020	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	49.500.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Nationalnobu Tbk	58.333.333.333	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank BCA Syariah	64.112.318.843	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Mayora Tbk	1.923.325.819	PT Bank Mayora Tbk
PT Bank Danamon	1.361.503.997	PT Bank Danamon
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah)	675.320.837.019	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRIsyariah Tbk)	47.961.689.926	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRIsyariah Tbk)
PT Bank KEB Hana Indonesia	37.396.535.192	PT Bank KEB Hana Indonesia
Subtotal	3.553.481.628.597	Subtotal
Total	6.224.831.456.650	Total

- b. By maturity

	2020	
Kurang dari 1 tahun	2.662.206.476.671	Less than 1 year
1 - 2 years	1.401.331.725.859	1 - 2 years
More than 2 years	2.161.293.254.120	More than 2 years
Total	6.224.831.456.650	Total

The Group has complied with all of the required covenants in the agreement and has made timely payment of principal and interest on the loan.

Collateral granted by the Company for all loan facilities received are cession from ULamm and/or Mekaar customers. The Cession is updated in accordance with the terms and conditions of each creditor. Information regarding collateral loan facilities are disclosed in Note 6.

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.42 dated September 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp.750,000,000,000,000 with an interest rate of 8.00% per annum. The loan term is 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on September 30, 2024. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - melalui Unit Syariah nya memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank BTN 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Current ratio* diatas 120%, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 12 Maret 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 12 Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 Januari 2021 dan telah dilunasi pada 29 Januari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Deed of Mudharabah Muqayaddah Agreement No. 87 dated June 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - through its Sharia Unit provided a Working Capital facility to the Company in the amount of Rp500,000,000,000. The profit sharing ratio for PT Bank BTN is 18.50% and the Company is 81.50%, equivalent to an IRR of 9.00% per annum. The loan period is 36 months from the signing of the contract and will mature on June 30, 2024. The loan is intended for financing based on sharia principles to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially Mekaar sharia. Companies are required to maintain a maximum gearing ratio of 10x, Current ratio above 120%, Debt to Equity Ratio (DER) a maximum of 10x and Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 9 dated March 12, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 12, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 dated December 30, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 0.30% per annum. Loan period of 30 days from the signing of the credit agreement and will mature on January 30, 2021 and has been fully paid on January 29, 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 37 dated October 20, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.20% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on October 2023. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain maximum Gearing Ratio of 10x, maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of the Mekaar product not more than 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Perjanjian ini terakhir diubah dengan amandemen 1 Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perjanjian ini terakhir diubah dengan akta perjanjian No. 8 tanggal 12 Maret 2021 tentang syarat *covenant* yang berlaku. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Interest Coverage Ratio* diatas 100% dan *Gearing Ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perjanjian ini terakhir diubah dengan akta perjanjian No. 7 tanggal 12 Maret 2021 tentang syarat *covenant* yang berlaku. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Interest Coverage Ratio* diatas 100% dan *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.581.656.862.735 dan Rp845.616.110.558.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 458 tanggal 16 November 2021 Bank BNI memberikan tambahan fasilitas sebesar Rp250.000.000.000 dengan bunga 8,5% sehingga total plafond menjadi Rp1.000.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas 36 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Current Ratio* minimal 1.2x, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3% net dan jatuh tempo fasilitas berakhir pada bulan November 2022.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 41 dated December 19, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.50% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on December 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. This agreement was last amended with deed of agreement No. 8 dated March 12, 2021 concerning the covenants applied. The Company is required to maintain the overall Interest Coverage Ratio above 100% and maximum Gearing Ratio of 10x.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 1 dated September 13, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum. Loan period of 24 months from the signing of the credit agreement and has been extended with deed No. 5 dated September 13, 2020 will mature on September 2022. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. This agreement was last amended with deed of agreement No. 7 dated March 12, 2021 concerning the covenants applied. The Company is required to maintain the overall Interest Coverage Ratio above 100% and maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp1,581,656,862,735 and Rp845,616,110,558, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Deed of Agreement No. 458 dated November 16, 2021, Bank BNI provides an additional facility of Rp250,000,000,000 with an interest of 8.5% so that the total ceiling becomes Rp1,000,000,000,000, with a term of 36 months. The funds will be used to finance ULaMM and Mekaar. The company is required to maintain the quality of the Gearing Ratio of a maximum of 10x, Current Ratio of at least 1.2x, and Non-Performing Loan for the entire product not more than 3% nett and the maturity of the facility ends in November 2022.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta perjanjian No 2 tanggal 5 Agustus 2020 Bank BNI menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULamm dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut dan telah diperpanjang berdasarkan Addendum Akad No. 2 tanggal 30 Juni 2021.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp330.888.836.202 dan Rp386.070.787.807.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 Februari 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Deed of Agreement No. 2 dated August 5, 2020, Bank BNI provides a revolving working capital loan with a total ceiling of Rp750,000,000,000, with a term of 12 months. The funds will be used to finance ULamm and Mekaar. The company is required to maintain a maximum *gearing ratio* quality of 10x, a maximum *Debt to Equity Ratio* (DER) of 10x and a *Non-Performing Loan* for the entire product of no more than 5% for three consecutive months and has been extended based on the Addendum to the Akad No. 2 on June 30, 2021.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp330,888,836,202 and Rp386,070,787,807, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Deed Working Capital Credit Agreement No. 37 dated February 23, 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 8.50% *fixed* per annum with a loan term of 24 months from the signing of the credit agreement and will mature on February 22, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain *Gearing Ratio* maximum 10x and the quality of the *Non-Performing Loan* as a whole product not more than 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 89 dated May 15, 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 8.50% *fixed* per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and fully paid on May 14, 2021. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The Company is required to maintain maximum *Gearing Ratio* of 8x and overall *Non-Performing Loan* quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,35% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp978.778.698.975 dan Rp1.074.234.877.497.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Modal Kerja No. 71 tanggal 23 Desember 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) W/A 4 dan W/A 5 dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000.000.000. Jangka waktu maksimal 24 bulan dan 36 bulan yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis Mekaar dan *replacement* pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 5%. Perusahaan harus menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 36 dated August 20, 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp800,000,000,000 with an interest rate of 8.35% fixed per year with a maximum loan term of 24 months since the credit agreement was signed and has been fully paid on April 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The company is required to maintain maximum gearing ratio of 8x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp978,778,698,975 and Rp1,074,234,877,497, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Working Capital Agreement No. 71 dated December 23, 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk provides a Working Capital Credit (KMK) W/A 4 and W/A 5 facilities with a credit limit of Rp2,000,000,000,000, respectively. Maximum period of 24 months and 36 months which is intended for additional working capital for Mekaar Business lending and replacement of existing loans from other banks, respectively, with an interest rate of 5%. Companies must maintain financial ratios in accordance with POJK 16/POJK.05/2019 concerning Supervision of PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 111 dated December 28, 2018, regarding the signing of a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp300,000,000,000 for additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) lending. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on December 28, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum Gearing Ratio of 10x, maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan telah dilunasi pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp266.666.666.665 dan Rp3.125.000.000.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 9 Juni 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 9 Juni 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.816.666.671 dan nihil.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Agreement on Working Capital Loan No. 37 dated November 30, 2018, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp500,000,000,000 for additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) loans. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on November 30, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Based on the Deed of Working Capital Loan Agreement No. 46 dated July 29, 2016, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit amounting to Rp500,000,000,000 for additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSME). Loan facility period of 12 months from the signing of credit agreement and has been extended with deed No. 10 dated September 5, 2017 and fully paid on July 29, 2021. Interest rate of 10.00% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Total payment of this loan for the periods ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp266,666,666,665 and Rp3,125,000,000, respectively.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Based on the Deed of Credit Agreement No. 30 dated June 9, 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 8.50% per year with a loan term of 48 months and will mature on June 9, 2025. The funds are for financing micro and small businesses.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp22,816,666,671 and nil, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM

Pada tahun 2019, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 013/SP3/LPDB/2019 sebesar Rp30.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat *margin* sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank DKI

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp500.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,25% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 9,25% dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x, *current ratio* sebesar 120% dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu fasilitas 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir pada 19 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Revolving Fund Management Institution

In 2019, PT PNM Ventura Syariah working capital credit facility from Management Institution - CMSMEs pursuant to Working Capital Lending approval No. 013/SP3/LPDB/2019 amounting Rp30,000,000,000 non-revolving be used for working capital venture capital financing. Interest rate of 40% : 60% for gross revenue for a period of 4 years, interest is calculated every end of the month.

PT Bank DKI

Based on the Deed of Credit Agreement No. 11 dated May 10, 2021 between PT Bank DKI and the Company, the Company obtained a credit limit maximum of Rp500,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.25% per annum and will mature on May 10, 2024. The funds are for micro and small business financing through ULaMM and the Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10x and a maximum gross Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 9 dated 10 May 2021, PT Bank DKI - through the Sharia Business Unit provided a loan with a credit limit a maximum of Rp500,000,000,000. The maximum term of the loan facility is 42 months with a maximum repayment period of 36 months with a profit sharing ratio of 9.25% and will mature on May 10, 2024. The funds are for micro and small business financing through Mekaar Syariah and the Company is required to have a maximum gearing ratio of 10x, a current ratio of 120% and a maximum gross Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 44 dated November 19, 2020 between PT Bank DKI and the Company, the Company obtained loan with a credit limit a maximum of Rp300,000,000,000. Loan facility period of 42 months with credit tenor 36 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum and will mature on May 19, 2024. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM. The Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank DKI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 63,33% dan Perusahaan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 66,67% dan Perusahaan 33,33%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019, PT Bank DKI memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* gross maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI dengan memberikan pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* gross maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank DKI (continued)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 42 dated November 19, 2020, PT Bank DKI - through Sharia Business Unit provides loan with a credit limit a maximum of Rp300,000,000,000. Loan facility period maximum 42 months with credit tenor 36 months and will mature on May 19, 2024. Profit sharing for PT Bank DKI 63.33% and Company 36.67%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM syariah. The Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 31 dated October 30, 2019, PT Bank DKI - through Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp300,000,000,000. Loan facilities period 42 months with repayment period 36 months and will mature on April 30, 2022. Profit sharing for PT Bank DKI 66.67% and Company 33.33%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM and the Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 34 dated October 29, 2019, PT Bank DKI provides loan with a credit limit of Rp300,000,000,000 with loan facilities period 42 months and repayment period 36 months. Fixed interest rate of 10.00% per annum and will mature on April 30, 2022. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM and the Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 4 dated September 5, 2018, PT Bank DKI provides loan with a credit limit of Rp200,000,000,000 with loan facilities period 42 months and repayment period 36 months. Fixed interest rate of 9.00% per annum and will mature on March 5, 2022. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM and the Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank DKI (lanjutan)

Berdasarkan surat perjanjian kredit tanggal No. 65 tanggal 29 November 2017 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 8,95% per tahun dan sudah dilunasi pada 30 November 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir di bulan September 2021. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 18 bulan dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan dan sudah dilunasi pada bulan September 2019. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan sudah dilunasi pada 15 Juni 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp641.673.765.891 dan Rp385.216.432.171.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank DKI (continued)

Based on the letter of credit agreement No. 65 dated November 29, 2017 between PT Bank DKI and the Company, loan with a credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 8.95% per year and has been fully paid on November 30, 2020. The fund is for micro and small business financing through ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated September 5, 2018, PT Bank DKI - through Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp100,000,000,000. Loan facilities period 42 months with repayment period 36 months and will mature on September, 2021. Profit sharing for PT Bank DKI 60% and Company 40%. The fund is for financing micro and small businesses through ULaMM Syariah and the Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.

Based on the letter of Credit Agreement No. 07 dated September 5, 2018, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp100,000,000,000. Loan facilities with period of 18 months with repayment period of 12 months and has been fully paid on September 2019. Profit sharing for PT Bank DKI 60% and Company 40%. The fund is for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah and the Company must maintain a maximum Non-Performing Loan of 5%.

Based on the deed of credit agreement No. 75 dated June 13, 2017 between PT Bank DKI and the Company obtained loan with a credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.00% per year and has been fully paid on June 15, 2020. The fund is for micro and small business financing through ULaMM and the Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp641,673,765,891 and Rp385,216,432,171, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(dahulu PT Bank BNI Syariah)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank BNI Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Telah dilakukan perpanjangan Fasilitas pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan Plafond pinjaman Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,50% *fixed* pertahun dan jangka waktu pinjaman 12 bulan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp794.939.816.761 dan Rp752.661.315.598.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan akta perjanjian kredit No.12 tanggal 22 September 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp300.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,35% per tahun dan akan berakhir pada bulan September 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* min 1,2 x dan *gearing ratio* maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 15 April 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp500.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dan akan berakhir pada bulan April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2x dan *gearing ratio* maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(formerly PT Bank BNI Syariah)**

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit Number 24 dated May 31, 2019, PT Bank BNI Syariah provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% *fixed* per year with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of *Non-Performing Loans* for the entire product of no more than 5%. The facility has been extended on August 29, 2020 with a loan ceiling of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% *fixed* per year and a loan term of 12 months.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp794,939,816,761 and Rp752,661,315,598, respectively.

PT Bank Permata Tbk

Based on the credit agreement deed No.12 dated September 22, 2021, PT Bank Permata Tbk provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp300,000,000,000 with a profit sharing of 8.35% per annum and will expire in September 2022. The funds are for financing micro and small enterprises through Mekaar. The company is required to maintain a minimum *current ratio* of 1.2 x and a maximum *gearing ratio* of 10x and maintain a maximum NPL of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No.5 dated April 15, 2021, PT Bank Permata Tbk provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp500,000,000,000 with a profit sharing of 8.75% per annum and will mature on April 2022. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM Syariah. The company is required to maintain a minimum *current ratio* of 1.2x and a maximum *gearing ratio* of 10x and maintain a maximum NPL of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9% per tahun dan telah dilunasi pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan telah dilunasi pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp479.166.666.666 dan Rp125.000.000.000.

PT Bank Mega Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 31 tanggal 15 November 2021, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan akan berakhir pada November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, *current ratio* minimal 1,2x, *gearing ratio* maksimal 10x, *financing to asset ratio* min 65%, *micro financing ratio* min 50%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Permata Tbk (continued)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated October 21, 2020, PT Bank Permata Tbk provides Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II Facilities with a maximum credit limit amount of Rp100,000,000,000, with profit sharing 9% per annum and has been fully paid on October 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar dan ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%.

Based on the deed of credit agreement No. 22 dated July 27, 2018, PT Bank Permata Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 interest rate 9.75% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. This loan was extended for credit term, with "Surat Penawaran Fasilitas Perbankan" No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 dated October 1, 2020 and has been fully paid on July 27, 2021. The Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp479,166,666,666 and Rp125,000,000,000, respectively.

PT Bank Mega Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement Number 31 dated November 15, 2021, PT Bank Mega Tbk provided a facility to the Company amounting to Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 8% per annum with a loan term of 12 months for Mekaar and will mature on November 2022. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of the *Non-Performing Loan* of the entire product not more than 5%, *minimum current ratio* of 1.2x, *maximum gearing ratio* of 10x, *financing to asset ratio* of min 65%, *micro financing ratio* of min 50%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Mega Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 tanggal 8 Desember 2020, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,75% *fixed* per pencairan dengan jangka waktu pinjaman ULaMM 48 Bulan dan Mekaar 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10x.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp320.833.333.326 dan nihil.

PT Bank Mega Syariah

Berdasarkan addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 04 tanggal 2 Februari 2021, PT Bank Mega Syariah memberikan tambahan plafon sebesar Rp65.000.000.000. Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan per pencairan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dan akan berakhir pada 2 Februari 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Fasilitas Mekaar telah diperpanjang sampai dengan 20 November 2021 dan ULaMM akan berakhir di bulan November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp48.848.387.314 dan Rp248.111.798.383.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Mega Tbk (continued)

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 30 dated December 8, 2020, PT Bank Mega Tbk provides working capital credit facility amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 10.75% per drawdown with a loan term of 48 months for ULaMM and 24 months for Mekaar from the signing of the credit agreement and will mature on December 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain the quality of the *Gearing Ratio* not more than 10x.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp320,833,333,326 and nil, respectively.

PT Bank Mega Syariah

Based on the addendum to the Facility Provision Agreement (Wa'd) No. 04 dated February 2, 2021, PT Bank Mega Syariah provides an additional limit amounting to Rp65,000,000,000. Profit sharing ratio according to the agreement per drawdown with a maximum period of 36 months and will mature on February 2, 2024. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs).

Based on the Facility Provision Agreement (Wa'd) No. 33 dated November 28, 2019, PT Bank Mega Syariah provides the Mudharabah facility to the Company in the amount of Rp235,000,000,000 with an profit sharing of 11% fixed per annum with a loan period of 12 months for Mekaar and 36 months for ULaMM. Mekaar facilities has been extended until November 20, 2021 and ULaMM will mature on November 2022. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall *Non-Performing Loan* quality of the product no more than 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp48,848,387,314 and Rp248,111,798,383, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 59 tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan addendum ketiga No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp924.999.999.997 dan Rp300.000.000.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 tanggal 14 Desember 2021, PT Bank BPD Kalteng memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar setara 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada Desember 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3% dan *Gearing Ratio* maksimal 10x.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Victoria International Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 59 dated March 23, 2021, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market line credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9% with a loan facility period of 12 months from the signing of the loan and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of the Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 69 dated May 23, 2019, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market Line Credit facility to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of credit facility 12 months from the signing of the credit. This loan was amended several times, the latest by 3th addendum No. 69 dated May 19, 2020 with additional facilities credit limit of Money Market Line amounting to Rp250,000,000,000 and fully paid on May 23, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Enterprises loans (MSMEs). The company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and maximum Non-Performing Loans 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp924,999,999,997 and Rp300,000,000,000, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement Number 21 dated December 14, 2021, PT Bank BPD Kalteng provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate equivalent to 8% per year with a loan term of 36 months and will mature on December 2024. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Companies are required to maintain the quality of the Non-Performing Loan of the entire product of no more than 3% and a maximum Gearing Ratio of 10x.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah dilunasi pada 7 Februari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3% untuk produk Mekaar.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp350.000.000.007 dan Rp183.333.333.306.

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 21 tanggal 30 November 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp275.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 7,25% p.a dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3%, CCR 100%, *gearing ratio* maksimal 8x, NPL > 90 hari total maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah (continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 dated February 7, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months and has been fully paid on February 7, 2021. The loan is intended as additional working capital for Mekaar product.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 48 dated November 20, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months and will mature on November 20, 2021. The loan is intended as additional working capital for Mekaar product. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears a maximum of 3% for product Mekaar.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp350,000,000,007 and Rp183,333,333,306, respectively.

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 21 dated November 30, 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp275,000,000,000 with an interest rate of 7.25% pa with a loan term of 12 months from signed credit agreement and will mature on November 2022. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain the quality of the *Non-Performing Loan* of the entire product not more than 3%, CCR 100%, *gearing ratio* maximum 8x, NPL > 90 days a maximum of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 23 Juni 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada 23 Juni 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 30 Oktober 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 23 Mei 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp144.357.570.831 dan Rp174.592.057.398.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk (continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated June 23, 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.25% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and installment tenor of 12 month and will mature on June 23, 2022. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 99 dated October 30, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp80,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan period of 12 months from signed credit agreement and has been fully paid on October 30, 2020. The loan is intended as additional working capital for Mekaar distribution. Companies must maintain the quality of Non-Performing Loans for Mekaar products no more than 3%.

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 73 dated 23 May 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 12 months from credit agreement signed and has been fully paid on May 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp144,357,570,831 and Rp174,592,057,398 respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 82 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada 30 Juni 2022. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada bulan Februari 2022. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun dan telah berakhir pada bulan Desember 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp231.583.906.557 dan nihil.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No.58 tanggal 30 November 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp390.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 7,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 82 dated June 30, 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with a term of 18 months and an installment tenor of 12 months and will mature on June 30, 2022. The interest rate is 9% fixed per annum. The funds are for short-term working capital financing. The company is required to maintain a gearing ratio of a maximum of 9x and arrears of Non-Performing Loans above 90 days at a maximum of 3%.

Based on the Deed Working Capital Credit Agreement No. 4 dated February 23, 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with a facility period of 18 months and an installment tenor of 12 months and will mature on February 2022. Interest rate is 9% fixed per annum. The funds are used for short-term working capital financing. The company is obliged to maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and non-performing loan arrears of more than 90 days with a maximum of 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 3 dated December 2, 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with loan facility period of 18 months and repayment period of 12 months. The interest rate is 9% fixed per annum and has been fully paid on December 2021. The funds are for short-term working capital financing. The Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 9x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 3%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp231,583,906,557 and nil, respectively.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 58 dated November 30, 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided a Mudharabah Financing facility to the Company amounting to Rp390,000,000,000 with the margin rate 7.5% per annum and 36 month facility period since the agreement have signed and credit agreement will expire in November 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, *Current Ratio* minimal 1.2x, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp166.666.666.659 dan Rp25.000.000.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)

The loan is intended as additional working capital for the distribution of Sharia Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of the Non-Performing Loan of the entire product not more than 5%, the Current Ratio is at least 1.2x, the Gearing Ratio is a maximum of 10 times.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 29 dated December 18, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided Mudharabah Financing facilities to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with a profit sharing of 10.25% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement was signed and will mature on December, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro and Small Medium Enterprises (MSME) lending.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 114 dated May 27, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Mudharabah Financing facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an profit sharing of 10.75% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature in May 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro Small and Medium Enterprises (MSME) lending.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp166,666,666,659 and Rp25,000,000,000, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 34 dated 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on September 2024. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 31 tanggal 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta (UUS) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (Syariah) kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan nisbah setara sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta - melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil untuk PT Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 55,39% dan Perusahaan 44,61%. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak fasilitas digunakan dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat (continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 31 dated 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and West Sulawesi Jakarta Branch (UUS) provided a Working Capital Credit (Syariah) facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an equivalent ratio of 8.75% per annum with a term of loan. 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on September 2024. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed Working Capital Credit Agreement No. 12 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch - through Sharia Business Unit provides Sharia Financing Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp50,000,000,000 with Profit sharing for PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat 55.39% and Company 44.61%. Loan term of 12 months from the drawdown of facility and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain *Gearing Ratio* of 10x and a maximum *Non-Performing Loan* arrears of 5%.

Based on the Deed Working Capital Credit Agreement No. 9 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp150,000,000,000 with an interest rate of 9% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 4 dated March 11, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum with a loan period of 12 months after the credit agreement is signed and has been fully paid on March 12, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp248.391.380.020 dan Rp141.059.334.398.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat (continued)**

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated November 23, 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November 22, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain *gearing ratio* of 10x and a maximum *Non-Performing Loan arrears* of 5%.

Total payment of this loan for the periods ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp248,391,380,020 and Rp141,059,334,398, respectively.

PT Bank BCA Syariah

Based on the Deed Addendum Credit Agreement No. 9 dated March 24, 2021, PT Bank BCA Syariah provides a working capital loan with credit limit amounting Rp100,000,000,000. The profit sharing ratio will be stated in each financing realization contract. Loan period of 48 months for ULaMM facilities and 12 months for Mekaar. The funds are used for financing Mekaar and ULaMM Syariah. Companies are required to maintain a maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and a maximum of 5% non-performing loan arrears.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 14 dated October 3, 2019, PT Bank BCA Syariah provided a loan of working capital with a credit limit of Rp150,000,000,000. Profit sharing will be stated in each financing contract realization. This loan had been extended with letter of credit No. 375/ADP/2020 dated November 11, 2020 with a period 48 months for ULaMM and 12 months for Mekaar. The funds are for financing Mekaar and Sharia ULaMM. The company must maintain a maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and a maximum *Non-Performing Loan arrears* of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank BCA Syariah (lanjutan)

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp80.891.032.605 dan Rp105.658.831.516.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Uncommitted Facility Line No. 1 tanggal 1 September 2021, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari Rp1.500.000.000.000 fasilitas konvensional dan Rp500.000.000.000 fasilitas syariah, dengan suku bunga setara 6,50% p.a fixed dengan jangka waktu 36 bulan, Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, NPL nett maksimal seluruh kredit 5%, *return of asset* minimal 0,5%, *return of equity* minimal 5% dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 8 November 2021, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp300.000.000.000 dengan bagi hasil setara 7,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal November 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non-Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2% dan *Current Ratio* minimal 1.2 x

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank BCA Syariah (continued)

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp80,891,032,605 and Rp105,658,831,516, respectively.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Based on the Uncommitted Facility Line Agreement Deed No. 1 dated September 1, 2021, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) provides housing loan facilities with a maximum limit of Rp. 2,000,000,000,000 consisting of 1.5 trillion conventional facilities and 500 billion Sharia, with an interest rate equivalent to 6.50% pa fixed with a period of 36 months, the Company is required to maintain current minimum ratio 120%, gearing ratio maximal 10 times, maximum net NPL for all credits 5%, return of assets min. 0.5%, return of equity minimal 5% and operating expenses compared to operating income is less than 100%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 03 dated November 8, 2021, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a maximum limit of Rp300,000,000,000 with a profit sharing equivalent to 7.5% per year with a loan term of 12 months and will expire on November 2022. The funds are for micro business financing and small through Mekaar Syariah. The company is required to maintain a gearing ratio of a maximum of 9x and the quality of Non Performance Financing for Mekaar products not more than 2% and a Current Ratio of at least 1.2x

Based on the Deed of Credit Agreement No. 12 dated November 30, 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp200,000,000,000 with profit sharing equivalent to 9.75% per annum with a loan term of 12 months and has been fully paid on November 30, 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah. The Company is required to maintain maximum Gearing Ratio of 9x and the quality of the Non Performance Financing for the Mekaar not more than 2%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp199.999.999.995 dan Rp102.857.513.266.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.39 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga sebesar 13,5% per tahun dengan jangka waktu 72 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp232.181.720.647 dan Rp883.333.327.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (continued)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 05 dated August 7, 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp100,000,000,000 with profit sharing equivalent to 10% per annum with a loan term of 18 months and has been fully paid on August 28 and September 27, 2020. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and Sharia ULaMM.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp199,999,999,995 and Rp102,857,513,266, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 39 dated June 30, 2021, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk provides a credit facility with a maximum limit of Rp100,000,000,000 with a profit sharing equivalent to 9.25% per annum with a loan term of 24 months and will expire on dated June 30, 2022. The funds will be used to finance micro and small businesses through Mekaar Syariah. The Company is required to maintain a maximum *gearing ratio* of 10x times.

In 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah obtain a working capital credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk approval letter by the Working Capital Credit No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1,000,000,000 *non-revolving* be used for working capital venture capital financing. Interest rate of 13.5% per annum for a period of 72 months, 0.5% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp232,181,720,647 and Rp883,333,327, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Danareksa Finance

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Dana Reksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 17 dengan plafond pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil dan Rp150.000.000.000.

Bank SBI Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 16 Desember 2021, Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp150.000.000.000 dengan bunga setara 7.5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1.2x, *gearing ratio* maksimal 10x, NPL nett maksimal 5%, *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *interest coverage ratio* minimal 1.1x.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.29 tgl 16 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Danareksa Finance

On December 27, 2019, PT PNM Ventura Capital obtained a working capital credit facility from PT Danareksa Finance based on Credit Agreement Deed No.17 with credit limit as of Rp200,000,000,000 and has been disbursed as much as Rp75,000,000,000 used for working capital venture financing. Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 3 years, administration 0.02% of the credit limit.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to nil and Rp150,000,000,000, respectively.

Bank SBI Indonesia

Based on the Deed of Credit Agreement No. 33 dated December 16, 2021, Bank SBI Indonesia provides a credit facility with a limit of Rp150,000,000,000 with an interest equivalent to 7.5% per annum with a loan term of 36 months and will expire in December 2024. The funds are for financing micro and small businesses. The Company is required to maintain a minimum current ratio of 1.2x, a maximum gearing ratio of 10x, a maximum net NPL of 5%, a financing to asset ratio of at least 65%, a micro financing ratio of at least 50%, and a minimum interest coverage ratio of 1.1x.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.29 dated September 16, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta provides a credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.00% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will expire in September 2024. The loan is intended as additional working capital for lending Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta
(lanjutan)**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp41.688.565.451 dan Rp13.888.889.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 1% dari plafon kredit.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.999.999.998 dan nihil.

PT Bank Nationalnubu Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta
(continued)**

Based on the deed of Working Capital Credit agreement No. 19 dated July 9, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10.00% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on July, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp41,688,565,451 and Rp13,888,889,000, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

On December 29, 2020, PT PNM Ventura Capital obtained a working capital credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan based on Deed Credit Agreement with credit limit as of Rp50,000,000,000 and has been disbursed as much as Rp50,000,000,000 used for working capital venture capital financing Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 5 years, administration 1% of the credit limit.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp4,999,999,998 and nil, respectively.

PT Bank Nationalnubu Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 dated September 6, 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a maximum loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on September 6, 2022. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Nationalnobu Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank Nationalnobu Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 dan telah berakhir pada 22 April 2021. Pada tahun 2021, fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada 22 April 2022. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp33.333.333.335 dan Rp133.333.333.333.

PT Bank Syariah Indonesia (dahulu PT Bank BRI Syariah)

Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility Mudharabah* No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRI syariah Tbk) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp35.398.143.907 dan Rp32.202.157.568.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Nationalnobu Tbk (continued)

Based on the Deed of Working Capital Loan No. 51 dated April 22, 2019, PT Bank Nationalnobu Tbk provides a *Money Market Line (MML) Credit facility* of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 10.75% *fixed per annum* with a maximum loan term of 12 months since credit agreement signed and has been extended with deed No. 26 dated April 22, 2020 and will be matured on April 22, 2021. On 2021, this facility has been extended and will mature on April 22, 2022. The Company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain *Gearing Ratio* of 10x and a maximum *Non-Performing Loan arrears* above 90 days a maximum of 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp33,333,333,335 and Rp133,333,333,333, respectively.

PT Bank Syariah Indonesia (formerly PT Bank BRI Syariah)

Based on the Deed of *Mudharabah Line Facility Agreement* No. 13 dated April 26, 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRI syariah Tbk) provides a *Working Capital Credit facility* to the Company of Rp100,000,000,000 with *profit sharing* of 9.50% *fixed per annum* with a loan term of 42 months from the signing of the credit agreement and will mature on October, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and the *Non-Performing Loan* for the entire product not more than 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp35,398,143,907 and Rp32,202,157,568, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 1658/PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,75% per tahun dan telah dilunasi pada 9 November 2021.

PT Bank Mayora

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mayora berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan, administrasi 1% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp119.371.347 dan Rp261.116.311.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tahun 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 tanggal 9 November 2016 sebesar Rp5.500.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 66 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp321.223.651 dan Rp1.863.174.005.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Central Asia Tbk

Based on the Deed of credit agreement No. 1658/PPK/SLK/2016 dated June 28, 2016, PT Bank Central Asia Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 12% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%. This loan was extended several times for credit term, the latest by "Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ)" No. 3453 dated November 6, 2020 with the provision of an interest rate of 11.75% per annum and has been fully paid on November 9, 2021.

PT Bank Mayora

In 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah obtain a working capital credit facility from PT Bank Mayora approval letter by the Working Capital Credit No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 amounting to Rp3,000,000,000 non-revolving be used for working capital financing. Interest rate of 13% per annum for a period of 120 months, 1% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp119,371,347 and Rp261,116,311, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

In 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari obtain a working capital credit facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk approval letter by the Working Capital Credit SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 dated November 9, 2016 amounting to Rp5,500,000,000 non-revolving be used for working capital financing. Interest rate of 13% per annum for a period of 66 months, 0.5% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp321,223,651 and Rp1,863,174,005, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank KEB Hana Indonesia

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 126 tanggal 19 November 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 20 November 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada Juni 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp37.396.535.192 dan Rp161.721.052.942.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Addendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10x.

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2021 adalah:

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank KEB Hana Indonesia

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 126 dated November 19, 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the working capital credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November 20, 2020. Loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 40 dated June 28, 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and fully paid on June 2021. Loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp37,396,535,192 and Rp161,721,052,942, respectively.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 20 May 13, 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk provides a Money Market Line (MML) Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an interest rate of 11.50% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been extended with Addendum 1 No. 201/ADD/2020 and will mature until May 14, 2021. The Company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain the quality of the Gearing Ratio not more than 10x.

Borrowings facility and the amount of the unused credit facility by the Parent Company as of December 31, 2021 are:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)

18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman

a. Borrowing

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2021 adalah :

Borrowings facility and the amount of the unused credit facility by the Parent Company as of December 31, 2021 are:

	Plafon	LCU	Outstanding	
Pinjaman Rekening Koran:				Overdraft Loan:
PT Bank Central Asia Tbk	50.000.000.000	9.454.302.470	40.545.697.530	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	25.000.000.000	25.000.000.000	-	PT Bank Permata Tbk
Subtotal	75.000.000.000	34.454.302.470	40.545.697.530	Subtotal
Pinjaman Berjangka:				Terms Loan:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000.000.000	3.500.000.000.000	500.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.750.000.000.000	-	1.477.051.470.588	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	3.500.000.000.000	1.546.835.000.000	830.348.333.336	PT Bank Pembangunan Daerah DKI
PT Bank Mega Tbk	1.500.000.000.000	900.000.000.000	277.083.333.333	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	247.083.333.343	752.916.666.657	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	101.208.965.149	898.791.034.851	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	1.000.000.000.000	-	816.666.666.667	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	525.000.000.000	380.681.322.916	-	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	450.000.000.000	50.000.000.000	85.084.644.147	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	400.000.000.000	250.000.000.000	66.666.666.667	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Victoria International Tbk	350.000.000.000	125.000.000.000	150.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank JTrust	300.000.000.000	-	68.416.093.444	PT Bank JTrust
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	200.000.000.000	-	177.183.333.336	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah DIY	200.000.000.000	-	144.444.444.000	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Nationalnobu Tbk	150.000.000.000	50.000.000.000	25.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank SBI Indonesia	150.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000	PT Bank SBI Indonesia
Subtotal	17.475.000.000.000	7.200.808.621.408	6.369.652.687.026	Subtotal
Total	17.550.000.000.000	7.235.262.923.878	6.410.198.384.556	Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)

18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman (lanjutan)

a. Borrowing (continued)

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2020 adalah:

Borrowings facility and the amount of the unused credit facility by the Parent Entity as of December 31, 2020 are:

	Plafon	LCU	Outstanding	
Pinjaman Rekening Koran:				Overdraft Loan:
PT Bank Central Asia Tbk	50.000.000.000	10.915.172.705	39.084.827.295	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	50.000.000.000	35.062.346.735	14.937.653.265	PT Bank Permata Tbk
Subtotal	100.000.000.000	45.977.519.440	54.022.480.560	Subtotal
Pinjaman Berjangka:				Terms Loan:
PT Bank Tabungan Negara Tbk	2.000.000.000.000	66.291.666.667	1.725.375.000.000	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	1.500.000.000.000	-	62.520.260.000	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank DKI	1.500.000.000.000	-	1.057.843.124.575	PT Bank DKI
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.300.000.000.000	-	266.666.666.667	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	750.000.000.000	123.138.943.101	626.861.056.899	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank BNI Syariah	750.000.000.000	74.679.162.982	675.320.837.018	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Maybank	550.000.000.000	-	284.722.222.222	PT Bank Maybank
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	400.000.000.000	-	216.666.666.667	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	300.000.000.000	-	93.504.163.292	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Victoria International Tbk (MML)	250.000.000.000	-	250.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk (MML)
PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)	250.000.000.000	250.000.000.000	-	PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)
PT Bank Mega Syariah	235.000.000.000	35.069.785.273	199.930.214.727	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	200.000.000.000	100.000.000.000	91.666.666.667	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	200.000.000.000	-	37.396.535.192	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank BCA Syariah	150.000.000.000	-	64.112.318.843	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRISyariah Tbk)	100.000.000.000	-	47.961.689.928	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRISyariah Tbk)
PT Bank Nationalnobu Tbk	100.000.000.000	-	58.333.333.333	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	100.000.000.000	-	86.111.111.000	PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta
PT Bank Permata Tbk	100.000.000.000	-	83.333.333.333	PT Bank Permata Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000	-	100.000.000.000	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000.000.000	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk (MML)	50.000.000.000	50.000.000.000	-	PT Bank Nationalnobu Tbk (MML)
Subtotal	10.935.000.000.000	699.179.558.023	6.028.325.200.363	Subtotal
Total	11.035.000.000.000	745.157.077.463	6.082.347.680.923	Total

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman bank diungkapkan pada Catatan 27.

Information regarding the classification and fair value of bank borrowings are disclosed in Note 27.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	2021	2020	
Medium Term Notes			Medium Term Notes
Entitas Induk			Parent Entity
Rupiah			Rupiah
MTN XIII Seri A	50.000.000.000	50.000.000.000	MTN XIII Seri A
MTN XIII Seri B	110.000.000.000	110.000.000.000	MTN XIII Seri B
MTN XIII Seri C	200.000.000.000	200.000.000.000	MTN XIII Seri C
MTN XIII Seri D	15.000.000.000	15.000.000.000	MTN XIII Seri D
MTN XVII (Danareksa)	-	500.000.000.000	MTN XVII (Danareksa)
MTN XIX Seri A	-	70.000.000.000	MTN XIX Seri A
MTN XIX Seri B	-	105.000.000.000	MTN XIX Seri B
MTN XIX Seri C	-	105.000.000.000	MTN XIX Seri C
MTN XIX Seri D	-	142.500.000.000	MTN XIX Seri D
MTN XIX Seri E	-	201.000.000.000	MTN XIX Seri E
	<u>375.000.000.000</u>	<u>1.498.500.000.000</u>	
Sukuk			Sukuk
Entitas Induk			Parent Entity
Rupiah			Rupiah
Sukuk Mudharabah I Tahun 2017 Seri D	-	100.000.000.000	Sukuk Mudharabah I Tahun 2017 Seri D
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A	60.000.000.000	60.000.000.000	Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B	240.000.000.000	240.000.000.000	Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I	300.000.000.000	300.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A	-	435.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B	65.000.000.000	65.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D	-	350.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E	100.000.000.000	100.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II	50.000.000.000	50.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C	322.000.000.000	322.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F	120.000.000.000	120.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	200.000.000.000	200.000.000.000	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H	50.000.000.000	50.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri A	712.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri D	308.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri D
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri B	780.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri B
Sukuk Mudharabah III Tahun 2021 Tahap II Seri F	208.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah III Tahun 2021 Tahap II Seri F
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri A	1.158.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri B	515.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri C	327.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri C
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri C	200.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri C
Subtotal	<u>5.715.000.000.000</u>	<u>2.392.000.000.000</u>	Subtotal
Total	<u>6.090.000.000.000</u>	<u>3.890.500.000.000</u>	Total

b. Berdasarkan jatuh tempo:

b. By maturity:

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	2.048.000.000.000	2.008.500.000.000	Less than 1 year
1 - 2 tahun	1.100.000.000.000	890.000.000.000	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	2.942.000.000.000	992.000.000.000	More than 2 years
Total	<u>6.090.000.000.000</u>	<u>3.890.500.000.000</u>	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk:

Surat Utang Jangka Menengah PNM

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Berdasarkan hasil pemeringkatan Pefindo No. 942/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 MTN XIX seri A, B, dan C mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah *Refinancing*, pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat idAA (Double A) dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK

Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk:

Medium Term Notes PNM

The Company issues MTN XIX Series D on February 26, 2019 amounting to Rp142,500,000,000 with a period of 2 years 10 months 2 days, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series E on April 16, 2019 in the amount of Rp201,000,000,000 with a period of 2 years 8 months 12 days, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

The Company issues MTN XIX Series A on December 28, 2018 amounting to Rp70,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series B on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series C on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. Based on the rating results from Pefindo No. 942/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 MTN XIX Series A, B and C are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

The Company issues MTN XVII on March 15, 2018 in the amount of Rp500,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 8.25% per annum and has been fully paid on March 12, 2021 and there is no guarantee in issuing this MTN. The purpose of issuing MTN XVII is *Refinancing*, business development and working capital. The interest payment schedule is carried out on a quarterly basis. The name of the trustee for the issuance of MTN XVII is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Issuance of Series A MTN XVIII is ranked idAA (Double A) with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

**Informasi penting sehubungan dengan Surat
Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)**

Surat Utang Jangka Menengah PNM (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 56 bulan 14 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 54 bulan 26 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara kuartal baik untuk MTN XIII seri C maupun D. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII C dan D adalah *Cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama wali amanat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII A dan B adalah *Cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Nama Wali Amanat dalam penerbitan MTN XII Seri A dan B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perusahaan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang MTN. Surat berharga ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok MTN pada tanggal penerbitan.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

**Significant information related to Medium Term
Notes and Sukuk: (continued)**

Medium Term Notes PNM (continued)

The Company issued MTN XIII Series C on April 28, 2017 amounting to Rp200,000,000,000 with a period of 56 months 14 days, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. The Company issued MTN XIII Series D on June 14, 2017 amounting to Rp15,000,000,000 with a period of 54 months 26 days, a fixed interest rate of 11.25% per annum and mature January 10, 2022. Schedule of interest payments on a quarterly basis for both MTN XIII series C and D. The guarantee given in the issuance of Series XIII C and D MTN is *Cessie*. There is no relationship between the trustee and the issuer's business in the issuance of MTN XIII Series C and D. The name of the trustee in issuing MTN XIII Series C and D is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. There is no rating in the issuance of MTN XIII Series C and D. The purpose of issuing MTN XIII Series C and D is to increase working capital in the context of financing Micro and Small Enterprises.

The Company issued MTN XIII Series A on January 10, 2017 amounting to Rp50,000,000,000 with a period of 60 months, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. The Company issued MTN XIII Series B on March 14, 2017 amounting to Rp110,000,000,000 with a period of 60 months, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on March 14, 2022. Schedule of interest payments on a 3-month basis for both MTN XIII series A and B. The guarantee given in the issuance of MTN Series XIII A and B is *Cessie*. There is no relationship between the trustee and the issuer's business in issuing MTN XIII Series A and B. The name of the Trustee in the issuance of MTN XII Series A and B is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. There is no rating in the issuance of MTN XIII Series A and B. The purpose of issuing MTN XIII Series A and B is to increase working capital in the context of financing Micro and Small Enterprises.

The MTN issued without script, except MTN Jumbo Certificate issued by the Company on behalf of the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) as a proof of debt for the benefit of the MTN. These securities are offered at 100% of the principal amount on the date of issuance of MTN.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah PNM (lanjutan)

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran bunga MTN yang untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya pada tanggal jatuh tempo MTN.

Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak -banyaknya Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.158.000.000.000, nisbah setara 6,00% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000.000.000, nisbah setara 7,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000.000.000, nisbah setara 8,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2022 untuk Sukuk Seri A dan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 938/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Medium Term Notes PNM (continued)

Interest of MTN is paid every 3 (three) months, from the date of emission and MTN interest payment for the first time and last time on the maturity date of the MTN.

Sukuk Mudharabah

Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Tranche I Year 2021

On July 8, 2021, the Company issued the Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Tranche I Year 2021 with a principal amount of up to Rp6,000,000,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK).

The Company issues and offers the 2021 PNM Sustainable Sukuk Mudharabah I phase I which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on July 8, 2021. The Company's Sukuk consist of:

- Seri A: The principal amount is Rp1,158,000,000,000, the equivalent ratio is 6.00% per annum, with a term of 370 calendar days.
- Seri B: The principal amount is Rp515,000,000,000, the equivalent ratio is 7.00% per annum, with a term of 3 years.
- Seri C: The principal amount is Rp327,000,000,000, the equivalent ratio is 8.00% per annum, with a term of 5 years.

Sukuk profit sharing payments are made every 3 (three) months from October 8, 2021 to October 8, 2022 for Series A Sukuk and October 8, 2024 for Sukuk Series B and October 8, 2026 for Sukuk Series C.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 938/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA(sy) (Double A Sharia) rating which is valid for the period July 1, 2022.

Sukuk are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable goods, both existing and future.

The issuance of the Sukuk is carried out based on the PNM Phase I Sustainable Sukuk Mudharabah Trust Agreement Phase I of 2021 No. 19 April 16, 2021 Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Surat Utang Jangka Menengah PNM (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri C pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri C tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F Tahap II pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp208.000.000.000 dengan jangka waktu 1 Tahun 9 bulan 16 hari, nisbah sebesar 11,59% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III seri F Tahap II. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah) Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III seri F Tahap II tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri B pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp780.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 40,95% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri D tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Medium Term Notes PNM (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani 2020 Series C on June 29, 2021 amounting to Rp200,000,000,000 with a period of 2 years, a ratio of 9.75% per annum of the revenue shared, and will mature on June 29, 2023. There is no guarantee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV series C. The trustee for the issuance of Sukuk is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia). The payment schedule ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk Mudharabah IV series C is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Year 2019 Series F Phase II on May 4, 2021 amounting to Rp208,000,000,000 with a period of 1 year 9 months 16 days, a ratio of 11.59% per annum of the revenue earned distributed, and will mature on February 20, 2023. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah III series F Phase II. The trustee for the issuance of Sukuk is PT Bank Syariah Indonesia Tbk with a Pefindo rating and an idAA(sy) (Double A Sharia). The payment schedule ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk Mudharabah III series F Phase II is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series B on March 10, 2021 amounting to Rp780,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 40.95% per year of the revenue shared, and will be due on March 10, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series B. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series B is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and an idAA(sy) (Double A Sharia). The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series D is listed on the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri D pada tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp308.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 16,17% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri D tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri A pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp712.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 37,38% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series D on February 19, 2021 amounting to Rp308,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 16.17% per annum of the revenue shared, and will mature on the date January 19, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series D. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series D is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia). The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series D is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series A on January 19, 2021 amounting to Rp712,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 37.38% per annum of the revenue shared, and will mature on the date January 19, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series A. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series A is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia). The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series A is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Year 2019 Series H Sukuk Mudharabah III on December 15, 2020 amounting to Rp50,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 3% per annum of revenue that was paid, and due on December 15, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series H Sukuk Mudharabah III Series. Trustee for issuance of Series H Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with rating of Pefindo and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series H Sukuk Mudharabah III Series H is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 tahap 1 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 on October 27, 2020 in the amount of Rp200,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 9.75% per annum of revenue generated, and due on October 27, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1. Trustees for the issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 are Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series F on April 8, 2020 in the amount of Rp120,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 6.69% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series F. Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of the Series III Sukuk Mudharabah F is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III 2019 Series F is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C on February 20, 2020 amounting to Rp322,000,000,000 for a period of 3 years, a ratio of 17.94% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series C. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of the Series C Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and UlaMM Syariah. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C is listed on the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri E tahap I pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 10 Bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tahap I tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan telah jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series E phase I on December 5, 2019 in the amount of Rp50,000,000,000 with a term of 2 years 10 months 25 days, a ratio of 3.00% per annum of the revenue is collected, and will mature on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Phase E Sukuk Mudharabah III Series I. Trustee for the issuance of Phase E Series Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III 2019 Series E phase I is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series A on September 24, 2019 in the amount of Rp435,000,000,000 with a term of 2 years, a ratio of 25.48% per annum from the revenue generated, and will be due on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of Series A Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule for payment of ratio is 3 monthly. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series A is listed on the KSEI exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series D on October 30, 2019 in the amount of Rp350,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 20.50% per year from the revenue generated, and mature on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Series D. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series D is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series D is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 Tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III tahap 1. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1 adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah Bank BJB dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series B on October 30, 2019 in the amount of Rp65,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 3.90% per annum of the revenue generated, and will be due on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series B. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of Series III Sukuk Mudharabah is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabahah working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III in 2019 Series B is listed on the KSEI exchange.

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah III Year 2019 Phase 1 on June 18, 2019 in the amount of Rp300,000,000,000 with a period of 5 years, a ratio of 19% per annum of revenue generated, and due on June 18, 2024. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III stage 1. Trustees for the issuance of Sukuk Mudharabah III Phase 1 are Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Mudharabah III Year 2019 Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series B on March 26, 2019 amounting to Rp240,000,000,000 with a period of 2 years 11 months, a ratio of 30.00% per year of revenue generated, and will fall due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series B. Sukuk Mudharabah II for issuance of Series B Sukuk Mudharabah is BJB Bank with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is to increase murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuing business. Issuance of Series B Sukuk Mudharabah registered at KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN
SUKUK (lanjutan)**

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah Bank BJB dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 44,7917% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri D adalah Bank Bukopin dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D tercatat di bursa KSEI.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-968/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. RC-972/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah yang berlaku untuk periode 20 September 2021 sampai dengan 1 Juli 2022.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series A on February 26, 2018 in the amount of Rp60,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series A. Sukuk Mudharabah II. Trustee for issuance of Series B Sukuk Mudharabah is BJB Bank with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah II series B is listed on the KSEI exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Series D Sukuk Mudharabah I on January 31, 2017 in the amount of Rp100,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 44.7917% per annum of revenue generated, and due on January 31, 2021. There is no guarantee on the issuance of Series D Sukuk Mudharabah I. Trustee for the issuance of Series D Sukuk Mudharabah is Bank Bukopin with Pefindo rating and rating A+. The payment schedule is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series D Sukuk Mudharabah I is listed on the KSEI exchange.

Based on the results of a Sukuk Mudharabah rating pursuant to Letter of Pefindo No. RC-968/PEF-DIR/VIII/2020 and No. RC-972/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk are rated idAA(sy) (Double A Sharia) the period from September 20, 2021 until July 1, 2022.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI

a. Berdasarkan jenis:

	2021	2020	
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021	2.992.355.687.311	-	Revolving Bonds IV PNM Tranche I Year 2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	665.350.236.408	-	Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	828.211.644.934	1.731.563.642.800	Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	249.520.680.130	249.357.039.061	Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.348.973.209.692	1.348.465.851.583	Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	1.998.662.168.493	1.997.175.553.571	Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	1.995.209.106.603	2.498.910.426.022	Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	-	749.307.247.353	Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	-	838.710.119.235	Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016
Total	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Total

b. Berdasarkan jatuh tempo:

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	3.901.707.189.148	2.996.136.037.703	Less than 1 year
1 - 2 tahun	2.834.303.297.179	2.734.470.495.933	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	3.342.272.247.244	3.682.883.345.989	More than 2 years
Total	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Total

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.

Revolving Bond IV PNM Tranche I Year 2021

On December 13, 2021, the Company issued Shelf Registration Bond IV PNM Phase 1 Year 2021 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-227/D.04/2021 dated November 30, 2021

The Company issues and offers Shelf Registration Bond IV PNM Phase I 2021 which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on December 10, 2021. The Company's Bonds consist of:

- Series A: The principal amount is Rp1,000,000,000,000, the interest rate is fixed at 3.75% per annum, with a term of 370 calendar days.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 (lanjutan)

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond IV PNM Tranche I Year 2021 (continued)

- Series B: The principal amount is Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate is 5.50% per annum, with a term of 3 years.
- Series C: The principal amount is Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate is 6.25% per annum, with a term of 5 years.

Bond interest payments are made every 3 (three) months from March 10, 2022 until December 20, 2022 for Series A Bonds and December 10, 2024 for Series B Bonds and December 10, 2026 for Series C Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

The bonds are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future.

The issuance of the Bonds was carried out based on the Trusteeship Agreement for Shelf Registration Bond III PNM Phase V Year 2021 No.25 dated February 19, 2021, drawn up before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. Changing the fields of business unless the government's decision;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 (lanjutan)

4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp168.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RC-106/PEF-DIR/III/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 8 Februari 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond IV PNM Tranche I Year 2021 (continued)

4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche V in 2021 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on March 18, 2021. The Company bonds of consist:

- Series A: Total principal amount of Rp168,000,000,000, fixed interest rate of 6.25% per annum, a term of 370 calendar days.
- Series B: Total principal amount of Rp159,000,000,000, fixed interest rate of 7.25% per annum, a term of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp339,200,000,000, fixed interest rate of 8.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest will be paid every 3 (three) months from the date of June 17, 2021 until March 17, 2022 for Series A Bonds, March 17, 2024 for the Series B Bonds and March 17, 2026 for the Series C Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 dated October 24, 2019 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RC-106/PEF-DIR/III/2021 dated February 9, 2021, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from February 8, 2021 until August 1, 2021.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 (lanjutan)

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Per Wali amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021 (continued)

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was carried out based on Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021 Trustee Agreement No. 25 dated February 19, 2021, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's fixed assets to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No.S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche IV in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2020. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp904,800,000,000, fixed interest rate of 6.50% per annum, a period of 370 calendar days.
- Series B: Total principal amount of Rp537,000,000,000, fixed interest rate of 7.75% per annum, a period of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp292,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022..

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Perwali Amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 17 November 2020 dan Addendum I No. 3 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020 (continued)

Bond interest will be paid every 3 (three) months from the date of March 4, 2021 until December 14, 2021 for Series A Bonds, December 4, 2023 for the Series B Bonds and December 4, 2025 for the Series C Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future

The bonds issuance was carried out Based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020 No. 32 dated November 17, 2020 and Addendum I of Bonds Trustee Agreement No. 3 dated December 2, 2020, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. *Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;*
2. *Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;*
3. *The acquisition of shares or assets;*
4. *Changing the fields of business unless the government's decision;*
5. *Conducting termination of covenants company material adverse impact;*
6. *Reducing the capital, issued and paid-up capital.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2020 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bond III PNM Tranche III in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 4, 2020.

The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp55,100,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp194,900,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 5 years.

Bond interest will be paid every 3 (three) months from the date of July 30, 2020 until April 30, 2023 for Series A Bonds and April 30, 2025 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020 No.10 dated April 8, 2020, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020 (continued)

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche II in 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 28, 2019. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp586,500,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp763,500,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from the date of February 28, 2020 until November 28, 2022 for Series A Bonds and November 28, 2024 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019 (continued)

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019 No. 18 dated November 12, 2019, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No. 9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 17 tanggal 4 April 2019, Addendum III Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 74 tanggal 9 Mei 2019 dan Addendum IV Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 118 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019 (continued)

The Company published and offerer the Revolving Bond III PNM Tranche I in 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2019. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,401,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp599,000,000,000, fixed interest rate of 9.85% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from the date of August 28, 2019 until May 28, 2022 for Series A Bonds and May 28, 2024 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The issuance of the Bonds is carried out based on the Trustee Agreement of Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019 No. 9 dated January 11, 2019 as amended by Addendum I Bond Trustee Agreement No. 14 dated February 6, 2019, Addendum II Bonds Trustee Agreement No. 17 dated April 4, 2019, Addendum III Bonds Trustee Agreement No.74 dated May 9, 2019 and Addendum IV Bonds Trustee Agreement No. 118 dated May 27, 2019 all of which were made before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019 (continued)

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bonds II PNM Year 2017 with a principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company published and offered Revolving Bonds II PNM Tranche II in 2018 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on April 16, 2018. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,254,000,000,000, fixed interest rate of 8.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp1,246,000,000,000, fixed interest rate of 8.50% per annum, a term of 5 years

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from the date of July 13, 2018 until April 13, 2021 for Series A Bonds and April 13, 2023 for the Series B Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 No. 109 tanggal 12 Maret 2018 dan Addendum I Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 139 tanggal 26 Maret 2018 yang keduanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018 (continued)

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was conducted based on Trustee Agreement of Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018 No. 109 dated March 12, 2018 and Addendum I of Bonds Trustee Agreement No. 139 dated March 26, 2018, both of which are made before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants Company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bonds II PNM Year 2017 with a principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company published and offered Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on July 13, 2017. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 9.25% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from the date of October 12, 2017 until July 12, 2020 for Series A Bonds and July 12, 2022 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 (lanjutan)

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Addendum I Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 No. 95 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan Total pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017 (continued)

The bonds issuance was conducted based on Addendum I Trustee Agreement of Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017 No. 95 dated June 15, 2017 were made before Notary of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, which is acting as trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016

On December 12, 2014, the Company issued Revolving Bonds I PNM Phase I Year 2014 with a principal amount of Rp2,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-534/D.04/2014 dated December 12, 2014.

The Company published and offered Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 4, 2016. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp661,000,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp839,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 5 years.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 November 2019 untuk Obligasi Seri A dan 3 November 2021 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 No. 7 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016 (continued)

Bond interest payment every 3 (three) months from the date of February 3, 2017 until November 3, 2019 to Series A Bonds and November 3, 2021 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No. RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No. RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bond issuance was conducted based on Revolving Bond I PNM Tranche I Year 2014 Trustee Deed Agreement No. 7 dated October 6, 2014 were made in the presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, which is acting as trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. *Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;*
2. *Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;*
3. *The acquisition of shares or assets;*
4. *Changing the fields of business unless the government's decision;*
5. *Conducting termination of covenants Company material adverse impact;*
6. *Reducing the capital, issued and paid-up capital.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Perusahaan sudah mematuhi setiap syarat dan pembatasan yang diberikan oleh Wali Amanat atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014, Obligasi II PNM Tahun 2013, dan Obligasi I PNM Tahun 2012.

Perusahaan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	7.644.312.600
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	5.096.208.398
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	744.433.250
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.307.610.750
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	4.473.781.014
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	3.331.375.948
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.764.210.608
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	2.193.713.909
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972.354.958
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.908.798.140
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969.439.794
Total	37.406.239.369

Biaya transaksi obligasi yang sudah diamortisasi dan dibebankan ke Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	-
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	1.500.802.134
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	265.113.380
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	648.547.879
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	3.253.077.835
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.807.617.100
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.497.076.059
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	2.193.713.909
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972.354.958
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.908.798.140
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969.439.794
Total	23.016.541.188

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang obligasi diungkapkan pada Catatan 28.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016 (continued)

The Company has complied with every requirement and covenants required by the Trustee of the issuance of Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021, Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020, Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020, Revolving Bonds III PNM Tranche I and II Year 2019, Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018, Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017, Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016, Revolving Bonds I PNM Tranche I Year 2014, Bonds II PNM Year 2013, and Bonds I PNM Year 2012.

The Company measures the value of bonds by calculating the amortized cost using the effective interest method. Bond transaction cost is charged by the Company as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020
	-	-
	-	101.472.311
	-	322.826.309
	-	1.897.265.240
	-	2.241.801.950
	-	3.071.457.961
	-	1.903.833.143
	-	2.972.354.958
	-	2.908.798.140
	-	2.969.439.794
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019
	-	Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018
	-	Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017
	-	Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016
	-	Revolving Bonds I PNM Tranche I Year 2014
	-	Bonds II PNM Year 2013
	-	Bonds I PNM Year 2012
Total	18.389.249.806	Total

Bond transaction cost have been amortized and charged to the Statement of profit and loss and Other Comprehensive Income until the date of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020
	-	-
	-	-
	-	665.653.272
	-	665.653.273
	-	1.317.322.523
	-	2.277.599.067
	-	1.615.105.952
	-	2.972.354.958
	-	2.908.798.140
	-	2.969.439.794
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019
	-	Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019
	-	Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018
	-	Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017
	-	Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016
	-	Revolving Bonds I PNM Tranche I Year 2014
	-	Bonds II PNM Year 2013
	-	Bonds I PNM Year 2012
Total	15.391.926.979	Total

Information regarding classification and fair value of bond payables are disclosed in Note 28.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

a. Berdasarkan jenis:

	2021
Pihak Berelasi	
Rupiah	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.917.715.190.015
Pihak Ketiga	
Bank Pembangunan Asia	
(USD401.226,81)	5.725.105.338
(USD474.771,94)	-
Subtotal	5.725.105.338
Total	3.923.440.295.353

b. Berdasarkan jatuh tempo:

	2021
Kurang dari 1 tahun	508.277.118.314
1 - 2 tahun	1.060.788.348.883
Lebih dari 2 tahun	2.354.374.828.156
Total	3.923.440.295.353

Pusat Investasi Pemerintah

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION

a. By type:

	2021	2020	
Related Parties			
Rupiah			
Indonesia Investment Agency (PIP)	3.917.715.190.015	3.035.065.437.303	
Third Parties			
Asian Development Bank			
(USD401,226.81)	5.725.105.338	-	
(USD474,771.92)	-	6.696.662.821	
Subtotal	5.725.105.338	6.696.662.821	Subtotal
Total	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Total

b. By maturity:

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	508.277.118.314	185.095.018.084	Less than 1 year
1 - 2 tahun	1.060.788.348.883	1.076.764.899.159	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	2.354.374.828.156	1.779.902.182.881	More than 2 years
Total	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Total

Indonesia Investment Agency

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement Number 30 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without a grace period from the date of disbursement. funds and will expire in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement Number 32 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without a grace period from the date of disbursement. funds and will expire in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Syariah Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR
NEGERI (lanjutan)**

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2023. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 November 2019, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp2.350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir pada November 2022. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir pada Oktober 2021. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 58 tanggal 28 Desember 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman

**21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN
CREDIT INSTITUTION (continued)**

Indonesia Investment Agency (continued)

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 15 dated August 14, 2020, the Government Investment Agency provides a Loan/Financing facility to the Company amounting to Rp1,147,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and will be mature on August 2023. The Company is obliged to channel Loans/Financing specifically for the Sharia Mekaar Program and must submit a List of Accounts Receivable which is a Fiduciary Guarantee every 6 months with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 2 dated November 4, 2019, the Government Investment Agency provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp2,350,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan period of 36 months without a grace period since the disbursement date fund and will be mature on November 2022. The Company is obliged to distribute Loans/Financing specifically for the Mekaar Program and must submit the List of Receivables that become Fiduciary Collateral every 6 months with a minimum value or equal to 100% of outstanding loans.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 61 dated October 31, 2018, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan period of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and will be mature on October 2021. The Company is obliged to channel special Loans/ Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables which become a Fiduciary Guarantee every 6 months with a value of at least or equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 58 dated December 28, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR
NEGERI (lanjutan)**

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020 dan 11 Januari 2021. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 47 tanggal 30 November 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 Agustus 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 24 Agustus dan 8 September 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Bank Pembangunan Asia

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%)+0,35% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

**21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN
CREDIT INSTITUTION (continued)**

Indonesia Investment Agency (continued)

the date of disbursement fund and has been fully paid on December 28, 2020 and January 11, 2021. The Company is required to disburse Loans/ Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 47 dated November 30, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on December 28, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 2 dated August 4, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on August 24 and September 8, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

Asian Development Bank

Due to the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") represent loan for micro financing for Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) from Asian Development Bank (ADB).

Based on that agreement the Company was imposed by interest rate according to ADB interest rate (periodically) to the Government (LIBOR+0.6%)+ 0,35% per annum. The fund were distributed to executing financial institution through micro financing for Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2021	2020
Entitas Anak		
PT PNM IM		
Pajak penghasilan:		
PPh Pasal 28	-	206.276.121
Pajak lain-lain:		
Pajak Pertambahan Nilai	273.552.081	-
Subtotal	273.552.081	206.276.121
PT PNM VC		
Pajak penghasilan:		
PPh Pasal 4 ayat (2)	41.805.200.818	46.298.150.900
PPh Pasal 21	13.138.910	68.325.432
PPh Pasal 22	86.878.078	-
PPh Pasal 23	4.809.717.372	-
PPh Pasal 25	2.051.693.367	-
PPh Pasal 28	4.536.236.820	5.592.158.427
Pajak lain-lain:		
Pajak Pertambahan Nilai	18.967.294.645	7.159.925.334
Subtotal	72.270.160.010	59.118.560.093
Total	72.543.712.091	59.324.836.214

22. TAXATION

a. Prepaid Taxes

	2021	2020
Subsidiaries		
PT PNM IM		
Corporate income tax:		
Income Tax Article 28		206.276.121
Other taxes:		
Value Added Tax	273.552.081	-
Subtotal	273.552.081	206.276.121
PT PNM VC		
Corporate income tax:		
Income Tax Article 4 (2)	41.805.200.818	46.298.150.900
Income Tax Article 21	13.138.910	68.325.432
Income Tax Article 22	86.878.078	-
Income Tax Article 23	4.809.717.372	-
Income Tax Article 25	2.051.693.367	-
Income Tax Article 28	4.536.236.820	5.592.158.427
Other taxes:		
Value Added Tax	18.967.294.645	7.159.925.334
Subtotal	72.270.160.010	59.118.560.093
Total	72.543.712.091	59.324.836.214

b. Utang Pajak

	2021	2020
Entitas Induk		
Pajak penghasilan:		
PPh Pasal 4 (2)	5.510.637.897	891.210.136
PPh Pasal 21	10.061.609.150	5.118.877.014
PPh Pasal 22	140.807.813	135.345.428
PPh Pasal 23	1.306.420.983	1.044.098.478
PPh Pasal 25	19.600.762.540	2.102.473.564
PPh Pasal 29	231.260.238.618	95.699.453.579
Pajak lain-lain:		
Pajak Pertambahan Nilai	12.141.052.530	7.903.541.020
Subtotal	280.021.529.531	112.894.999.219
Entitas Anak		
Pajak penghasilan:		
PPh Pasal 4 (2)	279.469.859	697.839.824
PPh Pasal 21	3.921.545.511	2.242.599.552
PPh Pasal 22	899.926	-
PPh Pasal 23	278.599.017	294.577.589
PPh Pasal 25	609.397.163	684.196.320
PPh Pasal 29	23.986.743.566	4.217.159.864
Pajak lain-lain:		
Pajak Pertambahan Nilai	29.336.409.618	1.261.418.819
Subtotal	58.413.064.660	9.397.791.968
Total	338.434.594.191	122.292.791.187

b. Taxes Payables

	2021	2020
Parent Entity		
Corporate income tax:		
Income Tax Article 4 (2)	5.510.637.897	891.210.136
Income Tax Article 21	10.061.609.150	5.118.877.014
Income Tax Article 22	140.807.813	135.345.428
Income Tax Article 23	1.306.420.983	1.044.098.478
Income Tax Article 25	19.600.762.540	2.102.473.564
Income Tax Article 29	231.260.238.618	95.699.453.579
Other taxes:		
Value Added Tax	12.141.052.530	7.903.541.020
Subtotal	280.021.529.531	112.894.999.219
Subsidiaries		
Corporate income tax:		
Income Tax Article 4 (2)	279.469.859	697.839.824
Income Tax Article 21	3.921.545.511	2.242.599.552
Income Tax Article 22	899.926	-
Income Tax Article 23	278.599.017	294.577.589
Income Tax Article 25	609.397.163	684.196.320
Income Tax Article 29	23.986.743.566	4.217.159.864
Other taxes:		
Value Added Tax	29.336.409.618	1.261.418.819
Subtotal	58.413.064.660	9.397.791.968
Total	338.434.594.191	122.292.791.187

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Beban (manfaat) pajak Perusahaan

c. The Company's income tax expense (benefit)

	2021	2020	
Entitas Induk			Parent Entity
Beban pajak kini - non-final	(355.537.237.440)	(131.912.353.098)	Current tax expense - non-final
Beban pajak tangguhan	160.187.102.863	111.778.686.006	Deferred tax expense
Entitas Anak			Subsidiaries
Beban pajak kini - non-final	(45.941.096.843)	(22.050.031.599)	Current tax expense - non-final
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(252.421.513)	1.643.189.671	Deferred tax expense (benefit)
Beban pajak	(241.543.652.933)	(40.540.509.020)	Tax expense

d. Pajak Penghasilan Badan

d. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliations between income before income tax consolidated statement of profit and loss and taxable income are as follows:

	2021	2020	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian	1.086.671.580.172	399.135.154.357	Consolidated profit before income tax per consolidated statements of income
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(109.361.103.984)	(63.481.560.471)	Profit before income tax of Subsidiaries
Transaksi Eliminasi	58.817.738.615	42.660.157.039	Elimination Transaction
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk	1.036.128.214.803	378.313.750.925	Profit before income tax of Parent
Dikurangi: Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(181.898.271.843)	(210.860.602.740)	Less: Interest income subjected to final tax
Laba entitas induk sebelum rekonsiliasi fiskal	854.229.942.960	167.453.148.184	Income of parents before fiscal reconciliation
<u>Beda Waktu:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Penyusutan aset tetap	102.853.043.884	184.800.542.004	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	16.624.683.033	15.742.682.713	Amortization of intangible asset and pre-operation cost
Beban (pemulihan) nilai yang tidak dapat diperhitungkan	641.980.370.154	310.832.557.754	Impairment losses expenses that cannot be accounted for as a non-deductible expenses
Imbalan kerja	(15.893.705.896)	22.467.977.776	Employee benefits
Jasa produksi dan tantiem	22.847.560.909	84.126.047.924	Bonus and tantiem
Beban lainnya yang tidak dapat diakui secara fiskal lainnya	(40.288.757.253)	(237.574.077.616)	Other expenses that can not be recognized
Subtotal	728.123.194.831	380.395.730.555	Subtotal
<u>Beda Tetap:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	92.294.473.823	94.827.249.019	Non-deductible expenses pursuant to fiscal
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(58.569.259.037)	(43.074.522.768)	Portion of profit from investment in Associates
Subtotal	33.725.214.786	51.752.726.251	Subtotal

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

	2021
Laba menurut Pajak	1.616.078.352.559
Laba menurut Pajak (dibulatkan)	1.616.078.352.000
Beban Pajak Kini:	
Tahun 2021	355.537.237.440
(22% x Rp1.616.078.352.000)	
Tahun 2020	-
(22% x Rp599.601.604.000)	-
Pajak Penghasilan	355.537.237.440
Dikurangi:	
Pajak dibayar di muka	
PPh Pasal 23	(8.630.000)
PPh Pasal 25	(124.268.368.822)
Estimasi Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan	231.260.238.618

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan tidak mengkreditkan estimasi beban PPh Badan periode berjalan dengan uang muka pajak per 31 Desember 2021 dan 2020.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan PPh Badan.

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

22. TAXATION (continued)

d. Corporate Income Tax (continued)

	2021	2020
	599.601.604.991	599.601.605.000
	599.601.604.991	599.601.605.000
	-	-
	131.912.353.098	131.912.353.098
	(26.137.000)	(36.186.762.519)
	(36.186.762.519)	(36.186.762.519)
Estimasi on Underpaid Corporate Income Tax	95.699.453.579	95.699.453.579

According to the Indonesian Tax Act, the Company reported/paid tax based on self-assessment system. Tax authorities may assess or amend taxes for a period specified in accordance with applicable regulations.

The Company does not estimate the burden of the corporate income tax credit for the year with a prepaid tax by December 31, 2021 and 2020.

Taxable income reconciliation results become the basis for filling annual corporate income tax.

e. Deferred Tax Assets (Liabilities)

Mutasi tahun 2021/Movement during 2021

	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	Dibebankan ke Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	
Entitas Induk						Parent Entity
Penyusutan aset tetap	985.768.052	22.627.669.654	-	-	23.613.437.706	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	3.472.029.933	3.657.430.267	-	-	7.129.460.200	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja	5.680.846.785	(3.496.615.297)	-	-	2.184.231.488	Employee benefits
Jasa produksi	23.346.457.556	11.070.631.210	-	-	34.417.088.766	Bonus, incentive and tantiem
Cadangan kerugian penurunan nilai	142.224.877.069	126.327.987.029	-	-	268.552.864.098	Allowance for impairment losses
Aset pajak tangguhan Entitas Induk	175.709.979.395	160.187.102.863	-	-	335.897.082.258	Deferred tax assets - Parent

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

e. *Deferred Tax Assets (Liabilities)*

Mutasi tahun 2021/Movement during 2021						
	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	Dibebankan ke Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	30 Des 2021/ Dec 30, 2021	
<u>Entitas Anak</u>						<u>Subsidiaries</u>
Penyusutan aset tetap	(789.426.668)	3.571.013.673	-	-	2.781.587.005	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	36.888.918	31.306.527	-	-	68.195.445	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja	1.144.878.266	(90.171.597)	-	-	1.054.706.669	Employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	34.342.851.707	(5.966.743.257)	-	-	28.376.108.450	Allowance for impairment losses
Rugi fiskal tidak dapat dikompensasikan	389.096.210	2.129.600.860	-	-	2.518.697.070	Uncompensated fiscal loss
Penilaian		(4.709.096.458)	-	-	(4.709.096.458)	Valuation
BYMHD jasa produksi	4.753.176.191	5.062.707.079	-	-	9.815.883.270	Accrued expenses - bonus
Aset pajak tangguhan Entitas Anak	39.877.464.624	28.616.827	-	-	39.906.081.451	Deferred tax assets - Subsidiaries
Subtotal	215.587.444.019	160.215.719.690	-	-	375.803.163.709	Subtotal
<u>Entitas Anak</u>						<u>Subsidiaries</u>
Penyusutan aset tetap	(6.585.300.641)	12.781.884.703	-	-	6.196.584.062	Depreciation of fixed assets
BYMHD jasa produksi	396.442.922	(608.692.716)	-	-	(212.249.794)	Accrued expenses - bonus
Insentif	507.979.842	(860.860.649)	-	-	(352.880.807)	Incentive
THR	186.993.843	(276.149.875)	-	-	(89.156.032)	THR
Beban imbalan pasca kerja	(267.933.970)	229.445.463	-	-	(38.488.507)	Employee benefits
Liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak	(5.761.818.004)	11.265.626.926	-	-	5.503.808.922	Deferred tax liabilities Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan Konsolidasi	209.825.626.015	171.481.346.616	-	-	381.306.972.631	Deferred Tax Assets - Consolidation

Mutasi tahun 2020/Movement during 2020							
	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	Dampak Penerapan PSAK 71/ Impact of Implementation PSAK 71	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif/ Charged to Statements of Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Des 2020 / Dec 31, 2020	
<u>Entitas Induk</u>							<u>Parent Entity</u>
Penyusutan aset tetap	15.660.321.746	-	(14.674.553.694)	-	-	985.768.052	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	504.738.236	-	2.967.291.697	-	-	3.472.029.933	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja	6.245.537.631	-	(564.690.846)	-	-	5.680.846.785	Employee benefits
Jasa produksi, bonus dan tantiem	12.375.000.000	-	10.971.457.556	-	-	23.346.457.556	Bonus, incentive and tantiem
Cadangan kerugian penurunan nilai	10.954.463.092	18.191.232.684	113.079.181.293	-	-	142.224.877.069	Allowance for impairment losses
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Induk	45.740.060.705	18.191.232.684	111.778.686.006	-	-	175.709.979.395	Deferred tax assets (liabilities) - Parent

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. *Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)*

	Mutasi tahun 2020/Movement during 2020						
	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	Dampak Penerapan PSAK 71/ Impact of Implementation PSAK 71	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif/ Charged to Statements of Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	
<i>Entitas Anak</i>							<i>Subsidiaries</i>
Penyusutan aset tetap	1.511.685.986	-	(1.589.021.334)	-	(712.091.320)	(789.426.668)	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	36.888.918	-	-	-	-	36.888.918	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja Cadangan kerugian penurunan nilai	784.732.439	-	353.540.831	6.604.996	-	1.144.878.266	Employee benefits
Rugi fiskal tidak dapat dikompensasikan	5.452.382.477	24.006.052.264	1.490.922.383	-	3.393.494.583	34.342.851.707	Allowance for impairment losses
Penilaian BYMHD jasa produksi	435.491.785	-	(435.491.785)	-	-	-	Uncompensated fiscal loss Valuation
	5.673.706.349	-	(920.530.157)	-	-	4.753.176.192	Accrued expenses - bonus
Aset (liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak	13.894.887.954	24.006.052.264	(711.483.852)	6.604.996	2.681.403.263	39.877.464.625	Deferred tax assets (Liabilities) - Subsidiaries
Subtotal	59.634.948.659	42.197.284.948	111.067.202.154	6.604.996	2.681.403.263	215.587.444.020	Subtotal
Penyusutan aset tetap	(6.585.300.641)	-	-	-	-	(6.585.300.641)	Depreciation of fixed assets
BYMHD jasa produksi	396.442.922	-	-	-	-	396.442.922	Accrued expenses - bonus
Insentif THR	507.979.842	-	-	-	-	507.979.842	Incentive THR
Beban imbalan pasca kerja	19.855.594	-	-	-	(287.789.564)	(267.933.970)	Employee benefits
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak	(5.474.028.440)	-	-	-	(287.789.564)	(5.761.818.004)	Deferred tax Asset (liabilities) Subsidiaries
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Konsolidasi	54.160.920.219	42.197.284.948	111.067.202.154	6.604.996	2.393.613.699	209.825.626.016	Deferred tax assets (Liabilities) - Consolidation

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang ("UU) No. 2 Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 pada Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.

On May 18, 2020, Perpu No. 1 Year 2020 has been legalized into Law No. 2 Tahun 2020.

Based on the Tax Harmonization Law which was ratified on October 7, 2021 in Article 17 paragraph (1) it is stated that:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

“Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022”.

f. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif Entitas Induk	1.036.128.214.803	136.759.210.133
Beban pajak dihitung pada tarif yang berlaku:		
Tahun 2021 - disetahunkan (22% x Rp1.036.128.214.803)	227.948.207.257	-
Tahun 2020 - disetahunkan (22% x Rp136.759.210.133)	-	30.087.026.229
Total	227.948.207.257	30.087.026.229
Dampak pajak atas:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	20.044.769.902	6.594.946.940
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(12.885.236.988)	(6.919.973.919)
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(40.017.619.805)	(24.235.379.983)
Penyesuaian pajak tangguhan	79.981.551.549	29.571.025.713
Total	47.123.464.658	5.010.618.751
Beban pajak	275.071.671.915	35.097.644.980

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

23. DANA CADANGAN ANGSURAN

	2021	2020
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	2.994.511.749.461	1.953.439.414.600
Uang Titipan Nasabah	1.606.423.205.346	352.724.160.233
Dana Cadangan Angsuran	275.352.673.106	214.815.145.193
Total	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026

Dana Cadangan nasabah merupakan dana milik nasabah ULaMM yang dititipkan kepada Perusahaan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah. Perusahaan menampung dana cadangan angsuran masing-masing sejumlah 173.468 nasabah dan 97.446 nasabah ULaMM pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

22. TAXATION (continued)

e. *Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)*

“Domestic corporate taxpayers and permanent establishments are 22% which will take effect in the 2022 Fiscal Year.”

f. *Reconciliation between tax expense and the result of accounting profit before tax multiplication with prevailing tax rate is as follow:*

	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif Entitas Induk	1.036.128.214.803	136.759.210.133	<i>Profit before income tax per statements of comprehensive income of Parent Entity</i>
Beban pajak dihitung pada tarif yang berlaku:			<i>Tax expense is calculated by prevailing tax rate</i>
Tahun 2021 - annualized (22% x Rp1.036.128.214.803)	227.948.207.257	-	<i>Year 2021 - annualized (22% x Rp1.036.128.214.803)</i>
Tahun 2020 - annualized (22% x Rp136.759.210.133)	-	30.087.026.229	<i>Year 2020 - annualized (22% x Rp136.759.210.133)</i>
Total	227.948.207.257	30.087.026.229	Total
Dampak pajak atas:			<i>Tax effect on:</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	20.044.769.902	6.594.946.940	<i>Non-deductible expenses pursuant to fiscal</i>
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(12.885.236.988)	(6.919.973.919)	<i>Portion of profit from investment in Associates</i>
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(40.017.619.805)	(24.235.379.983)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Penyesuaian pajak tangguhan	79.981.551.549	29.571.025.713	<i>Deferred tax adjustment</i>
Total	47.123.464.658	5.010.618.751	Total
Beban pajak	275.071.671.915	35.097.644.980	Tax expense

g. *Tax Assessment Letter*

The Company did not receive a Letter of Tax Provision (SKP) and a Letter of Tax Bill (STP) from the Tax Office for the year ended December 31, 2021.

23. INSTALLMENT RESERVE FUND

	2021	2020	
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	2.994.511.749.461	1.953.439.414.600	<i>Customer's Responsibility</i>
Uang Titipan Nasabah	1.606.423.205.346	352.724.160.233	<i>Customer's Deposit</i>
Dana Cadangan Angsuran	275.352.673.106	214.815.145.193	<i>Customer's Reserve Fund</i>
Total	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Total

Installment Reserve Fund are funds belonging to ULaMM customers that are deposited to the Company without requiring customer approval when there is a lack of payment of customer obligations. The Company accommodates an installment reserve fund of 173,468 customers and 97,446 ULaMM customers as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. DANA CADANGAN ANGSURAN (lanjutan)

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang. Perusahaan melayani uang titipan sejumlah 6.999.774 nasabah dan 5.514.580 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perusahaan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perusahaan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

Uang Pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas. Perusahaan menampung uang pertanggungjawaban masing-masing sejumlah 10.451.377 nasabah dan 7.801.490 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 19 November 2021 Pemerintah telah menyalurkan subsidi bunga/subsidi margin kepada Perusahaan sebesar Rp930.226.274.768. Selanjutnya, pada 31 Desember 2021 Perusahaan telah menyalurkan seluruh subsidi bunga/subsidi margin tersebut melalui dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

24. UTANG LAIN-LAIN

	2021
Pihak Berelasi	
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746
Pihak Ketiga	
Dana pihak ketiga BPR/S	262.429.408.206
Dana titipan asuransi dan notaris	46.113.698.951
Utang pihak ketiga	5.167.604.342
Lain-lain	9.251.672.731
Subtotal	322.962.384.230
Total	323.368.663.976

23. INSTALLMENT RESERVE FUND (continued)

Deposit money is a form of service for the Mekaar Program to customers so they can get access to safekeeping money easily, cheaply and safely. Deposit money can be used as a source of payment or repayment of customer financing if the customer delays or disappears. The Company serves deposit funds of 6,999,774 Mekaar's customers and 5,514,580 Mekaar's customers as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Income from the placement of funds obtained by the Company from the customer's deposit money is used to cover the administrative expense and management of the customer's deposit fund. The Company does not impose an administrative expense and manage the deposit fund to the customer.

Liability Accounts are money set aside from loans received by Mekaar customers, which will be returned to customers after all loan is have been repaid off. The Company holds responsibility money totaling 10,451,377 Mekaar's customers and 7,801,490 Mekaar's customers as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 150/PMK.05/2021 dated October 25, 2021 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Pandemic Virus Disease 2019 (Covid-19).

On November 19, 2021, the Government has distributed interest subsidies/margin subsidies to the Company amounting to Rp930,226,274,768. Furthermore, on December 31, 2021, the Company has distributed the entire interest subsidy/margin subsidy through an installment reserve fund for ULaMM customers and as Customer Deposit or Interest Subsidy for Mekaar customers.

24. OTHER PAYABLES

	2021	2020	
			Related Party
			BPJS Ketenagakerjaan
			Third Parties
			Third-party funds of BPR/S
			Insurance and notary deposit fund
			Third party liabilities
			Others
			Subtotal
			Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2021
Personalia	106.095.464.862
Beban operasional	79.126.190.162
Bunga obligasi	78.092.148.236
Bunga pinjaman bank dan MTN	33.124.236.705
Bunga NUSSP	12.828.882
Total	296.450.868.847

25. ACCRUED EXPENSES

	2020	
	117.014.648.288	Personnel
	130.817.626.671	Operational expenses
	114.995.434.946	Interest - bonds
	52.856.547.363	Interest - bank borrowings and MTN
	7.963.486	Interest - NUSSP
Total	415.692.220.754	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021 Perusahaan memiliki beban bunga obligasi yang masih harus dibayar sehubungan dengan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, serta Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021.

On December 31, 2021, the Company has a accrued bond interest expenses in according to the listing of Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016, Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017, Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018, Revolving Bond III PNM Tranche I and Tranche II Year 2019, Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020, Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020, and Revolving Bond III PNM Tranche V Year 2021.

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja

	2021
Entitas Induk	
Program imbalan pasca kerja	5.225.498.897
Program manfaat jangka panjang lain	19.149.871.146
	24.375.370.043
Entitas Anak	4.799.330.043
Total	29.174.700.086

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee Benefit Liability (Asset)

	2020	
	37.810.812.923	Parent Entity
	16.400.511.203	Post-retirement benefits program
	16.400.511.203	Other long-term benefits program
	54.211.324.126	
Entitas Anak	4.346.797.959	Subsidiaries
Total	58.558.122.085	Total

Beban Imbalan Kerja

	2021
Laba Rugi	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	(13.060.116.152)
Program manfaat jangka panjang lain	4.661.111.527
	(8.399.004.625)
<u>Entitas Anak</u>	1.874.456.565
Subtotal	(6.524.548.060)
Penghasilan Komprehensif Lainnya	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	(7.215.917.260)
Total	(13.740.465.320)

Employee Benefit Expenses

	2020	
	21.198.693.199	Profit and Loss
	4.623.337.644	Parent Entity
	4.623.337.644	Post-retirement benefits program
	25.822.030.843	Other long-term benefits program
	2.574.960.757	
Entitas Anak	2.574.960.757	Subsidiaries
Subtotal	28.396.991.600	Subtotal
Other Comprehensive Income		
<u>Parent Entity</u>		
Post-retirement benefits program	6.761.195.825	Parent Entity
Total	35.158.187.425	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Beban Imbalan Kerja (lanjutan)

Perusahaan telah menghitung kewajibannya pada tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan telah menghitung kewajibannya pada tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan hasil perhitungan aktuarial sesuai dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja.

Perusahaan membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24 (revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

Akumulasi keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul tidak diakui kecuali jika melebihi 10% dari nilai yang lebih besar dari Nilai Kini Kewajiban atau Nilai Wajar Aset, maka kelebihanannya diakui sepanjang rata-rata sisa masa kerja.

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat kerja karyawan (*post employment benefit*) sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan melakukan pendanaan untuk program ini melalui PT BNI Life Insurance.

Total karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah 3.841 karyawan (tidak diaudit) dan 3.683 karyawan (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuarial yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Januari 2021.

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefit Expenses (continued)

The company has calculated its obligations in 2021 in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment.

The company has calculated its obligations in 2020 in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

The balance of employee benefit liability as of December 31, 2021 and 2020 represent an actuarial calculation of SFAS No. 24 (Revised 2013) regarding Employee Benefit.

The Company recorded a post-employment benefit plans in accordance SFAS 24 (revised 2013) on Employee Benefits. The Company uses the Projected Unit Credit Method to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service cost and past service cost (if applicable).

Accumulated profit/loss arising unrecognized actuarial unless it exceeds 10% of the value is greater than Present Value Fair Value Assets or liabilities, then the excess is recognized throughout the expected average remaining working lives.

The Company has laid off employee benefit programs (*post-employment benefits*) according to Company Policy. The Company made funding for this program through PT BNI Life Insurance.

Number of employees entitled to the benefits as of December 31, 2021 and 2020 are 3,841 employees (unaudited) and 3,683 employees (unaudited), respectively.

The calculation of employee benefit liabilities for Post-retirement Benefit and Other Long-Term Benefit Program is performed by the Independent Actuarial Office of PT Padma Radya Aktuarial as set forth in the Report of Estimated Liability Calculation Benefits of Employee Period Employee PT Permodalan Nasional Madani dated January 3, 2021.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program yang diikuti oleh Entitas Induk dalam manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

a. Program imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

	2021	2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) awal periode	162.235.623.277	128.074.309.518
Biaya jasa kini	22.774.603.819	20.431.291.171
Biaya jasa lalu	(38.996.540.855)	-
Penghasilan atau beban bunga	11.210.262.998	10.215.653.498
Imbalan yang dibayarkan	(5.582.949.686)	(1.772.454.905)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(314.530.920)
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(7.159.872.418)	15.341.433.213
Penyesuaian	(5.131.546.028)	(9.740.078.298)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) - akhir periode	139.349.581.107	162.235.623.277

Present value of defined benefit obligations (PVDBO) - beginning of period
Current service costs
Past service costs
Interest income or expenses
Compensation paid

Remeasurement of net defined benefit liability (asset):
Gains/losses arising from changes in demographic assumptions
Gains/losses arising from changes in financial assumptions
Adjustments

Present value of defined benefit obligations (PVDBO) - end of period

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Wajar Aset Program

	2021	2020
Nilai wajar aset - awal periode	124.424.810.354	118.103.143.382
luran pemberi kerja	11.060.020.009	-
Ekspektasi imbal hasil dari aset program	8.048.442.114	9.448.251.471
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Imbal hasil aset program	(1.492.815.807)	(682.792.437)
Imbalan yang dibayarkan	(4.333.689.081)	(1.652.212.669)
Kombinasi bisnis	(3.582.685.379)	(791.579.393)
Nilai Wajar Aset - akhir periode	134.124.082.210	124.424.810.354

Reconciliation of beginning and ending balances of Fair Value of Plan Assets

Plan Assets - beginning of period
Contribution by employer
Expectations returns on plan assets
Remeasurement of net defined benefit liability (asset):
Return on plan assets
Compensation paid
Business combination

Fair Value of Assets - end of period

Analisis NKKIP yang didanai dan tidak didanai

	2021	2020
NKKIP dari program yang seluruhnya tidak didanai	5.225.498.897	37.810.812.923
NKKIP dari program yang seluruhnya didanai	134.124.082.210	124.424.810.354
Total NKKIP	139.349.581.107	162.235.623.277

Analysis of funded and unfunded PVDBO

PVDBO of programs that are not funded entirely
PVDBO of programs that are funded entirely

Total PVDBO

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program imbalan pasca kerja (lanjutan)

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	139.349.581.107	162.235.623.277	Present value of defined benefit obligations
Nilai wajar aset program (jika didanai)	(134.124.082.210)	(124.424.810.354)	Fair value of plan assets (if funded)
Status pendanaan	5.225.498.897	37.810.812.923	Funding status
Total (Aset) Liabilitas	5.225.498.897	37.810.812.923	Total (Assets) Liabilities

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

	2021	2020	
Biaya jasa kini	22.774.603.819	20.431.291.171	Current service costs
Biaya jasa lalu	(38.996.540.855)	-	Past service costs
Bunga neto atas liabilitas (aset)	3.161.820.884	767.402.028	Net interest of liabilities (assets)
Total Beban Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	(13.060.116.152)	21.198.693.199	Total Expense Recognized in the Income Statement
Keuntungan dan kerugian aktuarial:			Actuarial gains (losses):
Perubahan asumsi demografis	-	(314.530.920)	Changes in demographic assumptions
Perubahan asumsi aktuarial	(7.159.872.418)	15.341.433.213	Changes in actuarial assumption
Penyesuaian	(5.131.546.029)	(9.740.078.298)	Adjustments
Imbal hasil atas aset program	5.075.501.187	1.474.371.830	Return on plan assets
Total (Manfaat) Beban yang Diakui Sebagai Penghasilan Komprehensif Lain	(7.215.917.260)	6.761.195.825	Total (Benefit) Expense recognized in the Other Comprehensive Income
Total (Manfaat) Beban yang Diakui Sebagai Penghasilan Komprehensif Lain	(20.276.033.412)	27.959.889.024	Total (Benefit) Expense Recognized in the Other Comprehensive Income

Komposisi Nilai Wajar Aset Program:

	2021	2020
Persentase:		
Dana Pasar Uang	50,00%	50,00%
Dana Pendapatan Tetap	50,00%	50,00%
Properti	0,00%	0,00%
Aset Lainnya (Company Saving Product)	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%

Composition Fair Value Plan of Assets:

Persentase:
Money Market Fund
Fixed Income
Property
Other Assets (Company Saving Product)
Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program imbalan pasca kerja (lanjutan)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

	2021
Tingkat diskonto	7,50%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%
Tingkat pengembalian Investasi	7,00%
Tingkat mortalita	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10.00% p.a until 35 y.o than linear decrease until 0% p.a at 56 y.o
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%
Usia pensiun normal	56 tahun
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil

Analisis Sensitivitas

	2021
Asumsi Tingkat Diskonto	139.349.581.107
Tingkat Diskonto + 1%	126.470.042.198
Tingkat Diskonto - 1%	154.207.740.106
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	139.349.581.107
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	154.725.500.734
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	125.826.214.875
Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan	14,74
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	5.958.248.538
1 - 5 tahun	43.842.205.628
5 - 10 tahun	112.754.675.933
> 10 tahun	1.033.817.509.129

b. Program imbalan jangka panjang lainnya

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

	2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) awal periode	16.400.511.203
Biaya jasa:	
Biaya jasa kini	3.633.844.261
Biaya jasa lalu	(140.781.438)
Penghasilan atau beban bunga	1.097.204.743
Imbalan yang dibayarkan	(1.911.751.585)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:	
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(504.102.384)
Penyesuaian	574.946.346
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) akhir periode	19.149.871.146

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Post-retirement benefits program (continued)

Present value of defined benefit obligation (PVDBO) is calculated by the independent actuary using actuarial assumption as follows:

	2020	
Tingkat diskonto	7,00%	Discount rate assumption
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%	Salary growth projection rate
Tingkat pengembalian Investasi	8,00%	Investment rate of return
Tingkat mortalita	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10.00% p.a until 35 y.o than linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	Resignation rate
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A	Taking of early pension proportion
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%	Taking of normal pension proportion
Usia pensiun normal	56 tahun	Normal retirement age
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil	Layoff rate for other reason

Sensitivity Analysis

	2020	
Asumsi Tingkat Diskonto	162.235.623.277	Discount rate assumption
Tingkat Diskonto + 1%	146.935.994.522	Discount Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	179.934.460.890	Discount Rate - 1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	162.235.623.277	Rate of Salary Increase Assumption
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	180.360.150.984	Rate of Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	146.289.121.504	Rate of Salary Increase - 1%
Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan	14,95	Weighted average duration of benefit obligation
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo		The following estimated benefit payments that will be due
< 1 tahun	6.301.705.739	< 1 year
1 - 5 tahun	46.901.905.515	1 - 5 years
5 - 10 tahun	126.252.624.965	5 - 10 years
> 10 tahun	1.201.084.461.930	> 10 years

b. Other long-term benefits program

Reconciliation of beginning and ending balances of the Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO)

	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) awal periode	15.010.984.389	Present value of defined benefit obligations (PVDBO) beginning of period
Biaya jasa:		Service costs:
Biaya jasa kini	3.533.151.483	Current service costs
Biaya jasa lalu	-	Past service costs
Penghasilan atau beban bunga	1.095.215.437	Interest income or expenses
Imbalan yang dibayarkan	(3.233.810.830)	Compensation paid
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		Remeasurement of net defined benefit liability (asset):
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(91.639)	Gains/losses arising from changes in demographic assumptions
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	860.068.577	Gains/losses arising from changes in financial assumptions
Penyesuaian	(865.006.214)	Adjustments
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) akhir periode	16.400.511.203	Present value of defined benefit obligations- (PVDBO) - end of period

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Program imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

b. Other long-term benefits program (continued)

Analisis NKKIP yang didanai dan tidak didanai

Analysis of funded and unfunded PVDBO

	2021	2020	
NKKIP dari program yang seluruhnya tidak didanai	19.149.871.146	16.400.511.203	PVDBO of programs that are not funded entirely
Total NKKIP	19.149.871.146	16.400.511.203	Total PVDBO

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Reconciliation of PVDBO and fair value of plan assets for assets and liabilities are recognized in the consolidated financial statements.

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	19.149.871.146	16.400.511.203	Present value of defined benefit obligations
Status pendanaan	19.149.871.146	16.400.511.203	Funding status
Total (Aset) Liabilitas	19.149.871.146	16.400.511.203	Total (Assets) Liabilities

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

Reconciliation of employee benefits expense recognized in the Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income.

	2021	2020	
Biaya jasa kini	3.633.844.261	3.533.151.483	Current service costs
Biaya jasa lalu	(140.781.438)	-	Past service costs
Bunga neto atas liabilitas (aset)	1.097.204.743	1.095.215.437	Net interest of liabilities (assets)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	70.843.961	(5.029.276)	Amortization of actuarial loss (gain)
Total Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	4.661.111.527	4.623.337.644	Total Expense recognized in the Income Statement
Total Beban Imbalan Pasti	4.661.111.527	4.623.337.644	Total Defined Benefit Expenses

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

Present value of defined benefit obligation (PVDBO) is calculated by the independent actuary using actuarial assumption as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7,50%	7,00%	Discount rate assumption
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%	10,00%	Salary growth projection rate
Tingkat mortalita	100% TMI4	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10,00% p.a until 35 y.o than linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10,00% p.a until 35 y.o than linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	Resignation rate
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A	N/A	Taking of early pension proportion
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%	100%	Taking of normal pension proportion
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	Normal retirement age
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil	Nil	Layoff rate for other reason

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**b. Program imbalan jangka panjang lainnya
(lanjutan)**

Analisis Sensitivitas

	2021
Asumsi Tingkat Diskonto	19.149.871.146
Tingkat Diskonto + 1%	18.213.275.540
Tingkat Diskonto - 1%	20.184.184.501
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	19.149.871.146
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	20.152.310.950
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	17.291.446.321
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	2.704.218.857
1 - 5 tahun	16.345.933.685
5 - 10 tahun	19.534.372.192
> 10 tahun	44.016.082.312

Perusahaan mengadakan asuransi pensiun manfaat pasti untuk karyawan sejak 28 Desember 2001. Program pensiun ini dikelola oleh PT BNI Life Insurance. Sumber dana asuransi terutama berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan. Kontribusi karyawan adalah sebesar 3% dari gaji pokok dan kontribusi Perusahaan sebesar 7% dari gaji pokok karyawan.

Saldo akumulasi dana akhir Perusahaan selaku pemberi kerja sesuai dengan laporan PT BNI Life Insurance pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp134.124.082.210 dan Rp124.424.810.354.

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan memiliki berbagai macam aset keuangan, diantaranya kas dan setara kas, portofolio efek, pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal, piutang jasa manajemen, pendapatan yang masih akan diterima, piutang kegiatan manajer investasi, piutang lain-lain, yang timbul dari kegiatan operasi Perusahaan. Sedangkan liabilitas keuangan Perusahaan diantaranya utang bank dan lembaga keuangan, pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Other long-term benefits program (continued)

Sensitivity Analysis

	2021	2020	
Asumsi Tingkat Diskonto	19.149.871.146	16.400.511.203	Discount Rate Assumption
Tingkat Diskonto + 1%	18.213.275.540	15.540.375.406	Discount Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	20.184.184.501	17.352.572.786	Discount Rate - 1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	19.149.871.146	16.400.511.203	Rate of Salary Increase Assumption
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	20.152.310.950	17.315.314.078	Rate of Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	17.291.446.321	14.827.285.915	Rate of Salary Increase - 1%
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo			The following estimated benefit payments that will be due
< 1 tahun	2.704.218.857	1.901.826.134	< 1 year
1 - 5 tahun	16.345.933.685	15.251.722.440	1 - 5 years
5 - 10 tahun	19.534.372.192	17.549.258.551	5 - 10 years
> 10 tahun	44.016.082.312	39.570.182.023	> 10 years

The Company organized defined benefits pension program for employees since December 28, 2001. Pension fund is administrated by PT BNI Life Insurance. Pension program funding are from contribution paid by the employer and the employees. The employee's contribution is 3% of gross salary and employer's is 7% of gross salary.

The balance of accumulated contributions of the employer in accordance with the report of PT BNI Life Insurance on December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp134,124,082,210 and Rp124,424,810,354, respectively.

27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

a. Financial Instruments Classification

The Company has various financial assets, including cash and cash equivalents, portfolio of securities, loans, capital financing, management services receivables, accrued income, investment manager activities receivables, other receivables, that arising from the Company's operations. While the Company's financial liabilities include bank and financial institution borrowings, loan from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution, bond payables,

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

dan lembaga kredit luar negeri, utang obligasi, dana cadangan angsuran, utang kegiatan manajer investasi dan utang lain-lain. Perusahaan tidak memiliki transaksi derivatif, terutama untuk mengelola risiko suku bunga yang berasal dari pinjaman Perusahaan dan utang obligasi.

Rincian kebijakan akuntansi penting dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas diungkapkan dalam Catatan 2.

Tabel berikut menunjukkan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
Aset Keuangan		
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Portofolio efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1.184.264.100.940	524.808.898.763
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623
Pinjaman yang diberikan	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818
Pembiayaan modal	768.094.030.173	846.572.933.315
Piutang jasa manajemen - bersih	5.634.889.481	7.194.005.688
Pendapatan masih akan diterima - bersih	130.096.791.910	117.946.355.821
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286.747.464	8.043.481.660
Piutang lain-lain	87.561.426.240	57.711.206.701
Tersedia untuk dijual		
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665.228.119
Total aset keuangan	38.580.722.219.037	28.119.124.494.508
Liabilitas keuangan		
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000
Utang Obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865	4.144.473
Utang lain-lain	323.368.663.976	384.107.996.141
Beban yang masih harus dibayar	296.450.868.847	415.692.220.754
Total liabilitas keuangan	36.901.227.579.475	25.891.366.517.793

27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

a. Financial Instruments Classification (continued)

installment reserve fund, investment manager activities liabilities and other liabilities. The Company does not have derivative transactions, primarily to manage interest rate risk from the Company's borrowings and bond payables.

Details of significant accounting policies and methods that applied (including criteria for recognition, the measurements basis and revenues and expenses recognition) for each classification of financial assets, financial liabilities and equity instruments are disclosed in Note 2.

The following table set out the financial assets and financial liabilities as of December 31, 2021 and 2020:

Financial Assets
Fair value through profit or loss
Portfolio of securities measured at amortized cost
Amortized cost
Cash and cash equivalent
Loans
Capital financing
Management services receivables - net
Accrued incomes - net
Investment manager activities receivables
Other receivables
Fair value through other comprehensive income
Portfolio of securities fair value through other comprehensive income
Total financial assets
Financial liabilities
Liabilities at amortized costs
Bank and financial institution borrowings
Medium - term notes and sukuk
Bond payables
Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Installment reserve fund
Investment manager activities payables
Other liabilities
Accrued expenses
Total financial liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

**27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(continued)**

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

**a. Financial Instruments Classification
(continued)**

Tabel berikut menunjukkan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, yang dicatat dalam laporan posisi keuangan.

The following tables show the carrying value and estimated fair value of the Company's financial instruments, that recorded in the consolidated statement of financial position.

	Nilai Tercatat/Carrying Value		
	2021	2020	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Cash and cash equivalent
Portofolio efek			Portfolio of securities
yang diukur dengan nilai			measured at fair
wajar melalui laba rugi	1.184.264.100.940	524.808.898.763	value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans
Pembiayaan modal	768.094.030.173	846.572.933.315	Capital financing
Piutang jasa manajemen	5.634.889.481	7.194.005.688	Management services receivables
Pendapatan yang masih akan diterima	130.096.791.910	117.946.355.821	Accrued incomes
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286.747.464	8.043.481.660	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	30.270.213.358	57.711.206.701	Other receivables
Portofolio efek dengan nilai wajar			Portfolio of securities with fair value
melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665.228.119	through other comprehensive income
Total aset keuangan	38.523.431.006.155	28.119.124.494.508	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang Bank dan lembaga keuangan	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Bank and financial institution
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia			Borrowings from the Government of the Republic
dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	of Indonesia and foreign credit institution
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865	4.144.473	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	323.368.663.976	384.107.996.141	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	239.159.655.965	415.692.220.754	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	36.843.936.366.593	25.891.366.517.793	Total financial liabilities
	Nilai Wajar/Fair Value		
	2021	2020	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Cash and cash equivalent
Portofolio efek			Portfolio of securities
yang diukur dengan nilai			measured at fair
wajar melalui laba rugi	1.184.264.100.940	524.808.898.763	value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans
Pembiayaan modal	768.094.030.173	846.572.933.315	Capital financing
Piutang jasa manajemen	5.634.889.481	7.194.005.688	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	130.096.791.910	117.946.355.821	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286.747.464	8.043.481.660	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	30.270.213.358	57.711.206.701	Other receivables
Portofolio efek dengan nilai wajar			Portfolio of securities with fair value
melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665.228.119	through other comprehensive income
Total aset keuangan	38.523.431.006.155	28.119.124.494.508	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium – term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia			Borrowings from the Government of Republic of
dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Indonesia and foreign credit institution
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865	4.144.473	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	323.368.663.976	384.107.996.141	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	239.159.655.965	415.692.220.754	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	36.843.936.366.593	25.891.366.517.793	Total financial liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

**27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(continued)**

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal adalah sama dengan harga transaksinya. Nilai wajar efek yang diperdagangkan di bursa, adalah harga penutupan pada tanggal perdagangan.

Pinjaman yang diberikan, Pembiayaan Modal dan Piutang

Portofolio kredit secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal dan piutang dengan suku bunga tetap, pembiayaan modal dengan bagi hasil dan piutang lain-lain. Pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Portofolio efek

Nilai wajar untuk surat-surat ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

Pinjaman yang diterima

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva *yield* terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

Liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar liabilitas lain-lain menggunakan nilai tercatat karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun.

b. Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial assets at initial recognition is equal to the price of the transaction. The fair value of securities for trading on the Stock Exchange, is the closing price on the trading date.

Loans, Capital Financing and Receivables

Generally, the credit portfolio consists of loans, capital and receivables financing with a fixed interest rate, with the result of capital financing and other receivables. Loans, financing capital stated at amortized cost. The fair value of the loans shows the estimated discounted value of future cash flows expected to be received by the Company by using current market interest rates.

Portfolio of securities

The fair values for marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

Borrowings

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve that appropriate for the remaining maturity period.

Other liabilities

The estimated fair values of other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair value of other liabilities using the carrying value due to residual maturity below one year.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2021

28. NON-CONTROLLING INTEREST

The non-controlling interest on net income (losses) of subsidiaries during 2021

Laporan Posisi Keuangan/Consolidated Statements of Financial Position

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	215.073.663.984	1.955.215
PT PNM Venture Capital	0,000%	484.184.976.638	1.329.448
PT PNM Venture Syariah	0,000%	80.450.339.853	22.904.699.789
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	123.863.742.124	159
PT Mitra Utama Madani	0,000%	20.979.198.532	5.760
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	13.983.953.586	395
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	33.297.216.623	9.143
PT Micro Madani Institute	0,000%	59.252.614.131	9.046
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	97.854.260.927	277
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	12.252.428.081	13
PT Crom Madani Indonesia	0,000%	5.543.417.585	-
PT Karya Digital Madani	0,000%	10.000.000.000	12.905
			22.908.022.150

Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/ Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	13.746.293.606	124.966
PT PNM Venture Capital	0,000%	44.823.213.470	123.073
PT PNM Venture Syariah	0,000%	3.721.576.768	4.349.586.345
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	2.607.869.282	3
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.357.459.783	1.196
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	1.015.816.869	29
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	22.692.275.043	6.231
PT Micro Madani Institute	0,000%	33.379.436.846	5.096
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	24.681.221.768	70
PT Crom Madani Indonesia	0,000%	3.424.728.896	4
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	(128.429.601)	-
PT Karya Digital Madani	0,000%	-	-
			4.349.847.013

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan / Comprehensive Income	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	13.746.293.606	124.966
PT PNM Venture Capital	0,000%	49.669.772.283	136.380
PT PNM Venture Syariah	0,000%	3.743.022.557	4.349.573.689
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	2.604.893.769	3
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.335.050.137	1.190
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	1.015.812.342	29
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	22.703.165.282	6.234
PT Micro Madani Institute	0,000%	33.603.087.779	5.130
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	24.696.030.677	70
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	3.427.802.974	4
PT Crom Madani Indonesia	0,000%	(128.429.601)	-
PT Karya Digital Madani	0,000%	-	-
			4.349.847.695

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

28. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2020 adalah :

The non controlling-interest over income (loss) of subsidiaries during 2020 are:

Laporan Posisi Keuangan/Consolidated Statements of Financial Position

Entitas Anak	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	201.327.370.360	1.830.249	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	429.531.487.915	1.178.246	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	561.445.045.230	11.699.538.164	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.031.434.481.433	53.486.860	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	22.019.565.538	1.664.414.819	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	47.845.029.359	456.440.770	PT Mitra Tekno Madani
			13.876.889.108	

Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax

Entitas Anak	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/ Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	12.275.862.676	111.599	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	30.798.855.867	83.427	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	7.415.439.432	110.087	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.602.515.688	748.242	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.256.512.746	411.583.851	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	185.171.887	1.924.298	PT Mitra Tekno Madani
			414.561.504	

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income

Entitas Anak	%	Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan/ Comprehensive Income Attributable	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	12.275.862.676	111.599	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	30.223.011.060	85.008	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	7.427.016.265	110.087	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.603.107.427	748.242	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.115.838.505	411.583.851	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	186.825.069	1.924.298	PT Mitra Tekno Madani
			414.563.085	

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MODAL SAHAM

29. SHARE CAPITAL

		2021				
	Total Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share	Total Nilai Saham/ Total Share Value	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership		
Modal Dasar					Authorized Capital	
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia	
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:	
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00001%	Share of series A Dwiwarna	
Saham seri B					Share of series B	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.199.999	1.000.000	9.199.999.000.000	99,99999%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Total Modal Dasar	9.200.000	-	9.200.000.000.000	100,00000%	Total Authorized Capital	
Modal Ditempatkan dan Disetor					Issued and Fully Paid in Capital	
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia	
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:	
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00003%	Share of series A Dwiwarna	
Saham seri B					Share of series B	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.799.999	1.000.000	3.799.999.000.000	99,99997%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	-	3.800.000.000.000	100,00000%	Total Shares Issued and Fully Paid in Capital	
2020						
	Total Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share	Total Nilai Saham/ Total Share Value	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership		
Modal Dasar					Authorized Capital	
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia	
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:	
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00001%	Share of series A Dwiwarna	
Saham seri B	9.199.999	1.000.000	9.199.999.000.000	99,99999%	Share of series B	
Total Modal Dasar	9.200.000	-	9.200.000.000.000	100,00000%	Total Authorized Capital	
Modal Ditempatkan dan Disetor					Issued and Fully Paid in Capital	
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia	
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:	
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00004%	Share of series A Dwiwarna	
Saham seri B	2.299.999	1.000.000	2.299.999.000.000	99,99996%	Share of series B	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	2.300.000	-	2.300.000.000.000	100,00000%	Total Shares Issued and Fully Paid in Capital	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-308/MBU/09/2021, Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 26 tanggal 21 September 2021, oleh Notaris Hadijah, S.H. Akta tersebut telah disahkan dalam Akta Penegasan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 59 tanggal 28 Oktober 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani menjadi PT Permodalan Nasional Madani.
2. Menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yakni sebanyak 3.799.999 saham dengan nilai sebesar Rp3.799.999.000.000.
3. Perubahan struktur pemegang saham meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp3.800.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp1.000.000 oleh Negara Republik Indonesia merupakan sisa setoran lama setelah dikurangi pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia.
 - b. Rp3.799.999.000.000 oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan setoran modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan masih dalam proses persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. S-1228/MBU/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 12 tanggal 12 Januari 2021, oleh Notaris Hadijah, S.H. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp9.200.000.000.000 terbagi atas 9.200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 3.800.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp3.800.000.000.000.
3. Dari modal dasar yang sudah ditempatkan tersebut, seluruhnya telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

29. SHARE CAPITAL (continued)

In accordance with the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number: SK-308/MBU/09/2021, the Company amended its articles of association which have been ratified in Notarial Deed No. 26 dated September 21, 2021, by Notary Hadijah, S.H. The deed has been ratified in the Deed of Affirmation in the Deed of Statement of Shareholders' Decision Number: 59 dated 28 October 2021 made before Hadijah, S.H., Notary in Jakarta. The changes are as follows:

1. Approved the change of the Company's name from a Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani to PT Permodalan Nasional Madani.
2. Approved the change in the Company's shareholder structure as a result of the transfer of all series B shares of the Republic of Indonesia to and in the context of increasing the participation of the Republic of Indonesia's state capital in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which amounted to 3,799,999 shares with a value of Rp3,799,999,000,000.
3. Changes in shareholder structure include the fulfillment of the Company's total issued and paid-up capital of Rp3,800,000,000,000 with details as follows:
 - a. Rp1,000,000 by the Republic of Indonesia is the remainder of the old deposit after deducting the transfer of all series B shares of the Republic of Indonesia.
 - b. Rp3,799,999,000,000 by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is a paid-up capital originating from the transfer of all Series B shares of the Republic of Indonesia.

Amendments to the Company's Articles of Association are still in the process of being approved by the Ministry of Law and Human Rights.

In accordance with the SOE Menteri Decree at the GMS No. S-1228/MBU/12/2020 dated December 29, 2020 the Company amended its articles of association which was ratified in the Notarial Deed No. 12 dated 12 January 2021, by Notary Hadijah, S.H. The changes are as follows:

1. The authorized capital of the Company is set at Rp9,200,000,000,000, divided into 9,200,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000.
2. Of the authorized capital, 3,800,000 shares or a total of Rp3,800,000,000,000 have been subscribed and subscribed by the Republic of Indonesia.
3. From the issued share capital, all of the shares had been fully paid by the Government of the Republic of Indonesia.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH-01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: S-1033/MBU/11/2020 tanggal 17 November 2020 Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 28 tanggal 20 November 2020, oleh Notaris Hadijah, S.H. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp9.200.000.000.000 terbagi atas 9.200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 2.300.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp2.300.000.000.000.
3. Dari modal dasar yang sudah ditempatkan tersebut, seluruhnya telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: S-315/MBU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang sudah disahkan dalam Akta Notarial No.12 tanggal 6 Juni 2016, oleh Notaris Hadijah, SH., perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sesuai. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni melalui Surat Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 23 Juni 2016.

Saham Perusahaan yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A Dwiwarna dan saham seri B. Saham seri A Dwiwarna hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan memiliki hak-hak khusus sesuai yang tercantum pada akta notarial tersebut yang tidak dimiliki oleh pemegang saham seri B.

29. SHARE CAPITAL (continued)

The amendment to the Company's Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the Decree No. AHU-AH.01.03-0033759 dated January 20, 2021.

In accordance with the SOE Menteri Decree at the GMS Number: S-1033/MBU/11/2020 dated November 17, 2020 the Company amended its articles of association which was ratified in the Notarial Deed No. 28 dated 20 November 2020, by Notary Hadijah, S.H. The changes are as follows:

1. The authorized capital of the Company is set at Rp9,200,000,000,000, divided into 9,200,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000.
2. Of the authorized capital, 2,300,000 shares or a total of Rp2,300,000,000,000 have been subscribed and subscribed by the Republic of Indonesia.
3. Of the issued authorized capital, all of them have been fully paid-up by the Republic of Indonesia.

The amendment to the Company's Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the Decree No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 27 November 2020.

In accordance with the Decree of the Minister of State Enterprises as the AGM No.S-315/MBU/05/2016 dated May 23, 2016, the Company changed its articles of which have been ratified in No. 12 notarial deed dated June 6, 2016, by Notary Hadijah, SH., Concerning Changes type of Shares and Amendment of Articles of Association of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) accordingly. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia namely through Decree No. AHU-0011894.AH.01.02.TAHUN 2016 dated June 23, 2016.

The company shares were originally without the series to be composed of shares of series A Dwiwarna and shares of series B. Shares Series A Dwiwarna can only be owned by the Republic of Indonesia and has special rights as stated in the notarial deed that is not owned by the holders of shares of series B.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notarial Nomor: 23 tanggal 29 Januari 2016, oleh Notaris Hadijah, S.H., perihal Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yakni menyetujui perubahan Modal Dasar Perusahaan menjadi Rp5.200.000.000.000 yang terdiri dari 5.200.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan perubahan Penyertaan Modal Negara menjadi Modal Disetor sebesar Rp1.000.000.000.000, sehingga jumlah Modal Disetor menjadi Rp1.300.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni melalui Surat Keputusan No. AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 15 Februari 2016.

30. PENYERTAAN MODAL NEGARA

	2021
Penyertaan Modal Negara - Tahap I	-
Penyertaan Modal Negara - Tahap II	1.500.000.000.000
	1.500.000.000.000
Konversi ke modal saham	(1.500.000.000.000)
Total	-

Perusahaan telah melakukan konversi dari Penyertaan Modal Negara Tahap II senilai Rp1.500.000.000.000 menjadi modal saham pada tanggal 20 Januari 2021. (lihat Catatan 29 - Modal Saham)

Perusahaan menerima penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp1.500.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

Perusahaan telah melakukan konversi dari Penyertaan Modal Negara Tahap I senilai Rp1.000.000.000.000 menjadi modal saham pada tanggal 27 November 2020. (lihat Catatan 29 - Modal Saham)

Perusahaan menerima penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

29. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Notarial Deed Number: 23 dated January 29, 2016, by Notary Hadijah, S.H, regarding the Decision Statement of PT Permodalan Nasional Madani (Persero), namely approving the change in the Company's Authorized Capital to Rp5,200,000,000,000 consisting of 5,200,000 shares, with nominal value of Rp1,000,000 and change of State Equity Participation to Paid-up Capital of Rp1,000,000,000,000 so that the total Paid-up Capital becomes Rp1,300,000,000,000. The amendment deed has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, namely through Decree No. AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016 dated February 15, 2016.

30. STATE CAPITAL INVESTMENT

	2020	
	1.000.000.000.000	State Capital Investment Thranck I
	1.500.000.000.000	State Capital Investment Thranck II
	2.500.000.000.000	
	(1.000.000.000.000)	Convert to share capital
Total	1.500.000.000.000	Total

The Company has converted from the State Equity Participation Phase II amounting to Rp1,500,000,000,000 into share capital on January 20, 2021. (see Note 29 - Share Capital)

The Company received additional State Equity Investment (PMN) from the Government of the Republic of Indonesia on December 3, 2020 amounting to Rp1,500,000,000,000 in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 63 of 2020 dated November 2, 2020 concerning Additional State Capital Participation from the Government of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

The Company has converted from the State Equity Participation Phase I amounting to Rp1,000,000,000,000 into share capital on November 27, 2020. (see Note 29 - Share Capital)

The Company obtains an additional State Capital Investment ("PMN") of the Government of the Republic of Indonesia on July 29, 2020 amounted to Rp1,000,000,000,000 accordance with the Indonesian Government Regulation No. 31 Year 2020 dated July 6, 2020 regarding the Increase in Investment by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's Capital Stock PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. CADANGAN UMUM DAN CADANGAN BERTUJUAN

Cadangan umum Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp537.241.280.550 dan 537.241.280.550. Cadangan bertujuan Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp30.632.515.845 dan Rp30.632.515.845.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 tanggal 14 April 2021, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp358.180.083.833 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

32. DIVIDEN DAN DANA PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Dividen

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 tanggal 14 April 2021, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp358.180.083.833 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp973.231.336.153 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

Perusahaan tidak memiliki saldo utang dividen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 tanggal 14 April 2021, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp358.180.083.833 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diamanatkan untuk mengalokasikan laba untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2021.

31. GENERAL RESERVE AND APPROPRIATED RESERVE

The Company's general reserve as of December 31, 2021 and 2020 amounting to 537,241,280,550 and Rp537,241,280,550, respectively. The Company's appropriated reserve as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp30,632,515,845 and Rp30,632,515,845, respectively.

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 dated April 14, 2021, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2020 Parent Entity amounting to Rp358,180,083,833 entirely determined as Retained Earnings.

32. DIVIDEND AND FUND FOR PARTNERSHIPS AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PKBL)

Dividend

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 dated April 14, 2021, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2020 Parent Entity amounting to Rp358,180,083,833 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not required to pay dividends to the Shareholders.

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/VI/20 dated June 29, 2020, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2019 Parent Entity amounting to Rp973,231,336,153 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not required to pay dividends to the Shareholders.

The Company has no outstanding balance of the dividend payable on December 31, 2021 and 2020.

Partnerships and Community Development Program

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 dated April 14, 2021, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2020 Parent Entity amounting to Rp358,180,083,833 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not mandated to allocate profits for the Partnership and Community Development Program in 2021.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. DIVIDEN DAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
BINA LINGKUNGAN (PKBL) (lanjutan)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(lanjutan)

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp973.231.336.153 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diamanatkan untuk mengalokasikan laba untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2020.

32. DIVIDEND AND FUND FOR PARTNERSHIPS AND
COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PKBL)
(continued)

Partnerships and Community Development
Program (continued)

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/VI/20 dated June 29, 2020, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2019 Parent Entity amounting to Rp973,231,336,153 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not mandated to allocate profits for the Partnership and Community Development Program in 2020.

33. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	2021	2020
Pendapatan pembiayaan Mekaar	6.926.854.873.118	4.176.089.073.652
Pendapatan dari Unit ULaMM	1.418.481.224.908	1.308.139.668.285
Pendapatan dari modal ventura	74.848.332.704	115.038.110.100
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta Lembaga Keuangan Mikro	3.973.825.481	4.151.946.648
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	997.387.692	1.845.551.953
Total	8.425.155.643.903	5.605.264.350.638

33. INTEREST AND SHARIA REVENUE

Income from Mekaar financing
Income from ULaMM
Income from venture capital
Income from micro, small and medium, and microfinance institution credit financing
Income from Micro, Small, Medium financing

Total

34. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

	2021	2020
Beban bunga bank	908.652.173.238	552.672.976.765
Beban bunga obligasi	790.662.238.927	909.781.528.489
Beban bagi hasil sukuk	485.249.991.381	-
Beban bunga MTN, PN dan Sukuk	121.437.596.758	227.210.827.225
Beban bunga non-bank	79.019.867	142.526.169
Total	2.306.081.020.171	1.689.807.858.648

34. INTEREST AND SHARIA EXPENSES

Bank interest expense
Bond interest expense
Sukuk profit sharing
MTN, PN and Sukuk interest expense
Non-bank Interest expense

Total

35. PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO, JASA GIRO,
DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA

	2021	2020
Pendapatan jasa giro	77.060.616.490	48.533.050.740
Pendapatan bunga deposito	19.663.866.906	57.246.625.746
Pendapatan dividen	-	818.387.395
Total	96.724.483.396	106.598.063.881
Keuntungan dari efek berupa: Kontrak Pengelolaan Dana Reksadana	11.540.590.182 2.365.144.906	860.483.198 9.817.783.919
Total	13.905.735.088	10.678.267.117

35. REVENUES FROM DEPOSIT INTEREST,
CURRENT SERVICES, AND OTHER OPERATING
REVENUES

Revenues from current services
Revenues from deposit interest
Revenue from dividend

Total

*Gain from securities:
Discretionary fund
Mutual fund*

Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. BEBAN USAHA

	2021	2020
Beban administrasi dan umum:		
Gaji dan tunjangan	2.950.630.117.869	2.305.329.646.819
Kerugian penurunan nilai piutang	606.795.004.589	304.760.280.140
Tantiem, jasa produksi, dan insentif	493.673.167.064	273.860.159.858
Beban kantor	308.774.988.831	188.767.691.470
Asuransi kredit	273.081.731.837	146.490.133.446
Sewa kantor, kendaraan, dan rumah dinas	189.078.047.413	93.089.665.552
Penyusutan (Catatan 13)	164.878.765.104	281.884.384.268
Jasa profesional	77.825.983.569	31.260.251.732
Sistem informasi	77.521.393.039	58.003.995.606
Amortisasi (Catatan 15)	77.515.471.772	72.654.123.598
Pemeliharaan dan perbaikan	59.914.364.277	29.235.320.470
Pendidikan dan latihan	21.490.172.412	15.667.190.553
Jamuan	11.138.279.542	6.697.681.566
Beban pemasaran	10.223.782.833	9.619.563.456
Pengembangan kapasitas usaha	8.947.082.058	9.307.298.433
Perjalanan dan transportasi	6.887.815.879	5.794.773.570
Biaya agen penjual reksadana	6.711.759.435	6.380.232.096
Proyek operasional	1.120.674.583	668.235.541
Pengendalian Risiko	178.833.350	114.870.345
Imbalan kerja	(6.524.548.060)	28.396.991.600
Lain-lain	6.077.232.911	2.299.652.367
Total	5.345.940.120.307	3.870.282.142.486

36. OPERATING EXPENSES

Administration and general expenses:
Salaries and allowances
Loss on impairment
Bonus and incentives
Office expenses
Insurance Credit
Rent for office, vehicles, and home office
Depreciation (Note 13)
Professional fee
Information system
Amortization (Note 15)
Maintenance and repairs
Education and training
Entertainment
Marketing expenses
Capacity building
Travel and transportation
Agency fee of mutual fund
Operational projects
Risk Controlling
Employee benefits
Miscellaneous
Total

37. LAIN-LAIN - BERSIH

	2021	2020
Pendapatan lain-lain	151.800.982.254	194.568.113.529
Beban lain-lain	(9.512.819.959)	(11.454.963.084)
Lain-lain - bersih	142.288.162.295	183.113.150.445

37. OTHERS - NET

Other income
Other expenses
Others - net

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN tanggal 5 Juli 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN melalui BUMN Khusus tanggal 10 Desember 2018, Perusahaan ditunjuk sebagai BUMN Khusus yang berhak mendapatkan hibah atau pinjaman tanpa bunga dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina.

Based on Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community-Owned Enterprises Community Development Program dated July 5, 2017 and based on the letter from Deputy of Business Infrastructure Sector of the Ministry of SOEs No. SK-03/D7.MBU/12/2018 concerning Implementation Guidelines for Fund Distribution of SOEs' Partnership Programs through Special SOEs on December 10, 2018, The Company is designated as Special SOEs entitled to receive grants or interest-free loans from the Partnership Program from SOEs.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

Perusahaan ditunjuk sebagai BUMN Khusus, karena Perusahaan adalah BUMN yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian rakyat melalui pemberian pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil. Tujuan dari penyaluran dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus adalah karena masih terdapat dana Program Kemitraan yang tidak tersalurkan sehingga penyaluran dana tersebut belum optimal serta kurangnya kompetensi BUMN Non-Jasa Keuangan dalam penyaluran dana Program Kemitraan pada usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dan PT Bumi Suksesindo Nomor 120/PKS/PNM/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Hibah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Guna Pengembangan Usaha Mikro, Kecil melalui Penyaluran Modal Mikro serta Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Usaha; maka Perusahaan berhak untuk menerima hibah atas Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dari PT Bumi Suksesindo sebesar Rp1.000.000.000 yang akan disampaikan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pendapatan hibah yang diterima Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp61.000.000.000 dan Rp189.394.478.322.

	2021	2020
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	127.518.478.322
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	50.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	10.000.000.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk	-	1.776.000.000
Perum LPPNPI	-	100.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bumi Suksesindo	1.000.000.000	-
Total	61.000.000.000	189.394.478.322

37. OTHERS - NET (continued)

The Company is designated as a Special SOE, because the Company is a SOEs that is engaged in the empowerment of the people's economy through the provision of capital loans and/or guidance to micro and small businesses. The purpose of the distribution of the Partnership Program funds through the Special SOEs is because there are still funds from the Partnership Program that is not channeled so that the distribution of funds is not optimal as well as the lack of competency of Non-Financial Services State Enterprises in the distribution of Partnership Program funds to micro and small businesses.

Based on the Cooperation Agreement between the Company and PT Bumi Suksesindo Number 120/PKS/PNM/VIII/2021 dated Agustus 2, 2021 concerning Grants for Community Development and Empowerment Funds for Micro, Small Business Development through Micro Capital Distribution and Training and Assistance for Business Development; then the Company is entitled to receive a grant of the Community Development and Empowerment Fund from PT Bumi Suksesindo in the amount of Rp1,000,000,000 which will be submitted in 2 (two) stages in accordance with the terms and conditions set forth in the agreement.

Income from grant received by the Company as a Special SOE for the period ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp61,000,000,000 and Rp189,394,478,322.

Related Parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk
Perum LPPNPI

Third Party
PT Bumi Suksesindo

38. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

	2021	2020
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	(5.665.228.119)	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	7.215.917.942	(6.922.673.712)
Total	1.550.689.823	(6.922.673.712)

38. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Item that will not be reclassified to profit or loss
Unrealized loss from financial assets available for sales

Item that will not be reclassified to profit or loss
Actuarial gain on employee benefit program

Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

39. LABA PER SAHAM

Laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

	2021	2020
Laba per saham:		
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	840.778.080.226	358.180.083.833
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar - dasar	3.800.000	1.466.667
Laba per saham - dasar (Rupiah penuh)	221.257	244.214

39. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing profit attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Earnings per share:
Profit attributable to owners of the parent

Weighted average number of outstanding common stock - basic

Earning per share - basic (full amount)

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi:

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The nature of relationship with the related parties is summarized as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ The Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham pengendali/ Controlling shareholder	Surat Utang Pemerintah/ Government Promissory Notes
PT BPRS PNM Patuh Beramal	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan/ PT PNM has more than 50% of the Company's shares	Penyertaan Modal/ Capital Financing
PT BPRS PNM Mentari	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan/ PT PNM has more than 50% of the Company's shares	Penyertaan Modal/ Capital Financing
PT BPRS Haji Miskin	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan/ PT PNM has more than 50% of the Company's shares	Penyertaan Modal/ Capital Financing
PT Syarikat Takaful Indonesia	PT PNM memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan/ PT PNM has less than 20% of the Company's shares	Investasi pada entitas asosiasi/ Investment in associates
PT BPR Rizky Barokah	PT PNM VS memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan/ PT PNM VS has more than 50% of the Company's shares	Deposito Berjangka/ Time Deposits Penyertaan Modal/ Capital Financing
PT BPRS Ampek Angkek Candung	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan/ PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares	Investasi pada entitas asosiasi/ Investment in associates
PT BPRS Daya Artha Mentari	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan/ PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares	Investasi pada entitas asosiasi/ Investment in associates
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayan	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan/ PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares	Investasi pada entitas asosiasi/ Investment in associates

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan) :

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang lembaga keuangan/ <i>Financial institution borrowings</i>
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang lembaga keuangan/ <i>Financial institution borrowings</i>
Pusat Investasi Pemerintah	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Kas dan setara kas, Utang bank/ <i>Cash and cash equivalent, Bank borrowings</i>
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang lembaga keuangan/ <i>Financial institution borrowings</i>

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

The nature of relationship with the related parties is summarized as follows (continued):

Transaksi dengan pihak berelasi, diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak lainnya.

Transactions with the related parties is treated the same as transactions with the third parties.

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	2021	2020	
Kas di Bank			Cash in Bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	978.752.142.596	772.526.865.830	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	501.282.555.667	1.156.308.078.779	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	363.783.933.975	274.685.041.463	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	126.231.304.238	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.577.333.798	195.965.032.117	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	157.097.576	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Total Kas di Bank	2.024.784.367.850	2.399.485.018.189	Total Cash in Bank
Deposito Berjangka			Time Deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	326.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.050.000.000	115.550.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	42.500.000.000	280.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.000.000.000	9.650.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Deposito Berjangka	436.550.000.000	405.200.000.000	Total Time Deposits
Total Kas dan Setara Kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Total Cash and Cash Equivalent
Persentase terhadap total aset	9,20%	14,09%	Percentage to total assets

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Portofolio Efek Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (Catatan 5)

b. Portfolio of Securities Measured at Fair Value Through Profit or Loss (Note 5)

	2021	2020	
Reksadana			Mutual Funds
RDPNU PNM Dana Tunai	1.001.272.851.473	200.050.410.959	RDPNU PNM Dana Tunai
RDSPT PNM Multiekspor I	11.357.440.000	24.346.094.400	RDSPT PNM Multiekspor I
RDS Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara	10.498.494.000	-	RDS Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara
PNM Dana Kas Platinum	10.139.952.000	130.053.595.496	PNM Dana Kas Platinum
RDSPT Mikro BUMN Seri V	10.109.681.000	5.062.436.000	RDSPT Mikro BUMN Seri V
RD PNM PUAS	10.085.997.611	-	RD PNM PUAS
RD PNM Dana Maxima 2	10.002.887.000	-	RD PNM Dana Maxima 2
Reksa Dana PNM Money Market Fund USD	8.186.829.087	-	Reksa Dana PNM Money Market Fund USD
PNM Saham Agresif	7.402.481.898	7.520.193.328	PNM Saham Agresif
RD PNM Syariah	6.314.668.751	-	RD PNM Syariah
PNM Saham Unggulan	6.180.225.257	6.092.614.384	PNM Saham Unggulan
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.512.103.374	5.529.115.615	RDPT PNM Jamkrindo Fund
RDPT PNM Multisektoral VI	5.124.865.000	-	RDPT PNM Multisektoral VI
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016	5.120.726.500	5.134.946.500	RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016
RDSPT Multisektoral V	5.115.286.500	5.097.470.500	RDSPT Multisektoral V
RDPT PNM Pos Indonesia	5.105.209.000	5.114.844.500	RDPT PNM Pos Indonesia
RDSPT Mikro BUMN Seri IV	5.091.353.000	5.096.335.000	RDSPT Mikro BUMN Seri IV
RDPT PNM Multisektoral VII	5.073.948.500	-	RDPT PNM Multisektoral VII
RDSPT PNM Multisektoral XII	5.061.009.500	5.068.335.000	RDSPT PNM Multisektoral XII
RDSPT Mikro BUMN Seri II	5.058.395.500	5.068.666.000	RDSPT Mikro BUMN Seri II
RD PNM ETF CORE LQ45	5.052.969.383	11.432.704.000	RD PNM ETF CORE LQ45
RDSPT PNM Multisektoral XI	5.051.718.000	5.021.105.500	RDSPT PNM Multisektoral XI
RDPT PNM Multisektoral X	5.000.000.000	5.052.212.000	RDPT PNM Multisektoral X
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	5.000.000.000	5.019.009.000	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II
RDPT PNM Multisektoral IX	5.000.000.000	5.018.171.000	RDPT PNM Multisektoral IX
RDPT Multisektoral III	4.995.123.000	4.971.690.500	RDPT Multisektoral III
RDSPT PNM Indah Karya	4.962.724.500	5.013.947.500	RDSPT PNM Indah Karya
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.841.321.500	4.838.384.500	RDPT PNM Perikanan Nusantara
RDPT PNM Multisektoral XVI	4.835.541.000	4.757.761.500	RDPT PNM Multisektoral XVI
PNM Ekuitas Syariah	386.148.606	429.162.637	PNM Ekuitas Syariah
RDPT Multisektoral I	-	5.018.305.500	RDPT Multisektoral I
RD PNM Amanah Syariah	-	36.686.019.870	RD PNM Amanah Syariah
RDSPT Mikro BUMN Seri III	-	10.047.453.000	RDSPT Mikro BUMN Seri III
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN I	-	5.157.008.500	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN I
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	-	5.036.018.000	RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima	-	1.038.738.074	RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima
Total	1.182.939.950.940	523.772.748.763	Total
Persentase terhadap total aset	2,70%	1,65%	Percentage to total assets

c. Pinjaman yang Diberikan (Catatan 6)

c. Loans (Note 6)

	2021	2020	
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277.243.874	277.243.874	MSE Financing for MFI/S
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277.243.874)	(277.243.874)	Less: Allowance for Impairment Losses
Total	-	-	Total
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,00%	Percentage to total assets

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

**d. Piutang kegiatan manajer investasi
(Catatan 10.a)**

**d. Investment manager activities receivables
(Note 10.a)**

	2021	2020	
Piutang management fee			Management fee receivables
RDSPT PNM Indah Karya	2.455.463.700	1.138.293.089	RDSPT PNM Indah Karya
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI	982.804.465	-	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI
RDSPT PNM Multi Ekspor 1	572.366.912	599.646.126	RDSPT PNM Multi Ekspor 1
KPD - PT PNM (Persero)	401.946.782	324.649.484	KPD - PT PNM (Persero)
RDPT PNM Multisektoral VII	329.262.112	481.662.956	RDPT PNM Multisektoral VII
RDPT PNM Jamkrindo Fund	280.299.858	303.381.317	RDPT PNM Jamkrindo Fund
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	252.455.846	-	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN
RD PNM Saham Unggulan	208.395.706	202.519.751	RD PNM Saham Unggulan
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	207.175.057	313.302.877	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II
RD PNM Dana Bertumbuh	205.702.872	222.305.797	RD PNM Dana Bertumbuh
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VIII	202.960.825	-	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VIII
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V	162.236.868	231.348.311	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V
RDPT PNM Multisektoral X	151.395.308	151.106.748	RDPT PNM Multisektoral X
RD PNM Dana Kas Platinum 2	108.745.022	84.118.486	RD PNM Dana Kas Platinum 2
RDPT PNM Multisektoral XII	98.864.122	98.904.534	RDPT PNM Multisektoral XII
RDSPU PNM Faaza	96.182.854	98.321.974	RDSPU PNM Faaza
RD PNM Amanah Syariah	86.335.886	50.325.782	RD PNM Amanah Syariah
RDPT PNM Multisektoral IX	52.586.230	79.542.463	RDPT PNM Multisektoral IX
RDSPT PNM Multisektoral V	35.162.468	48.166.554	RDSPT PNM Multisektoral V
RD PNM Saham Agresif	32.806.681	33.175.520	RD PNM Saham Agresif
RD PNM ETF Core LQ45	31.804.362	21.624.799	RD PNM ETF Core LQ45
PNM Surat Berharga Negara 90	31.720.357	55.564.710	PNM Surat Berharga Negara 90
RDPT PNM Multisektoral XI	27.257.947	73.700.470	RDPT PNM Multisektoral XI
RD Pasar Uang PNM Dana Maxima	25.434.117	-	RD Pasar Uang PNM Dana Maxima
RD PNM Ekuitas Syariah	24.315.374	28.877.399	RD PNM Ekuitas Syariah
RD PNM Dana Sejahtera 2	23.722.273	-	RD PNM Dana Sejahtera 2
PNM Surat Berharga Negara II	21.783.163	20.618.236	PNM Surat Berharga Negara II
RD PNM Dana Kas Likuid	20.824.461	34.076.841	RD PNM Dana Kas Likuid
RDPN PNM Dana Maxima	19.373.832	-	RDPN PNM Dana Maxima
RDT PNM Terproteksi Investa 29	17.124.908	72.967.060	RDT PNM Terproteksi Investa 29
RD PNM Dana Kas Platinum	16.728.677	7.524.509	RD PNM Dana Kas Platinum
RD PNM Dana Tunai	14.822.979	33.063.084	RD PNM Dana Tunai
RD PNM Syariah	14.003.834	6.126.487	RD PNM Syariah
RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah	13.959.846	14.647.822	RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah
RD PNM PUAS	12.592.602	-	RD PNM PUAS
RDSPT PNM Kaffah	11.263.409	33.138.134	RDSPT PNM Kaffah
RDPT Multisektoral XVI	9.169.908	19.919.806	RDPT Multisektoral XVI
RDSPU PNM Falah	5.999.595	11.519.765	RDSPU PNM Falah
RDSPU PNM Falah 2	5.051.260	10.608.874	RDSPU PNM Falah 2
RDT PNM Terproteksi Investa 30	5.002.691	6.228.784	RDT PNM Terproteksi Investa 30
RD PNM Terproteksi Dana Investa 11	4.256.089	6.221.663	RD PNM Terproteksi Dana Investa 11
RDT PNM Terproteksi Investa 28	2.189.588	7.064.309	RDT PNM Terproteksi Investa 28
RDSPU PNM Arafah	1.763.694	134.345.564	RDSPU PNM Arafah
RDT PNM Terproteksi Investa 31	1.748.619	10.215.902	RDT PNM Terproteksi Investa 31
PNM Surat Berharga Negara	1.649.269	32.812.196	PNM Surat Berharga Negara
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III	35.000	417.686.868	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	32	232.312.595	RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19	2	2	RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II	2	2	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II
RDPT PNM Perikanan Nusantara	-	883.636.364	RDPT PNM Perikanan Nusantara
RDPT PNM Multisektoral VI	-	340.820.926	RDPT PNM Multisektoral VI
RDST PNM PNM Misbah 4	-	338.177.777	RDST PNM PNM Misbah 4
RD Terproteksi PNM Investa 25	-	161.230.977	RD Terproteksi PNM Investa 25
RDSPT Mikro BUMN Seri II	-	160.675.583	RDSPT Mikro BUMN Seri II
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016	-	117.164.740	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	-	114.845.514	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV
RDPT PNM POS Indonesia	-	91.365.224	RDPT PNM POS Indonesia
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	-	39.048.761	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN
RD PNM Terproteksi Dana Investa 3	-	23.399.394	RD PNM Terproteksi Dana Investa 3
RD PNM Pasar Uang Syariah	-	2.286.988	RD PNM Pasar Uang Syariah
Total	7.286.747.464	8.024.289.898	Total
Persentase terhadap total aset	0,02%	0,03%	Percentage to total assets

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

e. Portofolio Efek Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Catatan 14)

e. Portfolio of Securities Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (Note 14)

	2021	2020	
<u>Entitas Induk</u>			<u>Parent Entity</u>
Saham PT Syarikat Takaful Indonesia	5.785.108.997	5.785.108.997	Shares of PT Syarikat Takaful Indonesia
Kerugian yang belum direalisasi	(5.785.108.997)	(119.880.878)	Unrealized Loss
Total	-	5.665.228.119	Total
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,02%	Percentage to total assets

f. Utang Bank dan Lembaga Keuangan (Catatan 18)

f. Bank and Financial Institution Borrowings (Note 18)

	2021	2020	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.899.682.853.634	1.700.260.184.481	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	897.316.847.703	62.520.260.004	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	744.630.751.862	626.861.056.899	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	495.900.000.000	266.666.666.669	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	473.841.787.830	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	177.147.691.698	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pengelola Dana Bergulir			Revolving Fund Management Institution
- KUMKM	26.437.480.000	15.041.660.000	- CMSMEs
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.758.429.234	-	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Total	4.732.715.841.961	2.671.349.828.053	Total
Persentase terhadap total liabilitas	12,67%	10,24%	Percentage to total liabilities

g. Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri (Catatan 21)

g. Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and Foreign Credit Institution (Note 21)

	2021	2020	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.917.715.190.015	3.035.065.437.303	Indonesia Investment Agency (PIP)
Persentase terhadap total liabilitas	10,49%	11,64%	Percentage to total liabilities

h. Utang Lain-Lain (Catatan 24)

h. Other Payables (Note 24)

	2021	2020	
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746	406.279.746	BPJS Ketenagakerjaan
Persentase terhadap total liabilitas	0,00%	0,00%	Percentage to total liabilities

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020, and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

h. Utang Lain-Lain (Catatan 24) (lanjutan)

Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Imbalan kerja jangka pendek		
Dewan Komisaris	10.313.585.187	11.610.516.805
Dewan Direksi	27.001.042.556	25.056.340.171
Total	37.314.627.743	36.666.856.976

Saldo utang, piutang dan transaksi lainnya dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

- Selama tahun 2021 dan 2020 Perusahaan melakukan transaksi sewa tenaga kerja masing-masing sebesar Rp918.098.503.559 dan Rp1.473.245.462.839 kepada PT Mitra Utama Madani dan PT Micro Madani Institute.
- PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas pendanaan jangka panjang yang diwakilkan oleh PT PNM Investment Management berupa investasi. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 11,5% per tahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp113.000.000.000.

Tidak terdapat anggota atau kelompok direksi, komisaris, pemegang saham utama yang juga merangkap sebagai karyawan dan manajemen kunci.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat No. S-711/KO.052/2020 perihal Pencatatan Pengambilalihan (Akuisisi) dan Pemegang Saham Pengendali PT BPRS Haji Miskin. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS Haji Miskin berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Acquisition			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	26.742	2.674.200.000	51,95	(26.742)	(2.674.200.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	26.742	2.674.200.000	26.742	2.674.200.000	51,95
Pemegang Saham Lainnya	24.734	48.801.800.000	48,05	-	-	24.734	48.801.800.000	48,05
Total	51.476	51.476.000.000	100,00	-	-	51.476	51.476.000.000	100,00

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

h. Other Payables (Note 24) (continued)

Remuneration payment to Board of Commissioner and Board of Directors as a follows:

	2021	2020
Short-term employee benefits		
Board of Commissioners	10.313.585.187	11.610.516.805
Board of Director	27.001.042.556	25.056.340.171
Total	37.314.627.743	36.666.856.976

As of December 31, 2021 and 2020 the balances of debts, receivables and other transactions with related parties are as follows:

- During 2021 and 2020 the Company entered into a lease labor transaction amounting to Rp918,098,503,559 and Rp1,473,245,462,839, respectively to PT Mitra Utama Madani and PT Micro Madani Institute.
- PT Mitra Bisnis Madani has a long-term funding facility represented by PT PNM Investment Management in the form of investment. The loan interest rate is 11.5% per annum. The balance on December 31, 2017 amounted to Rp113,000,000,000.

There are no member or Company of directors, commissioners, major shareholder who also doubles as the employees and key management.

On December 18, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. S-711/KO.052/2020 concerning the Implementation of The Takeover (Acquisition) of PT BPRS Haji Miskin. The composition of the shareholding in PT BPRS Haji Miskin changed to the following:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

h. Utang Lain-Lain (Catatan 24) (lanjutan)

h. Other Payables (Note 24) (continued)

Pada tanggal 17 September 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. SRRB-39/KR.0202/2020 perihal Pelaksanaan Pengambilalihan (Akuisisi) PT BPRS PNM Mentari. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS PNM Mentari berubah menjadi sebagai berikut:

On September 17, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. SRRB-39/KR.0202/2020 concerning the Implementation of The Takeover (Acquisition) of PT BPRS PNM Mentari. The composition of the shareholding in PT BPRS PNM Mentari changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Acquisition			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	616.667	616.667.000	64,66	(616.667)	(616.667.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	616.667	616.667.000	616.667	616.667.000	64,66
Pemegang Saham Lainnya	337.049	337.049.000	35,34	-	-	337.049	337.049.000	35,34
Total	953.716	953.716.000	100,00	-	-	953.716	953.716.000	100,00

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. S-612/KO.0801/2020 perihal Persetujuan Permohonan Izin Pengambilalihan Saham pada PT BPRS PNM Patuh Beramal berubah menjadi sebagai berikut:

On August 28, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. S-612/KO.0801/2020 concerning Approval of the License Application for Share Distribution at PT BPRS PNM Patuh Beramal changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Acquisition			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	496.420	49.642.000.000	76,37	(496.420)	(49.642.000.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	496.420	49.642.000.000	496.420	49.642.000.000	76,37
Pemegang Saham Lainnya	153.580	15.358.000.000	23,63	-	-	153.580	15.358.000.000	23,63
Total	650.000	65.000.000.000	100,00	-	-	650.000	65.000.000.000	100,00

Pada tanggal 26 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat No. S-258/KR.0113/2020 perihal Laporan Pelaksanaan Pengambilalihan Kepemilikan Saham (Akuisisi) PT BPR Rizky Barokah. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPR Rizky Barokah berubah menjadi sebagai berikut:

On March 26, 2020, the Financial Services Authority issued a letter No. S-258/KR.0113/2020 concerning the Report on the Implementation of the Share Ownership (Acquisition) of PT BPR Rizky Barokah. The composition of share ownership in PT BPR Rizky Barokah changes to be as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	520.000	5.200.000.000	86,67	(520.000)	(5.200.000.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	520.000	5.200.000.000	520.000	5.200.000.000	86,67
Pemegang Saham Lainnya	80.000	800.000.000	13,33	-	-	80.000	800.000.000	13,33
Total	600.000	6.000.000.000	100,00	-	-	600.000	6.000.000.000	100,00

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN MODAL

Tujuan Perusahaan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan memastikan struktur modal dan pengembalian pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas, proyeksi arus kas operasional, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang usaha yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat melakukan pemupukan laba ditahan dan mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham.

Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan *Gearing Ratio*. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang bersih dengan total modal. Utang bersih dihitung dari total pinjaman dikurangi dengan kas dan setara kas. Total modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan.

Kebijakan keuangan Perusahaan selama tahun 2021 dan 2020 adalah mempertahankan *Gearing Ratio* sesuai dengan persyaratan yang berlaku. *Gearing Ratio* pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)	
Total pinjaman	31.405.119	22.570.583	<i>Total borrowings</i>
Dikurangi : kas dan setara kas	(4.020.609)	(4.462.197)	<i>Less : cash and equivalents</i>
Utang bersih	27.384.510	18.108.386	<i>Net debt</i>
Total ekuitas	6.437.954	5.586.910	<i>Total equity</i>
<i>Gearing Ratio</i>	4,25	3,24	<i>Gearing Ratio</i>
<i>Debt to Equity Ratio</i>	4,88	4,04	<i>Debt to Equity Ratio</i>

41. CAPITAL MANAGEMENT

The Company objectives when managing capital are to safeguard The Company ability to continue as a going concern whilst seeking to maximize benefits to shareholders and other stakeholders.

The Company manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirement and capital efficiency of the Company, profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic business opportunities. In order to maintain or adjusting the capital structure, the Company may accumulating retained earnings and paid up capital from shareholders.

The Company monitors capital on the basis of *Gearing Ratio*. This ratio is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is calculated as total borrowings less cash and cash equivalents. Total equity is calculated as "equity" as shown in the statement of financial position.

The Company's financial policy during 2021 and 2020 was to maintain *Gearing Ratio* as prevailing regulation. The *Gearing Ratio* as at December 31, 2021 and 2020, were as follows:

42. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah mengimplementasikan Manajemen Risiko berdasarkan Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Kredit, Risiko Tingkat Suku Bunga, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional.

Profil Risiko

Perusahaan melakukan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun secara *enterprise* antara Perusahaan dengan entitas anak dan entitas asosiasi.

42. RISK MANAGEMENT

The Company has implemented a Risk Management based on the Legal Risk, Strategic Risk, Reputation Risk, Compliance Risk, Credit Risk, Interest Rate Risk, Liquidity Risk and Operational Risk.

Risk Profile

The Company perform risk management by consolidated against all types of risks that have been defined, both in the work unit as well as for enterprise between the Company with the subsidiary and the associates entity.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Perusahaan memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

Enterprise Risk Management (ERM) adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi risiko, pengintegrasian strategi transfer risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga dan pengukuran kinerja bisnis.

a. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko ini termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidaksanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hukum antara lain adalah pemahaman dokumen legalitas pada saat inisiasi awal, pembuatan perjanjian pembiayaan yang belum dipahami secara utuh oleh pelaksana termasuk proses pengikatan jaminan dan sertifikasi.

Guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum, Divisi Legal dan divisi terkait lainnya bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan mengelola setiap permasalahan yang terkait dengan hukum secara tepat termasuk potensi kerugiannya.

Perusahaan menyusun pedoman dan kode etik yang diberlakukan kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan internal maupun eksternal. Sanksi diterapkan secara konsisten kepada pejabat dan karyawan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

To obtain the overall risk profile of all types of risks, the Company provides risk weight for each type of risk according to the risk appetite that has been planned/designated.

Enterprise Risk Management (ERM) is the integration of risk conducted through integrating organizational risk, integrating risk transfer strategies and integrating risk management into the business process of the Company.

Implementation of integrated risk management in accordance with the concept of ERM, the business processes implemented in determining the strategy and business planning, product development and new business, pricing and business performance measurement.

a. Legal Risk

Legal risk is the risk that is caused due to the weakness of the juridical aspect. This risk includes but is not limited to the risks arising from the possibility of an agreement that could not be carried out, a third-party lawsuits, discrepancy with the laws and regulations in force, the weakness of the Alliance, the binding of the collateral is not appropriate, the inability to implementation of court rulings, court decisions that may interfere with or adversely affect the operation or condition of the Company.

Factors affecting legal risk understanding of legal documents at the time of early initiation, creation of financing agreements that have not been fully understood by the practitioner include the binding process assurance and certification process.

In order to avoid the possibility of litigation or lawsuits, Legal Division and other relevant divisions to complete the legal problems that occur with managing any problems related to the law appropriately including the potential disadvantages.

The Company develop guidelines and codes of conduct that apply to all employees at each level of organization in order to improve adherence to internal and external provision. Sanctions are applied consistently to loan officers and employees proven guilty of irregularities and violations.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis: visi Perusahaan, rencana strategis dan peluncuran produk baru.

Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perusahaan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, Perusahaan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Selain itu Perusahaan menetapkan indikator penting sesuai ketentuan BUMN yaitu indikator Tingkat Kesehatan (TKS) BUMN agar bisnis Perusahaan dapat tetap tumbuh dan terus meningkatkan kepercayaan bagi *stakeholder* dan *shareholder*.

c. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra dan konflik internal.

Pengelolaan risiko reputasi harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan debitur dan *stakeholders* sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan melakukan manajemen risiko reputasi dengan cara memantau dan melaksanakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk meng-*counter* berita negatif dan penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

b. Strategic Risk

Strategic risk is the risk that is caused partly due to the establishment and implementation of The Company strategy and improper business decision-making or the lack of the Company's responsiveness to the external changes.

Factors that influence the strategic risk: the Company's vision, strategic planning and new product launches.

Implementation of the strategy, vision and mission as well as the Company improper business decisions that are inconsistent with the external changes could affect business continuity of the Company.

In relation to the matters mentioned above, the Company has established, formulated and monitored the implementation of the strategy including the Company Work Plan Budget (RKAP) and Long-Term Corporate Plan (RJPP).

Additionally the Company set of important indicators in accordance with BUMN regulation, namely Health Level indicator (TKS) BUMN so that the Company business can still grow and continue to improve for the stakeholder and shareholder confidence.

c. Reputational Risk

Reputational risk is the risk due to the negative publicity associated with business or negative perceptions of the Company.

Factors that influence the risk of reputation are such as: image and internal conflict.

Reputational risk management should comply with the principles of transparency and improved service quality for debtors and stakeholders in line with regulation.

The Company performs risk management by monitoring and implementing the right communication in order to deal with negative news or information that tends to counterproductive, by implementing the use of effective media strategies to counter the negative news and the implementation of Good Corporate Governance consistently.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

d. Risiko Kepatuhan

d. Compliance Risk

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

Compliance risk is the risk that occurs because the Company did not comply with or implement internal regulations and legislation. In practical, compliance risks is inherent in the risks associated the Company on legislation and other applicable provisions, such as:

- Risiko strategis terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perusahaan.
- Risiko kredit terkait dengan ketentuan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP), Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

- *Strategic risks associated with the provisions of the Work Plan Budget (RKAP) of the Company.*
- *Credit risk associated with Lending/Limit Policies (BWMP), Productive Assets Quality and the Establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN).*
- *Other risks associated with internal and external regulations.*

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan adalah perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, budaya disiplin karyawan dan infrastruktur.

Factors that affect compliance risks are changes in external regulations, internal communications, employee discipline culture and infrastructure.

Perusahaan melakukan manajemen risiko kepatuhan melalui peningkatan budaya kepatuhan yang terus menerus dilakukan melalui program:

The Company perform risk management to increase compliance with the continuous culture of compliance through the program:

- Sosialisasi/pelatihan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur baru;
- Pembaharuan dan dokumentasi *database* kebijakan dan prosedur;
- Uji kepatuhan terhadap produk baru dan kebijakan baru.

- *Socialization/obedience training on policies and new procedures;*
- *Database updating and documentation of policies and procedures*
- *Compliance testing of new products and new policies.*

e. Risiko Pasar

e. Market Risk

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rate, exchange rate of rupiah currency, commodity prices and the prices of capital or loans, which could expose to the Company. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rate management.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Risiko Pasar (lanjutan)

Perubahan tingkat suku bunga akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat suku bunga naik yang menyebabkan beban dana meningkat. Untuk itu Perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

Sumber pendanaan Perusahaan yang terbesar berasal dari utang obligasi dan pinjaman bank komersial dengan tingkat suku bunga tetap. Perusahaan juga menerbitkan surat utang jangka pendek dan menengah dengan tingkat suku bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank komersial dengan tingkat bunga mengambang.

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perusahaan saat ini, risiko pasar Perusahaan adalah minimal. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

42. RISK MANAGEMENT (continued)

e. Market Risk (continued)

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate of fund is raised, which would cause losses to the Company. Therefore, the Company consistently implements fixed rate and floating rate management by doing adjustment on lending interest rate depending sensitivity of funding interest rate.

The largest source of funding for the Company comes from bonds and commercial bank loans with fixed interest rates. The Company's funding source is also from the issuance of promissory notes in short and medium term, with fixed interest rate and as well as small number of floating rate loans from commercial banks.

With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is minimal. The Company does not have financing business in foreign currency.

The following table summarizes the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates:

31 Desember/December 31, 2021
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate				Total/ Total	
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years		
Aset Keuangan								Financial Assets
Kas dan setara kas	-	-	4.020.609	-	-	-	4.020.609	Cash and cash equivalent
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	21.096.269	6.067.802	6.472.210	33.636.281	Loans
Subtotal	-	-	4.020.609	21.096.269	6.067.802	6.472.210	37.656.890	Subtotal
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	40.546	-	473.383	4.555.875	1.343.092	4.900.500	11.313.396	Bank and financial institutions borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	-	-	675.000	1.373.000	1.100.000	2.942.000	6.090.000	Medium-term notes and sukuk
Utang Obligasi Pinjaman dari Pemerintah RI dan Lembaga Kredit LN	-	-	167.855	3.733.852	2.834.303	3.342.272	10.078.282	Bond payables Borrowings from Government of RI and Foreign Credit
Subtotal	40.546	-	1.333.843	10.153.400	6.338.183	13.539.147	31.405.119	Subtotal
Total	(40.546)	-	2.686.766	10.942.869	(270.381)	(7.066.937)	6.251.771	Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

e. Risiko Pasar (lanjutan)

e. Market Risk (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate				Total/ Total	
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years		
Aset Keuangan								Financial Assets
Kas dan setara kas	-	-	4.462.197	-	-	-	4.462.197	Cash and cash equivalent
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	15.820.151	681.899	6.261.451	22.763.501	Loans
Subtotal	-	-	4.462.197	15.820.151	681.899	6.261.451	27.225.698	Subtotal
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	39.085	-	888.299	1.717.008	1.401.332	2.179.107	6.224.831	Bank and financial institutions borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	-	-	600.000	1.408.500	890.000	992.000	3.890.500	Medium-term notes and sukuk
Utang Obligasi Pinjaman dari Pemerintah RI dan Lembaga Kredit LN	-	6.697	2.942	182.153	1.076.765	1.773.206	3.041.763	Bond payables Borrowings from Government RI and Foreign Credit
Subtotal	39.085	6.697	1.491.241	6.303.797	6.102.567	8.627.196	22.570.583	Subtotal
Total	(39.085)	(6.697)	2.970.956	9.516.354	(5.420.668)	(2.365.745)	4.655.115	Total

f. Risiko Kredit

f. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul bilamana dana yang disalurkan tidak dapat kembali atau pendapatan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan.

Credit risk is the risk of financial losses incurred when funds can not be re-routed or expected revenues are not in accordance with a predetermined and agreed upon.

Risiko kredit Perusahaan berasal dari pinjaman yang diberikan kepada Bank Pelaksana Kredit Program, Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S), serta pembiayaan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

The Company's credit risk from loans granted to Credit Program Managing Bank, and Micro/Sharia Finance Institutions (LKM/S), as well as financing ULaMM (Micro Capital Services Unit) to Small and Micro Enterprises (SMEs).

Tabel berikut menggambarkan total risiko kredit dan konsentrasi risiko atas pinjaman yang diberikan dan pembiayaan modal yang dimiliki oleh Perusahaan:

The following table sets out the amount of credit risk and risk concentration of the loans and the capital financing owned by the Company:

	2021	2020	
Rupiah			Rupiah
Mekaaar	26.255.405	15.692.304	Mekaaar
Unit layanan modal mikro	7.280.577	6.982.930	Small and micro enterprises
Pembiayaan modal	884.762	961.304	Capital financing
Lembaga keuangan mikro/syariah	84.277	67.812	Micro/sharia finance institution
Mikro kecil dan menengah	16.022	20.455	Micro, small and medium
Total	34.521.043	23.724.805	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

	2021
Persentase	
Mekasar	76,06%
Unit layanan modal mikro	21,09%
Pembiayaan modal	2,56%
Lembaga keuangan mikro/syariah	0,24%
Mikro kecil dan menengah	0,05%
Total	100,00%

Besarnya eksposur portofolio pembiayaan mencerminkan semakin meningkatnya kontribusi risiko kredit terhadap total risiko Perusahaan, hal ini dikarenakan portofolio pembiayaan menempati porsi terbesar dari keseluruhan aset Perusahaan, sehingga risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko kredit pada tingkat transaksi dan portofolio, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan *business justification* yang memperhatikan pula *historical data*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit dalam peranannya dalam pengendalian dan mengurangi risiko kredit adalah kemampuan dan kematangan unit bisnis dalam membuat analisa kredit, sehingga tercapai suatu keseimbangan antara pengelolaan risiko dengan pengembangan bisnis.

1) Pengukuran risiko kredit

Grup telah menerapkan alat pengukuran risiko pada debitur yaitu *Credit Risk Rating* untuk debitur tergolong Bank Pelaksana dan LKMS dan *Credit Scoring* untuk debitur tergolong UKM. Alat pengukuran peringkat atau skor ini mengukur kualitas manajemen, kinerja keuangan dan prospek usaha dari debitur dengan standar penilaian menggunakan parameter industri. Alat ukur ini dievaluasi secara rutin untuk mengukur tingkat akurasi model maupun parameter industri. *Credit Risk Rating* dan *Credit Scoring* digunakan sebagai alat pemutus awal apakah suatu usulan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Credit Risk (continued)

	2020	
Percentage		
Mekasar	66,12%	
Small and micro enterprises	29,42%	
Capital financing	4,08%	
Micro/sharia finance institution	0,29%	
Micro, small and medium	0,09%	
Total	100,00%	Total

The amount of exposure of a portfolio of financing reflects the increasing contribution of credit risk to the total risk of the Company, this is because the finance portfolio occupies the largest portion of the total assets of the Company, so credit risk is the highest risk faced by the Company. The Company manages credit risk in the transaction and portfolio level, with reference to the prudential principles and business justification to consider also historical data.

Factors that affect credit risk in the role of controlling and reducing credit risk is the ability and maturity of the business unit in making the credit analysis, in order to reach a balance between risk management with business development.

1) Credit risk measurement

The Company has implemented a risk measurement tool on the debtor that the debtor's Credit Risk Rating for Bank Executor and LKMS classified and Credit Scoring for debtors classified as SMEs. Rank or score measurement tool measures the quality of management, financial performance and prospects of the debtor with the parameter assessment using industry standard. This measurement tool is evaluated on a regular basis to measure the accuracy of the model and the parameters of the industry. Credit Risk Rating and Credit Scoring is used as a initial determinant whether a proposed financing can be continued or not.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

1) Pengukuran risiko kredit (lanjutan)

Proses persetujuan pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan latar belakang yang mencukupi untuk menilai risiko kredit, sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Limit kewenangan para pejabat pemutus kredit berdasarkan keputusan K3PR (Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko) yang mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing pejabat tersebut.

2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Perusahaan menghindari pemberian kredit pada debitur, sektor usaha atau aktivitas yang sejak awal dapat menyebabkan terjadinya kerugian Perusahaan. Risiko ini dimonitor dan ditelaah secara periodik.

Agunan

Perusahaan dalam rangka mendapatkan keyakinan atas pengembalian penyaluran pembiayaan ini menerapkan kebijakan tentang agunan. Ketentuan yang diatur terkait jaminan ini mencakup ketentuan jenis agunan yang dapat diterima, besaran *coverage*-nya, tata cara pengikatan agunan dan ketentuan penjualan agunan. Selain itu juga dibuat petunjuk teknis cara penilaian agunan.

Perusahaan dapat menggunakan agunan (*collateral*) dalam rangka mitigasi risiko kredit. Perusahaan harus memiliki posisi hukum yang kuat atas agunan yang diterima dari debitur.

Batasan Pemberian Kredit

Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit melalui penerapan batas maksimal pemberian pembiayaan per individu atau Perusahaan, ketentuan daftar negatif industri, review atas produk secara berkala, ketentuan batasan penyaluran produk pada wilayah-wilayah tertentu, pelaksanaan telaah portofolio pembiayaan dan adanya pelaporan terkait kualitas pembiayaan setiap bulan.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Credit Risk (continued)

1) Credit risk measurement (continued)

Financing approval process conducted by an officer who has the experience, knowledge and adequate background for assessing credit risk, in accordance with each authority based on the applicable regulations. Limit the authority of the officials of credit based on the decision K3PR breaker (Policy Committee for Credit and Risk Control) that takes into account the competence of each official.

2) Control limits and risk mitigation policies

The Company avoid giving credit to the debtor, the business sector or activity from the beginning that can lead to loss of the Company. These risks are monitored and reviewed periodically.

Collateral

The Company in order to get confidence in the return distribution of lending implement a policy of collateral. Relevant provisions of this collateral covers the provision of acceptable, types of collateral, the amount of its coverage, the binding of collateral procedures and conditions of sale of collateral. It also made technical manual methods of valuation of collateral.

The Company can use the collateral in order to mitigate credit risk. The Company should have a strong legal position of the collateral received from debtor.

Lending Limits

The Company manage and control credit risk through the application of the provision of financing limit per individual or Company, the provisions of the negative list of industries, a review of the product on a regular basis, the provision limits the distribution of products in certain areas, the implementation of the financing portfolio review and the reporting of quality-related financing of each month.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Batasan Pemberian Kredit (lanjutan)

Penetapan limit dilakukan kepada debitur atau *counterparty*, secara individual maupun Perusahaan, baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*. Besarnya limit didasari oleh analisis mengenai kemampuan membayar debitur dan toleransi Perusahaan.

Limit untuk risiko kredit ditetapkan pada jenis industri dan sektor ekonomi dengan tujuan mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit.

Limit kredit di reviu secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan debitur dan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi.

Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit dilakukan terhadap beberapa faktor sehingga dapat diidentifikasi potensi terjadinya masalah secara lebih dini (*early warning sign*). Pemantauan dilakukan terhadap kondisi keuangan dan bisnis debitur, pola pembayaran, pemenuhan *covenant*, kesesuaian penggunaan dana kredit, nilai jaminan dan kredibilitas debitur tersebut melalui *trade checking*, *bank checking* serta perubahan terkait *rating*.

Pemantauan risiko kredit dapat dilakukan melalui proses reviu secara individual per debitur maupun secara portofolio.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Credit Risk (continued)

- 2) *Control limits and risk mitigation policies (continued)*

Lending Limits (continued)

Establishment of limits made to the debtor or counterparty, individually and in Companys, both on balance sheet and off balance sheet. The amount limit based on the analysis of the debtors' repayment abilities and the Company's tolerance.

Limit to credit risk are set on the type of industries and economic sectors with the purpose to reducing the risk arising due to the concentration of lending.

Credit limits are reviewed periodically to consider changes in the ability of the debtor and notice changes in economic conditions.

Credit Monitoring

Credit monitoring carried out on a few factors that can be identified potential problems early (early warning sign). Monitoring conducted on the financial condition and business of the debtor, payment patterns, compliance with covenants, conformity of credit fund utilization, the value of collateral and the debtor's credibility through trade checking, bank checking and the associated changes in rating.

Credit risk monitoring can be carried out through the review process on an individual basis per debtor or a portfolio.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Penurunan Nilai dan Kebijakan Pencadangan

Tingkat cadangan yang wajar ditetapkan untuk setiap kualitas kredit. Besarnya pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Credit Risk (continued)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

Impairment and Reserve Policies

Reasonable level of allowance is set for each credit quality. The amount of allowance for impairment losses is in accordance with the applicable regulation.

Impairment losses recognized in the financial reporting is a loss that has occurred on the financial statements date of financial position (based on objective evidence for impairment).

31 Desember/December 31, 2021
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Nilai kotor/ Gross value	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai bersih/ Net value	
Kas dan setara kas	4.020.609	-	4.020.609	Cash and cash equivalents
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.184.264	-	1.184.264	Portfolio of securities measured at fair value through profit or loss
Pinjaman yang diberikan	33.636.281	(1.259.105)	32.377.176	Loans
Pembiayaan modal	884.762	(116.668)	768.094	Capital financing
Piutang jasa manajemen - neto	10.411	(4.776)	5.635	Management services receivable - net
Pendapatan masih akan diterima	130.097	-	130.097	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286	-	7.286	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	43.533	(13.263)	30.270	Other receivables
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.785	(5.785)	-	Portfolio of securities measure at fair value through Accrued income
Total	39.923.028	(1.399.597)	38.523.431	Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

f. Credit Risk (continued)

31 Desember/December 31, 2020 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)				
	Nilai kotor/ Gross value	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai bersih/ Net value	
Kas dan setara kas	4.462.197	-	4.462.197	Cash and cash equivalents
Portofolio efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	524.809	-	524.809	Portfolio of securities measured at fair value through profit or loss
Pinjaman yang diberikan	22.763.500	(674.515)	22.088.985	Loans
Pembiayaan modal	961.304	(114.732)	846.573	Capital financing
Piutang jasa manajemen - neto	8.326	(1.132)	7.194	Management services receivable - net
Pendapatan masih akan diterima	117.947	-	117.947	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	8.043	-	8.043	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	70.947	(13.235)	57.711	Other receivables
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.785	(120)	5.665	Portfolio of securities measure at fair value through Accrued income
Total	28.922.858	(803.734)	28.119.124	Total

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The above table illustrates the maximum exposure to credit risk for the Company on December 31, 2021 and 2020. For assets in the statement of financial position, the exposure set out above are based on net carrying amounts as disclosed in the consolidated statement of consolidated financial position.

Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The information on the credit quality of financial assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

- Perusahaan 1 : Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
- Perusahaan 2 : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
- Perusahaan 3 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak (di bawah 90 hari) dalam 3 tahun terakhir.
- Perusahaan 4 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak diatas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
- Perusahaan 5 : Nasabah lama yang pinjamannya pernah/telah direstrukturisasi.

- Company 1 : New customers (less than 6 months).
- Company 2 : Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.
- Company 3 : Existing customers with history of overdue (below 90 days in the past 3 years).
- Company 4 : Existing customers with history of default more than 90 days in the past 3 years.
- Company 5 : Existing customers with loans that was/has been restructured.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

g. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga terjadi akibat kegiatan usaha Perusahaan yang mengandung suku bunga, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah serta pinjaman yang diterima untuk modal kerja usaha. Dalam hal ini, Perusahaan bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan tingkat suku bunga serta mengawasi penerapan dan pelaksanaannya.

Risiko tingkat suku bunga dapat terjadi akibat peningkatan tingkat suku bunga pinjaman yang tidak serta merta diikuti dengan tingkat suku bunga kredit. Perusahaan menerapkan pendekatan *zero-interest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Perusahaan juga secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perusahaan.

h. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

1) Pengelolaan Risiko Likuiditas

Perusahaan sangat berkepentingan dalam menjaga likuiditasnya, agar tetap dapat mengembangkan asetnya dan menjaga kredibilitas dan kemampuan akses pendanaan Perusahaan. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya *cash flow* dan terkontrolnya tingkat *maturity gap* Perusahaan. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi diatasi dengan memelihara aset likuid dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pendanaan.

Penyediaan dana dalam bentuk deposito dan kontrak pengelolaan dana adalah bagian dari menjaga optimalisasi likuiditas Perusahaan. Perusahaan menempatkan deposito pada bank-bank umum dengan tingkat bunga sesuai dengan tingkat bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

42. RISK MANAGEMENT (continued)

g. Interest Rate Risk

Interest rate risk results from the Company's operations that contain interest rate, which is credit given to customers and loans received for working capital. In this regard, the Company's responsible for establishing strategies and policies in the management of interest rates as well as overseeing the implementation and execution.

Interest rate risk can occur due to an increase in lending rates is not necessarily followed by the level of credit rates. The Company applies a zero-interest approach gapping, to maximize the fixed-rate loans. The Company also regularly reviews the level of lending rates by reference to the loan interest rate applicable to optimize the Company's results of operations.

h. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk, which the Company does not have sufficient financial resources to settle the obligations that have matured.

1) Liquidity Risk Management

The Company is concerned in maintaining its liquidity, in order to continue to develop its assets and maintain the credibility and the Company's funding access ability. Liquidity management is carried out continuously and carefully the emphasis on maintaining cash flow and controlled level of the Company's maturity gap. Cash flow gaps that occur are mitigated by maintaining liquid assets and improve access to funding sources.

Provision of funds in time deposits and fund contract management is part of effort to maintaining liquidity optimality of the Company. The Company placing deposits in Commercial Banks at appropriate interest risk to the interest rate that is guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

h. Risiko Likuiditas (lanjutan)

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

Analisa *maturity gap* ditinjau secara berkala melalui mekanisme rapat bulanan Perusahaan yang mengevaluasi kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan (*funding*), analisa pengelolaan *earning aset* dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga *floating* terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan) dan strategi penetapan *pricing* produk.

Pengelolaan likuiditas memperhatikan keseimbangan antara risiko likuiditas dan biaya untuk memelihara aset likuid.

Pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang menggunakan metodologi sesuai *best practice*, yang dapat menggambarkan profil risiko likuiditas inheren saat ini maupun potensi risiko likuiditas di masa mendatang. Termasuk dalam alat ukur likuiditas adalah *liquidity gap* dan rasio-rasio likuiditas.

Tabel berikut menyajikan sisa umur kontraktual liabilitas keuangan Perusahaan yang menggambarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko likuiditas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

31 December/December 31, 2021 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)						
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Utang bank dan lembaga keuangan	5.069.803	1.343.092	4.687.249	213.252	11.313.396	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	2.048.000	1.100.000	2.615.000	327.000	6.090.000	MTN and Sukuk
Utang obligasi	3.901.707	2.834.303	1.519.683	1.822.589	10.078.282	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	508.278	1.060.788	2.348.650	-	3.917.716	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	5.725	5.725	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	1	-	-	-	1	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	323.369	323.369	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	-	296.450	-	-	296.450	Accrued expenses
Dana cadangan angsuran	4.793.680	55.072	82.608	110.143	5.041.503	Installment reserve fund
Total	16.321.469	6.689.705	11.253.190	2.802.078	37.066.442	Total

42. RISK MANAGEMENT (continued)

h. Liquidity Risk (continued)

2) Analysis of Liquidity (continued)

Maturity gap analysis is reviewed periodically through the Company monthly meetings mechanism that evaluates: maturity gap of funding management, analysis of earnings management assets and liabilities with floating interest rate to the benchmark interest rate, the placement of fund analysis, development of a portfolio report (outstanding and disbursement) and product pricing strategies.

Liquidity amagement is carried out while taking the balance between liquidity risk and liquid asset maintenance cost into accounts.

Liquidity risk measurement is performed by using a measuring instruments according to the best practice methodologies, which can describe the current inherent liquidity risk profile of current and potential future liquidity risks. Included in the liquidity measuring tools are the liquidity gap and liquidity ratio.

The following table summarizes the contractual life remaining of the Company's financial liabilities that describe the Company's exposure to liquidity risk on December 31, 2021 and 2020:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

h. Risiko Likuiditas (lanjutan)

h. Liquidity Risk (continued)

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

2) Analysis of Liquidity (continued)

31 Desember/December 31, 2020 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)						
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Utang bank dan lembaga keuangan	2.662.206	1.401.332	2.029.095	132.198	6.224.831	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	2.008.500	890.000	692.000	300.000	3.890.500	MTN and Sukuk
Utang obligasi	2.996.136	2.734.470	1.836.165	1.846.719	9.413.490	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	185.095	1.076.765	1.773.206	-	3.035.066	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	6.696	6.696	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	4	-	-	-	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	384.108	384.108	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	-	415.692	-	-	415.692	Accrued expenses
Dana cadangan angsuran	2.383.378	20.927	41.776	74.898	2.520.979	Installment reserve fund
Total	10.235.319	6.539.186	6.372.242	2.744.619	25.891.366	Total

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The following table describes the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as at December 31, 2021 and 2020.

31 Desember/December 31, 2021							
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity date	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	4.020.609	-	-	-	-	4.020.609	Cash and cash equivalent
Portofolio efek untuk diperdagangkan	-	1.184.264	-	-	-	1.184.264	Portfolio of securities trading
Pinjaman yang diberikan	-	21.096.269	6.067.802	6.472.210	-	33.636.281	Loans
Pembayaan modal	-	437.577	263.819	183.366	-	884.762	Capital financing
Piutang jasa manajemen	-	10.411	-	-	-	10.411	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	130.097	-	-	-	130.097	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	-	7.287	-	-	-	7.287	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	-	87.561	-	-	-	87.561	Other receivables
Aset lain-lain/Bank Dibatasi penggunaannya	1.623.897	-	-	-	-	1.623.897	Other asset/ Restricted bank
	5.644.506	22.953.466	6.331.621	6.655.576	-	41.585.169	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	-	5.069.803	1.343.092	4.687.249	213.252	11.313.396	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	-	2.048.000	1.100.000	2.615.000	327.000	6.090.000	MTN and Sukuk
Utang obligasi	-	3.901.707	2.834.303	1.519.684	1.822.589	10.078.283	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	-	508.277	1.060.788	2.348.650	-	3.917.715	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	-	5.725	5.725	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	-	1	-	-	-	1	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	-	323.369	323.369	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	296.450	296.450	Accrued expenses
Dana cadangan angsuran	-	4.628.464	55.072	82.607	110.144	4.876.287	Installment reserve fund
	-	16.156.252	6.393.255	11.253.190	3.098.529	36.901.226	
Total perbedaan jatuh tempo	5.644.506	6.797.214	(61.634)	(4.597.614)	(3.098.529)	4.683.943	Total maturity gap

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

h. Risiko Likuiditas (lanjutan)

h. Liquidity Risk (continued)

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

2) Analysis of Liquidity (continued)

31 Desember/December 31, 2020

	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ No contractual/ maturity date	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	4.462.197	-	-	-	-	4.462.197	Cash and cash equivalent
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	524.809	-	-	-	524.809	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	-	15.820.151	681.899	6.261.451	-	22.763.501	Loans
Pembiayaan modal	-	370.212	276.036	315.056	-	961.304	Capital financing
Piutang jasa manajemen	-	8.326	-	-	-	8.326	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	117.946	-	-	-	117.946	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	-	8.043	-	-	-	8.043	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	-	57.711	-	-	-	57.711	Other receivables
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.665	-	-	-	-	5.665	Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income
	4.467.862	16.907.198	957.935	6.576.507	-	28.909.502	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	-	2.644.392	1.401.332	2.029.095	150.013	6.224.832	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	-	2.008.500	890.000	692.000	300.000	3.890.500	MTN and Sukuk
Utang obligasi	-	2.996.136	2.734.470	1.836.165	1.846.718	9.413.489	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	-	185.095	1.076.765	1.773.206	-	3.035.066	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	-	6.697	6.697	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	-	4	-	-	-	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	-	384.108	384.108	Other liabilities
Beban yang masih harus dibayar	-	-	415.692	-	-	415.692	Accrued expense
	-	7.834.127	6.518.259	6.330.466	2.687.536	23.370.388	
Total perbedaan jatuh tempo	4.467.862	9.073.071	(5.560.324)	246.041	(2.687.536)	5.539.114	Total maturity gap

i. Risiko Operasional

i. Operational Risk

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dalam menjalankan operasional Perusahaan yang disebabkan oleh tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal dalam ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal.

Operational risk is the risk faced by the Company's in the operational runnings the Company caused by inadequate or internal process failure due to, human error, system failure or problem with the ineligibility or failure of external process, people and systems or from external events.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

i. Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam mengelola risiko operasional, Perusahaan sangat berkepentingan dengan menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan mendukung penerapan manajemen risiko. Lingkungan internal mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Oleh karena itu, Perusahaan secara aktif melakukan sosialisasi dan training terkait manajemen risiko untuk meningkatkan *risk awareness* dan kualitas kontrol dalam rangka mitigasi risiko operasional.

Perusahaan telah membuat kebijakan dan prosedur sebagai turunan dari kebijakan untuk seluruh aktivitas operasional di dalam Perusahaan dan memastikan adanya *dual control* pada setiap proses kegiatan. Kebijakan dan prosedur selalu dikaji ulang dan disempurnakan untuk memastikan kecukupan mekanisme kontrol dan perbaikan berkesinambungan.

Manajemen risiko operasional merupakan tanggung jawab seluruh jajaran karyawan dan manajemen setiap unit kerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Perusahaan.

Pengelolaan risiko operasional mencakup pengelolaan risiko hukum, kepatuhan, strategis dan reputasi.

Pengukuran parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional dilakukan berdasarkan identifikasi risiko operasional dengan mengukur dampak dan kemungkinan pada risiko yang melekat. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersumber dari masukan dari unit kerja, sedangkan pendekatan kuantitatif diukur dari data historis risiko operasional.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

i. Operational Risk (continued)

In managing operational risk, the Company is concerned with creating an internal environment that is conducive and supportive of risk management. Applications of internal environment affect the design and implementation of control activities, information and communication systems, and monitoring activities. Therefore, the Company actively socializing and training related to the risk management to improve risk awareness and control quality in order to mitigate operational risk.

The Company has made policy and procedures as an instance derivative of a policy for whole operational activities within the Company ensure dual control and in each process activity. Policies and procedures are always reviewed and enhanced to ensure control mechanisms adequacy end of continuous improvement.

Operational risk management is the responsibility of all employees and management of each unit of work in the Company. Operational risk management should be embedded in business processes and operational the Company.

Management of operational risk includes legal risk management, compliance, strategic and reputational risk.

Parameters measuring that affect the operational risk exposure is performed based on the identification of operational risks by measuring the impact and likelihood on the inherent risks. Operational risk measurement is based on qualitative and quantitative approaches. A qualitative approach derived from the input of the unit of work, while the quantitative approach is measured from historical data of operational risk.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2021	
	Dolar AS/ US Dollar	Setara Rupiah/ Rp Equivalent
Aset Moneter		
Kas dan setara kas	13.962,86	199.236.088
Portofolio efek untuk diperdagangkan	573.749,12	8.186.829.087
Aset Moneter	587.711,98	8.386.065.175
Liabilitas Moneter		
Utang kepada Bank Pembangunan Asia	433.619,13	5.725.105.339
Liabilitas Moneter Bersih	154.092,85	2.660.959.836

Monetary Assets
Cash and cash equivalents
Portfolio of securities - trading

Monetary Assets

Monetary Liabilities
Borrowings to Bank Pembangunan Asia

Net Monetary Liabilities

	31 Desember/December 31, 2020	
	Dolar AS/ US Dollar	Setara Rupiah/ Rp Equivalent
Aset Moneter		
Kas dan setara kas	47.350,77	667.882.589
Liabilitas Moneter		
Utang kepada Bank Pembangunan Asia	474.771,92	6.696.662.821
Liabilitas Moneter Bersih	427.421,15	6.028.780.232

Monetary Assets
Cash and cash equivalents

Monetary Liabilities
Borrowings to Bank Pembangunan Asia

Net Monetary Liabilities

44. PROVISI DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki kontinjensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 89 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - 67 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian.
 - 22 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian
- b. Terdapat 105 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - 2 kasus dalam proses Peninjauan Kembali;
 - 26 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
 - 14 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
 - 63 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Perusahaan mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi Perusahaan dengan membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari beban usaha (Catatan 36) pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp36.728.188.149 dan Rp28.943.680.000.

44. PROVISION AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2021, the Company has the following contingencies:

- a. There are 89 criminal cases with debtors;
 - 67 cases under examination by the police;
 - 22 cases under investigation by the police;
- b. There are 105 civil cases with the debtors:
 - 2 cases in the Judicial Review process;
 - 26 cases in the cassation process at the Supreme Court;
 - 14 cases on appeal at the High Court;
 - 63 cases on examination process at the District Court.

The Company recognized the impact of the contingencies relating to the cases faced by the Company by establishing an allowance for operating losses and recognizing the risk controlling expense as part of operating expenses (Note 36) for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp36,728,188,149 and Rp28,943,680,000, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN

- a. Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka penyaluran kredit program ke bank pelaksana. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, telah menunjuk Perusahaan sebagai salah satu koordinator penyaluran program kredit.

Perusahaan dan Bank Indonesia pada tanggal 15 November 1999 telah menandatangani perjanjian pengalihan pengelolaan KLBI yang diberikan dalam rangka membiayai kredit program sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia No. 14 tanggal 15 November 1999 dibuat dihadapan Ismudjadi, S.H., pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Bank Indonesia memberi wewenang kepada Perusahaan untuk menagih kepada bank pelaksana angsuran pokok pada saat jatuh tempo angsuran KLBI.
- ii. Perusahaan dapat memanfaatkan angsuran pokok sampai jatuh tempo KLBI, dengan kewenangan untuk mengatur secara berimbang terbatas pada Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)-Umum; KKPA-Bagi Hasil; KKPA-Nelayan; KKPA-Unggas; KKPA-TKI; KKPA-PIR Trans; Kredit Modal Kerja (KMK)-BPR/BPRS; Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM)-BPR; KPKM-Bank Umum; Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP); Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN); dan Kredit Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).
- iii. Perusahaan berkewajiban melaporkan pemanfaatan angsuran pokok yang dikelola Perusahaan kepada Bank Indonesia yang bentuk dan periode laporannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

45. AGREEMENTS

- a. In line with the enactment of Law No. 23 Year 1999, Bank Indonesia no longer allowed to directly provide the Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) in order to credit program distribution to executing banks. The Government through the Decree of Minister of Finance letter No. 487/KMK.017/1999 October 13, 1999, has been appointed the Company as one of the coordinator for distribution of the credit program.

The Company and Bank Indonesia on November 15, 1999 has signed a management transfer agreement KLBI given credit in order to finance the program as stated in the Deed of Transfer of Management of Bank Indonesia Liquidity Credit No. 14 dated November 15, 1999, an made in the presences of Ismudjadi, S.H., replacement of Mudofir Hadi, S.H., Notary in Jakarta.

Implementation of the transfer of KLBI done in the following way:

- i. Bank Indonesia authorize the Company to charge to the executing bank installments of principal at maturity installments KLBI.
- ii. The Company may utilize the principal until maturity KLBI, with the authority to set a balanced way limited to Primary Cooperatives Credit for Members (KKPA)-General; KKPA-Profit Sharing; KKPA-Fisherman; KKPA-Poultry; KKPA-TKI; KKPA-PIR Trans; Working Capital Loans (KMK)-BPR/BPRS; Small and Micro Credit (KPKM)-BPR; KPKM-Commercial Bank; Credit for Urban Public Transport Bus (KUAUBP); National Private Large Plantation Credit (PBSN); Credit and Transmigration Nucleus (PIR-Trans).
- iii. The Company is obliged to report the utilization of the Company's principal managed to Bank Indonesia in the form and the period of the report in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Sesuai Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI, Pasal 2 ayat 1, Bank Indonesia menyerahkan pengelolaan KLBI kepada Perusahaan yang meliputi:

- Saldo baki debit atau total KLBI yang telah ditarik bank pelaksana dan masih tercatat dalam rekening pinjaman bank pelaksana di Bank Indonesia per tanggal 31 Oktober 1999 sebesar Rp6.634.597.524.967.
 - Saldo kelonggaran tarik atau selisih antara komitmen plafon dengan jumlah KLBI yang telah ditarik oleh bank pelaksana, tidak termasuk jumlah KLBI yang tidak dapat ditarik oleh bank yang bersangkutan karena telah melampaui batas waktu penarikan yang telah ditentukan per tanggal 31 Oktober 1999 sebesar Rp2.660.784.353.615.
- b. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan dalam rangka Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil No. KP-018/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004 yang telah diubah berturut-turut dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. KP-018/DP3/2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan dalam rangka Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil No. AMA-67/KP-018/DSMI/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian pinjaman dalam rangka pendanaan kredit usaha mikro dan kecil. Pinjaman ini untuk diteruskan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).
- c. Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan No. SLA-1184/DP3/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang diubah dengan Surat No. S-55/MK.5/2012 tanggal 4 Januari 2012, Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan telah menandatangani perjanjian penerusan pinjaman atas dana pinjaman yang berasal dari *Asian Development Bank (ADB)*

45. AGREEMENTS (continued)

According to the Credit Liquidity of Bank Indonesia (KLBI) Management Transfer Agreement, Article 2, paragraph 1, Bank Indonesia submitted to the Company's management KLBI include:

- Outstanding balance of total KLBI which has been withdrawn by the executing banks and still recorded in the loan accounts of the executing banks at Bank Indonesia as of October 31, 1999 amounting to Rp6,634,597,524,967.
 - The balance of unused loan facilities or the difference between the commitment limit the number KLBI been withdrawn by the executing bank, excluding amounts KLBI can not be withdrawn by the bank concerned because it has exceeded a predetermined withdrawal period as of October 31, 1999 amounting to Rp2,660,784,353,615.
- b. According to the Loan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Company in order to Financing Small and Micro Business Loan No. KP-018/DP3/2004 dated May 14, 2004 which has been amended in a row and the last addendum of this Loan Agreement No. KP-018/DP3/2004 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company in the Context of Credit Financing Micro and Small No. AMA-67/KP-018/DSMI/2014 dated August 29, 2014, the Company and the Government of the Republic of Indonesia has signed a loan agreement in order to financing micro and small business loans. The loan is for on-lent by a Financial Institution Executor (LKP) in order to finance Small and Micro Business Loan (KUMK).
- c. Based on the Subsidiary Loan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and The Company No. SLA-1184/DP3/2005 dated January 25, 2005, has amended by letter No. S-55/MK.5/2012 dated January 4, 2012, the Government of the Republic of Indonesia and the Company has entered into a loan agreement on loan from the Asian Development Bank (ADB) for on-lent by

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

untuk diteruskan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan penataan lingkungan dan pemukiman (*the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*). Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan maksimal sebesar USD757.550,54 dengan angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2028.

- d. PT PNM Investment Management ("PNM IM") sebagai pengelola investasi dana pihak ketiga, menerima pendapatan jasa pengelolaan sebesar 1% - 2% per tahun dari nilai aset bersih dana kelolaan. Sedangkan atas pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah, PNM IM menerima pola bagi hasil yang disepakati bersama. Pengelolaan investasi ini berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan tidak ada risiko yang ditanggung oleh PNM IM atas pengelolaan dana tersebut.
- e. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 9 Juni 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 9 Juni 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
- f. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 2 tanggal 5 Agustus 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2021. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan kredit sampai dengan 7 Juni 2021. Suku bunga sebesar 10% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.

45. AGREEMENTS (continued)

Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) in order to finance environmental regulation and settlement (*the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*). Loans granted by the Government of the Republic of Indonesia to the Company a maximum of USD757,550.54 with the first installment due on June 1, 2010 and ended on December 1, 2028.

- d. PT PNM Investment Management ("PNM IM") as the investment manager of third party funds, receive revenue management services by 1% - 2% per annum of the net asset value of funds under management. While the management of the funds in the form of Mudharabah financing, PNM IM receive profit-sharing arrangements agreed upon. Investment management is based on the agreement that has been agreed upon and there is no risk borne by PNM IM for managing the fund.
- e. Based on the Deed of Credit Agreement No. 30 dated June 9, 2021, the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 8.50% per year with a loan term of 48 months and will expire on June 9, 2025. The funds are for financing micro and small businesses.
- f. Based on the Deed of Agreement No. 2 dated August 5, 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk provides a revolving working capital loan with a total credit limit of Rp750,000,000,000, with a facility period from August 5, 2020 and will mature on March 7, 2021. This Agreement has been extended with extension credit letter until June 7, 2021. The interest rate is 10% per annum. The funds are used for financing ULaMM and Mekaar. The Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears a maximum of 3%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- g. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp500.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,25% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu 42 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *NPL gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu 42 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *NPL gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 5 September 2018 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *NPL gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *NPL gross* maksimal 5%.

45. AGREEMENTS (continued)

- g. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 11 dated May 10, 2021 between PT Bank DKI and the company, the company with a maximum limit a credit of Rp500,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.25% per year. The funds are for micro and small business financing through ULaMM and the Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10x and a maximum gross Non-Performing Loan of 5%.*

Based on the Letter of Credit Agreement No. 44 dated November 19, 2020 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp300,000,000,000, a period of 42 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 34 dated October 29, 2019 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp300,000,000,000, a period of 42 months and a fixed interest rate of 10.00% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No.04 dated September 5, 2018 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp200,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.00% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Based on the credit agreement No. 75 dated June 13, 2017, between PT Bank DKI and the Company, loans with a total credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.00% per year. The fund for the financing of micro and small enterprises through ULaMM. The Company shall maintain the Debt Equity Ratio (DER) maximum of 10x and a maximum gross NPL of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- h. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu 42 bulan serta suku bunga fixed sebesar 9,50% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan NPL gross maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, antara PT BPD DKI Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan total plafon sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 42 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga Debt Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan NPL gross maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 10 tanggal tanggal 5 September 2018, antara PT BPD DKI Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan total plafon sebesar Rp100.000.000.000 berdasar perjanjian Mudharabah dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 9,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan NPL gross maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 7 tanggal tanggal 5 September 2018, antara PT BPD DKI Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan total plafon sebesar Rp100.000.000.000 berdasar perjanjian Mudharabah dengan jangka waktu 12 bulan dengan bunga 9,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan NPL gross maksimal 5%.

45. AGREEMENTS (continued)

- h. Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 9 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp150,000,000,000 with an interest rate of 9% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Letter of Credit Agreement No. 42 dated November 19, 2020 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp300,000,000,000, a period of 42 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah and ULaMM Syariah. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 31 dated October 30, 2019, between PT BPD DKI Syariah and the Company, a loan with a maximum limit a credit of Rp300,000,000,000 with a period of 42 months. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 10 dated September 5, 2018, between PT BPD DKI Syariah and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp100,000,000,000 is based on the Mudharabah agreement with a period of 36 months with an interest of 9.00% per annum. The fund is for financing micro and small businesses through ULaMM Syariah. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 7 dated September 5, 2018, between PT BPD DKI Syariah and the Company, a loan with a maximum limit a credit of Rp100,000,000,000 is based on the Mudharabah agreement with a period of 12 months with an interest of 9.00% per annum. The fund is for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta – melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil untuk PT Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 55,39% dan Perusahaan 44,61%. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak fasilitas digunakan dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

45. AGREEMENTS (continued)

- i. *Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 12 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch – through Sharia Business Unit provides Sharia Financing Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp50,000,000,000 with Profit sharing for PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat 55.39% and Company 44.61%. Loan term of 12 months from the drawdown of facility and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain Gearing Ratio of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.*

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 9 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp150,000,000,000 with an interest rate of 9% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.4 dated March 11, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum with a loan period of 12 months after the credit agreement is signed and has been fully paid on March 12, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated November 23, 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and mature on November 22, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- j. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 1658/PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,75% per tahun dan telah dilunasi pada 9 November 2021.

- k. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

45. AGREEMENTS (continued)

- j. Based on the Deed of credit agreement No. 1658/PPK/SLK/2016 dated June 28, 2016, PT Bank Central Asia Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 12% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%. This loan was extended several times for credit term, the latest by "Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ)" No. 3453 dated November 6, 2020 with the provision of an interest rate of 11.75% per annum and has been fully paid on November 9, 2021.

- k. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 111 dated December 28, 2018, regarding the signing of a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp300,000,000,000 for additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) lending. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on December 28, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The company is required to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Based on the Agreement on Working Capital Loan No. 37 dated November 30, 2018, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp500,000,000,000 for additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) loans. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on November 30, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan telah dilunasi pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta "Addendum I - Perjanjian Kredit Modal Kerja PT PNM (Persero)" No.10, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 29 Juli 2017 sampai dengan 29 Juli 2021 (48 bulan) dan jangka waktu penarikan 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,025% dari plafon kredit. Perusahaan harus menjaga kondisi pembiayaan agar tingkat *Non-Performing Loan (NPL)* atas pinjaman yang disalurkan tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

- I. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 24 Januari 2017, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT CIMB Niaga Tbk berupa Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-7) on *Liquidation Basis* sebesar Rp50.000.000.000. Tujuan penggunaan kredit adalah untuk Modal Kerja yang akan disalurkan kepada *end-user* PNM melalui unit ULaMM. Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan biaya provisi sebesar 0,5% dari plafon kredit. Jaminan yang diberikan berupa fidusia (*notariil*) atas seluruh tagihan Perusahaan kepada *end-user* minimal sebesar 100%. Perusahaan wajib menjaga kondisi pembiayaan agar tingkat *Non-Performing Loan (NPL)* Nett atas pinjaman yang disalurkan tidak lebih dari 4,75%.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Working Capital Loan Agreement No. 46 dated July 29, 2016, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit amounting to Rp500,000,000,000 for additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSME). Loan facility period of 12 months from the signing of credit agreement and has been extended with deed No. 10 dated September 5, 2017 and mature on July 29, 2021. Interest rate of 10.00% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Based on the Deed "Addendum I - Working Capital Loan Agreement of PT PNM (Persero)" No.10, the Company applied for a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit amounting to Rp500,000,000,000 for additional working capital loan for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Term of credit facility July 29, 2017 until July 29, 2021 (48 months) and withdrawal period of 12 months from the signing of credit agreement. Interest rate of 10.00% per annum with an upfront fee of 0.025% of the credit limit. The Company must maintain the financing condition so that the Non-Performing Loan (NPL) rate on the loan is not more than 5% for three consecutive months.

- I. Based on the Deed of Credit Agreement No. 03 dated January 24, 2017, the Company applied for a credit facility from PT CIMB Niaga Tbk in the form of Special Transaction Loan (PTK-7) on *Liquidation Basis* of Rp50,000,000,000. The purpose of credit use is for Working Capital to be channeled to PNM *end-user* through ULaMM unit. The term of the credit facility is a maximum of 48 months from the signing of the credit agreement. Interest rate of 10.00% per year with a provision fee of 0.5% of the credit limit. The collateral provided in the form of fiduciary (*notarial*) on all of the Company's bills to the *end-user* is at least 100%. The Company is required to maintain the financing condition for Nett Non-Performing Loan (NPL) level for the loan disbursed to not more than 4.75%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- m. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 Februari 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,35% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

45. AGREEMENTS (continued)

- m. *Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 37 dated February 23, 2021, PT Bank Mandiri Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 8.50% fixed per annum with a loan term of 24 months from the signing of the credit agreement and will mature on February 22, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain Gearing Ratio maximum 10x and the quality of the Non-Performing Loan as a whole product not more than 5%.*

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 89 dated May 15, 2019, PT Bank Mandiri Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 8.50% fixed per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and mature on May 14, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is required to maintain maximum Gearing Ratio of 8x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 36 dated August 20, 2018, PT Bank Mandiri Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp800,000,000,000 with an interest rate of 8.35% fixed per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and has been fully paid on April 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is required to maintain maximum gearing ratio of 8x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 31 Agustus 2017, PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan sudah dilunasi pada 30 Agustus 2019. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 6x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

- n. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/ Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 51 dated August 31, 2017, PT Bank Mandiri Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp300,000,000,000 with an interest rate of 9.00% fixed per annum with a maximum loan period of 24 the month since the credit agreement was signed and has been fully paid on August 30, 2019. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain maximum gearing ratio of 6x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

- n. *Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 30 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without a grace period from the date of disbursement. funds and will expire in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan.*

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 32 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without a grace period from the date of disbursement. funds and will expire in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Syariah Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 November 2019, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp2.350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 58 tanggal 28 Desember 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 15 dated August 14, 2020, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company amounting to Rp1,147,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The Company is obliged to channel Loans/Financing specifically for the Sharia Mekaar Program and must submit a List of Accounts Receivable which is a Fiduciary Guarantee every 6 months with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 2 dated November 4, 2019, the Government Investment Center provides loan/financing facilities to the Company amounting to Rp2,350,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan period of 36 months without a grace period since the disbursement date fund. The Company must distribute loans/special financing for the Mekaar Program and must submit the List of Receivables that become Fiduciary Collateral every 6 months with a minimum value or equal to 100% of outstanding loans.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 61 dated October 31, 2018, the Government Investment Center provides a Loan / Financing facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per year with a loan period of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The company is obliged to channel special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables which become a Fiduciary Guarantee every 6 months with a value of at least or equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan Agreement/ Financing No. 58 dated December 28, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 47 tanggal 30 November 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 Agustus 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

- o. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank National Nobu Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank National Nobu Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MLM)* kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 dan berakhir pada 22 April 2021. Pada tahun 2021, fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada 22 April 2022. Perusahaan belum melakukan penarikan atas

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 47 dated November 30, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 2 dated August 4, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

- o. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 dated September 6, 2019, PT Bank National Nobu Tbk provides a Credit Facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a maximum loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on September 6, 2022. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

Based on the Agreement Deed of Working Capital Loan No. 51 dated April 22, 2019, PT Bank National Nobu Tbk provides a Money Market line Credit facility of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 10.75% fixed per annum with a maximum loan term of 12 months from credit agreement signed and has been extended with deed No. 26 dated April 22, 2020 will mature on April 22, 2021. In 2021, this facility has been extended and will mature on April 22, 2022. The Company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%.

- p. Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 126 tanggal 19 November 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 20 November 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT KEB Hana Bank memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- q. Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 5 tanggal 15 April 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp500.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dan akan berakhir pada bulan April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah . Perusahaan wajib menjaga current ratio minimal 1,2 x dan gearing ratio maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 15 Agustus 2019, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ I dengan plafon maksimal sebesar Rp150.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 21 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha

45. AGREEMENTS (continued)

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain Gearing Ratio of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.

- p. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 126 dated November 19, 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the working capital credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November 20, 2020. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.*

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 40 dated June 28, 2018, PT KEB Hana Bank granted the Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.

- q. *Based on the credit agreement deed No. 5 dated April 15, 2021, PT Bank Permata Tbk provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp500,000,000,000 with a profit sharing of 8.75% per annum and will expire in April 2022. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM Syariah. The Company is required to maintain a minimum current ratio of 1.2 x and a maximum gearing ratio of 10x and maintain a maximum NPL of 5%.*

Based on the deed of credit agreement No. 10 dated August 15, 2019, PT Bank Permata Tbk provides Musyarakah Mutanaqisah - MMQ I Facilities with a maximum credit limit amount of Rp150,000,000,000 with profit sharing 10% per annum with a term loan of 18 months and has been fully paid on September 21, 2020. The funds are for financing micro and small

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x, gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Performing Loan di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan telah dilunasi pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Performing Loan di atas 90 hari maksimal 5%.

- r. Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - melalui Unit Syariah nya memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Current ratio* diatas 120%, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 12 Maret 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 12 Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khusus Mekaar.

45. AGREEMENTS (continued)

businesses through Mekaar dan ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x, gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.

Based on the deed of credit agreement No. 22 dated July 27, 2018, PT Bank Permata Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 interest rate 9.75% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. This loan was extended for credit term, with "Surat Penawaran Fasilitas Perbankan" No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 dated October 1, 2020 and mature on July 27, 2021. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.

- r. *Based on the Deed of Mudharabah Muqayaddah Agreement No. 87 dated June 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - through its Sharia Unit provided a Working Capital facility to the Company in the amount of Rp500,000,000,000. The profit sharing ratio for PT Bank Tabungan Negara (Persero) is 18.50% and the Company is 81.50%, equivalent to an IRR of 9.00% per annum. The loan period is 36 months from the signing of the contract. The loan is intended for financing based on sharia principles to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially Mekaar sharia. The Company are required to maintain a maximum gearing ratio of 10x, Current ratio above 120%, Debt to Equity Ratio (DER) a maximum of 10x and Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.*

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 9 dated March 12, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 12, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for Mekaar.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada 30 Januari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada bulan Desember 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *gearing ratio* maksimal 10x.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 dated December 30, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 0.30% per annum. Loan period of 30 days from the signing of the credit agreement and has been fully paid on January 30, 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 37 dated October 20, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.20% per year. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on October 2023. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of the Mekaar product not more than 5%.*

*Based on the deed of Working Capital Credit Agreement No. 1 dated September 13, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum. Loan period of 24 months from the signing of the credit agreement and has been extended with deed No. 5 dated September 13, 2020 will mature on September 2022. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain the overall *Debt Services Coverage Ratio* above 100% and maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x.*

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 41 dated December 19, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.50% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on December 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain the overall *Debt Services Coverage Ratio* above 100% and maximum *gearing ratio* of 10x.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- s. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 23 Juni 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan tenor angsuran 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- t. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

45. AGREEMENTS (continued)

- s. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated June 23, 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.25% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and installment tenor of 12 month. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 99 dated October 30, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp80,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan period of 12 months from signed credit agreement. The loan is intended as additional working capital for Mekaar distribution. The Company must maintain the quality of Non-Performing Loans for Mekaar products no more than 3%.

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 73 dated May 23, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 12 months from credit agreement signed. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%.

- t. *Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 29 dated December 18, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided Mudharabah Financing facilities to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with a profit sharing of 10.25% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement was signed and will mature on December, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro and Small Medium Enterprises (MSME) lending.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal No. 43 tanggal 30 November 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- u. Berdasarkan Addendum perjanjian kredit modal kerja No. 20 tanggal 27 Desember 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan dengan Plafond sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga menjadi sebesar 10,00% per tahun.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 16 Mei 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Dana Reksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.17 dengan plafond pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 114 dated May 27, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Mudharabah Financing facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an profit sharing of 10.75% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on May, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro Small and Medium Enterprises (MSME) lending.

Based on the Deed of Agreement for Working Capital Loans No. 43 dated November 30, 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp50,000,000,000 at an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

- u. *Based on the Addendum on working capital credit agreement No. 20 dated December 27, 2019, PT Danareksa Finance provides Working Capital Credit facilities to the Company with a maximum credit limit of Rp350,000,000,000 with an interest rate of 10.00% per annum.*

Based on the Agreement Deed of Working Capital Loan No. 3 May 16 2019, PT Danareksa Finance provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp350,000,000,000 with an interest rate of 12.00% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

On December 27, 2019, PT PNM Ventura Capital obtained a working capital credit facility from PT Danareksa Finance based on Credit Agreement Deed No.17 with plafond as of Rp200,000,000,000 and has been disbursed as much as Rp75,000,000,000 used for working capital venture capital financing Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 3 years, administration 0.02% of the credit limit.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- v. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BNI Syariah) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9.50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Telah dilakukan perpanjangan Fasilitas pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan Plafond pinjaman Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,50% *fixed* per tahun dan jangka waktu pinjaman 12 bulan.
- w. Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRISyariah Tbk) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.
- x. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line (MML) kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Adendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* tidak lebih dari 10x.

45. AGREEMENTS (continued)

- v. *Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated May 31, 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah) provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%. The facility has been extended on August 29, 2020 with a loan maximum credit limit of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum and a loan term of 12 months.*
- w. *Based on the Deed of Mudharabah Line Facility Agreement No. 13 dated April 26, 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRISyariah Tbk) provides a Working Capital Credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with profit sharing of 9.50% fixed per annum with a loan term of 42 months from the signing of the credit agreement and will mature on October, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and the Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.*
- x. *Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 20 May 13, 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk provides a Money Market Line (MML) Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an interest rate of 11.50% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been extended with Addendum 1 No. 201/ADD/2020 and will mature until May 14, 2021. The Company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is obliged to maintain the quality of the gearing ratio not more than 10x.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- y. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.
- z. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah dilunasi pada 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.
- aa. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 15 Agustus 2019, PT Bank Permata Syariah memberikan Fasilitas MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp150.000.000.000 suku bunga 9,50% per tahun Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%.
- Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 27 Juli 2020, Bank Permata Syariah memberikan Fasilitas MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 suku bunga 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 18 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%.
- ab. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 59 tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan maksimal tidak lebih dari 5%.

45. AGREEMENTS (continued)

- y. Based on the Deed of Credit Agreement No. 05 dated August 7, 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp100,000,000,000 with profit sharing equivalent to 10% per annum with a loan term of 18 months and has been fully paid on August 28 and September 27, 2020. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and Sharia ULaMM.
- z. Based on the Deed of Credit Agreement No. 12 dated November 30, 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp200,000,000,000 with profit sharing equivalent to 9.75% per annum with a loan term of 12 months and has been fully paid on November 30, 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Sharia Mekaar. The Company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 9x and the quality of the Non Performance Financing for the Mekaar not more than 2%.
- aa. Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated August 15, 2019, PT Bank Permata Syariah provides MMQ Facilities with a maximum credit limit of Rp150,000,000,000 9.50% interest per annum. The funds are for financing micro and small businesses through Sharia Mekaar and ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and NPL arrears above 90 days a maximum of 5%.
- Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated July 27, 2020, Bank Permata Syariah provides MMQ Facilities with a maximum credit limit of Rp100,000,000,000, 9% interest per annum with a loan term of 18 months. The funds are for financing micro and small businesses through Sharia Mekaar and ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and NPL arrears above 90 days a maximum of 5%.
- ab. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 59 dated March 23, 2021, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market line credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9% with a loan facility period of 12 months from the signing of the loan and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of the Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan addendum ketiga No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas kredit Money Market Line kepada Perusahaan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

- ac. Berdasarkan Add Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp110.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

- ad. Berdasarkan addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 04 tanggal 2 Februari 2021, PT Bank Mega Syariah memberikan tambahan plafon sebesar Rp65.000.000.000. Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan per pencairan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 69 dated May 23, 2019, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market Line Credit facility to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of credit facility 12 months from the signing of the credit. This loan was amended several times, the latest by 3th addendum No. 69 dated May 19, 2020 with additional facilities credit limit of Money Market Line amounting to Rp250,000,000,000 and has been fully paid on May 23, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and maximum Non-Performing Loans 5%.

- ac. *Based on the Add Credit Agreement Deed No.9 dated March 24, 2021, PT Bank BCA Syariah provides a working capital loan with a maximum credit limit of Rp110,000,000,000. The profit sharing ratio will be stated in each financing realization contract. With a period of 48 months for ULaMM facilities and 12 months for Mekaar. The funds are used for financing Mekaar and ULaMM Syariah. The Company are required to maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and a maximum of 5% non-performing loan arrears.*

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 14 dated October 3, 2019, PT Bank BCA Syariah provided a loan of working capital with a credit limit of Rp150,000,000,000. Profit sharing will stated in each financing contract realization. This loan had been extended with letter of credit No. 375/ADP/2020 dated November 11, 2020 with a period 48 months for ULaMM and 12 months for Mekaar. The funds are for financing Mekaar and Sharia ULaMM. The Company must maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.

- ad. *Based on the addendum to the Facility Provision Agreement (Wa'd) No. 04 dated February 2, 2021, PT Bank Mega Syariah provides an additional limit amounting to Rp65,000,000,000. Profit sharing ratio according to the agreement per drawdown with a maximum period of 36 months. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs).*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- ae. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 09 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- af. Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah provides the Mudharabah facility to the Company in the amount of Rp235,000,000,000 with an interest rate of 11% fixed per annum with a loan period of 12 months for Mekaar and 36 months for ULaMM. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.

- ae. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 09 dated February 7, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%*

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 48 dated November 20, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.

- af. *Based on the deed of Working Capital Credit agreement No. 19 dated July 9, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10.00% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on July, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

ag. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 tanggal 8 Desember 2020, fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman ULaMM 36 Bulan dan Mekaar 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio tidak lebih dari 10x.

ah. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 82 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

ai. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank BPD Jabar Banten Syariah memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

45. AGREEMENTS (continued)

ag. Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 30 dated December 8, 2020, working capital credit facility amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 9.9% per annum with a ULaMM loan term of 36 months and Mekaar 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is obliged to maintain the quality of the gearing ratio not more than 10x.

ah. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 82 dated 30 June 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with a term of 18 months and an installment tenor of 12 months. The interest rate is 9% fixed per annum. The funds are for short-term working capital financing. The company is required to maintain a gearing ratio of a maximum of 9x and arrears of Non-Performing Loans above 90 days at a maximum of 3%.

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 4 dated February 23, 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with a facility period of 18 months and an installment tenor of 12 months. Interest rate is 9% fixed per annum. The funds are used for short-term working capital financing. The company is obliged to maintain a maximum gearing ratio of 9x and non-performing loan arrears of more than 90 days with a maximum of 3%.

ai. Based on the Deed of Credit Agreement No. 39 dated June 30, 2021, PT Bank BPD Jabar Banten Syariah provides a credit facility with a maximum limit of Rp100,000,000,000 with a profit sharing equivalent to 9.25% per annum with a loan term of 24 months and will expire on dated June 30, 2022. The funds will be used to finance micro and small businesses through Mekaar Syariah. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10x and a maximum gearing ratio of 10 times.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- aj. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 10 Bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Penerbitan MTN XIX seri D dan E berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara waliamanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Penerbitan MTN XIX seri A, B, dan C berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara waliamanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XVIII Seri A pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp390.000.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 tidak ada jaminan atas penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVIII Seri A adalah Penambahan Modal Kerja dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama Waliamanat untuk penerbitan MTN XVIII Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara waliamanat dengan usaha emiten.

45. AGREEMENTS (continued)

- aj. The company issues MTN XIX Series D on February 26, 2019 amounting to Rp142,500,000,000 with a period of 2 years 10 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series E on April 16, 2019 in the amount of Rp201,000,000,000 with a period of 2 years 8 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and mature on December 28, 2021. Issuance of Series D and E MTN XIX is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

The company issues MTN XIX Series A on December 28, 2018 amounting to Rp70,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.20% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series B on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.20% per annum and mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series C on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.20% per annum and will mature on December 28, 2021. Issuance of Series A, B and C MTN XIX is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

The company issues XVIII Series A MTN on September 27, 2018 amounting to Rp390,000,000,000 with a period of 24 months, a fixed interest rate of 9.25% per annum and mature on September 27, 2020 there is no guarantee for the issuance of this MTN. The purpose of the issuance of Series A XVIII MTN is Working Capital Addition in the framework of Financing Micro and Small Businesses. The interest payment schedule is carried out on a quarterly basis. The name of the Trustee for the issuance of Series A MTN XVIII is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Issuance of Series A MTN XVIII is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

ak. Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri C pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F Tahap II pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp208.000.000.000 dengan jangka waktu 1 Tahun 9 bulan 16 hari, nisbah sebesar 11,59% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III seri F Tahap II. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri B pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp780.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 40,95% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri B tercatat di bursa KSEI.

45. AGREEMENTS (continued)

ak. The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani 2020 Series C on June 29, 2021 amounting to Rp200,000,000,000 with a period of 2 years, a ratio of 9.75% per annum of the revenue shared, and will mature on June 29, 2023. There is no guarantee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV series C. The trustee for the issuance of Sukuk is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk with Pefindo rating and idAA rating. The payment schedule ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Year 2019 Series F Phase II on May 4, 2021 amounting to Rp208,000,000,000 with a period of 1 year 9 months 16 days, a ratio of 11.59% per annum of the revenue earned distributed, and will mature on February 20, 2023. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah III series F Phase II. The trustee for the issuance of Sukuk is PT Bank Syariah Indonesia Tbk with a Pefindo rating and an idAA rating. The payment schedule ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series B on March 10, 2021 amounting to Rp780,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 40.95% per annum of the revenue shared, and will be due on March 10, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series B. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series B is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA rating. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series B is listed on the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri D pada tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp308.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 16,17% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri D tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri A pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp712.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 37,38% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F tercatat di bursa KSEI.

45. AGREEMENTS (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series D on February 19, 2021 amounting to Rp308,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 16.17% per annum of the revenue shared, and will mature on the date January 19, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series D. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series D is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA rating. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series D is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series A on January 19, 2021 amounting to Rp712,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 37.38% per annum of the revenue shared, and will mature on the date January 19, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series A. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series A is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA rating. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series A is listed on the KSEI.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Series H Sukuk Mudharabah III on December 15, 2020 amounting to Rp50,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 3% per annum of revenue that was paid, and due on December 15, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series H Sukuk Mudharabah III Series. Trustee for issuance of Series H Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with rating of Pefindo and rating idAA. Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series F Sukuk Mudharabah III is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahun 2020 tahap 1 Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahun 2020 tahap 1 Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahun 2020 tahap 1 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

45. AGREEMENTS (continued)

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 on October 27, 2020 in the amount of Rp200,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 9.75% per annum of revenue generated, and due on October 27, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1. Trustees for the issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 are Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA. Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series F on April 8, 2020 in the amount of Rp120,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 6.69% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series F. Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of the Series III Sukuk Mudharabah F is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III 2019 Series F is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C on February 20, 2020 amounting to Rp322,000,000,000 for a period of 3 years, a ratio of 17.94% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series C. The Trustee for the issuance of the Series C Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C is listed on the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri E tahap I pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 10 Bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tahap I tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri E pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 11 Bulan 10 hari, nisbah sebesar 6,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

45. AGREEMENTS (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series E phase I on December 5, 2019 in the amount of Rp50,000,000,000 with a term of 2 years 10 months 25 days, a ratio of 3.00% per annum of the revenue is collected, and will mature on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Phase E Sukuk Mudharabah III Series I. Trustee for the issuance of Phase E Series Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III 2019 Series E phase I is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series E on November 20, 2019 in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of 2 years 11 months 10 days, a ratio of 6.00% per annum from the revenue generated, and will mature on October 30, 2022. There are no guarantees on the issuance of Series E. Sukuk Mudharabah III. The trustee for the issuance of Series E Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Series 2019 E is listed on the KSEI exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series D on October 30, 2019 in the amount of Rp350,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 20.50% per year from the revenue generated, and will be due on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series D. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series D is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series D is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan telah jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 Tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III tahap 1. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1 adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

45. AGREEMENTS (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Year 2019 Series B on October 30, 2019 in the amount of Rp65,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 3.90% per annum of the revenue generated, and will be due on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series B. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of Series III Sukuk Mudharabah is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III in 2019 Series B is listed on the KSEI exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series A on September 24, 2019 in the amount of Rp435,000,000,000 with a term of 2 years, a ratio of 25.48% per annum from the revenue generated, and mature on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of Series A Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA. Schedule for payment of ratio is 3 monthly. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series A is listed on the KSEI exchange.

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah III Year 2019 Phase 1 on June 18, 2019 in the amount of Rp300,000,000,000 with a period of 5 years, a ratio of 19% per annum of revenue generated, and due on June 18, 2024. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III stage 1. Trustees for the issuance of Sukuk Mudharabah III Phase 1 are Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA. Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Mudharabah III Year 1 Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 44,7917% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri D adalah Bank Bukopin dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D tercatat di bursa KSEI.

45. AGREEMENTS (continued)

The company issued PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series B on March 26, 2019 amounting to Rp240,000,000,000 with a period of 2 years 11 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and will fall due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series B. Sukuk Mudharabah II for issuance of Series B Sukuk Mudharabah is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with Pefindo rating and rating idAA. Schedule of payment is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is to increase murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuing business. Issuance of Series B Sukuk Mudharabah registered at KSEI stock exchange.

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series A on February 26, 2018 in the amount of Rp60,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series A. Sukuk Mudharabah II. Trustee for issuance of Series B Sukuk Mudharabah is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with Pefindo rating and rating idAA. Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah II series B is listed on the KSEI exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Series D Sukuk Mudharabah I on January 31, 2017 in the amount of Rp100,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 44.7917% per annum of revenue generated, and due on January 31, 2021. There is no guarantee on the issuance of Series D Sukuk Mudharabah I. Trustee for the issuance of Series D Sukuk Mudharabah is Bank Bukopin with Pefindo rating and rating idAA. The payment schedule is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series D Sukuk Mudharabah I is listed on the KSEI exchange.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 938/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 938/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA (Double A) rating which is valid for the period July 1, 2022.

46. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis pembiayaan yang dihasilkan. Jenis pembiayaan yang memiliki karakteristik serupa diagregasikan dan dievaluasi secara berkala oleh manajemen Perusahaan. Laba/rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen operasi utama Perusahaan disajikan sebagai berikut:

46. OPERATION SEGMENT

The Company manages its business activities and identifies its reported segments by financing type which generated. The financing type that have similar characteristics aggregated and evaluated regularly by the Company's management. Profit/loss from each segment used to assess the performance of each segment. Information relating to the Company's main operation segment is presented as follows:

	31 Desember/December 31, 2021 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)						
	Pembiayaan/ Financing	Manajer Investasi/ Investment Management	Modal Ventura/ Venture Capital	Pembiayaan Syariah/ Sharia' Financing	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga keuangan mikro	3.974	-	-	-	-	3.974	Income from micro, small and medium and micro finance institution
Pendapatan dari ULaMM	1.150.797	-	-	267.684	-	1.418.481	Income from ULaMM
Pendapatan pembiayaan Mikro, kecil dan menengah koperasi	997	-	-	-	-	997	Income from micro, small and medium financing
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar	3.156.035	-	-	3.770.820	-	6.926.855	Income from Mekaar financing
Pendapatan dari modal ventura	-	-	57.966	79.212	(62.329)	74.849	Income from venture capital
Pendapatan jasa pengelolaan dana	175.619	11.568	10.547	9.943	(97.047)	110.630	Income from fund management services
Pendapatan jasa konsultan manajemen	5.378	-	12.590	283	(12.293)	5.959	Income from management consulting services
Pendapatan kegiatan manajer investasi	-	54.674	-	-	-	54.675	Income from investment manager activities
	4.492.800	66.242	81.103	4.127.942	(171.669)	8.596.419	
Beban bunga dan keuangan	(1.175.789)	-	(70.821)	(1.171.305)	111.836	(2.306.081)	Interest expenses and financial charges
Beban penyusutan	(154.571)	(1.876)	(566)	(102.932)	95.066	(164.879)	Depreciation expenses
Laba bersih	379.563	13.746	44.823	464.937	(57.941)	845.128	Net income
Aset	24.540.764	227.042	1.221.801	19.707.879	(1.985.192)	43.712.295	Assets
Liabilitas	19.472.494	11.968	756.540	18.213.668	(1.180.329)	37.274.341	Liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

46. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

46. OPERATION SEGMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2020
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Pembiayaan/ Financing	Manajer Investasi/ Investment Management	Modal Ventura/ Venture Capital	Pembiayaan Syariah/ Sharia' Financing	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga keuangan mikro	11.639	-	-	-	(7.487)	4.152	Income from micro, small and medium and micro finance institution
Pendapatan dari ULaMM	1.160.053	-	-	148.087	-	1.308.140	Income from ULaMM
Pendapatan dari pembiayaan kecil, menengah dan koperasi	1.846	-	-	-	-	1.846	Income from small and medium financing and cooperative
Pendapatan dari Mekaar	2.583.604	-	-	1.592.485	-	4.176.089	Income from Mekaar
Pendapatan dari modal ventura	-	-	76.889	38.149	-	115.038	Income from venture capita
Pendapatan jasa pengelolaan dana	196.456	9.835	6.722	14.405	(110.142)	117.276	Income from fund management services
Pendapatan jasa konsultan manajemen	4.089	-	6.954	-	(10.853)	190	Income from management consulting services
Pendapatan kegiatan manajer investasi	-	51.421	-	-	-	51.421	Income from investment manager activities
Lainnya	2.105	-	-	-	-	2.105	Others
	3.959.792	61.256	90.565	1.793.126	(128.482)	5.776.257	
Beban bunga dan keuangan	(1.290.740)	-	(112.364)	(449.755)	163.052	(1.689.807)	Interest expenses and financial charges
Beban penyusutan	(91.183)	(1.745)	(147.875)	(41.081)	-	(281.884)	Depreciation expenses
Laba bersih	284.470	12.276	23.372	(81.137)	(42.660)	196.321	Net income
Aset	21.236.276	212.557	2.264.797	10.415.164	(2.463.905)	31.664.889	Assets
Liabilitas	18.058.371	11.230	1.915.625	7.939.948	(1.847.195)	26.077.979	Liabilities

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

47. EVENTS AFTER REPORTING DATE

Perubahan Direksi

Change of board of directors

Berdasarkan keputusan pemegang saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan No. 51-DIR/CSC/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) maka susunan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:

Based on the decision of the shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 dated January 14, 2022 and No. 51-DIR/CSC/01/2022 dated January 14, 2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)), the composition of the Board of Directors is as follows:

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan dan Operasional
Direktur Bisnis
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
Ninis Kesuma Adriani
Tjatur Herry Priyono
Sunar Basuki
Kindaris

Board of Directors

President Director
Finance and Operation Director
Business Director
Institutional and Planning Director
Compliance and Risk Management Director

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Penerimaan Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 24 Januari 2022 Pemerintah telah menyalurkan subsidi bunga/subsidi margin kepada Perusahaan sebesar Rp900.096.376.216. Selanjutnya, Perusahaan akan menyalurkan dana subsidi bunga/subsidi margin tersebut melalui dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

Berdasarkan Akta No. 32 dan 33 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perseroan menyetujui tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris

Arif Rahman Hakim
Meidyah Indreswari
Veronica Colondam
Parman Nataatmadja
Iwan Taufiq Purwanto^{*)}

Board of Commissioners

President Commissioner/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan
Direktur Bisnis
Direktur Operasional
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
Ninis Kesuma Adriani^{**)}
Tjatur Herry Priyono
Sunar Basuki^{***)}
Kindaris

Board of Directors

President Director
Strategic Planning and Finance Director
Business Director
Operational Director
Compliance and Risk Management Director

^{*)} Dalam proses pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

^{**)} Semula Direktur Keuangan dan Operasional menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan.

^{***)} Semula Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional.

^{*)} In the process of implementing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority

^{**)} Previously the Finance and Operation Director became Strategic Planning and Finance Director.

^{***)} Previously Institutional and Planning Director became Operational Director.

Berdasarkan surat permohonan pencatatan efek bersifat obligasi oleh Perusahaan tanggal 25 Mei 2022.

Based on the letter of application for listing of bonds securities by the Company on May 25, 2022.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

48. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, yang telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00854/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022 di Indonesia dan untuk memenuhi persyaratan OJK, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan opini laporan auditor independen menggunakan pendekatan komparatif;
2. Sehubungan dengan tambahan pengungkapan kas dan setara kas yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha dan tidak dijamin;
3. Sehubungan dengan tambahan pengungkapan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan;
4. Sehubungan dengan tambahan pengungkapan informasi aktivitas investasi non-kas yang signifikan; dan
5. Catatan 13, sehubungan dengan tambahan pengungkapan perhitungan penjualan aset tetap.

49. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

- a. Aktivitas investasi non-kas yang signifikan

	2021
Aktivitas investasi non-kas yang signifikan:	
Pembelian aset tetap melalui utang lain-lain	-

48. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company issued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021. The consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021, were audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Public Accounting Firm with independent auditors' report No. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 dated February 7, 2022, which was reissued with independent auditors' report No. 00854/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/VI/2022 dated June 20, 2022. In relation with the Company's plan to conduct Shelf Registration Bonds V Phase I Year 2022 Offering in Indonesia and to meet the OJK requirement, the consolidated financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as follows:

1. Regarding opinion of independent auditors' report used comparative approach;
2. Regarding additional disclosure on cash and cash equivalent that cannot be used by the business group and are not pledged as collateral;
3. Regarding additional disclosure on events after reporting date;
4. Regarding additional disclosure on significant non-cash investing activity information; and
5. Note 13, regarding additional disclosure on sales of fixed assets calculation.

49. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

- a. Significant non-cash investing activity

	2021	2020	
			Significant non-cash investing activities:
			Purchase of fixed assets through other payables
	-	72.506.051.030	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

50. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

PSAK No. 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS No. 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 72.

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK No. 74 akan menggantikan PSAK No. 62 Kontrak Asuransi. PSAK No. 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK No. 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK No. 62, yang sebagian besar didasarkan pada kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS No. 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS No. 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

50. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current period financial statements are disclosed below.

Effective starting on or after January 1, 2022

SFAS No. 74: Insurance contracts, adopted from IFRS No. 17, effective January 1, 2022, and early adoption is permitted, but not before the entity applies SFAS No. 71 and SFAS No. 72.

This is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, SFAS No. 74 will replace SFAS No. 62 Insurance Contracts. SFAS No. 74 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and reinsurance), regardless of the type of entities that financial instruments with discretionary participation features.

A few scope exceptions will apply. The overall objective of SFAS No. 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers. In contracts to the requirement in SFAS No. 62, which are largely based on grandfathering previous local accounting policies, IFRS No. 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS No. 17 is the general model, supplemented by:

- *A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach)*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contract.*

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Company's consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021 and 2020,
and For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

51. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

52. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada Entitas Anak dicatat dengan metode biaya.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian ini.

51. ECONOMIC ENVIROMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

52. THE COMPANY'S SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

Separate financial information of the Parent Entity presents statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows, which the investment in a Subsidiaries is recorded using cost method.

The separate financial information of the Parent Entity are presented as attachment to these consolidated financial statements.

Lampiran I

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Attachment I

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas	3.365.959.555.387	4.053.790.624.997	Cash and cash equivalents
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2.655.706.500.473	1.611.820.758.353	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan - bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans - net
Piutang afiliasi	99.844.800.000	-	Affiliated receivables
Piutang jasa manajemen - bersih	5.517.363.481	7.194.005.688	Management services receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	96.118.868.969	73.081.762.483	Accrued income
Piutang lain-lain	32.250.532.805	36.605.647.007	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	124.268.368.821	-	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	364.133.394.911	214.910.874.598	Advances and prepayments
Investasi pada entitas asosiasi	689.428.117.305	558.287.251.594	Investment in associates
Aset pajak tangguhan	320.374.205.726	175.709.979.395	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	1.499.557.979.635	749.879.961.689	Fixed assets - net
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665.228.119	Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income
Aset takberwujud - bersih	110.599.557.240	164.848.633.661	Intangible assets - net
Aset lain-lain - bersih	1.780.570.391.315	1.349.215.290.193	Other assets - net
TOTAL ASET	43.521.505.248.170	31.089.994.921.595	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
Utang bank dan lembaga keuangan	11.129.850.663.638	6.062.869.818.070	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Utang pajak	404.298.528.353	112.894.999.219	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang lain-lain	188.417.785.203	61.891.710.843	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	391.506.361.253	358.635.731.347	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja	24.375.370.042	54.211.324.126	Employees benefit liabilities
TOTAL LIABILITAS	37.106.459.365.326	25.517.234.283.380	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham; modal dasar: 9.200.000 lembar saham; modal ditempatkan dan disetor penuh: 3.800.000 lembar saham per 31 Des 2021 dan 2.300.000 lembar saham per 31 Des 2020	3.800.000.000.000	2.300.000.000.000	Share capital - Common stock at par value of Rp1,000,000 per share; authorized capital: 9,200,000 shares Issued and fully paid capital: 3,800,000 shares as of Dec 31, 2021 and 2,300,000 as of Dec 31, 2020
Penyertaan modal negara	-	1.500.000.000.000	State capital investment
Saldo laba:			Retained earnings:
Telah ditentukan penggunaannya:			Appropriated retained earnings:
Cadangan umum	537.241.280.550	537.241.280.550	General reserves
Cadangan bertujuan	30.632.515.845	30.632.515.845	Appropriated reserves -
Belum ditentukan penggunaannya	2.045.597.843.110	1.204.819.762.884	Unappropriated retained earnings
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(5.619.911.552)	45.316.567	Unrealized gain on financial assets at fair value through other comprehensive income
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	7.194.154.891	21.762.369	Actuarial gain on employee benefits program
Total Ekuitas	6.415.045.882.844	5.572.760.638.215	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	43.521.505.248.170	31.089.994.921.595	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran II

Attachment II

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (ENTITAS INDUK SAJA) (sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2021	2020	PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PARENT ENTITY ONLY) (formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)) STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Years Ended December 31, 2021 and 2020 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Pendapatan Bunga dan Syariah	8.350.307.311.199	5.497.712.968.417	<i>Interest and Sharia Revenue</i>
Beban Bunga dan Syariah	(2.240.724.540.643)	(1.702.419.919.284)	<i>Interest and Sharia Expenses</i>
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH - bersih	6.109.582.770.556	3.795.293.049.133	INTEREST AND SHARIA REVENUE - net
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	5.442.130.892	4.089.535.200	<i>Revenue from management consulting services</i>
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	-	2.105.000.004	<i>Revenue from Java Reconstruction Fund</i>
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	82.486.481.692	106.581.063.881	<i>Interest revenue on current account, dividend and time deposits</i>
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	99.411.790.151	104.279.538.859	<i>Realized gains on sale of securities</i>
Beban usaha	(5.370.056.675.150)	(3.857.516.850.870)	<i>Operating expenses</i>
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	449.904.899	(145.360.609)	<i>Gain (loss) on foreign exchange - net</i>
Lain-lain - bersih	108.811.811.763	223.627.775.327	<i>Others - net</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.036.128.214.803	378.313.750.925	INCOME BEFORE INCOME TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:			Income Tax Benefit (Expense)
Pajak kini	(355.537.237.440)	(131.912.353.098)	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	160.187.102.863	111.778.686.006	<i>Deferred tax</i>
Total beban pajak penghasilan	(195.350.134.577)	(20.133.667.092)	<i>Total income tax expense</i>
LABA TAHUN BERJALAN	840.778.080.226	358.180.083.833	INCOME FOR THE YEARS
Penghasilan Komprehensif Lain:			Other comprehensive income:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			<i>Item that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Kerugian atas perubahan nilai wajar Aset keuangan melalui Penghasilan komprehensif lain	(5.665.228.119)	-	<i>Loss on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	7.215.917.260	(6.761.195.825)	<i>Remeasurement of employee benefit</i>
Total Penghasilan Komprehensif Lain	1.550.689.141	(6.761.195.825)	<i>Total Other Comprehensive Income</i>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	842.328.769.367	351.418.888.008	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba/Retained Earnings		Saldo Laba Ditentukan Penggunaan Retained Earnings	Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi Atas aset keuangan Yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Unrealized Gains financial assets at fair value through other comprehensive income	Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Kerja/ Actuarial Loss on Employee Benefits Program	Total		
	Saldo Laba Ditetapkan Appropriated Retained Earnings	Cadangan Umum/ General Reserves						Cadangan Bertujuan/ Appropriated Reserves
Saldo per 1 Januari 2020	1.300.000.000.000	537.241.280.550	30.632.515.845	846.639.679.051	45.316.567	8.396.805.564	2.722.955.597.577	Balances as of January 1, 2020
Modal saham	1.000.000.000.000	(1.000.000.000.000)	-	-	-	-	-	Share capital
Penyertaan modal negara	-	2.500.000.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000.000	State capital investment
Laba tahun berjalan	-	-	-	358.180.083.833	-	-	358.180.083.833	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	(6.761.195.825)	(6.761.195.825)	(6.761.195.825)	Other comprehensive income
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	(1.613.847.370)	(1.613.847.370)	(1.613.847.370)	Equity reclassification
Saldo per 31 Desember 2020	2.300.000.000.000	1.500.000.000.000	30.632.515.845	1.204.819.762.884	45.316.567	21.762.369	5.572.760.638.215	Balances as of December 31, 2020
Modal saham	1.500.000.000.000	(1.500.000.000.000)	-	-	-	-	-	Share capital
Laba tahun berjalan	-	-	-	840.778.080.226	-	-	840.778.080.226	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	(5.665.228.119)	7.215.917.260	1.550.689.141	Other comprehensive income
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	(43.524.738)	(43.524.738)	Equity reclassification
Saldo per 31 Desember 2021	3.800.000.000.000	-	537.241.280.550	2.045.597.843.110	(5.619.911.552)	7.194.154.891	6.415.045.882.844	Balances as of December 31, 2021

Lampiran V

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Attachment V

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penurunan penyaluran pinjaman	31.773.403.568.384	20.662.775.841.636	<i>Decrease in loan disbursement</i>
Penerimaan dari pendapatan bunga	8.487.250.073.163	5.359.063.272.103	<i>Receipt from interest income</i>
Penerimaan lain-lain	1.097.855.999.081	224.015.751.811	<i>Other receipts</i>
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	85.896.552.613	105.659.388.817	<i>Interest income on current account and deposits</i>
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi	14.727.577.864	10.282.974.691	<i>Receipt of financial advisory services, management consulting and investment</i>
Keuntungan penjualan portofolio efek	2.365.144.906	860.483.198	<i>Gain on sales of securities portfolio</i>
Pembayaran bunga pinjaman			<i>Interest payments on the loan and payment to</i>
Kenaikan penyaluran pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga	(42.712.862.420.708)	(25.495.011.124.926)	<i>Increase in loan disbursement the third parties</i>
Pembayaran kepada pegawai	(3.338.720.421.506)	(2.523.647.984.023)	<i>Payment for employees</i>
Pembayaran pajak	(508.931.454.713)	(171.776.829.051)	<i>Payment for taxes</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(7.906.518.702.770)	(3.749.207.997.074)	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan efek - bersih	200.000.000.000	196.117.491.086	<i>Sale on marketable securities - net</i>
Pembelian efek - bersih	(1.130.000.000.000)	(459.158.815.528)	<i>Purchase on marketable securities - net</i>
Pembelian aset tetap	(779.710.884.645)	(93.475.797.045)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Divestasi pada Entitas Asosiasi	-	18.799.394.177	<i>Divestment in Associates</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.709.710.884.645)	(337.717.727.310)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank	16.605.628.444.176	8.082.500.000.000	<i>Receipt from bank borrowing</i>
Penerimaan dana dari MTN	4.208.000.000.000	692.000.000.000	<i>Receipt from MTN</i>
Penerimaan dana obligasi	3.666.200.000.000	1.983.800.000.000	<i>Proceeds from bonds</i>
Penerimaan dana dari hibah	61.000.000.000	189.394.478.322	<i>Receipt from the grant</i>
Pembayaran pinjaman bank	(10.596.967.857.703)	(6.965.693.728.339)	<i>Payment for bank borrowing</i>
Pembayaran pokok obligasi	(2.997.800.000.000)	(750.000.000.000)	<i>Proceeds from bonds</i>
Pembayaran untuk MTN	(2.008.500.000.000)	(390.000.000.000)	<i>Payment for MTN</i>
Pembayaran biaya emisi obligasi	(9.162.068.668)	(3.004.316.983)	<i>Payment of bond issuance costs</i>
Penerimaan dari Penyertaan Modal Negara	-	2.500.000.000.000	<i>Receipt from State Capital Investment</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	8.928.398.517.805	5.338.996.433.000	Net cash flows provided by financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(687.831.069.610)	1.252.070.708.616	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4.053.790.624.997	2.801.719.916.381	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3.365.959.555.387	4.053.790.624.997	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:			CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
Kas	10.046.574.948	12.440.916.652	<i>Cash on hand</i>
Bank	2.770.912.980.439	2.941.349.708.345	<i>Cash in bank</i>
Deposito jangka pendek	585.000.000.000	1.100.000.000.000	<i>Short-term deposits</i>
Total	3.365.959.555.387	4.053.790.624.997	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri - Entitas Induk**

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai PSAK 71: "Instrumen Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. DAFTAR INVESTASI**1. GENERAL INFORMATION****Basis of Preparation of Separate Financial Statements - Parent Entity**

Separate financial statements of the parent entity prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements".

SFAS No. 4 (Revised 2013) set in the case of an entity presents separate financial statements, the report can only be presented as additional information in the consolidated financial statements. Separate financial statements are the financial statements presented by the parent entity who record investment in subsidiaries, associates and joint venture at cost or in accordance with SFAS 71: "Financial Instruments".

The accounting policies applied in the preparation of separate financial statements of the parent entity is the same as the accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries.

2. LIST OF INVESTMENT

31 Desember/December 31, 2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2021	99,9991%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2021	99,9997%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Syarikat Takaful Indonesia	Jakarta	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	Des/Dec 2021	6,9200%	Nilai wajar/ Fair value

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,998%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/Rental and Trading	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,953%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Outsourcing/ Outsourcing Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 98,966%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 94,444%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,897%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,957%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Crom Madani Indonesia	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 100,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Karya Digital Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 53,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC 76,372%	Konsolidasi/ Consolidation

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC 64,659%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 86,667%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 51,950%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 14,580%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Daya Artha Mentari	Pasuruan	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 2,390%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayang	Lampung	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 0,550%	Nilai wajar/ Fair value

31 Desember/December 31, 2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2020	99,9991%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2020	99,9997%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Syarikat Takaful Indonesia	Jakarta	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	Des/Dec 2020	6,9200%	Nilai wajar/ Fair value

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,998%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/Rental and Trading	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,953%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Outsourcing/ Outsourcing Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 98,966%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 94,444%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,897%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,957%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 86,667%	Konsolidasi/ Consolidation

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 64,6594%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS Sebesar/Owned by PNM VS 76,3723%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 74,710%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 14,58%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Daya Artha Mentari	Pasuruan	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 3,26%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayang	Lampung	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 0,370%	Nilai wajar/ Fair value



Kantor Pusat

PT Permodalan Nasional Madani
Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi,
South Jakarta City, Jakarta 12920



Kantor Pusat
Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id